BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah

daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

e. BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

g. BAB VII Penutup

(2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Kampar tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan :

a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.
c. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 12 Juli 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

MHD. FIRDAUS

Diundangkan Di Bangkinang
Pada Tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 17

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi kita semua, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2024, dengan mempedomani ketentuan aturan yang berlaku dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Perubahan Rencana Kerja ini, untuk kesempurnaan penyelesaian Rencana Kerja Tahun 2024 ini kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Kampar.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Bangkinang, 12 Juli 2023

Inspektur

Febrinaldi Tridarmawan, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770210 199512 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR



2024

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 5

BABAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ... **6**

2.1. EVALUASI RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWIULAN II TAHUN BERJALAN 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **13**

3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 13

BAB IV PENUTUP **22**

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 KABUPATEN KAMPAR 8

Tabel 3.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024 PROVINSI RIAU KABUPATEN KAMPAR 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang sekaligus tantangan daerah dalam rangka kemajuan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah. Daerah berkesempatan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Perencanaan sebagai salah satu komponen pembangunan daerah menghendaki pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menjalankan fungsinya wajib menyusun Rencana Stategis (RENSTRA) yang berpedoman kepada RPJMD dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan RKPD Kabupaten untuk satu tahunan, rencana kerja yang ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahunan dalam upaya mewujudkan sasaran strategis lima tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Inspektorat Kabupaten Kampar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari RPD Kabupaten Kampar dan Renstra Inspektorat Kabupaten Kampar.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Inspektorat Kabupaten Kampar yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Kampar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kampar disusun berdasarkan beberapa landasan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4421);
5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6402);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700.1.1/8737/SJ Perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;

22) Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/248/KSP.00/70-72/01/2023 Perihal Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Daerah;

23) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20);

24) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Mmenjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar;

25) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

26) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;

27) Peraturan Bupati Kab. Kampar No 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kab. Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 70);

28) Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

29) Surat Edaran Nomor : 050.13/Bappeda-I.2/252 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2024 diharapkan agar jajaran Inspektorat Kabupaten Kampar mampu menjadikan rencana tahunan sebagai penjabaran dari rencana tiga tahun yang tertuang dalam Renstra serta menjadi media program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

Dengan tersedianya seluruh informasi di atas dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 maka diharapkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang serta menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga pemanfaatan sumber–sumber yang tersedia dengan perencanaan yang matang dapat terimplementasi secara maksimal.

B. Tujuan

1) Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2024 agar pengawasan yang dilakukan dapat mencapai target yang ditetapkan tahun 2024, baik yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Renstra OPD maupun RPD Kabupaten Kampar, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna dalam meningkatkan kinerja dan mejunjung tinggi pranata hukum.

2) Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kampar sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kabupaten Kampar.

3) Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kampar untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program, kegiatan dan sub kegitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun berdasarkan sistimatika yang diamanahkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sesuai Lampiran C.5. tentang Penyajian Dokumen Renja yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja PD, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan uraian singkat Sistematika Penulisan Renja PD.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN.

Bab ini memuat hasil kajian/reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, Perkiraan capaian tahun berjalan s/d triwulan II (2024), dan Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Bab ini memuat uraian uraian program, kegiatan dan sub kegiatan pendanaan perangkat daerah sesuai dengan Perubahan RKPD Kab. Kampar tahun 2024.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan rencana tindak lanjut dan pada bagian akhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama serta tanda tangan kepala PD dan dibubuhi cap PD daerah.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan mempedomani model *das sollen-das sein* oleh Taliziduhu Ndraha, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya dengan tolak ukur adalah *das sollen*. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

2.1 EVALUASI RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN.

Sebagaimana diketahui pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analiasis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Total anggaran belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp.27.818.529.865 dengan realiasi sampai dengan semester I sebesar Rp.9.028.508.086 atau 32,46%. Dimana untuk belanja operasi yang merupakan kegiatan didalamnya memuat belanja gaji pegawai dengan realisasi sebesar Rp.6.868.442.058 atau sebesar 51,29%. Perkiraan realisasi capaian program dan kegiatan tahun berjalan (tahun 2024) adalah sebesar Rp.27.818.529.865 atau 100%.

Adapun Evaluasi hasil rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PD TAHUN 2024
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 KABUPATEN KAMPAR

NAMA OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023		Target Kinerja Renja Tahun 2024		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2024		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
														Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target
1						2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9 = (5+7)*	10 = (9/4)*
6	01					INSPEKTORAT DAERAH											
6	**01**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**24,06**		**43,40**
6	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**37,50**		**35,83**
6	01	01	2	01	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,00	Dok	2,00	Dok	2,00	Dok	1,50	50,00	3	30,00
6	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	Lap	4,00	Lap	4,00	Lap	2,00	25,00	5	41,67
6	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**56,25**		**38,39**
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68,00	Orang	65,00	Orang	67,00	Orang/bulan	33,50	12,50	82	60,11
6	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	12,00	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	1,00	100,00	2	16,67
6	**01**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**3,89**		**16,86**
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan	196,00	Orang	15,00	Orang	18,00	Orang	2,00	5,56	16	8,16
6	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	180,00	Keg	45,00	Keg	45,00	Keg	1,00	2,22	46	25,56
6	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**24,14**		**25,51**
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediak	8,00	Paket	2,00	Paket	2,00	Paket	1,00	30,00	3	32,50

1						2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9 = (5+7)*	10 = (9/4)*
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13,00	Paket	2,00	Paket	4,00	Paket	2,50	25,00	3	23,08
6	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8,00	Paket	1,00	Paket	2,00	Paket	1,00	15,00	1	16,25
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8,00	Paket	2,00	Paket	2,00	Paket	1,00	40,00	3	35,00
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Barang Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	8,00	Dok	1,00	Dok	2,00	Dok	0,80	20,00	1	17,50
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,00	Laporan	35,00	Laporan	35,00	Laporan	8,00	14,86	40	28,71
6	**01**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**-**		**120,00**
6	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	20,00	Unit	24,00	Unit	173,00	Unit	-	-	24	120,00
6	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2,00	Unit	-	Unit	192,00	Unit	-	-	-	-
6	01	01	2	07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di Sediakan	4,00	Unit	-	Unit	4,00	Unit	-	-	-	-
6	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**29,17**		**40,63**
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8,00	Laporan	3,00	Laporan	3,00	Laporan	1,50	33,33	4	50,00
6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00	Laporan	1,00	Laporan	1,00	Laporan	0,50	25,00	1	31,25
6	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**17,50**		**26,58**
6	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8,00	Unit	1,00	Unit	1,00	Unit	0,50	25,00	1	15,63
6	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	28,00	Unit	8,00	Unit	8,00	Unit	4,00	25,00	10	35,71
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200,00	Unit	50,00	Unit	50,00	Unit	30,00	20,00	60	30,00
6	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8,00	Unit	2,00	Unit	1,00	Unit	1,00	-	2	25,00
6	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN**		**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**				**27,08**
6	**01**	**02**	**2**	**06**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan internal**	**100,00**	**%**	**-**	**%**	**25,00**	**%**		**6,63**		**19,43**

1						2	3	4		5		6		7	8 = (7/6)	9 = (5+7)*	10 = (9/4)*
6	01	02	2	06	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah	30,00	Laporan	7,00	Laporan	7,00	Laporan	-	-	7	23,33
6	01	02	2	06	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan perangkat daerah	86,00	Laporan	22,00	Laporan	22,00	Laporan	-	-	22	25,58
6	01	02	2	06	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	22,00	Laporan	7,00	Laporan	11,00	Laporan	2,00	-	28	9,93
6	01	02	2	06	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	282,00	Laporan	28,00	Laporan	33,00	Laporan	8,00	15,15	149	25,34
6	01	02	2	06	05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan pemerintahan Desa	588,00	Laporan	144,00	Laporan	96,00	Laporan	48,00	25,00	31	5,27
6	01	02	2	06	05	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesekepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	5,00	Kesepakatan	1,00	Kesepakatan	1,00	Kesepakatan	-	-	1	20,00
6	01	02	2	06	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16,00	Dok	4,00	Dok	4,00	Dok	1,25	6,25	4	26,56
6	**01**	**02**	**2**	**02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**100,00**	**%**	-	**%**	**25,00**	**%**		**13,64**		**34,72**
6	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	72,00	Laporan	22,00	Laporan	22,00	Laporan	**5,00**	13,64	25	34,72
6	**01**	**03**				**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**100,00**	**%**	-	**%**	**25,00**	**%**				100,00
6	**01**	**03**	**2**	**01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**100,00**	**%**	-	**%**	**25,00**	**%**		-		**100,00**
6	01	03	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	1,00	Rekomendasi	1,00	Rekomendasi	1,00	Rekomendasi	-	-	1	100,00
6	**01**	**03**	**2**	**02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah asistensi dan pendampingan penyelenggaraan daerah**	**100,00**	**%**	-	**%**	**25,00**	**%**		-		**100,00**
6	01	03	2	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di Lakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	32,00	PD	32,00	PD	32,00	PD	-	-	32	100,00
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32,00	PD	32,00	PD	32,00	PD	**10,00**	-	32	100,00
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitorindan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4,00	Kegiatan	4,00	Kegiatan	3,00	Kegiatan	**2,00**	-	4	100,00
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53,00	PD	53,00	PD	53,00	PD	**17,67**	-	53	100,00
Jumlah															11,40		56,83

Analisis evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II jika dikaitkan dengan target Renstra sampai dengan Tahun 2026 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, target 100 persen, realisasi 43,58 persen.

   b) Program Penyelenggaraan Pengawasan, Indikator Persentase capaian pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan, dengan target tahunan 100 persen, realisasi 24,55 persen.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:
   Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Berjalan belum terdapat program dengan capaian 50%.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan:
   Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Berjalan tidak terdapat program dengan capaian di atas 50%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
   a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, target 100 persen, realisasi 43,58 persen, disebabkan Sub Kegeiatan belum terlaksana sesuai dengan rencana dan terkait dengan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

   b) Program Penyelenggaraan Pengawasan, Indikator Persentase capaian pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan, dengan target tahunan 100 persen, realisasi 24,55 persen, disebabkan Sub Kegeiatan belum terlaksana dan belum sesuai dengan rencana;

   c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dengan indikator Persentase capaian perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan target tahunan 100 persen, realisasi 14,32 persen, disebabkan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah belum dilaksanakan sama sekali dan untuk Sub Kegiatan lainnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan tiga.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah terdapat kegiatan dalam program renstra yang masih belum terpenuhi. Hal ini disebabkan belum seimbangnya rasio antara tenaga pemeriksa dengan objek pengawasan, minimnya perangkat pendukung serta teknologi informasi penungjang pengawasan serta belum terpenuhinya anggaran

penunjang implementasi pengawasan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut perlu penyesuaian target agar capaian strategis dapat terpenuhi, antara lain:
   a) Mengoptimalkan peran serta menyarankan *Stakeholder* perencanaan dan pelaporan Pemerintah Daerah dalam membina Perangkat Daerah untuk merencanakan dan mencapai peningkatan kinerja sehingga program pembinaan dan pengawasan akan berjalan dengan baik;
   b) Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri serta Badan Kepegawaian Negara;
   c) Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
   d) Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan kompetensi SDM Pengawasan;
   e) Melaksananakan perencanaan yang sebaik-baiknya dan Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawasan dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kampar sebagai berikut :

3.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.
   a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.1.2 Program Program Penyelenggaraan Pengawasan:

8) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

c. Reviu Laporan Kinerja

d. Reviu Laporan Keuangan

e. Pengawasan Desa

f. Kerjasama Pengawasan Internal

g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

9) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3.1.3 Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:

10) Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan.

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

11) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Intregitas

Adapun rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil rumusan di atas dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024
PROVINSI RIAU KABUPATEN KAMPAR

NAMA PD : INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2024											Perkiraan Maju		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		Sebelum	Sesudah	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Jumlah Perubahan	Sebelum	Sesudah			a/b/c	1/2/3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	*UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN*																	
6.01	*INSPEKTORAT DAERAH*									*21.384.015.476*	*28.055.259.807*	*6.671.244.331*				*30.860.785.788*		
6.01.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten***	***Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten***	***Inspektorat Kab. Kampar***	***Inspektorat Kab. Kampar***	***Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan***	***Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan***	*100%*	*100%*	*16.297.174.476*	*22.005.812.807*	*5.708.638.331*	***Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil***	***24.206.394.088***	*100%*	*17.654.975.415*	***Sedang Berjalan***	***INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR***
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**100%**	**100%**	**95.850.000**	**58.340.000**	**-37.510.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**64.174.000**	**100%**	**95.850.000**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	14.450.000	14.060.000	-390.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	15.466.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	81.400.000	44.280.000	-37.120.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	48.708.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan PD**	**Persentase Pememhanan administrasi keungan perangkat daerah**	**Persentase Pemenuhanan administrasi keungan perangkat daerah**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**100%**	**100%**	**13.330.575.462**	**13.632.797.403**	**302.221.941**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**14.996.077.143**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	67 Orang /bulan	67 Orang /bulan	13.325.075.462	13.628.137.403	303.061.941	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	14.990.951.143	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	1 Laporan	1 Laporan	5.500.000	4.660.000	-840.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	5.126.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**100%**	**100%**	**379.886.000**	**2.591.444.000**	**2.211.558.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**2.850.588.400**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang Ikut Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	18 Orang	18 Orang	318.636.000	2.530.344.000	2.211.708.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	2.783.378.400	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	45 Orang	50 Orang	61.250.000	61.100.000	-150.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	67.210.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**100%**	**100%**	**863.166.250**	**1.662.470.900**	**799.304.650**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**1.828.717.990**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	2 Paket	2 Paket	41.308.000	52.301.200	10.993.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	57.531.320	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	4 Paket	4 Paket	191.402.400	221.114.100	29.711.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	243.225.510	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	2 Paket	2 Paket	129.250.000	169.425.000	40.175.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	186.367.500	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	2 Paket	2 Paket	88.758.850	130.653.600	41.894.750	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	143.718.960	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Barang Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Barang Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	2 Dokumen	2 Dokumen	34.398.000	31.200.000	-3.198.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	34.320.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	35 Laporan	35 Laporan	378.049.000	1.057.777.000	679.728.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	1.163.554.700	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**100%**	**100%**	**616.028.000**	**2.522.595.400**	**1.906.567.400**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**2.774.854.940**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	-	4 unit	0	596.022.000	596.022.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	655.624.200	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	24 Unit	181 Unit	248.608.000	1.389.470.400	1.140.862.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	1.528.417.440	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	24 Unit	24 Unit	367.420.000	537.103.000	169.683.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	590.813.300	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**100%**	**100%**	**601.938.264**	**640.571.604**	**38.633.340**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**704.628.764**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	150.931.200	188.236.440	37.305.240	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	207.060.084	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	451.007.064	452.335.164	1.328.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	497.568.680	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Inspektorat Kab. Kampar**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**100%**	**100%**	**409.730.500**	**897.593.500**	**487.863.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**987.352.850**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	1 Unit	1 Unit	85.250.000	88.650.000	3.400.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	97.515.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Jumlah Kendraaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak Perizinannya	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	8 Unit	8 Unit	178.388.000	370.232.000	191.844.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	407.255.200	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	50 Unit	50 Unit	46.092.500	86.734.000	40.641.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	95.407.400	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Kab. Kampar	Inspektorat Kab. Kampar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	351.977.500	251.977.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	387.175.250	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.02	***Program Penyelenggaraan Pengawasan***	***Presentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)***	***Presentase realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)***	***OPD dan Pemerintah Desa***	***OPD dan Pemerintah Desa***	***Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n***	***Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n***	***100%***	***100%***	***4.408.235.000***	***4.697.881.000***	***289.646.000***	***Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil***	***Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil***	**100%**	***5.167.669.100***	***Sedang Berjalan***	***INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR***
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**OPD dan Pemerintah Desa**	**OPD dan Pemerintah Desa**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n**	**100%**	**100%**	**3.890.935.000**	**4.077.441.000**	**186.506.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**4.485.185.100**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja perangkat daerah	OPD dan Pemerintah Desa	OPD dan Pemerintah Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	7 Laporan	7 Laporan	408.350.000	358.200.000	-50.150.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	394.020.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan perangkat daerah	OPD dan Pemerintah Desa	OPD dan Pemerintah Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	22 Laporan	22 Laporan	900.450.000	1.411.920.000	511.470.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	1.553.112.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja	OPD dan Pemerintah Desa	OPD dan Pemerintah Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	11 Laporan	11 Laporan	122.235.000	164.906.000	42.671.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	181.396.600	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.02.2.02.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	OPD dan Pemerintah Desa	OPD dan Pemerintah Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	33 Laporan	33 Laporan	955.775.000	856.598.000	(99.177.000)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	942.257.800	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan pemerintahan Desa	OPD dan Pemerintah Desa	OPD dan Pemerintah Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	162 Laporan	96 Laporan	1.081.575.000	975.660.000	-105.915.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	1.073.226.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.02.2.02.05	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesekepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Jumlah Kesekepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	OPD dan Pemerintah Desa	OPD dan Pemerintah Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	9.250.000	65.800.000	56.550.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	72.380.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	OPD dan Pemerintah Desa	OPD dan Pemerintah Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua keluraha n	4 Dokumen	4 Dokumen	413.300.000	244.357.000	-168.943.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	268.792.700	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**OPD dan Pemerintah Desa**	**OPD dan Pemerintah Desa**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**100%**	**100%**	**517.300.000**	**620.440.000**	**103.140.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**682.484.000**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	OPD, Desa dan Masyarakat	OPD, Desa dan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	-	2 Lapran	0	97.040.000	97.040.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	106.744.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	OPD, Desa dan Masyarakat	OPD, Desa dan Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	15 Laporan	21 Laporan	517.300.000	523.400.000	6.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	575.740.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.03	***Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi***	***Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi***	***Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi***	***OPD***	***OPD***	***Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan***	***Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan***	***100%***	***100%***	***678.606.000***	***1.351.566.000***	***672.960.000***	***Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil***	***Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil***	***100%***	***1.486.722.600***	***Sedang Berjalan***	***INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR***
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan dan Fasilitas Pengawasan**	**OPD**	**OPD**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**100%**	**100%**	**11.100.000**	**11.100.000**	**0**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**12.210.000**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	OPD	OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	11.100.000	11.100.000	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	12.210.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Penyelenggaraan nyapendampingan dan asistensi**	**Persentase Penyelenggaraan nyapendampingan dan asistensi**	**OPD**	**OPD**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan**	**100%**	**100%**	**667.506.000**	**1.340.466.000**	**672.960.000**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**	**100%**	**1.474.512.600**	**Sedang Berjalan**	**INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR**
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di Lakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang di Lakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	32 PD	32 PD	85.700.000	393.013.000	307.313.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	432.314.300	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.03.2.02.02	Pendampinga, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	32 PD	32 PD	118.950.000	84.000.000	-34.950.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	92.400.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitorindan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitorindan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	OPD	OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	363.930.000	513.143.000	149.213.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	564.457.300	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	OPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamtan, semua kelurahan	53 PD	53 PD	98.926.000	350.310.000	251.384.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	385.341.000	Sedang Berjalan	INSPEKTORAT KABUPATEN KAMPAR
Total										**21.384.015.476**	**28.055.259.807**	**6.671.244.331**				**30.860.785.788**		

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 diupayakan dapat mengakomodir semua kegiatan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kampar 2023-2026. Kegiatan–kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2024 disusun berdasarkan skala prioritas dari Visi RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 untuk mencapai Misi Ke-dua yaitu "Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat", tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran pertama yang diharapkan dari tujuan tersebut adalah "Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan" dengan indikator Nilai Sakip dan Opini BPK.

Pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Kampar diharapkan sudah dapat berjalan maksimal, sehingga Inspektorat Kabupaten Kampar menjadi mitra bagi masyarakat Kabupaten Kampar.

Adanya kendala permasalahan yang dihadapi semuanya dapat diatasi dengan mengoptimalkan kegiatan dan efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan dana yang tersedia.

Inspektur

Febrinaldi Tridarmawan, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770210 199512 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
INSPEKTORAT
JALAN PRAMUKA NOMOR 16 TELP. (0762) 20044 FAX. 20203 BANGKINANG KOTA
e-mail: inspektorat.kampar77@gmail.com/ website: Inspektorat.kamparkab.go.id
Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 700/INSP-Perc/..30

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

INSPEKTUR KABUPATEN KAMPAR,

Menimbang :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kampar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kampar No 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kab. Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2022);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-359/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar;

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan Persiapan-persiapan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;

b. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait dan menghimpun bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024;

c. Membahas bersama-sama dengan Aparatur terkait tentang target yang ingin dicapai pada setiap indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 yang mengacu kepada Rencana Strategis untuk ditandatangi oleh Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab secara berjenjang kepada Bupati Kampar melalui Inspektur Kabupaten Kampar;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kesalahan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 16 April 2024

Inspektur,

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT KAMPAR

Febrinaldi Tridarmawan, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770210 199512 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH KAB. KAMPAR
NOMOR : 700/INSP-Perc/30
TANGGAL : 16 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Inspektur	Penanggung jawab	Bertanggungjawab atas penyusunan RENJA Tahun 2025 dan Perubahan RENJA Tahun 2024 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024
2 3 4	Sekretaris Inspektur Pembantu 4 Inspektur Pembantu 5	Ketua Wakil Ketua 1 Wakil Ketua 2	1) Memimpin dan bertanggungjawab langsung atas pekerjaan penyusunan Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja Tahun 2024 di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan selalu berkomunikasi dengan pimpinan agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien untuk tercipta keterpaduan dalam melaksanakan tugas. 2) Memverifikasi dan menganalisa data target setiap indikator kinerja sesuai Renstra Inspektorat.
5 6 7	Kasubbag Analisis dan Evaluasi Rici Ricardo, SE Hayu Ardina, SE., MM	Anggota Anggota Anggota	1) Mengkoordinir pengumpulan data target yang akan di capai pada setiap program/kegiatan berdasarkan Indikator (kinerja, Input, output dan outcome) yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; 2) Memverifikasi dan menganalisa rencana pencapaian target pada setiap indikator berdasarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap misi pembangunan; 3) Mengkoordinasikan dengan Pihak terkait indikator program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target output setiap program, kegiatan dan sub kegiatan pada setiap misi pembangunan.

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
8	Rahmat Hidayat, SH	Anggota	1) Melaksanakan fungsi administrasi dan penatausahaan serta memfasilitasi kegiatan penyusunan Rancangan Renja 2025 dan Perubahan Rancangan Renja 2024; 2) Membuat matrixs draf Renja dan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ingin dicapai; 3) Mengkoordinasikan data target setiap indikator yang disampaikan Kasubag/ Irban; 4) Membahas bersama pihak terkait terhadap target yang akan dicapai pada akhir tahun 2024; 5) Mengumpulkan data dan dokumen pendukung Renja; 6) Mendesain Cover Renja; 7) Mencetak dan menggandakan Dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024.
9	Efrizal, SE	Anggota	
10	Lukman Nul Hakim	Anggota	
11	Fauzan Habibie, S.I.Kom	Anggota	

Inspektur,

Febrinaldi Tridarmawan, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770210 199512 1 001

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(DPPKBP3A) KABUPATEN KAMPAR

RENJA PERUBAHAN 2024

(RANCANGAN RENCANA KERJA)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah hirobil'alamin Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar, telah dapat menyusun rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Bab.V Pasal 40 Ayat(5), mewajibkan setiap OPD menyusun rancangan rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD sesuai dengan sistimatika yang telah ditetapkan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Tahun 2023, berisikan rencana program dan kegiatan secara terintegrasi yang berubah, terencana dengan harapan dapat mengakselerasi dan mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah serta visi dan misi OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023– 2026.

Akhirnya saya ucapkan, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan yang lebih penting lagi semoga semua aktifitas akan selalu mendapat ridho Allah Subhanahuwatta'ala, Wabillahi Taufikwal Hidayah,

Wassalamu'alaikumWr.wb.

Bangkinang, 12 JULI 2023

KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR

Drs. EDI AFRIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681024 199401 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1

1.1 : Latar Belakang 1

1.2 : Landasan Hukum 3

1.3 : Maksud dan Tujuan 6

1.4. : Sistematika Penulisan 7

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPPKBP3A TAHUN LALU 9

2.1 : Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu & capaian Renstra 9

2.2 : Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 12

2.3 : Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD..... 29

2.4 : Review Terhadap Rancangan awal RKPD …… 33

2.5 : Penelahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan …… Masyarakat 35

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKBP3A KAB.KAMPAR TAHUN 2023 37

3.1 : Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2 : Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 42

3.3 : Program dan Kegiatan 43

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 49

BAB V : PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra DPPKBP3A s/d Tahun 2023	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayan Perangkat Daerah	24
Tabel 2.4	Review Terhadap Rencangan Awal RKPD Tahun 2024 DPPKBP3A Kab. Kampar	33
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	49

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 No.Telp&Fax (0762) 21485
B A N G K I N A N G Kode Pos 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 76 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 PERANGKAT DAERAH DAN PENYUSUNAN AGENDA KERJA. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, penegndalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka mnengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana jangka panjang menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ;

2. Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rancana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar ;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016 ;

17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2018 tanggal 28 Januari 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 ;

18. Keputusan Bupati Kampar Nomor 032-165/1/2019 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Esselon II/b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar ;

19. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad.Pemb/699 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020.

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021(Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590)

21. Peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (berita negara repuplik indonesia tahun 2020 nomor 1781);

22. Peraturan Dearah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);

23. Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kmpar tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perturan Daerah kabupaten kampar Nomor 6 tahun 2020 Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten kampar (lembaran Derah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017 Nomor 5), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten kampar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten kampar Nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 (lembaran Derah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 055 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 11);

27. Peraturan bupati Kampar Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati kampar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 37);

28. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar

29. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Menunjuk / mengangkat Tim penyusunan renja perangkat daerah dan penyusunan agenda kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, dengan personil sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Tim penyusunan renja perangkat daerah dan penyusunan agenda kerja dan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas menyiapkan rencana usulan kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA).
KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini Tim penyusunan renja perangkat daerah dan penyusunan agenda kerja.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	:	Bangkinang
Pada Tanggal	:	Juni 2023

KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR

Drs. EDI AFRIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681024 199401 1 002

TIM PENYUSUNAN RENJA OPD DPPKBP3A TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. EDI AFRIZAL, M.Si	KETUA	KEPALA DPPKBP3A
2	Drg. AWAL HAENNIWATI	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3	SATITI RAHAYU,SKM, M.K.M	ANGGOTA	KABID. PA
4	DWI ANDRIANI, SKM, M.Kes	ANGGOTA	KABID. KB
5	ISMULYATI,SKM, M.K.L	ANGGOTA	KABID. PP
6	LINDAWATI, SKM	ANGGOTA	Kepala UPT
7	Drs. MUHAMMAD SALEH	ANGGOTA	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
8	DARMA RAHAYU UTAMI	ANGGOTA	Analis Keuangan Pusat/Daerah
9	ZENI KURNIAWATININGSIH,SE	ANGGOTA	Kasubbag. Tata Usaha dan Sarana
10	Ns.MUHAMMAD AL HAFIZ, S.Kep	ANGGOTA	Perencana Muda
11	Ns. ERWINA RINDING. ST, S. Kep	ANGGOTA	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
12	ZULIA MARDALINA, S.Sos	ANGGOTA	Analis Kebijakan Muda
13	MARTINA, S.Farm, M.Farm, Apt	ANGGOTA	Analis Kebijakan Muda
14	AFNI, S.GZ, MKM	ANGGOTA	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
15	NILA RIWAYATI, SKM, M.Si	ANGGOTA	Analis Kebijakan Muda

16	ROSI ARTATI, A.Md. Kep	ANGGOTA	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
17	NOVI SAFRINA, AMK	ANGGOTA	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
18	Ns. SUSI DESRIANI, S. Kep	ANGGOTA	Analis Kebijakan Muda

Bangkinang, 12 Juli 2023

KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR

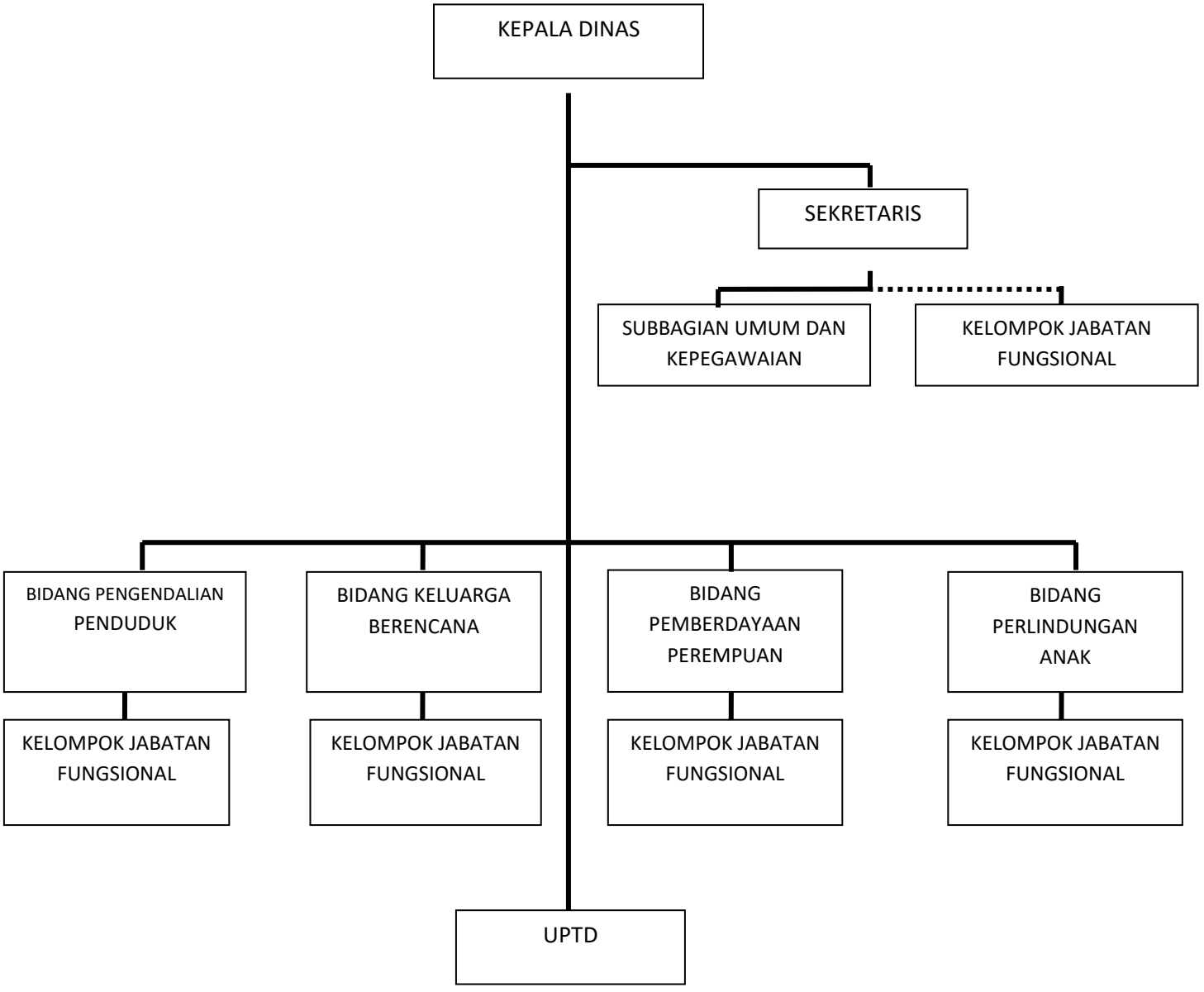
Drs. EDI AFRIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681024 199401 1 002

LAMPIRAN I

A. GAMBARAN UMUM DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR

1. STRUKTUR ORGANISASI DPPKBP3A

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 74 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunagan Anak Kabupaten Kampar (Lampiran 1). Struktur Organisasi DPPKBP3A Kab.Kampar digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Bahwa Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah : **Untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak."**

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, DPPKBP3A Kabupaten Kampar Menyelenggarakan Fungsi :

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
b. Menyusun program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
c. Menyelenggarakan pelayanan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
d. Menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, program kesejahteraan reproduksi, pemberdayaan keluarga,program keluarga berencana.
e. Pengelolaan data mikro kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, informasi gender dan anak ;
f. Pengelolaan data mikro kependudukan dan keluarga informasi gender dan anak.

g. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah,swasta,lembaga sosial dan organisasi masyarakat dibidang pelayanan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan anggaran keuangan dan perlengkapan serta organisasi.

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis daerah (UPTD).

3. KONDISI SUMBER DAYA KEPEGAWAIAN

a) Pegawai Struktural

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari : PNS struktural dan staf umum sebanyak 36 orang PNS, UPTD 2 PNS , Tenaga Honorer sebanyak 33 orang dan Tenaga Sukarela 6 (enam) orang.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas bila kita merujuk pada sistem pola kerja dinilai belum mengacu kepada pola maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa masih ada pejabat Eselon IV tidak mempunyai staf umumnya, hanya dibantu oleh staf/tenaga honorer, idealnya setiap 1 (satu) pejabat Eselon IV mempunyai 2 (dua) orang staf umum. Dari jumlah tersebut dapat dirinci berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Kepangkatan dan Golongan serta jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kabupaten Kampar (Lampiran II (DUK)

b) **Pegawai Fungsional**

Jumlah Pegawai Fungsional, sebagai tenaga Penyuluh (PKB) Lapangan pada tahun 2022 sebanyak 62 orang, sampai dengan posisi 31 Desember 2023 PKB sebanyak 49 orang dan P3K 3 orang, bertugas pada 21 Kecamatan, dan masing-masing kecamatan di koordinir oleh 1 (satu) orang koordinator. Pengangkatan PKB diputuskan berdasarkan peraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi PKB sebagai PNS Pusat. Pelaksanan peraturan ini mulai efektif pada Januari 2018. Sebelum diangkat sebagai PNS, para PKB dan P3K ini hanya berstatus pegawai non PNS yang digaji oleh pemerintah daerah. Setelah diangkat PKB akan menjadi pejabat fungsional sehingga mendapat tunjangan fungsional, sedangkan P3K bukan pejabat fungsional.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) APBD 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar, yang disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 dan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor: 06 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah (OPD) dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 46 tahun 2016.

Rencana Kerja (Renja) APBD 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses penyusunan Renja APBD Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) tahun 2024 didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui Forum OPD dengan melibatkan bidang-bidang terkait, Koordinator PKB/PLKB, Camat se-Kabupaten Kampar, tokoh masyarakat dan organisasi/lembaga yang ada keterkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar. Rencana Kerja disusun untuk memberikan landasan dan pedoman bagi pelaku pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) di Kabupaten Kampar dalam melaksanakan program-program tahun 2023.

Pada bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kampar pada khususnya. **Pertama** berkaitan dengan kuantitas penduduk. Dalam permasalahan ini antara lain diwarnai dengan jumlah yang besar disertai dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi, struktur umur muda. **Kedua** berkenaan dengan“ kualitas penduduk “ seperti angka kematian tinggi, pendidikan rendah, angka kemiskinan tinggi. **Ketiga** adalah penyebaran penduduk antar wilayah yang sangat timpang, baik antar daerah maupun antara desa dan kota.

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan menganalisa data meningkatnya kasus kekerasan, pelecehan seksual, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pencabulan dan tindak kejahatan lainnya pada perempuan dan anak.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun suatu perencanaan kerja yang dituangkan dalam **RANCANGAN RENCANA KERJA APBD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024.**

Selain itu rancangan rencana kerja ini juga merupakan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menunjang tugas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, dimana Program kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310):
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Kependudukan;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repiblik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kementerian dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Negara RI Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2019 nomor 52, Tamabahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rancana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021
(Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandami Corana Virus Disease 19 (Covid 19) dan Dampaknya;
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah ProvinsinRiau tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran daerah Provinsi Riau Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 nomor 6), Sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan perangkat daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2017 nomor 5), sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2020 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 055 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2002 Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang rencana kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 37);
27. Peraturan bupati Kampar Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati kampar Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 37);
28. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar
29. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

1.3. Maksud danTujuan.

1.3.1. Maksud

Adapun maksud penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Mengevaluasi Pelaksanaan Program/kegiatan tahun sebelumnya;
b. Menyusun Program/Kegiatan untuk tahun yang akan datang

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja, adalah sebagai berikut;

a. Sebagai acuan penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2023 bagi seluruh OPD di Kabupaten Kampar;

b. Sebagai pedoman dalam mensinkronisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2023 dengan 9 (sembilan) isu strategis Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023;

c. Sebagai pedoman dalam mensinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisan rancangan Renja DPPKBP3A sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

1.2 : Landasan Hukum

1.3 : Maksud dan Tujuan

1.4. : Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DPPKBP3A TAHUN LALU

2.1 : Evaluasi pelaksanaan Renja DPPKBP3A Tahun 2023 dan capaian Renstra

2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 : Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 : Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKBP3A KAB. KAMPAR TAHUN 2024

3.1 **:** Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 : Tujuan dan sasaran Renja DPPKBP3A

3.3 : Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

*2.*1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja APBD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar adalah penjabaran perencanaan tahunan sampai dengan tahun 2023, dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Rencana Kerja (RENJA) APBD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar selama tahun 2023. Sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra OPD) ditahun 2023.

Program/kegiatan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 51 Sub kegiatan, sebagian besar Sub kegiatan Belum mencapai target.

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang belum memenuhi target:

✓ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Input	: Dana yang Tersedia Rp. 13.500.000,-
	(Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
Output/ Outcome	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Target	: 3 Orang
Realisasi Anggaran	: 0%
Realisasi Sub. Kegiatan	: 0%
Permasalahan	: Tidak ada undangan Bimtek oleh sebab itu Kegiatan tidak dapat Berjalan dengan semestinya
Solusi	: -

❖ **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

✓ **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Failitas Kesehatan Termasuk jaringan dan jejaringnya

Input	: Dana yang Tersedia Rp. 82.500.000,-
	(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
Output/ Outcome	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Target	: 12 Laporan
Realisasi Anggaran	: 55.40%
Realisasi Sub Kegiatan	: 100%
Permasalahan	: Tidak Sesuai dengan Juknis dan untuk Pemusnahan Alat dan Obat harga satuannya kurang dari Satuan Harga DPA
Solusi	: Usulan di lalukan untuk Tahun anggaran mendatang

2. Dukungan operasional pelayanan KB bergerak

Input : Dana yang Tersedia Rp. 972.107.900,-
(Sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh ribu Sembilan ratus rupiah)

Output/ Outcome : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Target : 1 laporan

Realisasi Anggaran : 59.07%

Realisasi Sub Kegiatan : 80.16%

a. Permasalahan : Standar Harga pasar terlalu tinggi, sedangkan di standar harga pusat terlalu rendah sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilakuakan secara maksimal serta Proses Pembuatan MOU dan MOP yang Membutuhkan Waktu lebih lamauntuk mencapai kesepakatan

Solusi : Akan di evaluasi lagi kembali pada saat usulan untuk standar harga di anggaran tahun selanjutnya.

✓ **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

1. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL,PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)

Input : Dana yang Tersedia Rp. 4.364.740.000,-
(empat miliyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Output/ Outcome : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Target : 1 laporan

Realisasi Anggaran : 33.15%

Realisasi Sub Kegiatan : 33.15%

Permasalahan : Keluarnya Juknis terlalu lama,Kurangnya Pemahaman Tim tentang Kegiatan TPK, Dana yang di kucurkan terlalu besar, padahal baru tahun pertama di adakan

Solusi : -

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar berubah nomenklatur menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mempunyai tugas pokok :

"Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" dengan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

2.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar terdiri dari :

- 1(satu) Kepala Badan atau (Eselon IVc);
- 1(satu) Sekretaris (Eselon IVb), membawahi 3(tiga) Sub Bagian (Eselon IIId dan IIIb);
- 4(empat) Bidang (Eselon IVa), masing-masing membawahi :
  - Bidang Pengendalian Penduduk dengan membawahi 3 (tiga) sub.bidang Eselon IIId dan IIIc;
  - Bidang KB , membawahi 3(tiga) Sub Bidang (Eselon IIId dan IIIc);
  - Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 2 (dua) Sub Bidang (Eselon IIId)
  - Bidang Perlindungan Anak, membawahi 2 (dua) Sub Bidang (Eselon IIIc)

Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada lampiran Struktur Organisasi DPPKBP3A, Lampiran I

2.2.2. Jumlah Pegawai

2.2.2.1. Pegawai Struktural

Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari : PNS struktural dan staf umum sebanyak 36 orang PNS, UPTD 2 PNS , Tenaga Honorer sebanyak 33 orang dan Tenaga Sukarela 6 (enam) orang.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas bila kita merujuk pada sistem pola kerja dinilai belum mengacu kepada pola maksimal, hal ini dapat dilihat bahwa hampir seluruh pejabat Eselon IV tidak mempunyai staf PNS umumnya, selama ini dibantu oleh staf/tenaga honorer, idealnya setiap 1 (satu) pejabat Eselon IV mempunyai 2 (dua) orang staf umum. Dari jumlah tersebut dapat dirinci berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Kepangkatan dan Golongan serta jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kabupaten Kampar.

2.2.2.2.Pegawai Fungsional

Jumlah Pegawai Fungsional, sebagai tenaga Penyuluh (PLKB) Lapangan pada tahun 2020 sebanyak 91 orang, sampai dengan posisi 31 Desember 2023 sebanyak 60 orang, bertugas pada 21 Kecamatan, dan masing-masing kecamatan di koordinir oleh 1 (satu) orang koordinator.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2022 secara umum dapat terlaksana dengan baik. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam pandemi Covid 19 sehingga banyak kegiatan yang ditunda pelaksanaannya. Adapun faktor lain seperti:

a. Masih kurangnya beberapa jenis ketenagaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
b. Keterbatasan SDM untuk pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan terbatasnya pelayanan yang dapat diberikan.

c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dari berbagai kendala tersebut, hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah dengan :

a. Memanfaatkan secara maksimal sumber daya Manusia yang tersedia untuk mencapai sasaran/target indikator kinerja bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan.

b. Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral dengan melakukan pertemuan rutin dengan koordinator PKB Kecamatan,, pertemuan rutin mingguan dan bulanan, dimana dalam pertemuan dapat dikemukan permasalahan-permasalahan yang ada secara lebih awal sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya secara dini.

c. Mencari sumber pembiayaan lain dalam pembiayaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk seperti : APBD Propinsi dan APBN dsb dengan mengusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan dan perencanaan lainnya, ataupun dengan menyusun proposal-proposal permintaan dana pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lainnya.

Namun ada beberapa hal yang dapat menjadi pendorong keberhasilan pencapaian pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 antara lain : adanya dana dari APBD propinsi dan APBN yang membantu tercapainya target/indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti pembangunan Balai penyuluhan Keluarga Berencana di 21 kecamatan tersebar di Kabupaten Kampar dan pengadaan obat-obatan dan sarana pelayanan KB lainnya

Secara umum dapat disimpulkan :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar telah diselenggarakan dengan baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat diperoleh dari Nilai hasil evaluasi terhadap penetapan kinerja dan indikator kinerja utama dalam Rencana Srategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Kampar.
3. Dalam pencapaian sasaran secara umum telah berhasil diwujudkan dengan baik.

2.2.2.3 Evaluasi Pencapaian DPPKBP3A Kabupaten Kampar

NO	Indikator Kinerja	REALISASI KONDISI KINERJA									Target 2017 (Nasional)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.17	89.30	89,50	89,70	89.9	89,90	89,81	-	-	89,17
2	Indeks Komposit kesejahteraan Anak (IKKA)	64	64	64	64	64	64	64	-	-	64

Berdasarkan dari data diatas angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kampar melebihi target dari Provinsi, namun belum mencapai target Nasional ,perlu peningkatan untuk tahun berikutnya.

Tidak tercapainya Indeks Pembangunan Gender ini disebabkan karena :

1. Perempuan belum mendapat kepercayaan oleh masyarakat untuk duduk di lembaga legislatif
2. Masih kuatnya agama dan budaya di Kabupaten Kampar bahwa pemimpin adalah laki-laki.
3. Masih terdapat kelompok tertentu dari masyarakat yang masih lebih mengutamakan laki-laki untuk terlibat dalam pemerintahan atau bekerja diluar rumah daripada perempuan
4. Masih terbatasnya anggaran untuk mendukung indikator pembangunan gender.

Penjelasan dari masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Peran Perempuan Masih rendah

Peran Perempuan ditandai dengan Rasio keterwakilan perempuan di legislatif Kabupaten Kampar sampai tahun 2018 adalah 16 atau berhasil mencapai 90% dari target yang ditetapkan sebesar 17.78%. Belum mampunya tingkat realisasi sampai 2017 ini untuk mencapai angka 100% adalah akibat dari kultur dan struktur caleg perempuan yang masih belum begitu memihak pada kaum wanita. Meskipun belum dapat mencapai target akan tetapi capaian kinerja ini termasuk dalam kategori memuaskan karena berhasil memiliki tingkat capaian di atas 85%. Capaian rasio keterwakilan perempuan di legislatif sampai tahun 2017 ini juga lebih baik di banding tahun 2011, 2012, dan 2013 dengan hanya mencapai angka 10. Secara politis, kedepannya diharapkan iklim politik dapat berubah untuk lebih dapat memihak kepada kaum wanita sehingga pada periode Bupati berikutnya rasio keterwakilan perempuan di legislatif dapat mencapai angka yang ditargetkan.

2. Kasus kekerasan Pada Anak Yang Tinggi

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kampar pada tahun 2021 sebanyak 43 Kasus menurun setiap tahunnya. Namun kenyataan di lapangan masih banyak kasus kekerasan perempuan dan anak yang belum dilaporkan ke pihak berwenang. Hal ini disebabkan belum transparansinya para korban untuk melaporkan kasus kekerasan tersebut karena dianggap sebagai aib. Ini salah satu hambatan yang dihadapi oleh DPPKBP3A Kabupaten Kampar. Padahal sudah diberikan solusi melalui kegiatan sosialisasi di tiap RT, sekolah, maupun lingkungan kerja mengenai bahayanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan dampaknya terhadap kondisi fisik dan mental terhadap mereka yang menjadi korbannya. Solusi lain juga telah dibentuknya Satuan Tugas PKDRT di setiap Kecamatan.DPPKBP3A juga bekerjasama dengan Mitra kerja seperti UPTD PPPA, TP-PKK Kab.Kampar, Organisasi perempuuan, Forum anak dsb untuk mau perempuan melaporkan kasus yang dialaminya ke pihak berwajib.

Upaya-upaya untuk menekan/menurunkan rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dapat terealisasi secara maksimal. Faktor-faktor ini tentu saja berdampak pada tingkat capaian indikator kinerja yang terealisasi di angka 1% dan termasuk dalam kategori kurang. Untuk dapat mencapai target RPJMD, Pemerintah kab. Kampar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di tahun 2021 akan membenahi kinerja pusat pengaduan dan whistle blowing system serta mengerahkan tenaga-tenaga yang melakukan pendekatan korban KDRT untuk mau melaporkan kasus-kasus yang terjadi kepada pihak penegak hukum.

Indeks Komposit kesejahteraan anak pada Kabupaten Kampar diukur berdasarkan pada:

a. Pemenuhan hak anak mempengaruhi kualitas hidup anak yang kemudian menentujkan tingkat kesejahteraan anak
b. Pada tataran ideal risiko dan kebutuhan hidup anak berubah mengikuti tahapan kehidupan anak mulai dari janin, bayi, balita, anak-anak,remaja muda, sampai dengan remaja

c. Pada tataran prakti, karena ketersediaan data serta merujuk kebutuhan pokok anak dan menghadapi risiko hidup dalam hal kesehatan pada masa balita (0-4 thn) serta pendidikan pada usia 5-17 tahun , maka tahapan kehidupan berfokus pada balita, anak 5-17 tahun, dan

d. Memenuhi kebutuhan dan menjauhi resiko disetiap tahapan kehidupan anak merupakan kunci peningkatan kesejahteraan anak.

Adapun indicator dari Indeks Komposit kesejahteraan anak diukur dari tingkat kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi dan identitas. Kabupaten Kampar IKKA masih jauh dari IKKA Provinsi Riau. Provinsi Riau IKKA 68,1 sedangkan Kabupaten Kampar 64 . Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel Perbandingan IKKA Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar Tahun 2018

Nama Daerah	**Indeks Pemenuhan Hak Anak**					
	Kelangsungan Hidup	Perlindungan	Tumbuh Kembang	Partisipasi	Identitas	IKKA
Riau	83,9	80,5	51,4	46,8	77,9	68,1
Kampar	80,3	78,2	49,07	35,31	77,1	64

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DPPKBP3A Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut;

1. Terbatasnya kemampuan pengelola dan pelaksana program terutama ditingkat Lini lapangan, khususnya dalam pembinaan jejaring operasional di lapangan.
2. Masih lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan, yang ditandai oleh lemahnya pembinaan keluarga berkaitan pembinaan tumbuh kembang anak dan rendahnya keluarga akseptor miskin yang

dapat mengakses sumber permodalan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga;

3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak reproduksi yang ditandai dengan permasalahan persalinan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering;
4. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
5. Memperluas jaringan dan pemahaman tentang gender dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditingkat kecamatan melalui vocal point
6. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7. Peningkatan peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah
8. Rendahnya penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
9. Forum anak terdapat di 21 kecamatan dan 25 desa dari 242 desa 8 Kelurahan yang ada kendalanya meliputi keuangan, transportasi dan keadaan geografis daerah yang sulit di jangkau
10. Pojok Asi, belum tersedia dengan baik yang harusnya di sediakan
11. RBRA, Ruang Bermain Anak yang Ramah belum tersedia dengan baik
12. Pojok Baca, belum tersedia dengan baik yang harusnya di sediakan
13. Percepatan Penurunan Stunting dari 25.70% menjadi < 14% tahun 2024
14. Meningkatkan peringkat KLA dari Madya

2.3.1 Potensi.

Potensi DPPKB3A Kabupaten Kampar dapat diIdentifikasi sebagai berikut;

1. Jumlah petugas PLKB yang berasal dari pegawai BKKBN masih relative banyak dan berpengalaman dalam pengendalian penduduk melalui program KB dengan menggerakkan masyarakat dan promosi program KB. Seperti BKB, BKR, BKL, BLK, dan Keluarga Harmonis, maupun bidang Pemberdayaan Prempuan seperti PKK, GOW, Dharmawanita dan lain sebagainya.

2. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai baik untuk kepentingan internal maupun eksternal.

3. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal mrmbutuhkan upaya pengikatan kapasitas kelembagaan dan pelembagaan budaya kerja " Cerdas, Ulet dan Kemitraan (CUK).

4. Efektifitas dan efisiensi pengelalaan pembangunan KB dan Pemberdayaan Perempuan yang mengharuskan penerapan majemen prima yang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntable.

2.3.2 Permasalahan

Disamping keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Perberdayaan Perempuan di Kabupaten Kampar masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam periode pembangunan lima tahun priode mendatang.

Permasalahan dibawah ini meliputi kelemahan dan tantangan yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan DPPKBP3A dan pelaksanaan pembangunan Keluarga Berencana dan Perberdyaan Perempuan.

2.3.3. Kelemahan.

a. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur DPPKBP3A terutama bidang KKB yang disebabkan adanya kebijakan mutasi dan promosi pegawai serta pengadaan pengawai yang masih kurang dan tidak sesuai dengan bidang yang diharapkan.
b. Sarana dan prasarana operasional penggerakkan masyarakat baik bidang KB maupun bidang Perberdayaan Perempuan yang kurang memadai.
c. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program KB dan PP yang belum optimal

2.3.4. Tantangan.

a. Menurunnya jumlah petugas Pengendali Lapangan atau PLKB dan PPLKB sebagai ujung tombak program KB. Data terakhir menunjukkan bahwa PPLKB di Kabupaten Kampar berjumlah 74 orang .

b. Meningkat rasio PLKB terhadap desa / kelurahan agar persebaran tenaga lapangan merata. Data terakhir 1 PLKB menangani 2 – 3 desa / kelurahan bahkan ada sampai 5 – 6 desa / kelurahan.

c. Meningkatkan kemitraan dan penyuluhan dan pelatihan baik bidang KB maupun bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Data terakhir bidang KB pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kampar sebesar 5,4 persen, sedangkan yang diharapkan adalah 1,1 persen secara nasional. Bidang Pemberdayaan Perempuan masih tingginya relevansi antara laki – laki dan perempuan diberbagai bidang di Kabupaten Kampar, dibandingkan jumlah penduduk laki – laki dan perempuan yang hampir seimbang yaitu 51,7 persen laki dan 48,3 persen perempuan.

d. Meningkatkan pembinaan terhadap anak – anak. Data terakhir masih tingginya kasus kasus KDRT, perdagangan anak, dan ekploitasi pekerja anak.

e. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran program KB dan Perberdayaan Perempuan dan Anak yang kurang memadai. Dengan demikian, DPPKBP3A harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjadi prioritas.

f. Meningkatkan sinergsitas kebijakan dalam pembangunan KB dan PP dan PA baik lintas sektoral maupun di pusat dan propinsi.

2.3.5.Peluang

1. Dengan disahkan UU No 52 Tahun 2009 tentang Perekembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga, maka BKBPP Kabupaten Kampar diberikan mandat untk pengendalian penduduk dan program KB.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang perlu disosialiasikan kepada masyakat dalam upaya mencegah terjadinya KDRT, perdagangan anak serta meningkatkan perlindunngan anak serta berperan dalam pembangunan.
3. Inspres Nomor 9 Tahun 2000, tentang pengarusutamaan gender, yang diarahkan kepada perempuan maupun laki – laki utuk meningkatkan kemitrasejajaran yang harmonis, dimana perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi sikap dan prilaku yang saling menghormati, saling menghargai, saling memmbantu dan saling mengisi dalam pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan, Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota 81 Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten/Kota memperjelas pembagian kewenangan pengelolaan Program KB di tingkat Pusat, dan Kabnupaten / Kota.
5. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan KB dan PPA yang ditunjukkan dengan program KB dan PPA menjadi bagian pembangunan yang Prioritas Nasional, Propinsi dan Kabupaten / Kota.
6. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan pembangunan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam

menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar.

Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJPD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD. Gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah. Hal ini dapat di lihat pada Tabel 2.2.

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

DPPKBP3A melakukan Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan sama sehingga tidak ada perubahan . Hal ini dapat dilihat pada tabel review berikut:

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- RJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) setiap tahun.
- Dalam penyusunannya, RJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RJMD Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas - bawah serta bawah-atas (topdown - bottom up).
- Dalam kaidah perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan tidak saja didasarkan pada mekanisme top down, akan tetapi juga melalui mekanisme buttom up. Proses perencanaan melalui mekanisme buttom up dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. Mekanisme ini didasarkan pada undang-undang perencanaan pembangunan yang ada.
- Proses perencanaan pembangunan kesejahteraan Kesehatan merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, yang disusun berdasarkan mekanisme bottum up melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD serta musrenbang tingkat kabupaten dan provinsi juga musrenbang tingkat nasional.

- Dalam musrenbang tingkat desa pemangku-pemangku kepentingan seperti LMD, Tokoh masyarakat, agama, pemuda secara aktif memberikan masukan serta usulan kebutuhan program/kegiatan untuk pembangunan kesejahtaraan Kesehatan masyarakat desa. Demikian juga ditingkat kecamatan, kabupaten serta provinsi. Karena dalam pelaksanaan musrenbang di Kampar selalu menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan yang ada.
- Dari pelaksanaan musrenbang (baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten) diperoleh daftar usulan program/kegiatan di sektor Kesehatan dan dimasukan kedalam rekapitulasi usulan program/kegiatan tahun 2023
- Usulan Program/kegiatan pemangku kepentingan tidak ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN 2022
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR

Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (out came) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun Berjalan	
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)	Realisasi Renja PD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			
								Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022		Tahun 2023 (tahun berjalan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/9)
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
02	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**		**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
2	**14**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dibayarkan Gaji dan Tunjangan**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**97.92%**
2	14	01	202	01	~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/24 bulan		37/ 12 orang/ Bulan	37 Orang/24 bulan	100%	37 Orang/6 bulan	37 Orang/18 bulan	97.92%
2	**14**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan/pelatihan**	**3Orang**		**3 Orang**		**100%**	**3 Orang**	**-**	**100.00%**
2	14	01	205	11	~ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		3 Orang		0%	3 Orang	-	**0.00%**
2	**14**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah terealisasikan Program dan Kegiatan**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**98.90%**
2	14	01	206	01	~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100.00%
2	14	01	206	02	~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	95.93%
2	14	01	206	04	~ Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	96.22%
2	14	01	206	05	~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	99.97%
2	14	01	206	06	~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	100.00%
2	14	01	206	09	~ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	90.16%
2	**14**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**-**	**100.00%**

2	14	01	207	05	~	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		12 Bulan	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	**98.08%**
2	14	01	207	10	~	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 unit		12 Bulan	10 unit	100%	5 unit	10 unit	**95.41%**
2	**14**	**01**	**208**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa tenaga harian lepas**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100%**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100.00%**
2	14	01	208	02	~	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan		12 Laporan	12Laporan	100%	12 Bulan	12 Bulan	98.91%
2	14	01	208	04	~	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		1 lap	1 lap	100%	1 Laporan	1 Laporan	93.94%
2	**14**	**01**	**209**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Mobil Operasional**	**6 Unit**		**6 Unit**	**6 Unit**	**100%**	**6 Unit**	**6 Unit**	**100.00%**
2	14	01	209	01	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	95.57%
2	14	01	209	02	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	78.05%
2	14	01	209	06	~	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100.00%
2	14	01	209	09	~	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	99.65%
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Jumlah dokumen Data Kependudukan**	**1 dokumen**		**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**	**1 dokumen**	**0.00%**	**100.00%**
2	**14**	**02**	**202**			**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tercapaianya Program Bangga Kencana**	**100%**		**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.00%**	**99.45%**
2	14	02	202	02	~	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	**99.45%**
2	**14**	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Capaian TFR, UNMEETNEETD, mCPR**	**2.74/3,08**		**2.74/3,08**	**2.74/3,08**	**100%**	**2.74/3,08**	**2.74/3,08**	**100.00%**
2	**14**	**03**	**201**			**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah balai penyuluh KB manajemen dan KIE**	**21 Balai**		**21 Balai**	**21 Balai**	**100%**	**21 Balai**	**21 Balai**	**100.00%**
2	14	03	201	01	~	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	10 Organisasi		2 Organisasi	2 Organisasi	100%	2 Organisasi	2 Organisasi	93.48%

2	14	03	201	04	~	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
2	14	03	201	07	~	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 laporan		5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	92.51%
2	14	03	201	08	~	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	95.59%
2	**14**	**03**	**202**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah Balai PLKB/PKB**	**21 Balai**		**21 Balai**	**21 Balai**	**100%**	**21 Balai**	**21 Balai**	**100.00%**
2	14	03	202	02	~	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	5 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	82.79%
2	14	03	202	04	~	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	250 Orang		250 Orang	250 Orang	100%	250 Orang	250 Orang	96.14%
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Wawasan Kompeten Terlaksananya tenaga pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil**	**1 Keg**		**1 Keg**	**1 Keg**	**100%**	**1 Keg**	**100%**	**98.00%**
2	14	03	203	01	~	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		1 lap	1 lap	100%	12 Laporan	0%	**55.40%**
2	14	03	203	03	~	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42 Orang		50 orang	50 orang	100%	42 Orang	42 Orang	88.51%
2	14	03	203	06	~	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 unit		21 Unit	21 Unit	100%	1 unit	-	97.23%
2	14	03	203	10	~	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50 orang		21 Orang	21 Orang	100%	50 orang	0.00%	96.72%
2	14	03	203	11	~	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 laporan		1 lap	21 lap	100%	1 laporan	0.00%	59.07%
2	14	03	203	12	~	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	60 Orang		50 orang	50 orang	100%	60 Orang	0.00%	90.74%

2	**14**	**03**	**204**			**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan**	**Persentase Tercapainya peran kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kersertaan ber- KB bagi masyarakat**	**100%**		**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.00%**
2	14	03	204	01	~	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi		3 Organisasi	3 Organisasi	100%	3 Organisasi	3 Organisasi	99.33%
2	14	03	204	03	~	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	38 Kampung		38 kampung KB	38 kampung KB	100%	38 kampung KB	38 kampung KB	100.00%
2	**14**	**04**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun(ASFR 15-19 th)**	**20 ASFR**		**20 ASFR**	**20 ASFR**	**100%**	**20 ASFR**	**20 ASFR**	**100 %**
2	**14**	**04**	**201**			**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumalah remaja yang di beri pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan usia Muda melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja**	**10 orang**		**10 orang**	**1 Keg**	**100%**	**10 orang**	**10 orang**	**199.55%**
2	14	04	201	04	~	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 Orang		50 Orang	50 Orang	100%	21 Orang	21 Orang	100.00%
2	14	04	201	07	~	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 laporan		1 lap	1 lap	100%	1 laporan	1 laporan	33.15%
2	14	04	201	08	~	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5 laporan		1 lap	1 lap	100%	1 laporan	1 laporan	99.55%

2	**14**	**04**	**202**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan supervisi ke kecamatan**	**1 laporan**		**1 laporan**	**1 laporan**	**100%**	**1 laporan**	**1 laporan**	**99.44%**
2	14	04	202	04	~ Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	5 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	99.44%
2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2	08	02			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi**	**32 Orang**		**32 Orang**	**32 Orang**	**100%**	**32 Orang**	**32 Orang**	**100%**
2	**08**	**02**	**201**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah Perangat daerah yang mengikuti Pelatihan PPRG bagi perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG**	**27 Perangkat Daerah**		**27 Perangkat Daerah**	**27 Perangkat Daerah**	100%	**27 Perangkat Daerah**	**27 Perangkat Daerah**	98.11%
2	08	02	201	03	~ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah		27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	100%	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	98.11%
2	**08**	**02**	**202**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**banyaknya Perempuan berpolitik**	**50 Orang**		**5 Organisasi**	**5 Organisasi**	100%	**50 Orang**	**50 Orang**	**95.24%**
2	08	02	202	02	~ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi		5 Organisasi	5 Organisasi	100%	5 Organisasi	5 Organisasi	95.24%
2	**08**	**02**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah perempuan yang di data dengan Pendidikan dan Keterampilan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dan menciptakan kesempatan kerja untuk menunjang ekonomi keluarga**	**21 Orang**		**21 Orang**	**21 Orang**	**100%**	**21 Orang**	**21 Orang**	**100.00%**

2	08	02	203	01	~	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 lembaga		2 lembaga	21 Orang	100%	2 lembaga	2 lembaga	98.03%
2	08	02	203	03	~	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen		1 Dokumen	21 Orang	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	99.81%
2	**08**	**03**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal penanganan KDRT**	**11 Desa**		**11 Desa**	**11 Desa**	**100%**	**11 Desa**	**11 Desa**	**100%**
2	**08**	**03**	**202**			**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah desa Penyedia layanan yang sudah terbentuk untuk Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perlakuan yang salah**	**11 Desa**		**11 Desa**	**11 Desa**	**100%**	**11 Desa**	132 Orang	**100.00%**
2	08	03	202	01	~	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	132 Orang		132 Orang	132 Orang	100%	132 Orang	132 Orang	100.00%
2	**08**	**04**				**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Jumlah laporan untuk Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin**	**21 laporan**		**21 laporan**	**21 laporan**	**100%**	**21 laporan**	**21 laporan**	**100.00%**
2	**08**	**04**	**201**			**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Berkembangnya jumlah usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha merajut di kabupaten kampar dalam menunjang ekonomi keluarga**	**5 kel**		**5 kel**	**5 kel**	**100%**	**5 kel**	**5 kel**	**92.49%**
2	08	04	201	03	~	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21 laporan		21 laporan	21 laporan	100%	21 laporan	21 laporan	92.49%
2	**08**	**04**	**202**			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembinaan peran dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi dalam mensejahterakan Keluarga**	**100%**		**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.00%**
2	08	04	202	02	~	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang		10 orang	10 orang	100%	10 orang	10 orang	96.53%

2	08	04	202	03	~	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1	Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	97.47%
2	**08**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah laporan mencapaian APE di setiap kecamatan**	**21 laporan**		**21**	**laporan**	**21 laporan**	**100%**	**21 laporan**	**21 laporan**	**100.00%**
2	**08**	**05**	**201**			**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen sebagai pendukung dalamengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah**	**21 dokumen**		**21**	**dokumen**	**21 dokumen**	**100%**	**21 dokumen**	**21 dokumen**	**94.64%**
2	08	05	201	01	~	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	21 dokumen		21	dokumen	21 dokumen	100%	21 dokumen	21 dokumen	**94.65%**
2	**08**	**06**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Pesentasi dalam Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan**	**32%**		**32**	**%**	**32%**	**100%**	**32%**	**32%**	**95%**
2	**08**	**06**	**201**			**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	**21 FAN**		**21**	**FAN**	**21 FAN**	**100%**	21 FAN	21 FAN	**99.12%**
2	08	06	201	02	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen		2	Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	99.12%
2	**08**	**06**	**202**			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	**21 FAN**		**21**	**FAN**	**21 FAN**	100%	**21 FAN**	**21 FAN**	**100.00%**
2	08	06	202	01	~	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang		21	orang	21 orang	100%	21 orang	21 orang	99.23%

2	08	06	202	03	~ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga	21 dokumen		21 dokumen	21 dokumen	100%	21 dokumen	21 dokumen	99.61%
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Jumlah PATBM di tingkat Desa**	**80 Orang**		**80 Orang**	**80 Orang**	**100%**	**80 Orang**	**80 Orang**	**100.00%**
2	**08**	**07**	**201**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlindunginya Perempuan dan anak terhadap tindak Kekerasan**	**100%**		**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**28.93%**
2	08	07	201	02	~ Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1 dok	1 dok	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	99.82%
2	**08**	**07**	**202**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah**	**Jumlah desa penyedia layanan bagi anak untuk mengurangi Angka kekerasan terhadap anak**	**10 Desa**		**10 Desa**	**10 Desa**	**100%**	**10 Desa**	**10 Desa**	**199.06%**
2	08	07	202	02	~ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 layanan		10 layanan	10 layanan	100%	10 layanan	10 layanan	99.06%
2	08	07	202	04	~ Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100.00%
2	**08**	**07**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang**	**50%**		**50 %**	**50%**	**100%**	**50%**	**50%**	**96.12%**
2	08	07	203	02	~ Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	96.12%

Bangkinang, 12 Juli 2023

KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR

Drs. EDI AFRIZAL, M.SI
Pembina Uatama Muda
NIP. 19681024 199401 1 002

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPPKBP3A
Kabupaten Kampar

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Relisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Laju Pertumbuhan Penduduk (TFR)**			**2,75**	**2,75**	**2,74**	**-**	**2,25**	**2,74**	**2,74**	**-**	**-**	**-**	
II	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**			**89,90**	**89,90**	**-**	**-**	**100**	**89,90**	**-**	**-**	**-**	**-**	
III	**Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)**			**64**	**64**	**-**	**-**	**84**	**84**	**-**	**-**	**-**	**-**	

- Realisasi Capaian TFR pada tahun 2021 (2,25) mengalami peningkatan di tahun 2022 (2,74) Sedangkan Tahun 2023 Masih Berjalan
- Realisasi capaian IPG pada tahun 2021 (100) mengalami penurunanan di tahun 2022 (89,90) meskipun demikian sesuai dengan target Renstra dan Proyeksi tahun 2022 (89,90) sedangkan Tahun 2023 Masih berjalan.
- Realisasi capaian IKKA pada tahun 2021 (84) Tetap Stabil di tahun 2022 (84) sudah melebihi target dari Renstra sedangkan Tahun 2023 Masih berjalan

REVIEW TERHADAP RENCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR

Rencangan Awal RKPD										Hasil Analisa					
Kode Rekening					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (out came) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (out came) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Cacatan Penting
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**9,161,924,570**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**9,390,462,025**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**6,344,024,570**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**6,572,562,025**	**Kab. Kampar**
2	**14**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Kampar	**Persentase capaian Program dan Anggaran Perangkat daerah**	**100%**	**350,000,000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Kampar	**Persentase capaian Program dan Anggaran Perangkat daerah**	**100%**	**390,000,000**	Kab. Kampar
2	14	01	201	01	~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	50,000,000	~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	201	02	~ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50,000,000	~ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	201	03	~ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	50,000,000	~ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	201	04	~ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	~ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	201	05	~ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	50,000,000	~ Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	201	06	~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	50,000,000	~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	201	07	~ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50,000,000	~ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kampar	**Dibayarkan Gaji dan Tunjangan**	**12 Bulan**	**3,404,078,424**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kampar	**Dibayarkan Gaji dan Tunjangan**	**12 Bulan**	**3,404,078,424**	Kab. Kampar

2	14	01	202	01	~	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/12 Bulan	3,404,078,424	~	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/12 Bulan	3,404,078,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kab. Kampar**	**Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan/pelatihan**	**3 Orang**	**13,500,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Kab. Kampar**	**Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan/pelatihan**	**3 Orang**	**13,500,000**	Kab. Kampar
2	14	01	205	11	~	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	13,500,000	~	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	13,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Kab. Kampar**	**Jumlah terealisasikan Program dan Kegiatan**	**1 Paket**	**531,200,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Kab. Kampar**	**Jumlah terealisasikan Program dan Kegiatan**	**1 Paket**	**531,200,000**	Kab. Kampar
2	14	01	206	01	~	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	~	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	206	02	~	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	~	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	206	04	~	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90,500,000	~	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	206	05	~	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,000,000	~	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	206	06	~	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,200,000	~	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	206	09	~	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	300,000,000	~	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	206	11	~	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	~	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kab. Kampar**	**Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor**	**50 unit**	**400,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Kab. Kampar**	**Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor**	**50 unit**	**588,537,455**	Kab. Kampar
2	**14**	01	207	01	~	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	60,000,000	~	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	207	02	~	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	50,000,000	~	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	207	05	~	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	~	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	01	207	06	~	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50,000,000	~	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	207	09	~	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	200,000,000	~	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

2	14	01	207	10	~	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 unit	178,537,455	~	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 unit	178,537,455	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	207	11	~	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50,000,000	~	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kab. Kampar	**Tersedianya jasa tenaga harian lepas**	**12 Bulan**	**1,212,646,146**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kab. Kampar	**Tersedianya jasa tenaga harian lepas**	**12 Bulan**	**1,212,646,146**	**Kab. Kampar**
2	14	01	208	02	~	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	105,000,000	~	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12Laporan	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	208	03	~	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,000,000	~	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	208	04	~	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,057,646,146	~	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,057,646,146	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kab. Kampar	**Jumlah Mobil Operasional**	**6 Unit**	**432,600,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Kab. Kampar	**Jumlah Mobil Operasional**	**6 Unit**	**432,600,000**	Kab. Kampar
2	14	01	209	01	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	37,500,000	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	37,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	209	02	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	102,000,000	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	102,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	209	06	~	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	30,100,000	~	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	30,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	01	209	09	~	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	263,000,000	~	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	263,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Kab. Kampar**	**Jumlah dokumen Data Kependudukan**	**1 Dokumen**	**263,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Kab. Kampar**	**Jumlah dokumen Data Kependudukan**	**1 Dokumen**	**263,000,000**	
2	**14**	**02**	**202**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**Persentase tercapaianya Program Bangga Kencana**	**100%**	**263,000,000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**Persentase tercapaianya Program Bangga Kencana**	**100%**	**263,000,000**	Kab. Kampar
2	14	02	202	02	~	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	263,000,000	~	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	263,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Kab. Kampar**	**Capaian TFR, UNMEETNEETD, mCPR**	**2.74/3,08**	**1,454,900,000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Kab. Kampar**	**Capaian TFR, UNMEETNEETD, mCPR**	**2.74/3,08**	**1,454,900,000**	
2	**14**	**03**	**201**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		Kab. Kampar	**Jumlah balai penyuluh KB manajemen dan KIE**	**21 Balai**	**533,500,000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		Kab. Kampar	**Jumlah balai penyuluh KB manajemen dan KIE**	**21 Balai**	**533,500,000**	Kab. Kampar
2	14	03	201	01	~	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kab. Kampar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	2 Organisasi	166,000,000	~	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kab. Kampar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	2 Organisasi	166,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	201	04	~	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	300,000,000	~	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	201	05	~	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 laporan	67,500,000	~	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 laporan	67,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	201	07	~	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 laporan	1,011,300,001	~	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 laporan	1,011,300,001	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	201	08	~	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	67,500,000	~	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	67,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	**03**	**202**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		Kab. Kampar	**Jumlah Balai PLKB/PKB**	**21 Balai**	**100,000,000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		Kab. Kampar	**Jumlah Balai PLKB/PKB**	**21 Balai**	**100,000,000**	Kab. Kampar
2	14	03	202	01	~	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Kampar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	50 Organisasi	50,000,000	~	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Kampar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	50 Organisasi	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	202	02	~	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Kampar	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 unit	1,261,333,697	~	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Kampar	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 unit	1,261,333,697	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
2	14	03	202	03	~	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	21 Laporan	50,000,000	~	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	21 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

2	14	03	202	04	~	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Kampar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	250 Orang	1,300,015,000	~	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Kampar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	250 Orang	1,300,015,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**Jumlah tenaga pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil**	**42 Orang**	**734,500,000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**Jumlah tenaga pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil**	**42 Orang**	**734,500,000**	Kab. Kampar
2	14	03	203	01	~	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	82,500,000	~	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	82,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	203	02	~	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kampar	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	42 Orang	38,000,000	~	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kampar	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	42 Orang	38,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	203	03	~	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42 Orang	400,000,000	~	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42 Orang	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	203	06	~	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kampar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	82,500,000	~	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kampar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	82,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	203	10	~	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Kampar	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50 orang	122,000,000	~	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Kampar	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50 orang	122,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	203	11	~	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	972,107,900	~	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	972,107,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	14	03	203	12	~	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	60 Orang	92,000,000	~	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	60 Orang	92,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**14**	**03**	**204**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		Kab. Kampar	**Persentase Tercapainya peran kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kersertaan ber- KB bagi masyarakat**	**100%**	**86,900,000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		Kab. Kampar	**Persentase Tercapainya peran kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kersertaan ber- KB bagi masyarakat**	**100%**	**86,900,000**	Kab. Kampar

2	14	03	204	01	~	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Kampar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	86,900,000	~	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Kampar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	86,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	03	204	03	~	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Kampar	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	38 Kampung	655,500,000	~	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Kampar	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	38 Kampung	655,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun(ASFR 15-19 th)**	**20 ASFR**	**1,100,000,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun(ASFR 15-19 th)**	**20 ASFR**	**1,100,000,000**	
2	**14**	**04**	**201**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		Kab. Kampar	**Jumalah remaja yang di beri pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan usia Muda melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja**	**10 orang**	**700,000,000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		Kab. Kampar	**Jumalah remaja yang di beri pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan usia Muda melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja**	**10 orang**	**700,000,000**	Kab. Kampar
2	14	04	201	04	~	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kampar	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 Orang	300,000,000	~	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kampar	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 Orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	14	04	201	07	~	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	300,000,000	~	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	300,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusu Non Fisik
2	14	04	201	08	~	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 laporan	400,000,000	~	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 laporan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

2	**14**	**04**	**202**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Kab. Kampar	**Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan supervisi ke kecamatan**	**1 laporan**	**400,000,000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Kab. Kampar	**Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan supervisi ke kecamatan**	**1 laporan**	**400,000,000**	Kab. Kampar
2	14	04	202	04	~ Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 laporan	400,000,000	~ Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 laporan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**3,607,996,370**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**4,107,996,370**	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Kab. Kampar**	**Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi**	**27 Orang**	**400,000,000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi**	**27 Orang**	**400,000,000**	
2	**08**	**02**	**201**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Kampar**	**jumlah Perangat daerah yang mengikuti Pelatihan PPRG bagi perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG**	**27 Perangkat Daerah**	**60,000,000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**jumlah Perangat daerah yang mengikuti Pelatihan PPRG bagi perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG**	**27 Perangkat Daerah**	**60,000,000**	**Kab. Kampar**
2	08	02	201	03	~ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Kampar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	60,000,000	~ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**02**	**202**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan**	**Kab. Kampar**	**banyaknya Perempuan berpolitik**	**50 Orang**	**60,000,000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**banyaknya Perempuan berpolitik**	**50 Orang**	**60,000,000**	**Kab. Kampar**
2	08	02	202	02	~ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Kampar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	60,000,000	~ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**02**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Kampar	**jumlah perempuan yang di data dengan Pendidikan dan Keterampilan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dan menciptakan kesempatan kerja untuk menunjang ekonomi keluarga**	**21 Orang**	**280,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**jumlah perempuan yang di data dengan Pendidikan dan Keterampilan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dan menciptakan kesempatan kerja untuk menunjang ekonomi keluarga**	**21 Orang**	**280,000,000**	Kab. Kampar

2	08	02	203	01	~	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	180,000,000	~	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	08	02	203	03	~	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	100,000,000	~	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal penanganan KDRT di desa**	**11 Desa**	**250,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal penanganan KDRT di desa**	**11 Desa**	**250,000,000**	
2	**08**	**03**	**202**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**jumlah desa Penyedia layanan yang sudah terbentuk untuk Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perlakuan yang salah**	**11 Desa**	**100,000,000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**jumlah desa Penyedia layanan yang sudah terbentuk untuk Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perlakuan yang salah**	**11 Desa**	**100,000,000**	Kab. Kampar
2	08	03	202	01	~	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	132 Orang	100,000,000	~	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	132 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**03**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**persentase korban kekerasan pada perempuan dan anak berkurang**	**50%**	**150,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**persentase korban kekerasan pada perempuan dan anak berkurang**	**50%**	**150,000,000**	Kab. Kampar
2	08	03	203	02	~	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	250 Orang	150,000,000	~	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	250 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**Jumlah laporan untuk Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin**	**21 laporan**	**244,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**		**Jumlah laporan untuk Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin**	**21 laporan**	**244,000,000**	
2	**08**	**04**	**201**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Kab. Kampar**	**Berkembangnya jumlah usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha merajut di kabupaten kampar dalam menunjang ekonomi keluarga**	**5 kel**	**160,000,000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Berkembangnya jumlah usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha merajut di kabupaten kampar dalam menunjang ekonomi keluarga**	**5 kel**	**160,000,000**	Kab. Kampar

2	08	04	201	03	~	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21 laporan	160,000,000	~	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21 laporan	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**04**	**202**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**Persentase pembinaan peran dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi dalam mensejahterakan Keluarga**	**100%**	**84,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pembinaan peran dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi dalam mensejahterakan Keluarga**	**100%**	**84,000,000**	Kab. Kampar
2	08	04	202	02	~	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	84,000,000	~	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	84,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	08	04	202	03	~	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,153,509,805	~	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,153,509,805	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Kab. Kampar**	**Jumlah laporan mencapaian APE di setiap kecamatan**	**21 laporan**	**44,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**		**Jumlah laporan mencapaian APE di setiap kecamatan**	**21 laporan**	**44,000,000**	
2	**08**	**05**	**201**		**Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**Jumlah dokumen sebagai pendukung dalamengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah**	**21 dokumen**	**44,000,000**	**Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen sebagai pendukung dalamengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah**	**21 dokumen**	**44,000,000**	Kab. Kampar
2	08	05	201	01	~	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	21 dokumen	44,000,000	~	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	21 dokumen	44,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Kab. Kampar**	**Pesentasi dalam Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan**	**32%**	**2,075,000,000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Pesentasi dalam Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan**	**32%**	**2,575,000,000**	
2	**08**	**06**	**201**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	**21 FAN**	**60,000,000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	**21 FAN**	**60,000,000**	Kab. Kampar
2	08	06	201	02	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	60,000,000	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

2	**08**	**06**	**202**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Kampar	**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	**21 FAN**	**2,015,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	**21 FAN**	**2,515,000,000**	Kab. Kampar
2	08	06	202	01	~ Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang	300,000,000	~ Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	08	06	202	03	~ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 dokumen	215,000,000	~ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	21 dokumen	215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	08	06	202	04	~ Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1,500,000,000	~ Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Jumlah PATBM di tingkat Desa**	**80 Orang**	**594,996,370**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Jumlah PATBM di tingkat Desa**	**80 Orang**	**594,996,370**	
2	**08**	**07**	**201**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kampar	**Terlindunginya Perempuan dan anak terhadap tindak Kekerasan**	**100%**	**100,000,000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlindunginya Perempuan dan anak terhadap tindak Kekerasan**	**100%**	**100,000,000**	Kab. Kampar
2	08	07	201	02	~ Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	~ Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	**08**	**07**	**202**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Kampar	**Jumlah desa penyedia layanan bagi anak untuk mengurangi Angka kekerasan terhadap anak**	**10 Desa**	**100,000,000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah desa penyedia layanan bagi anak untuk mengurangi Angka kekerasan terhadap anak**	**10 Desa**	**100,000,000**	Kab. Kampar
2	08	07	202	02	~ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 layanan	100,000,000	~ Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 layanan	100,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	08	07	202	04	~ Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	100,000,000	~ Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

2	**08**	**07**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		Kab. Kampar	**persentase Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang**	**50%**	**394,996,370**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**persentase Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang**	**50%**	**394,996,370**	Kab. Kampar
2	08	07	203	02	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	394,996,370	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	394,996,370	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)
JUMLAH										**12,769,920,940**					**13,498,458,395**		

1 **Dalam Penginputan Renja untuk Perkiraan Maju Ada sebagian SUB. Kegiatan yang dinaikkan sebesar 10%**

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam Undang – undang Nomor : 10 Tahun 1992 pengertian Keluarga Berencana adalah meningkatkan kepedulian dan peranserta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sedangkan pada Undang – Undang Nomor : 52 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keluarga Berencana (KB) adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Permasalahan lain yang dihadapi berkaitan dengan tingkat kelahiran yaitu angka kelahiran (TFR) berdasarkan hasil SDKI menunjukkan peningkatan dari 2,1 pada tahun 2002/2003 menjadi 2,8 pada tahun 2017. Dan 2,7 pada tahun 2018, sebagai salah satu program social dasar yang sangat penting, pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2035.

Program pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah dalam penyelenggaraan Negara selama dalam kurun waktu 2015-2035 yang salah satunya adalah Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kebijakan strategi meliputi 3 periotitas utama (1) Revitalisasi Program KB, (2) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dan (3) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat.

Lampiran 1.N. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian urusan pemerintah bidang Pengendalian penduduk dan KB

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2.	3.	4.	5.
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.	a. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan pemerintah dg pemerintah daerah provinsi dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk.	a. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah prov. dg pemerintah daerah kab/kota dlm rangka pengendalian kuantitas penduduk.
		b. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.	c. Pemetaanperkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah prov.	b. Pemetaanperkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah kab/kota.
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Penyusunan desain progr. & pengelolaan advokasi, KIE	a. Pengembangan desain progr. pengelolaan	a. Pelaksanaan advokasi, KIE pengendalian penduduk & KB sesuai kearifan budaya lokal.

		pengendalian penduduk	& pelaksanaan advokasi, KIE pengendalian penduduk & KB. sesuai kearifan budaya lokal.	
		b. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).	b. Pemberdayaan& peningkatan peran serta OrmasTkt prov. dlmpengelolaan pelayanan & pembinaan kesertaan ber-KB.	b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
		c. Pengelolaan & penyediaan alat dan obat kontrasepsi utk kebutuhan PUS nasional.		c. Pengendalian & pendistribusian kebutuhan alat & obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kab/kota.
		d. Pengelolaan & pengendalian		d. Pemberdayaan & peningkatan peran serta Ormas

		sistem informasi keluarga. e. Pemberdayaan & peningkatan peran serta OrmasTkt nasional dlm pengendalian pelayanan & pembinaan kesertaan ber-KB.		Tktkab/kota dlm pelaksanaan pelayanan & pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	a. Pengembangan desain prog. pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga	a. Pengelolaan pelaksanaan desain prog. pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga	a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga
		b. Pemberdayaan & peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dlm pembangunan keluarga melalui	b. Pemberdayaan& peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat	b. Pelaksanaan & peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab./kota dlm pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan &kesejahteraan keluarga.

		ketahanan & kesejahteraan keluarga.	provinsi dlm pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan & kesejahteraan keluarga. c. Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	
4.	Pemberdayaa Perempuan	a. Meningkatkan Kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang b. Meningkatkan pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan Meningkatkan kapasitas	a. Peningkatan kualitas hidup perempuan d. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak c. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

		kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan		

Selain itu, penerapan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuang, dan perlindungan anak juga didukung oleh : 1. Peningkatan kualitas manajemen dan tatakelola pembangunan dalam kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. 2. Sistem manajemen data dan informasi tentang gender dan anak. 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sector, program, stake holder dan institusi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didapat dari isu-isu yang ada di DPPKBP3A Kabupaten Kampar sebagai berikut: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

I. Meningkatkan kualitas Pendidikan Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan adalah dengan program keluarga berencana. Program keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana

merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T yaitu terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun) (Kemenkes RI, 2017).

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Program yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka kesejahteraan perempuan. Namun jika diperhatikan program tersebut belum memberikan implikasi kepada perempuan secara menyeluruh. Program-program yang dilakukan cenderung ke hit and run belum direncanakan secara jelas. Persoalan yang dihadapi perempuan perlu mendapatkan solusi, yaitu berupa pemberdayaan. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan. Pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas. Salah satu bidang yang menarik untuk dibahas adalah pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2022 **adalah kesesuain Visi Kabupaten Kampar 2022," Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025. Misi 3 "Meningkatkan kualitas sumber daya yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan"**

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat dirumuskan melalui gambaran yang lebih jelas dengan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran sebagimana dimuat pada tabel dibawah ini:

Tujuan dan Sasaran DPPKBP3A

NO	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk dan KB	• TFR (Total Fertility Rate) • Angka Kelahiran padaRemaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) • Anmet Need (Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi) • Persentase peserta KB Aktif (MKJP) • Stanting
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Indeks Pembangunan Gender (IPG) • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) • Persentase Perempuan korban kekerasan • Persentase anak yang membutuhkan perlindunga khusus • Persentase lembaga penyedia layanan khusus

sehingga dan di tuangkan dalam Program/Kegiatan pada tahun 2024 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar sebagai berikut; .

1. Program Pengendalian Penduduk

A. Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlihat dari lajun Pertumbuhan Penduduk, sehingga harus dikendalikan melalui:

❖ Membuat Grand Design Kabupaten Kampar

❖ Tersedianya data Pendataan Keluarga

- ❖ Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan
- ❖ Tersedianya data rumah dataku di Kampung KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

A. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Penegdalian Penduduk dan KB sesuai dengan kearifan budaya local melalui peningkatan intensitas penyuluhan dengan cara:

- ❖ Memberikan reward kepada masyarakat yang telah ikut menyukseskan program Keluarga Berencana.
- ❖ Promosi, Informasi dan Edukasi tentang program Bangga Kencana
- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana bagi Balai Penyuluh KB
- ❖ Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

B. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- ❖ Tersedianya operasional Balai Penyuluh KB

C. Mengembangkan jejaring kerjasama pada kelompok-kelompok dan kader KB, PPKBD, Toga/Toma dan lembaga mitra terkait

D. Kegiatan Pengendalian dan Pendidtribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota melalui pelayanan KB masyarakat dengan cara:

- ❖ Pengendalian dan Pendistribusian Alkon
- ❖ Meningkatkan jumlah kepesertaan masyarakat ber KB;
- ❖ Meningkatkan jumlah kepesertaan KB Aktif MKJP;
- ❖ Meningkatkan jumlah kepesertaan KB Aktif Pria (MOP);
- ❖ Tersedianya sarana penunjang Pelayanan KB (FAskes)
- ❖ Peningkatan Kompetensi bagi tenaga pelayanan KB
- ❖ Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu masyarakat melalui meningkatkan sosialisasi dan pemahaman hak reproduksi individu;

E. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakat tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB melaui kampung KB dengan cara:

- ❖ Meningkatkan kualitas SDM seperti kader BKB, UPPKS dan BKR serta PPKS
- ❖ Penyuluhan dan Pembinaan dikampung KB

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

A. Pelaksanaan Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui keluarga sejahtera dengan cara:

- ❖ Peningkatan Komptensi bagi kader kelompok kegiatan (BKB,BKR, UPPKS)
- ❖ Sosialisasi dan pembinaan PIK R dalam pendewasaan usia perkawinan
- ❖ Sosialisasi dan promosi untuk pencegahan pada remaja dan ibu hamil

B. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui sosialisasi dan promosi tentang ajang prsetasi remaja.

4. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota

A. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota melalui Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan Meningkatkan pengetahuan SDM Perencana OPD ;

B. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota melalui Sosialisasi pada perempuan yang berpolitik, hukum, social dan Ekonomi

C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota melalui:

❖ peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

5. Program Perlindungan Perempuan

A. Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota melalui Sosialisasi PKDRT di tiap kecamatan maupun Desa

B. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/Kota melalui kegiatan pencegahan kekerasan dan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan hasil verifikasi dar Kementriaan PPPA Jakarta bahwa sub kegiatan dipisah, jadi sub kegiatan tidak di pakai

6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

A. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujdkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui pelatihan bagi perempuan sebagai kepala Keluarga dan perempuan putus sekolah

B. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota melalui:

❖ Meningkatkan SDM manusia terutama perempuan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan tentang peningkatan peran perempuan di pedesaan

❖ Melakukan pembinaan pada organisasi perempuan seperti TP-PKK , DWP, IKKD dan BKMT

7. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak

A. Pengumpulan, Pengolahan analisis dan penyajian Data Gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data untuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan Peran pada Pimpinan Kementerian atau Lembaga dan

Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

8. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

A. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

B. Penguatan dan Pengembagan Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota melalui:

- ❖ Meningkatkan kapasitas forum Anak;
- ❖ Mengembangkan system Informasi Gender dan Anak;

9. Program Perlindungan Khusus Anak

A. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota melalui kegiatan di UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam rangka pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

B. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui:

- ❖ Pendampingan pada anak yang memerlukan perlindungan khusus anak pada UPTD PPA.
- ❖ Perlindungan khusus pada perempuan dan anak melalui sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT).

C. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang diusulkan pada APBD tahun 2024 diharapkan akan dapat mendorong dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar, dengan komitmen yang tinggi akan bertekad melaksanakan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menunjang program tersebut yang ditandai dengan peningkatan alokasi anggaran setiap tahunnya.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review bulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan rencana
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap Bidang dan Seksi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja dan SDM
3. Aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kampar terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan disusun sebagai dasar untuk melaksanakan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bapak Bupati Kampar. semoga kiranya berkenan untuk merealisasikannya Usulan APBD Tahun Anggaran 2024. Atas pertimbangan dan berkenannya Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAMPAR

Kode Rekening						Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (out came) Kegiatan (output)	Rencangan Tahun 2024				Cacatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	4	5	6	7	8	9	9	10
2	**14**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**9,161,924,570**				**9,390,462,025**
2	**14**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**6,344,024,570**		**Kab. Kampar**	**100%**	**6,572,562,025**
2	**14**	**01**	**201**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian Program dan Anggaran Perangkat daerah**	Kab. Kampar	**100%**	**250,000,000**		Kab. Kampar	**100%**	**240,000,000**
2	14	01	201	01	~	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	10 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	10 Dokumen	60,000,000
2	14	01	201	02	~	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	2 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 Dokumen	60,000,000
2	14	01	201	03	~	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	2 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 Dokumen	
2	14	01	201	04	~	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	
2	14	01	201	05	~	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	2 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 Dokumen	60,000,000
2	**14**	01	201	06	~	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	12 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	12 Laporan	-
2	14	01	201	07	~	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	4 Laporan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	4 Laporan	60,000,000
2	**14**	**01**	**202**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dibayarkan Gaji dan Tunjangan**	Kab. Kampar	**12 Bulan**	**3,404,078,424**		Kab. Kampar	**12 Bulan**	**3,404,078,424**
2	14	01	202	01	~	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	37 Orang/12 Bulan	3,404,078,424	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	37 Orang/12 Bulan	3,404,078,424

2	**14**	**01**	**205**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan/pelatihan**	**Kab. Kampar**	**3 Orang**	**13,500,000**		Kab. Kampar	**3 Orang**	**13,500,000**
2	14	01	205	11	~	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	3 Orang	13,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	3 Orang	13,500,000
2	14	**01**	**206**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah terealisasikan Program dan Kegiatan**	**Kab. Kampar**	**1 Paket**	**726,200,000**		Kab. Kampar	**1 Paket**	**726,200,000**
2	14	01	206	01	~	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Paket	2,500,000
2	14	01	206	02	~	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Paket	100,000,000
2	14	01	206	04	~	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	90,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Paket	90,500,000
2	14	01	206	05	~	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	24,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Paket	24,000,000
2	14	01	206	06	~	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Dokumen	9,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	9,200,000
2	14	01	206	09	~	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	50 Laporan	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	50 Laporan	500,000,000
2	14	01	206	11	~	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen			Kab. Kampar	1 Dokumen	
2	14	**01**	**207**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor**	**Kab. Kampar**	**50 unit**	**305,000,000**		Kab. Kampar	**50 unit**	**543,537,455**
2	**14**	01	207	01	~	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kampar	2 Unit	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 Unit	60,000,000
2	14	01	207	02	~	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kampar	3 Unit			Kab. Kampar	3 Unit	
2	14	01	207	05	~	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Paket	55,000,000
2	**14**	01	207	06	~	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	6 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	6 Unit	
2	14	01	207	09	~	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	23 Unit	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	23 Unit	250,000,000
2	14	01	207	10	~	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	50 unit	178,537,455	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	50 unit	178,537,455

2	14	01	207	11	~	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	50 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	50 Unit	
2	**14**	**01**	**208**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa tenaga harian lepas**	Kab. Kampar	**12 Bulan**	**1,162,646,146**		**Kab. Kampar**	**12 Bulan**	**1,162,646,146**
2	14	01	208	02	~	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kampar	12Laporan	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	12Laporan	105,000,000
2	14	01	208	03	~	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	12 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	12 Laporan	
2	14	01	208	04	~	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	12 Laporan	1,057,646,146	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	12 Laporan	1,057,646,146
2	14	**01**	**209**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Mobil Operasional**	Kab. Kampar	**6 Unit**	**482,600,000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)**	Kab. Kampar	**6 Unit**	**482,600,000**
2	14	01	209	01	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kampar	6 Unit	37,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	6 Unit	37,500,000
2	14	01	209	02	~	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kampar	6 Unit	152,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	6 Unit	152,000,000
2	14	01	209	06	~	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kampar	6 Unit	30,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	6 Unit	30,100,000
2	14	01	209	09	~	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kampar	1 Unit	263,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Unit	263,000,000
2	**14**	**02**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Jumlah dokumen Data Kependudukan**	**Kab. Kampar**	**1 Dokumen**	**263,000,000**			**1 Dokumen**	**263,000,000**
2	**14**	**02**	**202**			**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase tercapaianya Program Bangga Kencana**	Kab. Kampar	**100%**	**263,000,000**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)**	Kab. Kampar	**100%**	**263,000,000**
2	14	02	202	02	~	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Kampar	1 Dokumen	263,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	263,000,000
2	**14**	**03**				**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Capaian TFR, UNMEETNEETD, mCPR**	**Kab. Kampar**	**2.74/3,08**	**1,454,900,000**			**2.74/3,08**	**1,454,900,000**

2	**14**	**03**	**201**			**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah balai penyuluh KB manajemen dan KIE**	Kab. Kampar	**21 Balai**	**466,000,000**		Kab. Kampar	**21 Balai**	**466,000,000**
2	14	03	201	01	~	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kab. Kampar	2 Organisasi	166,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 Organisasi	166,000,000
2	14	03	201	04	~	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Kampar	1 Dokumen	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	300,000,000
2	14	03	201	05	~	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Kampar	2 laporan	**67,500,000**	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 laporan	**67,500,000**
2	14	03	201	07	~	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Kampar	5 laporan	1,011,300,001	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kampar	5 laporan	1,011,300,001
2	14	03	201	08	~	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Kampar	1 laporan	67,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 laporan	67,500,000
2	**14**	**03**	**202**			**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Balai PLKB/PKB**	Kab. Kampar	**21 Balai**	-		Kab. Kampar	**21 Balai**	
2	14	03	202	01	~	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Kampar	50 Organisasi		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	50 Organisasi	
2	14	03	202	02	~	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kab. Kampar	1 unit	1,261,333,697	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Kampar	1 unit	1,261,333,697

2	14	03	202	03	~	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Kampar	21 Laporan		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	21 Laporan	
2	14	03	202	04	~	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Kampar	250 Orang	1,300,015,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kampar	250 Orang	1,300,015,000
2	**14**	**03**	**203**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Wawasan Kompeten Terlaksananya tenaga pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil**	Kab. Kampar	**1 Keg**	**834,500,000**		Kab. Kampar	**1 Keg**	**834,500,000**
2	14	03	203	01	~	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Kampar	12 Laporan	82,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kampar	12 Laporan	82,500,000
2	14	03	203	02	~	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kampar	42 Orang		PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	42 Orang	
2	14	03	203	03	~	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Kampar	42 Orang	538,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	42 Orang	538,000,000
2	14	03	203	06	~	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Kampar	1 unit	82,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 unit	82,500,000
2	14	03	203	10	~	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Kampar	50 orang	122,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	50 orang	122,000,000
2	14	03	203	11	~	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Kampar	1 laporan	972,107,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kampar	1 laporan	
2	14	03	203	12	~	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Kampar	60 Orang	92,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	60 Orang	92,000,000

2	**14**	**03**	**204**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Persentase Tercapainya peran kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kersertaan ber- KB bagi masyarakat**	Kab. Kampar	**100%**	**86,900,000**		Kab. Kampar	**100%**	**86,900,000**
2	14	03	204	01	~ Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Kampar	3 Organisasi	86,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	3 Organisasi	86,900,000
2	14	03	204	03	~ Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kab. Kampar	38 Kampung	655,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kampar	38 Kampung	655,500,000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun(ASFR 15-19 th)**		**20 ASFR**	**1,100,000,000**			**20 ASFR**	**1,100,000,000**
2	**14**	**04**	**201**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumalah remaja yang di beri pelatihan tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan usia Muda melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja**	Kab. Kampar	**10 orang**	**700,000,000**		Kab. Kampar	**10 orang**	**700,000,000**
2	14	04	201	04	~ Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kampar	21 Orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	21 Orang	300,000,000
2	14	04	201	07	~ Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Kampar	1 laporan		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusu Non Fisik	Kab. Kampar	1 laporan	

2	14	04	201	08	~	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Kampar	1 laporan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 laporan	400,000,000
2	**14**	**04**	**202**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan supervisi ke kecamatan**	Kab. Kampar	**1 laporan**	**400,000,000**		Kab. Kampar	**1 laporan**	**400,000,000**
2	14	04	202	04	~	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Kampar	1 laporan	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 laporan	400,000,000
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**3,607,996,370**				**4,107,996,370**
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi**	**Kab. Kampar**	**27 Orang**	**400,000,000**			**27 Orang**	**400,000,000**
2	**08**	**02**	**201**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**jumlah Perangat daerah yang mengikuti Pelatihan PPRG bagi perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG**	**Kab. Kampar**	**27 Perangkat Daerah**	**60,000,000**		**Kab. Kampar**	**27 Perangkat Daerah**	**60,000,000**
2	08	02	201	03	~	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	27 Perangkat Daerah	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	27 Perangkat Daerah	60,000,000
2	**08**	**02**	**202**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**banyaknya Perempuan berpolitik**	**Kab. Kampar**	**50 Orang**	**60,000,000**		**Kab. Kampar**	**50 Orang**	**60,000,000**

2	08	02	202	02	~	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	5 Organisasi	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	5 Organisasi	60,000,000
2	**08**	**02**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**jumlah perempuan yang di data dengan Pendidikan dan Keterampilan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dan menciptakan kesempatan kerja untuk menunjang ekonomi keluarga**	Kab. Kampar	**21 Orang**	**280,000,000**		Kab. Kampar	**21 Orang**	**280,000,000**
2	08	02	203	01	~	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Kampar	2 lembaga	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 lembaga	180,000,000
2	08	02	203	03	~	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kampar	1 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	100,000,000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Meningkatnya Pemahaman dan pengetahuan Satgas PKDRT dalam hal penanganan KDRT di desa**		**11 Desa**	**250,000,000**			**11 Desa**	**250,000,000**
2	**08**	**03**	**202**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**jumlah desa Penyedia layanan yang sudah terbentuk untuk Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai perlakuan yang salah**	Kab. Kampar	**11 Desa**	**100,000,000**		Kab. Kampar	**11 Desa**	**100,000,000**
2	08	03	202	01	~	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Kampar	132 Orang	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	132 Orang	100,000,000
2	**08**	**03**	**203**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**persentase korban kekerasan pada perempuan dan anak berkurang**	Kab. Kampar	**50%**	**150,000,000**		Kab. Kampar	**50%**	**150,000,000**
2	08	03	203	02	~	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Kampar	250 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	250 Orang	150,000,000

2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Jumlah laporan untuk Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan bid. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai jenis kelamin**		**21 laporan**	**244,000,000**			**21 laporan**	**244,000,000**
2	**08**	**04**	**201**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Berkembangnya jumlah usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha merajut di kabupaten kampar dalam menunjang ekonomi keluarga**	**Kab. Kampar**	**5 kel**	**160,000,000**		Kab. Kampar	**5 kel**	**160,000,000**
2	08	04	201	03	~ Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	21 laporan	160,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	21 laporan	160,000,000
2	**08**	**04**	**202**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pembinaan peran dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi dalam mensejahterakan Keluarga**	Kab. Kampar	**100%**	**84,000,000**		Kab. Kampar	**100%**	**84,000,000**
2	08	04	202	02	~ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	10 orang	84,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	10 orang	84,000,000
2	08	04	202	03	~ Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	1 Dokumen	2,153,509,805	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	2,153,509,805
2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah laporan mencapaian APE di setiap kecamatan**	**Kab. Kampar**	**21 laporan**	**44,000,000**			**21 laporan**	**44,000,000**
2	**08**	**05**	**201**		**Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen sebagai pendukung dalamengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah**	Kab. Kampar	**21 dokumen**	**44,000,000**		Kab. Kampar	**21 dokumen**	**44,000,000**
2	08	05	201	01	~ Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Kampar	21 dokumen	44,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	21 dokumen	44,000,000
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Pesentasi dalam Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan**	**Kab. Kampar**	**32%**	**2,075,000,000**			**32%**	**2,575,000,000**

2	**08**	**06**	**201**			**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	Kab. Kampar	**21 FAN**	**60,000,000**		Kab. Kampar	**21 FAN**	**60,000,000**
2	08	06	201	02	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	2 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	2 Dokumen	60,000,000
2	**08**	**06**	**202**			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup**	**Terwujudnya lembaga yang terdiri dari anak-anak dan mampu menampung aspirasi anak-anak**	Kab. Kampar	**21 FAN**	**2,015,000,000**		Kab. Kampar	**21 FAN**	**2,515,000,000**
2	08	06	202	01	~	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	21 orang	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	21 orang	300,000,000
2	08	06	202	03	~	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Kab. Kampar	21 dokumen	215,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	21 dokumen	215,000,000
2	08	06	202	04	~	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	1 Dokumen	1,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	2,000,000,000
2	**08**	**07**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Jumlah PATBM di tingkat Desa**		**80 Orang**	**594,996,370**			**80 Orang**	**594,996,370**
2	**08**	**07**	**201**			**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlindunginya Perempuan dan anak terhadap tindak Kekerasan**	Kab. Kampar	**100%**	**100,000,000**		Kab. Kampar	**100%**	**100,000,000**
2	08	07	201	02	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kampar	1 Dokumen	100,000,000
2	**08**	**07**	**202**			**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah desa penyedia layanan bagi anak untuk mengurangi Angka kekerasan terhadap anak**	Kab. Kampar	**10 Desa**	**100,000,000**		Kab. Kampar	**10 Desa**	**100,000,000**
2	08	07	202	02	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	10 layanan	100,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Kampar	10 layanan	100,000,000

2	08	07	202	04	~	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	10 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	10 Dokumen	100,000,000
2	**08**	**07**	**203**			**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang**	Kab. Kampar	**50%**	**394,996,370**		Kab. Kampar	**50%**	**394,996,370**
2	08	07	203	02	~	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	1 dokumen	394,996,370	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Kab. Kampar	1 dokumen	394,996,370
JUMLAH										**12,769,920,940**				**13,498,458,395**

1 **Dalam Penginputan Renja untuk Perkiraan Maju Ada sebagian SUB. Kegiatan yang dinaikkan sebesar 10%**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KAMPAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.607.996.370,00**	**5.327.499.200,00**	**6.052.265.900,00**	**2.444.269.530,00**							**4.454.836.370,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase pertisipasi perempuan di lembaga pemerintahan**				**20 Persen**	**20 Persen**	**400.000.000,00**	**3.413.020.900,00**	**3.959.656.400,00**	**0,00**							**400.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksannya Pelatihan PPRG bagi perencana SKPD dan Pendampingan Penyususnan ARG*				36 Orang	36 Orang	60.000.000,00	44.798.100,00	44.798.100,00	-15.201.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi Perencanaan SKPD dan Pendampingan Penyusunan ARG		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	60.000.000,00	44.798.100,00	44.798.100,00	-15.201.900,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tercapainya Sosialisasi Perempuan Berpolitik*				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	299.806.500,00	484.805.500,00	424.805.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Tercapainnya sosialisasi Perempuan Berpolitik		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	8 Organisasi	60.000.000,00	299.806.500,00	484.805.500,00	424.805.500,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya Pendidikan dan Keterampilan peran perempuan sebagai kepalarumah tanggadan menciptakan kesempatan untuk menunjang ekonomi keluarga*				21 Orang	21 Orang	280.000.000,00	3.068.416.300,00	3.430.052.800,00	3.150.052.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Perlidungan Perempuan		280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi				1 Lembaga	1 Lembaga	180.000.000,00	2.948.416.300,00	3.310.052.800,00	3.130.052.800,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**				**100 Persen**	**100 Persen**	**250.000.000,00**	**446.017.200,00**	**446.017.200,00**	**0,00**							**250.000.000,00**	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya perlindungan permpuan dan anak berbagai perlakuanyang salah*				11 Desa	11 Desa	100.000.000,00	357.617.200,00	357.617.200,00	257.617.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Meningkatnya Perlidungan Perempuan dan anak berbagai perlakuan yang salah		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				10 Orang	50 Orang	100.000.000,00	56.017.200,00	56.017.200,00	-43.982.800,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Layanan	0,00	301.600.000,00	301.600.000,00	301.600.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Perlindungan Perempuan*				1 Keg	1 Keg	150.000.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	-61.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	-61.600.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan**				**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**244.000.000,00**	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**	**0,00**							**244.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Berkembangnya Jumlah usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha merajut di kabupaten kampar dalam menunjang ekonomi keluarga*				5 Kel	5 Kel	160.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-40.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Berkembang nya Jumlah usaha ekonomi produktif dalam bidang usaha merajut di kabupaten kampardalam menunjang ekonomi keluarga		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksannya pembinaan peran dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi dalam mensejahterakan keluarga*				1 Keg	1 Keg	84.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-14.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya pembinaan peran dan partisipasi perempuan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi dalam mensejahterakan keluarga		84.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	84.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			84.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**tercapainya APE**				**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**44.000.000,00**	**52.243.200,00**	**129.469.700,00**	**0,00**							**44.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pemenuhan Hak Anak*				1 Keg	1 Keg	44.000.000,00	52.243.200,00	129.469.700,00	85.469.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Pemenuhan hak anak		44.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	52.243.200,00	129.469.700,00	85.469.700,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			44.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase pemenuhan hak anak**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.075.000.000,00**	**412.750.000,00**	**412.750.000,00**	**500.000.000,00**							**2.575.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pemenuhan Hak Anak*				21 FAN	21 FAN	60.000.000,00	37.896.000,00	37.896.000,00	-22.104.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Pemenuhan hak anak		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	37.896.000,00	37.896.000,00	-22.104.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terwujudnya Lembaga yang terdisri dari anak anak yang mampu menampung aspirasi anak anak*				21 FAN	21 FAN	2.015.000.000,00	374.854.000,00	374.854.000,00	-1.640.146.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terwujudnya Lembaga yang terdisri dari anak anak yang mampu menampung aspirasi anak anak		2.515.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	21 Orang	300.000.000,00	189.987.100,00	189.987.100,00	-110.012.900,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	215.000.000,00	128.345.700,00	128.345.700,00	-86.654.300,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			215.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	56.521.200,00	56.521.200,00	-1.443.478.800,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			2.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.607.996.370,00**	**5.327.499.200,00**	**6.052.265.900,00**	**2.444.269.530,00**							**4.454.836.370,00**	
1.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak**				**100 Persen**	**100 Persen**	**594.996.370,00**	**563.410.000,00**	**598.410.000,00**	**346.840.000,00**							**941.836.370,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlindunginya perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlindunginya perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan		446.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**3.607.996.370,00**	**5.327.499.200,00**	**6.052.265.900,00**	**2.444.269.530,00**							**4.454.836.370,00**	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				-	1 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			346.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Berkurangnya Angka kekeraan terhadap anak*				10 Desa	10 Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Berkurangnya Angka kekeraan terhadap anak		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang*				1 Keg	1 Keg	394.996.370,00	433.410.000,00	468.410.000,00	73.413.630,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Angka Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang		394.996.370,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	394.996.370,00	433.410.000,00	468.410.000,00	73.413.630,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			394.996.370,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Urusan Pemerintah Daerah**				**1 Tahun**	**1 Tahun**	**6.344.024.570,00**	**8.242.750.762,00**	**9.324.681.769,00**	**-10.000.000,00**							**6.334.024.570,00**	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan barang milik daerah*				1 Tahun	1 Tahun	305.000.000,00	258.497.900,00	324.402.600,00	19.402.600,00			-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan	Pengadaan barang milik daerah		305.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	250.057.900,00	315.962.600,00	315.962.600,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tercapainya penyususnan dokumen perangkat daerah*				1 Tahun	1 Tahun	250.000.000,00	157.795.500,00	162.891.700,00	-87.108.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Tercapainya penyususnan dokumen perangkat daerah		240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	66.816.800,00	66.816.800,00	16.816.800,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.331.700,00	55.427.900,00	5.427.900,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	40.647.000,00	40.647.000,00	-9.353.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Gaji dan Tunjangan ASN*				1 Tahun	1 Tahun	3.404.078.424,00	5.413.996.534,00	5.720.046.641,00	2.315.968.217,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Gaji dan Tunjangan ASN		3.404.078.424,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.404.078.424,00	5.413.996.534,00	5.720.046.641,00	2.315.968.217,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			3.404.078.424,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisai Peraturan dan Perundang undangan*				1 Tahun	1 Tahun	13.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Jumlah Orang yang Mengikuti sosialisai Peraturan dan Perundang undangan		13.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	13.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			13.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Tahun	1 Tahun	726.200.000,00	1.120.187.700,00	1.817.187.700,00	1.090.987.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Administrasi Umum Perangkat Daerah		726.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.416.000,00	2.416.000,00	-84.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	20.784.700,00	20.784.700,00	-79.215.300,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			90.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	17.044.000,00	17.044.000,00	17.044.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.200.000,00	850.000.000,00	1.547.000.000,00	1.537.800.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			9.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	192.543.000,00	192.543.000,00	192.543.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan barang milik daerah*				1 Tahun	1 Tahun	305.000.000,00	258.497.900,00	324.402.600,00	19.402.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Pengadaan barang milik daerah		305.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	55.000.000,00	8.440.000,00	8.440.000,00	-46.560.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**11.787.023.329,00**							**22.227.367.940,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**9.161.924.570,00**	**17.488.652.262,00**	**18.504.678.369,00**	**9.342.753.799,00**							**17.772.531.570,00**	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa tenaga harian lepas*				1 Tahun	1 Tahun	1.162.646.146,00	1.198.093.128,00	1.198.093.128,00	35.446.982,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Tersedianya jasa tenaga harian lepas		1.162.646.146,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	108.666.000,00	108.666.000,00	3.666.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.057.646.146,00	1.089.427.128,00	1.089.427.128,00	31.780.982,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.057.646.146,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Mobil Operasional*				1 Tahun	1 Tahun	482.600.000,00	82.180.000,00	90.060.000,00	-392.540.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Pemeliharaan Mesin, peralatan dan bangunan lainnya		482.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.500.000,00	24.530.000,00	32.410.000,00	-5.090.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			37.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	152.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-112.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			152.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	30.100.000,00	17.650.000,00	17.650.000,00	-12.450.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			30.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	263.000.000,00	0,00	0,00	-263.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			263.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility rate (TFR)**				**20 Persen**	**20 Persen**	**263.000.000,00**	**85.755.000,00**	**85.754.800,00**	**0,00**							**263.000.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Program bangga Kencana*				5 Buku	5 Buku	263.000.000,00	85.755.000,00	85.754.800,00	-177.245.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Program bangga Kencana		263.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	263.000.000,00	85.755.000,00	85.754.800,00	-177.245.200,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			263.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Ratio Akseptor KB**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.454.900.000,00**	**4.933.623.000,00**	**4.933.623.000,00**	**4.721.707.000,00**							**6.176.607.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksannya operasional dan sarana di balai penyuluhan KB manajemen dan KIE*				21 Kec	21 Kec	533.500.000,00	1.451.250.400,00	1.451.250.400,00	917.750.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksannya operasional dan sarana di balai penyuluhan KB manajemen dan KIE		1.887.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	67.500.000,00	7.925.800,00	7.925.800,00	-59.574.200,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			67.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	1.353.600.000,00	1.353.600.000,00	1.353.600.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			1.353.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	42.205.700,00	42.205.700,00	-257.794.300,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	166.000.000,00	47.518.900,00	47.518.900,00	-118.481.100,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			166.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	1.261.775.400,00	1.261.775.400,00	1.261.775.400,00			-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan	-		1.348.478.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB																		
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				-	3 Unit	0,00	261.775.400,00	261.775.400,00	261.775.400,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			416.478.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				-	1 Organisasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			932.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil*				1 Keg	1 Kegiatan	834.500.000,00	1.742.630.900,00	1.742.630.900,00	908.130.900,00			-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan	Wawasan Kompeten Terlaksananya tenaga pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil		2.256.129.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	12 Laporan	0,00	202.800.000,00	202.800.000,00	202.800.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			122.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				21 Orang	20 Orang	538.000.000,00	92.011.600,00	92.011.600,00	-445.988.400,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			538.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	76 Unit	82.500.000,00	78.813.800,00	78.813.800,00	-3.686.200,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			82.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				50 Orang	21 Orang	122.000.000,00	38.557.200,00	38.557.200,00	-83.442.800,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			122.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				-	1 Laporan	0,00	1.299.529.000,00	1.299.529.000,00	1.299.529.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			1.299.529.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				21 Orang	30 Orang	92.000.000,00	30.919.300,00	30.919.300,00	-61.080.700,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			92.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Pelaksanaan Advokasi Keomunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesai Keraifan Budaya lokal*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	86.900.000,00	477.966.300,00	477.966.300,00	391.066.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Pelaksanaan Advokasi Keomunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesai Keraifan Budaya lokal		684.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1 Organisasi	1 Organisasi	86.900.000,00	14.716.300,00	14.716.300,00	-72.183.700,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			86.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				-	1 Laporan	0,00	463.250.000,00	463.250.000,00	463.250.000,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			598.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan Kecamatan yang Melaksanakan Program Pembanguan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan**				**20 Persen**	**21 Kecamatan**	**1.100.000.000,00**	**4.476.581.400,00**	**4.476.581.400,00**	**3.898.900.000,00**							**4.998.900.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Kelompok Kegiatan*				10 Kel	21 Kecamatan	700.000.000,00	175.681.400,00	175.681.400,00	-524.318.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Meningkatnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada renaja (ASFR) menurunya angka pernikahan usia muda melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja		700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	104.563.600,00	104.563.600,00	-295.436.400,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1 Orang	100 Orang	300.000.000,00	71.117.800,00	71.117.800,00	-228.882.200,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan supervisi ke kecamatan*				10 Kel	10 Kel	400.000.000,00	4.300.900.000,00	4.300.900.000,00	3.900.900.000,00			-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan	Tersedianya Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan supervisi ke kecamatan		4.298.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	1 Organisasi	0,00	3.900.900.000,00	3.900.900.000,00	3.900.900.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Bidang Kesehatan Peningkatan Bidang Kesehatan			3.898.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H								**12.769.920.940,00**	**22.816.151.462,00**	**24.556.944.269,00**	**1.139.952.160.243,00**							**22.227.367.940,00**	

BAB V

P E N U T U P

Program dan kegiatan yang diusulkan pada APBD tahun 2023 diharapkan akan dapat mendorong dan mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh DPPKBP3A Kabupaten Kampar, dengan komitmen yang tinggi akan bertekad melaksanakan program Keluarga Berencana, PP dan PA untuk menunjang program tersebut yang ditandai dengan peningkatan alokasi anggaran setiap tahunnya.

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Melakukan proses perencanaan dengan lebih seksama, antara lain dengan menggelar review bulanan, terutama membahas serapan agar sesuai dengan rencana
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua pegawai di setiap Bidang dan Seksi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kerja dan SDM
3. Aktif mengadakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Kampar terkait dengan kegiatan dan agenda penting yang akan dilaksanakan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan disusun sebagai dasar untuk melaksanakan program KB, PP dan PA dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bapak Bupati Kampar. semoga

kiranya berkenan untuk merealisasikannya Usulan APBD Tahun Anggaran 2024. Atas pertimbangan dan berkenannya Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di	:	Bangkinang
Pada Tanggal	:	12 juli 2023

KEPALA DPPKBP3A KABUPATEN KAMPAR



Drs. EDI AFRIZAL, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681024 199401 1 002

RENCANA KERJA (RENJA)
BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2023

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Kampar NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar untuk priode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c. BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024).

(3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja PD Kabupaten Kampar Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Rencana Kerja Dinas Sosial;

h. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
k. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan ;
o. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
t. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
u. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
v. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
w. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK;
x. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
y. Rencana Kerja Inspektorat;
z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dd. Rencana Kerja Sekertariat Daerah;
ee. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
ff. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hilir;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hulu;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Tapung;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Tambang;
ll. Rencana Kerja Kecamatan Kampar;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Siak Hulu;
oo. Rencana Kerja Kecamatan XIII Koto Kampar;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Rumbio Jaya;

qq. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Utara;
rr. Rencana Kerja Kecamatan Kampa;
ss. Rencana Kerja Kecamatan Salo;
tt. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang;
uu. Rencana Kerja Kecamatan Kuok;
vv. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang Kota;
ww. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
xx. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
yy. Rencana Kerja Kecamatan Gunung Sahilan;
zz. Rencana Kerja Kecamatan Perhentian Raja;
aaa. Rencana Kerja Kecamatan Koto Kampar Hulu;

Pasal 5

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 13 Juli 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

MHD. FIRDAUS

Diundangkan Di Bangkinang
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 18

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 Bangkinang 28412
Telepon (0762) 7327022 Fax. 7327022
email : bappeda@kamparkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 40 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 PADA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR

Menimbang :

a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2024, merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk menyusun Renja Bappeda Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Renja Bappeda Tahun 2024;
c. bahwa pejabat/personil yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kampar;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023. Lembar Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 5;

10. Peraturan Bupati Kampar Nomor 79 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar;

11. Peraturan Bupati Kampar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 ;

12. Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023. Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 52;

13. Keputusan Bupati Kampar Nomor 060-501/VII/2022, tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;

14. Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2023, tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Kampar Nomor : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023 (Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA TAHUN 2024 PADA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH.

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Tim Penyusun Renja Bappeda Tahun 2024, yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

KEDUA : Tim Penyusun Renja Bappeda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membuat jadwal rencana kerja kegiatan Tim dalam melaksanakan Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024;

b. Melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan serta melakukan analisa terhadap data/ informasi dimaksud;

c. Melakukan penyusunan terhadap Renja Bappeda Tahun 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Renja Bappeda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua bertanggung jawab Kepada Kepala Bappeda Kabupaten Kampar;

KEEMPAT : Segala biaya yang terkait akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 4 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ARDI MARDIANSYAH, S. STP, M. Si
Pembina Tk.I
NIP.19850305 200412 1 001

LAMPIRAN. I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 40 TAHUN 2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA TAHUN 2024 PADA KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH, SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH.

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bappeda Kab. Kampar	Ketua	
2	Sekretaris	Sekretaris	
3	Kabid. Perencanaan dan Pengendalian	Anggota	
4	Kabid. Perekonomian dan SDA	Anggota	
5	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	
6	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	
7	Kabid Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota	
10	Subkoordinator Program	Anggota	
11	Subkoordinator Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
12	Subkoordinator Perencana	Anggota	
13	Subkoordinator Pemerintahan	Anggota	
14	Subkoordinator Pembangunan Manusia	Anggota	
15	Subkoordinator Sosial Budaya	Anggota	
16	Subkoordinator Perekonomian	Anggota	
17	Subkoordinator Pembangunan Pertanian	Anggota	
18	Subkoordinator Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
19	Subkoordinator Infrastruktur dan Pertanahan	Anggota	
20	Subkoordinator Perhubungan dan Kominfo	Anggota	
21	Subkoordinator Kewilayahan	Anggota	
22	Subkoordinator Data, Penelitian dan Pengkajian	Anggota	
23	Subkoodinator Teknologi dan Inovasi	Anggota	
24	Otmawati	Anggota	Staf Bappeda
25	Nasrudin	Anggota	Staf Bappeda

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ARDI MARDIANSYAH, S. STP, M. Si
Pembina Tk.I
NIP.19850305 200412 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah Nya hingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai rencana kondisi batas waktu yang di harapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan kegiatan PD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun merujuk atau berpedoman kepada Renstra Bappeda Kabupaten Kampar 2023-2026.

Renja Bappeda ini memuat indikator kinerja, kelompok sasaran disertai dengan dana indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda Tahun 2025 mendatang. Semoga Renja ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ARDI MARDIANSYAH, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19850305 2000412 1 001

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I		
PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II		
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III		
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		35
3.1	Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3	Program dan Kegiatan	37
BAB IV		
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		39
BAB V		
PENUTUP		58

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	19
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 25 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra PD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) PD.

Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Di dalam Renja PD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra PD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah. Dengan adanya Renja PD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program PD lainnya.

Renja BAPPEDA Kabupaten Kampar Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan guna mengoperasionalkan RKPD Tahun 2024 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Bappeda, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2022 ini adalah tahun kedua dari Renstra Bappeda Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat. RKPD Tahun 2023 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Bappeda Kabupaten Kampar, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD Tahun 2024.

Renja PD dibahas pada verifikasi Renja SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005- 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Mengevaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD Tahun 2017-2022.
b. Untuk merumuskan dan menetapkan Tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.
c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rentara PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Bappeda Kabupaten Kampar dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda Kabupaten Kampar, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kampar tahun lalu dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar. Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Kampar telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama.

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Untuk realisasi program kegiatan Bappeda Kabupaten Kampar untuk Tahun 2022 dari 4 program dan 52 kegiatan sudah memenuhi target kinerja 100% tidak mengalami hambatan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk realisasi program/kegiatan di Bappeda Kabupaten Kampar tidak ada yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sedangkan untuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak ada mengalami hambatan dan permasalahan.

Kebijakan dan tindakan Bappeda Kabupaten Kampar dari hasil evaluasi seperti yang terurai menjadi dua bagian seperti disebut di atas, maka perlu hal-hal sebagai berikut untuk meningkatkan, yaitu:

1) Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.
2) Meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur perencana sehingga pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi anggaran.

3) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar.
4) Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan.
5) Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Adanya beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan guna pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kampar tetap meningkat, yaitu:

a. Menetapkan target kinerja dan sasaran yang terukur.
b. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
c. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin aparatur untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional.
d. Usulan program dan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan yang ada.
e. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
f. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.

Adapun secara rinci Evaluasi Hasil Renja Bappeda Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2024 diuraikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN CAPAIAN RENSTRA PD s/d TAHUN BERJALAN.

Kode Rekening				Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/sub kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra 2017-2022 (Tahun akhir periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/sub Kegiatan Tahun 2022				Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi kinerjaRenja PD Tahun 2022	Rialisasi Tingkat capaian kinerja (%)	Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Realisasi Tingkat Capaian target (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06			**Urusan Perencanaan Pembangunan**									
1	06	01		**Bidang Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**									
1	06	01		**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**
1	06	01	02	1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**12 Dokumen**	**6 Dok**	**6 Dok**	**6 Dok**	**100%**	**6 Dok**	**12 Dok**	**100%**
1	06	01	08	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perangkat daerah yang di susun	6 dokumen	3 dok	3 dok	3 dok	**100%**	3 dok	6 dok	**100%**
1	06	01	09	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja	6 dokumen	3 dok	3 dok	3 dok	**100%**	3 dok	6 dok	**100%**
1	06	01	11	**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**
				1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terealisasinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	52 orang/bln	52	52 org	52 org	100%	52 org	52 orang	100%
				2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusun laporan keuangan terakhir tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	**100%**	1 Lap	2 Laporan	**100%**
				3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestern SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	**100%**	1 Lap	2 Laporan	**100%**

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**-**	**100%**	**100%**	100%	**25%**	**100%**	**100%**
				1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang di adakan	52 PNS	-	58 PNS	58 PNS	100%		52 PNS	100%
				2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	100%	2 Orang	2 Orang	100%
				3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	100%	12 Orang	12 Orang	100%
				4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100%
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100%
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100%
				4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	100%
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang di sediakan	2 Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dokumen	100%
				6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinsi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Laporan	100%
1	06	05		**5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**2 Lap**	**2 Lap**	**2 Lap**	100%	**2 Lap**	**4 Laporan**	**100%**
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Laporan	100%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum kantor yang di sediakan	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Laporan	100%
1	06	06		**6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang milik daerah**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	100%	**25%**	**100%**	**100%**
1	06	06	01	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	16 Unit	100%
				2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	40 Unit	100%
				3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang di pelihara/direhabiltasi	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%
1	06	15		**II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	100%	**25%**	**100%**	**100%**
1	06	20		**1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pembnagunan**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	100%	**25%**	**100%**	**100%**
1	06	20	05	1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis.	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dokumen	100%
1	06	20	13	2. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen rancangan awal RKPD	42 Berita Acara	21 Berita Acara	21 Berita Acara	21 Berita Acara	100%	21 Berita Acara	42 Berita Acara	100%
				3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	4 Berita Acara	100%	4 Berita Acara	8 Berita Acara	100%
				4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah berita Acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	2 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	2 Berita Acara	100%
				5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	42 Berita Acara	21 Berita Acara	21 Berita Acara	21 Berita Acara	100%	21 Berita Acara	42 Berita Acara	100%
				6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kotarverifikasi oleh kecamatan	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dokumen	100%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Terpenuhinya data dan informasi pembanguna daerah**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**
				1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Masukan	3 Masukan	3 Masukan	3 Masukan	100%	3 Masukan	6 Masukan	100%
				3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**
1	06	22	19	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunanpenelahaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	10 Laporan	100%
1	06	23	09	2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%
1	20	17		**III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**
1	20	17	20	**1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**
1	23	15	12	1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dokumen	100%
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam pemyusunan dokumen perencanaan pemabngunan perangkat daerah	14 PD	7 PD	7 PD	7 PD	100%	7 PD	1 dokumen	100%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Pemerintahan perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pemabngunan perangkat daerah	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 dokumen	100%
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 dokumen	100%
				5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dokumen	100%
				6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	18 PD	9 PD	9 PD	9 PD	100%	9 PD	1 dokumen	100%
				7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	18 PD	9 PD	9 PD	9 PD	100%	9 PD	1 dokumen	100%
				8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Sinkronisasi Rnstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 dokumen	100%
				2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan pembangunan bidang perekonomian dan SDA**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkana Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian laporan Sinkronisasi Rnstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemabngunan Manusia	12 PD	6 PD	6 PD	6 PD	100%	6 PD	12 PD	100%
				2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Perekonomian	12 PD	6 PD	6 PD	6 PD	100%	6 PD	12 PD	100%
				3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Laporan	100%
				4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang di koordinir Penyusunan (RPJP.RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dokumen	100%
				5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Rentra/Renja Bidang SDALaporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 PD	6 PD	6 PD	6 PD	100%	6 PD	12 PD	100%
				6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang SDA	12 PD	6 PD	6 PD	6 PD	100%	6 PD	12 PD	100%
				3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan yang dilaksanakan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100 Persen**	**50%**	**50%**	**50%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infstruktur yang di koordinir penyusunanya (RPJP,RPJM.dan RKPD)asistensi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur yang di koordionir penyusunanya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dokumen	100%
				2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8 PD	4 PD	4 PD	4 PD	100%	4 PD	8 PD	100%
				3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	8 PD	4 PD	4 PD	4 PD	100%	4 PD	8 PD	100%
				4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastuktur	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Laporan	100%
				5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan yang di koordinir penyusunanya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	2 dokumen	100%
				6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang KewilayahanLaporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	42 Kecamatan/OPD	21 Kecamatan/OPD	21 Kec/OPD	21 Kec/OPD	100%	21 Kec/OPD	42 Kecamatan/OPD	100%
				7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan	42 Kecamatan/ OPD	21 Kecamatan/ OPD	21 Kec/OPD	21 Kecamatan/OPD	100%	21 Kecamatan /OPD	42 Kecamatan/ OPD	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	2 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Laporan	100%
	IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase (%) konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**100%**		**50 Persen**	**50 Persen**	**100%**		**50 Persen**	**50%**
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah laporan Penelitian dan pengembangan bidang Litbang**	**2 Laporan**	-	**2 Lap**	**2 Lap**	**100%**	**1 Lap**	**2 Laporan**	**100%**
	1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	-	1 Lap	1 Lap	100%	-	1 Laporan	100%
	2. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	-	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Laporan	100%
	2. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Laporan Pengembangan Inocvasi dan Teknologipenelitian pengembangan inovasi dan teknologi**	**1 Laporan**	-	**1 Lap**	**1 Lap**	**100%**	**1 Lap**	**1 Lap**	**100%**
	3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelitbangan	1 Laporan	-	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Laporan	100%

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja kegiatan selama tahun 2017-2022 dapat dicapai dengan baik. Dan juga pada pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2022 dinilai sudah mencapai terget. Hal ini dikarenakan adanya konsistensi rencana teknis program dan kegiatan yang mengakibatkan beberapa kegiatan bidang dapat melaksanakan secara optimal, secara umum capaian Renstra Bappeda menunjukkan hasil yang baik sudah mencapai target.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, Bappeda Kabupaten Kampar sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 79 Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan.

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kampar didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kampar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase OPD dan desa yang menerapkan *SIPD*	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	-		B	BB	BB	A	B	B	BB	A	
3	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD).	-		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase capaian keberhasilan monotoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan.	-		80	85	90	100	80	85	91	100	
6	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	-		76,50	78,50	80,52	81,50	76,70	78	80,50	82,50	

Analisis Kinerja Keuangan dilakukan untuk melihat efesiensi realisasi penyerapan dana berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui kinerja keuangan per program. Pada tahun 2021 Bappeda Kabupaten Kampar melaksanakan 4 program, adapun program-programnya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Pada Tahun 2022 Bappeda Kabupaten Kampar menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 21.113.669.754 (dua puluh satu milyar seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh emapt rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.509.014.889. (dua puluh milyar lima ratus Sembilan juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah) atau 97,14%, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu, serta capaian kinerja Renstra PD. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Upaya mewujudkan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana .
2. Meningkatkan Pengembangan Sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah.
3. Upaya pengembangan tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah melalui sistem SIPD Kemeterian secara optimal.

4. Terciptanya kualitas Sumber Daya Aparatur Bappeda melalui diklat maupun kursus dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pemantauan rencana pembangunan daerah.
5. Upaya mewujudkan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif
6. Upaya pengembangan data informasi pembangunan daerah melalui webset secara optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024

NO	Rancanagan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.Kampar**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 Persen**	**12.819.137.342**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab.Kampar**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100 Persen**	**12.819.137.342**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**203.243.456**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**203.243.456**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	106.425.405	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	106.425.405	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.589.820	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.589.820	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.501.284	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.501.284	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.405.820	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.405.820	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.303.820	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	8.303.820	

NO	Rancanagan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	49.410.838	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	49.410.838	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	15.606.469	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	15.606.469	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.706.384.826**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**6.706.384.826**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 org/bln	6.641.859.915	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 org/bln	6.641.859.915	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23.745.923	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23.745.923	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	40.778.988	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	40.778.988	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**461.523.829**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**461.523.829**	

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	143.618.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	143.618.500
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.007.500	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	45.007.500
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	272.897.829	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	272.897.829
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.862.239.104**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**1.862.239.104**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.178.278	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.178.278
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	366.060.850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	366.060.850
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	181.988.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	181.988.400
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	139.080.896	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	139.080.896
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	66.096.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	66.096.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	958.834.680	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	958.834.680
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**700.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**700.000.000**

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	700.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	700.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**1.126.607.462**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Laporan**	**1.126.607.462**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	127.296.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	127.296.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	999.311.462	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	999.311.462
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**1.759.138.665**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**	**1.759.138.665**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	289.899.300	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	289.899.300
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	124.218.405	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	124.218.405
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.345.020.960	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.345.020.960
2.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100 Persen**	**2.987.160.471**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100 Persen**	**2.987.160.471**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan**	**100 Persen**	**1.834.054.277**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan**	**100 Persen**	**1.834.054.277**

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 Dokumen	204.737.670	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 Dokumen	204.737.670
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokuemn Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dokumen	189.453.672	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokuemn Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	5 Dokumen	189.453.672
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	21 Berita Acara	390.510.875	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	21 Berita Acara	390.510.875
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	47.506.986	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Berita Acara	47.506.986
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	411,410,917	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	411,410,917
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	21 Usulan	167.377.033	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	21 Usulan	167.377.033
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	834.468.041	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	834.468.041
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**458.273.720**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**458.273.720**
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	311.026.520	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	311.026.520
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	22.623.600	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	22.623.600

	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku	124.623.600	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku	124.623.600
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**485.116.237**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**485.116.237**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	209.336.316	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	209.336.316
	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	275.779.921	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	275.779.921
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**209.716.237**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100 Persen**	**209.716.237**
	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	107.336.316	Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	107.336.316
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	102.379.921	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	102.379.921
3.	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100 Persen**	**1.822.953.361**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100 Persen**	**1.822.953.361**

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**	**100 persen**	**778.444.700**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**	**100 persen**	**778.444.700**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	65.475.840	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	65.475.840
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10 PD	41.560.920	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	10 PD	41.560.920
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	30.345.560	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	30.345.560
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	134.922.800	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	134.922.800
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	65.475.840	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	65.475.840

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	41.560.920	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	41.560.920
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	104.180.020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 PD	104.180.020
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	294.922.800	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	294.922.800
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan**	**100 persen**	**403.597.533**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan**	**100 persen**	**403.597.533**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	64.342.449	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	64.342.449
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 PD	44.044.416	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 PD	44.044.416

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 PD	97,792,656	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 PD	97,792,656
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	99,693,323	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	99,693,323
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	64.342.449	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	64.342.449
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6 PD	44.044.416	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6 PD	44.044.416
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6 PD	143.130.480	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	6 PD	143.130.480
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	43.693.323	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	43.693.323
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan**	**100 persen**	**640.911.128**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan**	**100 persen**	**640.911.128**

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	110.123.178	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	110.123.178
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	25.990.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	25.990.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	54.800.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 PD	54.800.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	226.721.984	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	226.721.984
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	27.763.982	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	27.763.982
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6 PD	25.990.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6 PD	25.990.000

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6 PD	44.800.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6 PD	44.800.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	124.721.984	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	124.721.984
4.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**100 persen**	**997.232.500**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**100 persen**	**997.232.500**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang**	**2 laporan**	**147.650.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang**	**2 laporan**	**147.650.000**
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	136,800,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 laporan	136,800,000
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	147.650.000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	147.650.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan**	**2 dokumen**	**305.028.500**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan**	**2 dokumen**	**305.028.500**
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	125.178.500	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	125.178.500

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	179.850.000	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	179.850.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1 dokumen**	**198.554.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1 dokumen**	**198.554.000**
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	198.554.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	198.554.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**1 dokumen**	**346.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**1 dokumen**	**346.000.000**
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 dokumen	346.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 dokumen	346.000.000
	Jumlah ……..		**19.372.180.570**		**Jumlah ……**		**19.372.180.570**

2.5 Penelahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsipprinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benarbenar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, memiliki kewenangan di bidang perencanaan pembanguinan daerah dan penelitian pengembangan, sehingga secara langsung tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Kampar Tahun 2023, Bappeda Kabupaten Kampar tidak mempunyai usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait maupun dari LSM, Asosiasi dan Perguruan Tinggi, yang terkait langsung dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Kampar, begitu juga usulan dalam bentuk program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seperti pokir DPRD.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Pada Tahun 2023, melalui Bappenas, Pada Tahun 2024 tema perubahan pembangunan nasional adalah: **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Rencana Kerja Pemerintah 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni:, dengan arah Pembangunan kepada Kemiskinan, Lapangan Kerja, UMKM, dan Industri. Pembangunan Nasional melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai berikut:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan memperhatikan tema pembangunan Nasional, tema pembangunan Pemerintah Propinsi Riau yang tercantum pada RKPD Tahun 2024 juga ikut menyesuikan dari tema Nasional yaitu: **"Mewujudkan Riau Yang Berdaya Saing,**

Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia." Hal ini sejalan dengan misi provinsi Riau tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, serta mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah Propinsi Riau, maka dirumuskan tema perubahan pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 yaitu **"Menjadikan Kampar yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Provinsi Riau"**

Dengan berpedoman kepada tema tersebut diharapkan rencana kerja yang disusun dapat selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus diwujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas dilingkungan Bappeda Kabupaten Kampar, karena untuk hasil yang berkualitas tak terlepas dari perencanaan yang matang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Renja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026, yang disusun rancangannya secara paralel dengan RPD Kabupaten Kampar. Renja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Bappeda Kabupaten Kampar pada Tahun 2024. Target kinerja mereprensentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya hanya dapat dioperasikan jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa Tujuan dan Sasaran.

Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan (*key success factors*), yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Bappeda Kabupaten Kampar menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir

yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang ingin dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya alam dalam pelaksanaan aktivitas instansi/ satuan kerja.

Program Bappeda Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Rencana Kerja Anggaran yang merupakan perwujudan kebijakan internal adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan Rencana Kerja Regulasi yang merupakan perwujudan kebijakan eksternal adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, menfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Renja Bappeda Tahun 2024 mempunyai 4 program 18 Kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

3. **Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
   a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**
   b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
   c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
   d. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
   e. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Adapun Program kegiatan Dalam Tahun Anggaran 2024 program/kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya adalah sebagai berikut :

Tujuan : **Mewujudkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas serta Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif.**

SASARAN STRATEGIS	LOKALITAS DAN KEWENANGAN PD	
	PROGRAM	KEGIATAN
▪ **Konsistensi perencanaan pembangunan daerah**	▪ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	▪ **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	▪ **Program Koodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
▪ Meningknya kreativitas, Inovasi dan peran Litbang dalam pengambilan kebijakan pembangunan daearh	▪ **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Kegiatan Penelitian dan pengembangan dBidang sosial dan kependudukan 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 4. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana Program dan Kegiatan perumusan program/kegiatan Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2024, di sajikan pada Tabel 4.1. berikut ini.

TABEL 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	**01**	**01**			**BIDANG URUSAN PERENCANAAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**12.930.428.500**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**12.753.229.456**
5	**01**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar**	**10 dokumen**	**203.243.456**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**10 dokumen**	**207.158.298**
5	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	2 dokumen	106.425.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	108.553.913
5	01	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	1 dokumen	7.589.820	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	7.741.616
5	01	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	1 dokumen	7.501.284	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	7.501.284

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	1 dokumen	8.405.820	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	8.573.936
5	01	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	1 dokumen	8.303.820	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	8.469.896
5	01	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	3 laporan	49.410.838	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 laporan	50.399.055
5	01	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	1 laporan	15.606.469	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	15.918.598
5	**01**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**6.665.605.838**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**6.577.442.777**
5	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	48 org/bln	6.641.859.915	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		48 org/bln	6.511.627.368

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	1 Laporan	23.745.923	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	24.220.841
5	**01**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**1.572.979.930**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**1.896.865.966**
5	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	366.060.850	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	373.382.067
5	01	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	181.988.400	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	185.628.168
5	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Dokumen	66.096.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	64.800.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	1 Laporan	958.834.680	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	978.011.374
5	**01**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	Kab. Kampar	**100 persen**	**700.000.000**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			**700.000.000**
5	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kampar	2 unit	700.000.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 unit	700.000.000
5	**01**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Kampar	2 Laporan	**1.126.607.462**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	**1.109.559.040**
5	01	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Laporan	127.296.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	129.841.920
5	01	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Laporan	999.311.462	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	979.717.120

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	01	2.09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kampar	1 Unit	2.661.991.814	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.371.921.379
5	**01**	**02**				**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KONSISTENSINYA ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**3.398.571.388**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**3.466.542.815**
5	**01**	**02**	**2.01**			**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pembangunan**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**2.245.465.194**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**2.290.374.497**
5	01	02	2.01	01		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	204.737.670	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	208.832.424
5	01	02	2.01	02		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokuemn Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kab. Kampar	5 Dokumen	189.453.672	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	193.242.745
5	01	02	2.01	03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Kampar	21 Berita Acara	390.510.875	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Berita Acara	398.321.092

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	02	2.01	04		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Kampar	4 Berita Acara	47.506.986	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Berita Acara	48.457.125
5	01	02	2.01	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	1 Berita Acara	411,410,917	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Berita Acara	419.639.135
5	01	02	2.01	06		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kab. Kampar	21 Usulan	167.377.033	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Usulan	170.724.574
5	01	02	2.01	07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	Kab. Kampar	1 Dokumen	834.468.041	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	851.157.402

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	**01**	**02**	**2.02**			**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Data dan Informasi Pembangunan Daerah**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**458.273.720**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**467.439.194**
5	01	02	2.02	01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kab. Kampar	3 Masukan	311.026.520	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Masukan	317.247.050
5	01	02	2.02	02		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kab. Kampar	1 Orang	22.623.600	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Orang	23.076.072
5	01	02	2.02	03		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kab. Kampar	4 Buku	124.623.600	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Buku	127.116.072
5	**01**	**02**	**2.03**			**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kab. Kampar	**4 Laporan**	**485.116.237**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**4 Laporan**	**494.818.562**
5	01	02	2.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kampar	4 Laporan	209.336.316	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	213.523.042

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	02	2.03	03		Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Kampar	1 Laporan	275.779.921	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	281.295.520
5	**01**	**02**	**2.04**			**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Kab. Kampar	**2 implementasi**	**209.716.237**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**2 implementasi**	**213.910.562**
5	01	02	2.04	01		Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Kab. Kampar	1 Dokumen	107.336.316	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	109.483.042
5	01	02	2.04	02		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. Kampar	1 Dokumen	102.379.921	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	104.427.520
5	**01**	**03**				**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**2.203.658.492**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**2.054.319.148**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	03	2.01			**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**	Kab. Kampar	**100 persen**	**778.444.700**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**788.634.335**
5	01	03	2.01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Kampar	1 dokumen	65.475.840	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	66.785.357
5	01	03	2.01	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	7 PD	41.560.920	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 PD	42.392.138
5	01	03	2.01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Kampar	1 Laporan	30.345.560	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	32.521.258
5	01	03	2.01	03		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kab. Kampar	1 Laporan	134.922.800	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	135.621.297

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	03	2.01	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kampar	1 dokumen	65.475.840	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	66.785.357
5	01	03	2.01	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kampar	9 PD	41.560.920	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 PD	42.392.138
5	01	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kampar	9 PD	104.180.020	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 PD	106.515.500
5	01	03	2.01	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Kampar	1 Laporan	294.922.800	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	295.621.290

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	03	2.02			**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dilaksanakan**	Kab. Kampar	**100 persen**	**700.169.576**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 persen**	**613.155.462**
5	01	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kampar	1 dokumen	64.342.449	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	65.629.298
5	01	03	2.02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Kampar	6 PD	44.044.416	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	44.925.304
5	01	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Kab. Kampar	6 PD	97,792,656	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	98.792.656
5	01	03	2.02	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kab. Kampar	1 Laporan	99,693,323	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	102.693.323

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	03	2.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kampar	1 dokumen	64.342.449	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	65.629.298
5	01	03	2.02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Kampar	6 PD	143.130.480	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	44.925.304
5	01	03	2.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kab. Kampar	6 PD	143.130.480	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	145.993.090
5	01	03	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kab. Kampar	1 Laporan	43.693.323	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	44.567.189
5	01	03	2.03			**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksanakan**	Kab. Kampar	**100 persen**	**725.044.216**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 persen**	**652.529.351**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kampar	1 dokumen	110.123.178	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	112.325.642
5	01	03	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Kampar	6 PD	110.123.178	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	26.309.800
5	01	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kab. Kampar	6 PD	54.800.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	55.296.000
5	01	03	2.03	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Kampar	1 Laporan	226.721.894	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	231.256.424

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	01	03	2.03	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Kab. Kampar	1 dokumen	27.763.982	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	28.319.261
5	01	03	2.03	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Kampar	6 PD	25.990.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	26.309.800
5	01	03	2.03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Kab. Kampar	6 PD	44.800.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 PD	45.496.000
5	01	03	2.03	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Kampar	1 Laporan	124.721.984	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	127.216.424

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	03					**KEPEGAWAIAN**								
5	03	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerinatah Daerah Kab/Kota**	Kab. Kampar	**100 persen**	**461.523.829**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 persen**	**994.028.500**
5	03	01	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Kampar	**100 persentase**	**461.523.829**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 persen**	**140.000.000**
5	03	01	2.05	00 02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar	1 Paket	143.618.500	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	143.618.500
5	03	01	2.05	00 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kampar	2 Orang	45.007.500	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang	45.907.650
5	03	01	2.05	00 11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	12 Orang	272.P897.829	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Orang	278.355.786

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	02			**BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Kab. Kampar	**100 persen**	**1.134.032.500**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 persen**	**994.028.500**
5	05	02	2.01			**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Litbang**	Kab. Kampar	**2 Laporan**	**284.450.000**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**1 Laporan**	**140.000.000**
5	05	02	2.01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kampar	1 laporan	136,800,000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
5	05	02	2.01	14		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Kab. Kampar	1 laporan	147.650.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	140.000.000
5	05	02	2.02			**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Kependudukan**	Kab. Kampar	**2 dokumen**	**305.028.500**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**1 dokumen**	**305.028.500**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5	05	02	2.02	05		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kab. Kampar	1 dokumen	125.178.500	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			125178500
5	05	02	2.02	08		Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kab. Kampar	1 dokumen	179.850.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			179.850.000
5	05	02	2.03			**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Kab. Kampar	**1 dokumen**	**198.554.000**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			**199.000.000**
5	05	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Kampar	1 dokumen	198.554.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			199.000.000
5	05	02	2.04			**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kab. Kampar	**1 Laporan**	**346.000.000**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**1 Laporan**	**350.000.000**
5	05	02	2.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Kampar	1 Laporan	346.000.000	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	350.000.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA PD	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						NON URUSAN								
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								
5	05	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	Kab. Kampar	**100 persen**	**414.117.705**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 persen**	**994.028.500**
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Kab. Kampar	**100 Persen**	**414.117.705**	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		**100 Persen**	**994.028.500**
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kampar	8 Unit	289.899.300	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	295.697.286
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kampar	20 Unit	124.218.405	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Unit	126.702.773
							Jumlah			**20.542.332.414**				**18.992.486.970**

BAB IV
PENUTUP

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar 2023 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Renja Bappeda Kabupaten Kampar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu. Renja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2024, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perecanaan tersebut dilaksanakan.

Adanya Renja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bappeda diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain. Harapannya adalah Renja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Bappeda Tahun 2024 dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian Bappeda Kabupaten Kampar dalam Tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Tuntutan dan keinginan dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan senantiasa selalu berkembang seiring dengan berbagai kebijakan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini merupakan tantangan bagi Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang

akan datang. Maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya perbaikan dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Renja Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Kampar, Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Bappeda Kabupaten Kampar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintahan Kabupaten Kampar dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Bappeda Kabupaten Kampar dan penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna dan transparan.

Bangkinang, 12 Juli 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR

ARDI MARDIANSYAH, S.STP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19850305 200412 1 001

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KAMPAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**20.542.332.414,00**							**18.992.486.970,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**20.128.214.709,00**							**18.570.086.911,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**18.532.658.380,00**							**17.234.255.125,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**			**100 %**	**12.930.428.500,00**						**100 %**	**11.526.308.535,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			12 bulan	203.243.456,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Sosial	Bappeda Kab. Kampar	-	207.158.298,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	106.425.405,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Sosial	Bappeda Kab. Kampar		108.553.913,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.589.820,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		7.741.616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7.501.284,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		7.501.284,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8.405.820,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		8.573.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	8.303.820,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		8.469.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	49.410.838,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Sosial	Bappeda Kab. Kampar		50.399.055,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	15.606.469,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		15.918.598,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persentase	6.665.605.838,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar	-	6.535.848.209,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	6.641.859.915,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		6.511.627.368,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	23.745.923,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		24.220.841,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persentase	1.572.979.930,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar	-	1.601.821.609,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	366.060.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		373.382.067,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	181.988.400,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		185.628.168,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	66.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		64.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	958.834.680,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		978.011.374,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*	-			100 Persentase	700.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar	-	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	700.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			2 laporan	1.126.607.462,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar	-	1.109.559.040,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	127.296.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		129.841.920,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	999.311.462,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		979.717.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			100 Persentase	2.661.991.814,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar	-	1.371.921.379,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.661.991.814,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		1.371.921.379,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase (%)Konsistensinya antar dokumen Pembangunan Daerah Persentase Konsistensinya antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerahkoordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah***	**100 Persen 100 Persentase**			**100 Persen 100 Persentase**	**3.398.571.388,00**						**100 Persen 100 Persentase**	**3.466.542.814,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan*	-			100 %	2.245.465.194,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	2.290.374.497,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	204.737.670,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		208.832.424,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				5 Dokumen	189.453.672,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		193.242.745,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	390.510.875,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		398.321.092,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				4 Berita Acara	47.506.986,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		48.457.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	411.410.917,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		419.639.135,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				21 Usulan	167.377.033,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		170.724.574,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				1 Dokumen	834.468.041,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		851.157.402,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Terpenuhinya data dan informasi pembangunan daerah*	-			100 %	458.273.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	467.439.194,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	311.026.520,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		317.247.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				1 Orang	22.623.600,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		23.076.072,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				4 Buku	124.623.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		127.116.072,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Perdsentase Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	-			100 %	485.116.237,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah	-	494.818.561,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	209.336.316,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		213.523.041,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	275.779.921,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Organisasi Perangkat Daerah		281.295.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	209.716.237,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	213.910.562,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	107.336.316,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		109.483.042,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	102.379.921,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		104.427.520,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah***	**100 Persentase 100 Persen**			**100 Persen 100 Persentase**	**2.203.658.492,00**						**100 Persentase 100 Persen**	**2.241.403.776,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Koordinasi Perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia yang dilaksanakan*	-			100 Persentase	778.444.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	788.635.335,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	65.475.840,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		66.785.357,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				7 Laporan	41.560.920,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		42.392.138,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	30.345.560,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		32.521.258,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	134.922.800,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Infrastruktur	Kabupaten Kampar		135.621.297,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	65.475.840,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kesejahteraan Sosial Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		66.785.357,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	41.560.920,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		42.393.138,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	104.180.020,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		106.515.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	294.922.800,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		295.621.290,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA yang dilaksankanakan*	-			100 Persentase	700.169.576,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	714.223.248,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	64.342.449,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		65.629.298,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	44.044.416,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		44.925.304,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	97.792.656,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		98.792.656,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	99.693.323,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		102.693.323,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	64.342.449,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		65.629.298,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	143.130.480,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		145.993.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	143.130.480,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		145.993.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	43.693.323,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		44.567.189,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dilaksankan*	-			100 persentase	725.044.216,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	738.545.193,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	110.123.178,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		112.325.642,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	110.123.178,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		112.325.642,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	54.800.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		55.296.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	226.721.894,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		231.256.424,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	27.763.982,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		28.319.261,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	25.990.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		26.309.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	44.800.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		45.496.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	124.721.984,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		127.216.424,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**461.523.829,00**							**466.981.786,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**			**100 %**	**461.523.829,00**						**100 %**	**466.981.786,00**	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persentase	461.523.829,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar	-	466.981.786,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	143.618.500,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		143.618.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	45.007.500,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		45.007.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	272.897.829,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		278.355.786,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.134.032.500,00**							**868.850.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase terlaksananya penelitian dan penegembangan daerah***	**100 Persentase**			**100 Persentase**	**1.134.032.500,00**						**100 Persentase**	**868.850.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	-			1 laporan	284.450.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	136.800.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	147.650.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan*	-			1 dokumen	305.028.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	179.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	125.178.500,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1 Dokumen	179.850.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		179.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan*	-			0 dokumen	198.554.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar	-	199.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	198.554.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Bidang Ekonomi	Kabupaten Kampar		199.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Laporan Pengembangan inovasi dan teknologi*	-			1 laporan	346.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar	-	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	346.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Bidang Ekonomi	Bappeda Kab. Kampar		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**414.117.705,00**							**422.400.059,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**414.117.705,00**							**422.400.059,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	**100 %**			**100 %**	**414.117.705,00**						**100 %**	**422.400.059,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			100 Persentase	414.117.705,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	422.400.059,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	289.899.300,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Infrastruktur Peningkatan Bidang Ekonomi	-		295.697.286,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	124.218.405,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kesejahteraan Sosial Peningkatan Bidang Ekonomi	-		126.702.773,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	J U M L A H							**20.542.332.414,00**							**18.992.486.970,00**	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.
Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa dipersembahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa karena dengan izin-Nya jua penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Pembangunan aparatur negara mencakup aspek yang luas. Dimulai dari peningkatan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efektif dan effisien dengan tata laksana yang jelas dan transparan, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional serta berakuntabilitas kepada mitra kerja (stake holders). Pendayagunaan aparatur padaha kekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Negara dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik (good governance).

Upaya reformasi aparatur salah satunya ditempuh dengan penataan kepegawaian. Upaya pengembangan kepegawaian dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian. Namun demikian berbagai upaya tersebut di atas belum mampu membangun suatu Sistem Manajemen Kepegawaian yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, secara umum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Penyiapan Penyusunan Program dan Petunjuk Pembinaan dan Pengembangan Pegawai serta melaksanakan mutasi dan Tata Usaha Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Sehingga dalam penyusunan Draf Rencana Kerja Tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Kampar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasipembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Admistrasi Kepegawaian.

Dengan ditetapkan Rencana Kerja ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar selang tahun 2024 memiliki arah yang jelas dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kinerja ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkinang, 12 Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPAR



Ir. COKROAMINOTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199310 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TEBEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM 8

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan 8

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan 9

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan 10

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan 11

2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra BKPSDM Kabupaten Kampar 12

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25

2.3.1. Analisa Lingkungan Stretegis 25

2.3.1.1. Kondisi Umum BKPSDM Kabupaten Kampar 25

2.3.2. Analisis Lingkungan Internal 26

2.3.3. Analisis Lingkungan Eksternal 27
2.3.4. Isu-Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Kampar dan Upaya Penganganannya 28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi 40
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja 40
3.3. Program dan Kegiatan 43

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

BAB V PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar	20
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	32
Tabel. 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja	41
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja SKPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan dokumen perencanaan BKPSDM untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Rencana Kerja BKPSDM merupakan terjemahan perencanaan tahunan dibidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan perwujudan aparatur yang profesional dan sejahtera.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah turunan dari Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) yang akan melaksanakan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan program dan kegiatan sesuai isu-isu strategis tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar mengacu kepada peraturan perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Struktural;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4910);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPS Pegawai Republik Indonesia;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Government;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cara Pegisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasipembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
22. Keptusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan Dijajaran Depatemen Dalam Negeri dan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
24. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Sitem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online;
26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
28. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor; 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelanggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingat IV.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

30. Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman bagi Anggota KORPRI Kabupaten Kampar Yang Meninggal Dunia;
31. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Tugas Belajar dan Ketentuan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemeintah Kabupaten Kampar;
32. Peraturan Bupati Kampar Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar.
33. Surat Edaran Bupati Kampar Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada RKPD Kabupaten Kampar.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Rencana Kerja ini maka Dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Kampar tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistemtika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
  - 2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
  - 2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
  - 2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
  - 2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
  - 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
  - 2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masayarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/pogram/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikatir kinerja dan penetaan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pada tahun 2022 BKPSDM Kabupaten Kampar melaksanakan 3 (Tiga) program dengan 12 (Dua Belas) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub Kegiatan. Anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 sebesar Rp.8.661.623.718,- dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.7.980.985.286,- atau 92,14% dengan rata-rata capaian indikator kinerja output secara fisik sebesar 90,07%.

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 100%, yaitu:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, secara fisik target kinerja terealisasi sebesar 0%,.
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan Sub Kegitan :
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN secara fisik target kinerja terealisasi sebesar 79,60%
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN secara fisik kinerja terealisasi sebesar 78,45%

- Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN secara fisik target kinerja terealisasi sebesar 39,34%.

3. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan sub kegiatan :
   - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN secara fisik target kinerja terealisasi sebesar 82,50%
   - Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai secara fisik target kinerja terealisasi sebesar 7,50%

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2022 terdapat 9 (Sembilan) kegiatan dengan 20 (dua puluh) sub kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanyanya telah memenuhi target 100%, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdri dari sub kegiatan :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan :
   - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
7. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terdiri dari sub kegiatan :
   - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
8. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terdiri dari sub kegiatan :
   - Penyelenggaran Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum.
9. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional terdiri dari sub kegiatan :
   - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2022 terdapat 2 (dua) dengan 5 (lima) sub kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanyanya melebihi 100%, yaitu :

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terdiri dari sub kegiatan :
   - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian

2. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari sub kegiatan :
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   - Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   - Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

2.1.4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.

a. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN secara fisik target kinerja terealisasi sebesar 39,34% dari target yang diasumsikan pada tahun 2022 pengisian jabatan struktural sebanyak 760 jabatan hanya terisi 299 jabatan. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan karena adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN secara fisik realisasi kinerja sebesar 78,45% dari target yang direncanakan sebanyak 2000 ASN hanya terlaksana 1569 ASN, Tidak tercapainya target disebabkan banyak berkas yang tidak memenuhi syarat dan tidak lolos verifikasi BKN untuk diproses.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, secara fisik realisasi kinerja sebesar 79,60% dari target yang direncanakan 500 ASN, hanya terealisasi 398 ASN. Tidak tercapainya target disebabkan kurangnya minat dari ASN untuk pindah instansi dan banyak berkas tidak memenuhi syarat untuk diproses.

b. **Faktor-Faktor Penyebab Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan.**

Pada Tahun 2022 tidak terdapat kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanyanya melebihi 100%

2.1.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra BKPSDM Kabupaten Kampar.

Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap capaian program renstra BKPSDM selanjutnya dalam perencanaan target berikutnya akan dilihat hasil evaluasi renja tahun lalu. Bila pelaksanaan Renja tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun lalu.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan.

1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan secara baik agar tepat waktu dan sesuai sasaran dengan yang tertuang di dokumen anggaran.
2. Untuk penyerapan anggaran tahun berikutnya, dalam proses perencanaan penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran ataupun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan capaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 :

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KAMPAR

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD Tahun 2017-2022)	Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=10/4
					Penunjang Urusan										
					Kepegawaian										
5	**03**	**01**			**I.**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**93,33%**	**93,33%**
5	**03**	**01**	**2.01**		**1.**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi BKPSDM Kab. Kampar**	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	75%
5	03	01	2.01	01	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumn	2 Dokumen	100%
5	03	01	2.01	02	2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	03	01	2.01	03	3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	0%

5	03	01	2.01	04	4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	0%
5	03	01	2.01	05	5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	0%
5	03	01	2.01	06	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	83,33%
5	**03**	**01**	**2.02**		**2.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Dokumen Administrsi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**93,33%**	**93,33%**
5	03	01	2.02	01	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	255 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	100%	45 Orang	135 Orang	60%
5	03	01	2.05	05	2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
5	**03**	**01**	**2.05**		**3.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**34,29%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**83.33%**
5	03	01	2.05	07	1.	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil pemulangan Pegawai yang meninggal dalam Melaksanakan Tugas	140 Laporan	8 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	1 Laporan	29 Laporan	20%
5	03	01	2.01	11	2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	126 Orang	0	0	0%	11 Orang	126 Orang	100%
5	**03**	**01**	**2.06**		**4.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**83,33%**	**83,33%**
5	03	01	2.06	01	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	50%

5	03	01	2.06	02	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	188 Paket	188 Paket	188 Paket	188 Paket	100%	100 Paket	376 Paket	100%
5	03	01	2.06	04	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	50%
5	03	01	2.06	05	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	36 Paket	50%
5	03	01	2.06	06	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	50%
5	03	01	2.06	09	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	25 Laporan	34,72%
5	**03**	**01**	**2.08**		**5.**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100 Persen**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**83,33%**
5	03	01	2.08	02	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50%
5	03	01	2.08	04	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50%
5	**03**	**01**	**2.09**		**6.**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	**20%**	**100%**	**66,67%**	**66,67%**	**100%**	**62,22%**	**62,22%**
5	03	01	2.09	01	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya.	18 Unit	3 Unit	3 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	7 Unit	38,89 %
5	03	01	2.09	02	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	100%

5	03	01	2.09	06	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	72 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	50 Unit	74 Unit	100%
5	**03**	**02**			**II.**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Perentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah**	**100%**	**40%**	**60%**	**76,58%**	**76,58%**	**50%**	**55,53%**	**55,53%**
5	**03**	**02**	**2.01**		**7.**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**83,33%**	**83,33%**
5	03	02	2.01	03	1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1563 Dokumen	220 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	221 Dokumen	14,14%
5	03	02	2.01	06	2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1488 Dokumen	350 Dokumen	350 Dokumen	469 Dokumen	100%	1 Dokumen	820 Dokumen	55,11%
5	03	02	2.01	08	3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasiliasi	6 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	3 Lembaga	50%
5	03	02	2.01	10	4.	Pengelolaan Sistem Informasi Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0	0	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	03	02	2.01	11	5.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8976 Dokumen	3150 Dokumen	3500 Dokumen	3783 Dokumen	100%	1 Dokumen	6934 Dokumen	77,24%
5	03	02	2.01	12	6.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0	0	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
5	**03**	**02**	**2.02**		**8.**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN**	**100%**	**75%**	**70%**	**65,80%**	**65,80%**	**70%**	**68,60%**	**68,60%**
5	03	02	2.02	01	1.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3476 Dokumen	300 Dokumen	500 Dokumen	398 Dokumen	79,60%	500 Dokumen	1198 Dokumen	34,46%
5	03	02	2.02	02	2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	13337 Dokumen	1400 Dokumen	2000 Dokumen	1569 Dokumen	78,45%	2000 Dokumen	4969 Dokumen	37,26%

5	03	02	2.02	03	3.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	5008 Jabatan Struktural	760 Dokumen	760 Dokumen	299 Dokumen	39,34%	760 Dokumen	1819 Dokumen	36,32%
5	**03**	**02**	**2.03**		**9.**	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**100%**	**20%**	**0%**	**100%**	**100%**	**0%**	**40%**	**40%**
5	03	02	2.03	03	1.	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN peserta ujian dinas dan Penyesuaian ijazah	500 Orang	100 Orang	0	0	0	0	100 Orang	20%
5	03	02	2.03	04	2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	35 Orang	3 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	13 Orang	37,14%
5	**03**	**02**	**2.04**		**10.**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**100%**	**96,30%**	**100%**	**82,91%**	**82,91%**	**100%**	**93,07%**	**93,07%**
5	03	02	2.04	02	1.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5400 Dokumen	5200 Dokumen	7080 Dokumen	7305 Dokumen	100%	1 Dokumen	12506 Dokumen	231,59%
5	03	02	2.04	03	2.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	27500 Laporan	300 Laporan	7080 Laporan	7305 Laporan	100%	1 Laporan	7606 Laporan	27,66%
5	03	02	2.04	04	3.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberi penghargaan	1279 Orang	150 Orang	275 Orang	325 Orang	100%	275 Orang	750 Orang	58,64%
5	03	02	2.04	08	4.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	217 Laporan	20 Laporan	40 Laporan	33 Laporan	82,50%	1 Laporan	54 Laporan	58,88%
5	03	02	2.04	09	5.	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	63 Dokumen	25 Dokumen	40 Dokumen	3 Dokumen	7,50%	1 Dokumen	29 Dokumen	46,03%
5	**04**	**02**			**III.**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manuisa**	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**100%**	**50%**	**66,67%**	**66,67%**
5	**04**	**02**	**2.01**		**11.**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Terpenuhinya Kompetensi Teknis	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**0%**	**66,67%**	**66,67%**
5	04	02	2.01	03	1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	Terlaksananya Bintek Kepegawaian, Bintek Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat dan Bintek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	20 Orang	20 Orang	10 Orang	10 Orang	100%	100 %	30 Orang	100%

						Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
5	**04**	**02**	**2.02**		**12.**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**66,67%**	**66,67%**
5	04	02	2.02	07	1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	865 Orang	-	86 Orang	86 Orang	100%	80 Laporan	166 Orang	19,19%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dari 3 Program 12 kegiatan dan 30 sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dan telah diakomodir dalam DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022, seluruhnya belum dapat dilaksanakan, karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya pengurangan Anggaran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian program, kegiatan dan keuangan tahun 2022 dengan rata-rata capaian sebesar 92,14%. Atau terealisasi sebesar Rp.7.980.985.286,00,- dari anggaran yang terdapat dalam DPA BKPSDM tahun 2022 sebesar Rp.8.661.623.718,00,-

Sebagai bentuk upaya pencapaian realisasi terhadap target kinerja yang dilakukan, dibawah ini akan diuraikan pencapaian kinerja pelayanan dalam bentuk tabel 2.2 dihalaman sebelah :

Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BKPSDM
KABUPATEN KAMPAR

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota**	80%	100%	100%	100%	60%	80%	100%	100%	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi BKPSDM Kab. Kampar	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	8 Dok/ Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	
	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
	2. Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	1 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	
	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	1 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	
	4. Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	1 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	
	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			2 Dokumen	1 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	
	6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
2	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80%	100%	100%	100%	80%	80%	100%	100%	
	7. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	45 Orang	45 Orang/ Bulan	14 Bulan	14 Bulan	45 Orang	45 Orang/ Bulan	
	8. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	
3	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	85,71%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
	9. Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	8 Orang	20 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0 Orang	8 Orang	1 Laporan	1 Laporan	
	10. Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	126 Orang	0 Orang	11 Orang	30 Orang	0 Orang	0 Orang	11 Orang	30 Orang	
4	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	
	11. Jumlah Paket Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor yang disedikan	12 Bulan	12 Bulan	12 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Orang	12 Paket	1 Paket	
	12. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	188 Jenis	188 Jenis	100 Paket	50 Paket	188 Jenis	188 Jenis	100 Paket	100 Jenis	
	13. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Paket	2 Paket	
	14. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Paket	2 Paket	
	15. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Udangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Dokumen	3 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Dokumen	3 Dokumen	
	16. Jumlah Laporan Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	100 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	100 Laporan	

5.	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah				100%				100%	
	17. Jumlah Paket Mebel yang disediakan				10 Unit				10 Unit	
	18. Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan				10 Unit				10 Unit	
	19. Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan				5 Unit				5 Unit	
	20. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				5 Unit				5 Unit	
6	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%				100%	
	21. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	
	22. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	
7	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	
	23. Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
	24. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	25. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperlihara	12 Bulan	12 Bulan	50 Unit	10 Unit	12 Bulan	12 Bulan	50 Unit	10 Unit	
	26. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperlihara/direhabilitasi				1 Unit				1 Unit	
	27. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit				2 Unit	

II	**Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah**			100%	100%				100%	
8	Persentase Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai			100%	100%				100%	
	28. Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	220 Orang	0 Orang	300 Orang	1 Dokumen	0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 Dokumen	
	29. Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	350 Orang	350 Orang	350 Orang	1 Dokumen	354 Orang	469 Orang	350 Orang	1 Dokumen	
	30. Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Lembaga	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Lembaga	
	31. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			2 Dokumen	1 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	
	32. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3150 Orang	3500 Orang	3500 Orang	7000 Dokumen	8348 Orang	3783 Orang	3500 Orang	7000 Dokumen	
	33. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Laporan	2 Laporan			1 Laporan	2 Laporan	
9.	Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN			100%	100%			100%	100%	
	34. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Dokumen	338 Orang	398 Orang	500 Orang	500 Dokumen	
	35. Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1400 Orang	2000 Orang	2000 Orang	1500 Orang	1620 Orang	1569 Orang	2000 Orang	1500 Orang	
	36. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	760 Jabatan Struktural	760 Jabatan Struktural	760 Jabatan Struktural	600 Dokumen	760 Jabatan Struktural	299 Jabatan Struktural	300 Jabatan Struktural	600 Dokumen	
10.	Perentase Peningkatan Kapasitas ASN	100%	100%	100%	100%	0 %	62,73 %	0 %	100%	
	37. Jumlah ASN peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah	100 Orang	0 Orang	100 Orang	-	100 Orang	0 Orang	0 Orang	-	
	38. Jumlah ASN penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	3 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	3 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	

11	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	39. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Orang	7080 Orang	7080 Orang	5200 Dokumen	5200 Orang	7305 Orang	7080 Orang	5200 Dokumen	
	40. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	300 Orang	7080 Orang	7080 Orang	5200 Laporan	2011 Orang	7305 Orang	7080 Orang	5200 Laporan	
	41. Jumlah ASN yang diberi penghargaan	150 Orang	275 Orang	275 Orang	300 Orang	325 Orang	325 Orang	275 Orang	300 Orang	
	42. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyeselesaian Pelanggaran Disiplin	20 Orang	40 Orang	40 Orang	1 Laporan	20 Orang	33 Orang	40 Orang	1 Laporan	
	43. Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani		40 Orang	40 Orang	1 Dokumen	31 Orang	3 Orang	40 Orang	1 Dokumen	
III.	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**0%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**100%**	
12.	Persentase Pengembangan Kapasitas dibidang Kompetensi Teknis	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
	44. Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	20 Orang	0 Orang	20 Orang	15 Orang	20 Orang	10 Orang	0 Orang	15 Orang	
13.	Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	50%	50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	
	45. Jumlah laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	216 Orang	86 Orang	80 Orang	1 Laporan	216 Orang	86 Orang	86 Orang	1 Laporan	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Analisa Lingkungan Stretegis

2.3.1.1. Kondisi Umum BKPSDM Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar mempunyai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan orgaisasi sebagai berikut:

A. Kedudukan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

B. Tugas Pokok

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

C. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang mutasi dan promosi, bidang penilaian aparatur dan penghargaan dan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi dan bidang pengembangan kompetensi aparatur.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang mutasi dan promosi, bidang penilaian aparatur dan penghargaan dan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi dan bidang pengembangan kompetensi aparatur.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sekretariat, bidang mutasi dan promosi, bidang penilaian aparatur dan penghargaan dan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi dan bidang pengembangan kompetensi aparatur.
4. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang mutasi dan promosi, bidang penilaian aparatur dan penghargaan dan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi dan bidang pengembangan kompetensi aparatur.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, terdiri dari

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari:
   c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   d. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Mutasi dan Promosi
4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
6. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3.2. Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal merupakan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada di ruang lingkup kepegawaian pada kondisi terkini. Adapun kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strengths)

1. Jumlah PNS sebanyak 45 orang (berdasarkan data per 31 Desember 2022) dengan komposisi menurut jenis kelamin dan, golongan, pendidikan cukup variatif;
2. Peningkatan kelembagaan pengelola kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Anatusiasme PNS untuk meningkatkan tingkat pendidikan.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Kualitas PNS belum berdasarkan kompetensi yang diinginkan;
2. Belum adanya pembinaan pola karir PNS;
3. Belum adanya sarana dan prasarana gedung kantor yang layak dan sistem admnistrasi kepegawaian masih manual;
4. Disparitas baik jumlah maupun kualitas PNS antara 1 (satu) OPD dengan OPD lainnya.

2.3.3. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal merupakan analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang berada diluar lingkup kepegawaiam pada kondisi terkini yang terdiri dari ***Peluang*** dan ***Tantangan***. Adapun peluang dan tantangan dimaksud sebagai berikut:

a. Peluang (Oppotunities)

1. Kebijakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan khususnya dan tenaga teknis lainnya;

2. Kebijakan Pemerintah dalam hal pemenuhan kesejahteraan PNS sesuai standar kehidupan yang layak;
3. Kebijakan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
4. Terbukanya pengembangan model, bentuk dan system pendidikan dan pelatihan baik yaang diselenggarakan pemerintah melalui balai diklat maupun pihak swasta untuk peningkatan kompetensi PNS.

b. Tatangan (Threaths)

1. Kelembagaan Perangkat Daerah yang ramping struktur dan kaya fungsi;
2. Kemajuan Teknologi informasi yang semakin pesat;
3. Percepatan pembangunan yang menuntut kualitas aparatur;
4. Tuntutan pelayanan masyarakat yang ingin mudah, cepat, tertib aturan, murah dan akuntabel.

2.3.4. Isu isu Strategis BKPSDM Kabupaten Kampar dan Upaya Penanganannya.

Dari pelaksanaan program/kegiatan tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi dan perlu penanganannya. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 masalah yang timbul dapat diminimalisir dan dicarikan pemecahannya.

Permasalahan yang masih muncul antara lain:

1. Kurangnya kuantitas aparatur pengelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang masih belum efektif;

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang menunjang penyelanggaraan kegiatan;
4. Terbatasnya kompetensi aparatur dalam kaitannya penataan jumlah dan penempatan PNS yang proporsional;
5. Belum adanya sarana kegiatan yang memenuhi standar penyelanggaraan kegiatan milik pemerintah daerah;
6. Terbatasnya dukungan anggaran operasional BKPSDM Kabupaten Kampar.

Sedangkan Upaya penanganan yang akan diupayakan oleh BKPSDM Kabupaten Kampar untuk mengantisipasi permasalahan yang ada anatara lain:

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai :
   - Peningkatan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata anggaran belanja modal;
   - Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pengalokasian yang proporsional;
2. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan kedinasan dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
   - Meningkatkan koordinasi denga Perangkat Daerah dalam di kabupaten, lembaga diklat provinsi dan pusat serta pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan;
3. Meningkatkan Penataan Sistim Pelayanan manajemen kepegawaian yang cepat, tepat, transparan dan kepastian waktu;
   - Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu berdasarkan hasil perencanaan, analisis, perancangan dan desain sistem;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar, menetapkan isu strategis pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Sejumlah isu tersebut akan menjadi fokus di tahun depan. Isu tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan kebutuhan hak pegawai negeri sipil (PNS). Agar PNS mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam setahun. Hal ini perlu dilakukan agar kualitas aparatur yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kampar terus meningkat.
2. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Untuk menilai kinerja dan menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja perlu dilaksanakan Diklat Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai Peraturan Menteri PANRB nomor 38 tahun 2017. Hal perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sitem merit dalam manajemen kepegawaian. Standar Kompetensi Jabatan ASN merupakan salah satu unsur yang dinilai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melihat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
4. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas Aparatur Sipil Negara.
5. Peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian berbasis Teknologi Informasi (TI).
6. Penerapan menajemen kinerja dan manajemen talenta.
7. Pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional.

Selain itu, terdapat juga lima fokus kegiatan BKPSDM di tahun 2024.

1. Pendidikan dan Latihan (Diklat) teknis dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan infrastruktur dan pemulihan ekonomi.
2. Pendidikan dan Latihan (Diklat) Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
3. Penerimaan ASN (PNS dan PPPK)
4. Mengadakan uji kompetensi bagi ASN.
5. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis TI

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kampar Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sesuai dengan pagu indikatif dan analisa kebutuhan masing-masing bidang dilingkungan BKPSDM sebagaimana terlampir pada tabel review 2.3 di halaman sebelah:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN KAMPAR

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Program Kepegawaian Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah	**100%**	**3.686.177.300**	**Program Kepegawaian Daerah**	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah	**100%**	**3.986.177.300**	
1.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**100%**	**1.051.177.000**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**100%**	**1.351.177.000**	
1.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	800.000.000	
2.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	147.177.300	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	147.177.300	
3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	34.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	34.000.000	
4.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	
5.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaia	7000 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaia	7000 Dokumen	150.000.000	
6.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan	170.000.000	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Laporan	170.000.000	
2.	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN**	100%	**1.400.000.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN**	100%	**1.400.000.000**	

7.	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Antar ASN Antar Daerah	500 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Antar ASN Antar Daerah	500 Dokumen	150.000.000	
8.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	550.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	550.000.000	
9.	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	600 Dokumen	700,000,000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	600 Dokumen	700,000,000	
3.	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kapasitas ASN**	100%	**600.000.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Kapasitas ASN**	100%	**600.000.000**	
10.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang medapatkan Pendidikan lanjutan	5 Orang	600.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang medapatkan Pendidikan lanjutan	5 Orang	600.000.000	
4.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	**635.000.000**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	**635.000.000**	
11.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Dokumen	75.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Dokumen	75.000.000	
12.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Laporan	360.000.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5200 Laporan	360.000.000	
13.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	300 Orang	80.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	300 Orang	80.000.000	
14.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	50.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	50.000.000	
15.	Pelayanan Proses IzinPerceraian Pegawai	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	1 Dokumen	70.000.000	Pelayanan Proses IzinPerceraian Pegawai	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	1 Dokumen	70.000.000	
II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	***Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	100%	**7.957.063.549**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	***Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	100%	**8.102.063.549**	

5.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	8 Dokumen	**303.750.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	8 Dokumen	**373.750.000**	
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	180.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000.000	
17.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	27.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	27.500.000	
18.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.750.000	
19.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	13.750.000	
20.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.750.000	
21.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	42.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	42.000.000	
22.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	13.000.000	
6.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	**5.112.035.645**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	**5.112.035.645**	

23.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.108.327.459	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	5.108.327.459	
24.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.708.186	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.708.186	
7.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	**235.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	**310.000.000**	
25.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawian	1 Dokumen	0	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawian	1 Dokumen	75.000.000	
26.	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	125.000.000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	125.000.000	
27.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	110.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	110.000.000	
8.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	**1.133.407.426**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	**1.133.407.426**	
28.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	20.000.000	
29.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	400.000.000	
30.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	15.000.000	
31.	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	46.791.426	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	46.791.426	

32.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	46.825.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	46.825.000	
33.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.791.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.791.000	
34.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000	
9.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**445.870.478**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	**445.870.478**	
35.	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit	200.000.000	
36.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	10 Unit	90.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	10 Unit	90.000.000	
37.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	52 Unit	25.870.478	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	52 Unit	25.870.478	
38.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	130.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	130.000.000	
10.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**415.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	**415.000.000**	
39.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.000.000	
40.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	280.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	280.000.000	
11.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32 Unit	**312.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32 Unit	**312.000.000**	

41.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	60.000.000	
42.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas opersaionla atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	22.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas opersaionla atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	22.000.000	
43.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
44.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000	
III.	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**100%**	**1.080.000.000**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**100%**	**1.383.903.727**	
12.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**20 Orang**	**165.000.000**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis**	**20 Orang**	**265.000.000**	
45.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	165.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	15 Orang	265.000.000	
13.	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**100%**	**700.000.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**	**100%**	**950.000.000**	
46.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	1 Laporan	700.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	1 Laporan	950.000.000	

	Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
	TOTAL				**12.508.240.849**					**13.303.240.849**	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Kampar sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar, mempunyai kewenangan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga secara langsung tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Kampar Tahun 2023, usulan dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Kampar, pada Rencana Kerja Tahun 2024 tidak ada ususlan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunan, secara opersaional bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia tercantum dalam urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk tahun 2024 belum terdapat turunan program nasional dan program provinsi yang harus dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kampar.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Kampar dimaksudkan untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Kampar dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas BKPSDM Tahun Anggaran 2024.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan BKPSDM Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.
3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada BKPSDM Kabupaten Kampar.
4. Untuk kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pada BKPSDM Kabupaten Kampar.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran BKPSDM kabupaten Kampar.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Kampar, dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel. 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Indusri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera MISI : Menjadikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Sebagai Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil yang Profesional dan Sejahtera			
TUJUAN	SASARAN	STARTEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Aparatur melalui Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kompetensi ASN (formal dan non forma)	Pengembangan Kompetensi ASN (formal dan non formal) 1. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan 2. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional 3. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif 4. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen 5. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka Penetapan kinerja individu 1. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai 2. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi 3. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai Peningkatan SDM Aparatur dalam Ikatan Dinas
		Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	1. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat 2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) 3. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif 4. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN 5. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka

		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Telah ada standar kompetensi jabatan 2. Telah dilakukan asessment pada sebagian besar pegawai 3. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai 4. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai 5. berbasis kompetensi secara tidak berkala
	Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan kepegawaian	Membangun Aplikasi Sistem Teknologi Informasi yang dapat mengukur dan menilai kinerja Aparatur 1. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan 2. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai 3. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian 4. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja Terpenuhinya fasilitas pindah/purna PNS Terlakasananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	1. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah 2. diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode 3. perilaku instansi secara berkala 4. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi

3.3. **Program dan Kegiatan**

Program/Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 :

A. Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Bidang Urusan : Kepegawaian

Penunjang Bidang Urusan Kepegawaian terdiri dari 2 (dua) program urusan dengan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Terdiri dari kegiatan :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

   dengan Sub Kegiatan:

   i. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
   ii. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
   iii. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
   iv. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
   v. Pengelolaan Data Kepegawaian
   vi. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

2. Mutasi dan Promosi ASN

   dengan Sub Kegiatan:

   vii. Pengelolaan Mutasi ASN
   viii. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
   ix. Pengelolaan Promosi ASN

3. Pengembangan Kompetensi ASN

   dengan Sub Kegiatan:

   x. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

   dengan Sub Kegiatan:

   xi. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   xii. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

xiii. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

xiv. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

xv. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   dengan Sub Kegiatan:

xvi. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

xvii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

xviii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

xix. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

xx. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

xxi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

xxii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   dengan Sub Kegiatan:

xxiii. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

xxiv. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   dengan Sub Kegiatan:

xxv. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

xxvi. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

xxvii. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   dengan Sub Kegiatan:

xxviii. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

xxix. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

xxx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

xxxi. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

xxxii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

xxxiii. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

xxxiv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

xxxv. Pengadaan Meubiler

xxxvi. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

xxxvii. Pengadaan Aset Tak Berwujud

xxxviii. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:

xxxix. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

xl. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan Sub Kegiatan:

xli. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

xlii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

xliii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

xliv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Penunjang Bidang Urusan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN terdiri dari 1 (satu) program urusan dengan 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

I. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Terdiri dari kegiatan :

1. Pengembangan Kompetensi Teknis
Dengan Sub Kegiatan:

xlv. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Dengan Sub Kegiatan:

xlvi. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rumusan rencana program /kegiatan BKPSDM tahun 2024 dapat dilihat tabel 4.1 dihalaman sebelah:

Tabel 4.1
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KAMPAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**				**11.643.240.849**				**23.803.368.750**
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**3.686.177.300**				**9.350.000.000**
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegeawaian**			**1.051.177.300**				**2.375.000.000**
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	25.000.000
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.000.000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	800.000.000
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	25.000.000
5	03	02	2.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	25.000.000

5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Administrasi Pemberhentian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	147.177.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	25.000.000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	34.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	500.000.000
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	25.000.000
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaia	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7000 Dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	170.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN**			**1.400.000.000**				**1.740.000.000**
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Antar ASN Antar Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Dokumen	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	190.000.000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1500 Dokumen	550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	750.000.000
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Dokumen	700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	800.000.000
5	**3**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN**			**600.000.000**				**4.025.000.000**
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000

5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	1.000.000.000
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	200.000.000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	850.000.000
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan KerjasamaPelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	500.000.000
5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Jabatan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.000.000
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	03	02	2.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	30.000.000
5	03	02	2.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	03	02	2.03	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	15.000.000
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.000.000
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karier	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000

5	03	02	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	30.000.000
5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**			**635.000.000**				**1.210.000.000**
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	90.000.000
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5200 Dokumen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	120.000.000
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5200 Laporan	360.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	380.000.000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberi Penghargaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300 Orang	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	110.000.000
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberi Tanda Jasa	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	90.000.000
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	90.000.000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisplinan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	100.000.000
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	70.000.000
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	80.000.000
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	80.000.000
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**		**100 Persen**	**7.957.063.549**				**14.453.368.750**

5	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi BPKSDM Kab. Kampar**		**8 Dok/Lap**	**303.750.000**				**375.250.000**
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	27.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	28.500.000
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	13.750.000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	13.750.000
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	13.750.000
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	42.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	42.000.000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	13.500.000
5	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5.112.035.645**				**5.665.200.000**
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang/ Bulan	5.108.327.459	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	5.600.000.000
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	25.000.000
5	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	12.500.000
5	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	4.500.000
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	3.708.186	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	4.500.000

5	3	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	3.500.000
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Hasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	3.700.000
5	3	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	3.500.000
5	**3**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah**			**0**				**14.000.000**
5	3	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	3.600.000
5	3	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	3.600.000
5	3	1	2.03	3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	3.500.000
5	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	3.700.000
5	**3**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**235.000.000**				**878.318.750**
5	3	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	35.000.000
5	3	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaet Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.118.750
5	3	1	2.05	3	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	75.000.000
5	3	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	125.000.000
5	3	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	17.500.000

5	3	1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	80.000.000
5	3	1	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	125.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	3	1	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	45.000.000
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	14.000.000
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	42.300.000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	110.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	144.000.000
5	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**1.133.047.426**				**2.082.700.000**
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	750.000.000
5	3	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	15.000.000
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	46.791.426	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	47.500.000
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	46.825.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	46.825.000
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	4.791.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	4.875.000

5	3	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	13.500.000
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasiiasi Kunjungan Tamu	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	55.000.000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Laporan	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	900.000.000
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penataanusahaan Arsip pada SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	20.000.000
5	3	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	80.000.000
5	**3**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**445.870.478**				**4.100.000.000**
5	3	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	1.500.000.000
5	3	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	750.000.000
5	3	1	2.07	05	Pengadaan Meubiler	Jumlah Paket Meubiler yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	3	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	3	1	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	200.000.000
5	3	1	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	25.87.478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000
5	3	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	500.000.000
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000

5	3	1	2.07	11	Pengaadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disedikan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**415.000.000**				**570.000.000**
5	3	1	2.08	1	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	5.000.000
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	135.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	125.000.000
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	280.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	290.000.000
5	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah**			**312.000.000**				**830.000.000**
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas perorangan dan Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	80.000.000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Kendaraan Dinas opersaionla atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	22.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	25.000.000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	75.000.000
5	03	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.000.000
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang DIpelihara	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.000.000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000

5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	150.000.000
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**865.000.000**				**7.754.385.000**
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA MANUSIA**			**865.000.000**				**7.754.385.000**
5	**4**	**2**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Terpenuhinya Pengembangan Kapasitas dibidang Kompetensi Teknis**			**165.000.000**				**530.000.000**
5	4	2	2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.000.000
5	4	2	2.01	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaran Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaran Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum yang disusun	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN Yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Orang	165.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	180.000.000

5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	50.000.000
5	**4**	**2**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase Pemenuhan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**			**873.903.727**				**1.602.922.583**
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional yang disusun	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	250.000.000
5	4	2	2.02	3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	6.074.385.000
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 Persen	900.000.000
								TOTAL	**12.508.240.849**				**31.620.253.750**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Kampar 2023 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan sasaran yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Renja BKPSDM Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renja BKPSDM Tahun 2024 dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian BKSPDM Kabupaten Kampar dalam Tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya perbaikan dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar selama Tahun Anggaran 2024, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim,

individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Bangkinang, *12* Juli 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPAR



Ir. COKROAMINOTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199310 1 001

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2024



DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK
KABUPATEN KAMPAR
AGUSTUS 2024

KATA PENGANTAR

Bersyukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat dan KaruniaNYA sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa sholawat berangkai salam dengan ucapan *Allahumma sholli 'ala Muhammad wasallim wabarik 'alaihi* dihadiahkan kepada rahmatan lil 'alamin, Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari penjabaran lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini memiliki peranan penting karena merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi suatu keharusan karena akan digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 ini membutuhkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada tahun-tahun yang akan datang. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang terlibat selama penyusunan berlangsung diucapkan terima kasih.

Bangkinang, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

DENDI ZULHAIRI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730304 199201 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 25

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 30

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 34

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 45

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 48

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 48

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 49

3.3. Program dan Kegiatan 51

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V. PENUTUP 67

5.1. Rekomendasi 67

5.2. Kaidah Pelaksanaan 68

5.3. Rencana Tindak Lanjut 68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar Posisi Bulan Mei Tahun Anggaran 2024 10

Tabel 2 Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar Posisi Bulan Desember Tahun Anggaran 2023 15

Tabel 3 (T-C. 29) Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten / Kota dalam Rangka Pencapaian Target Nasional Kabupaten Kampar Tahun 2024 21

Tabel 4 (T-C. 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 26

Tabel 5 Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Non KUD di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023 28

Tabel 6 Perkembangan Modal Usaha, Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 s/d 2023 28

Tabel 7 UMKM Binaan dan Volume Usaha UKM Binaan di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023 28

Tabel 8 Perkembangan Jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023 29

Tabel 9 Jumlah Pengendalian Distribusi Barang di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023 29

Tabel 10 Jumlah Perkembangan Rekomendasi Izin BBM / LPG Bersubsidi Tahun 2020 s/d 2023 30

Tabel 11 Matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) 33

Tabel 12 (T-C. 31) Review Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 35

Tabel 13 (T-C. 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar 46

Tabel 14 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD 49

Tabel 15 Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 50

Tabel 16 (T-C. 33) Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kampar 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan salah satu lembaga teknis yang mengemban tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perdagangan, koperasi dan UMK. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Kampar, dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan di tiap perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis Tahun 2023 – 2026 yang dijabarkan ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 yang disusun secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus pada pelayanan masyarakat di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK.

Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapannya.

Perlu dicermati bahwa sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yakni menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, RENJA sebagai komitmen Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan khususnya dalam pengembangan atau pelayanan di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar. Sekaligus sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Kampar.

Ada beberapa prinsip dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024, yaitu :

1. Substansi Renja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur kinerja keluaran, target capaian program / kegiatan, target keluaran kegiatan dan total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar 2023-2026 dan berpedoman pada RPJMD 2023-2026. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
    a. Pembentukan Tim Penyusun Renja.

b. Orientasi mengenai Renja.
c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja.
d. Pengumpulan Data dan Informasi.

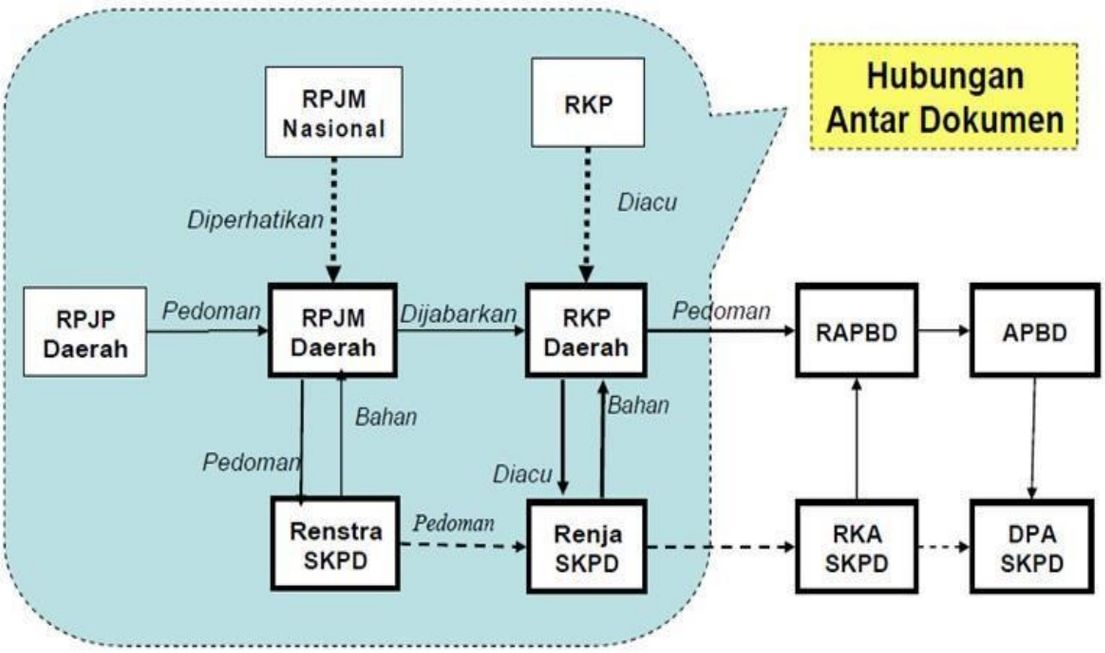
2. Pengolahan Data dan Informasi

   Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renja
   a. Pengolahan data dan informasi.
   b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas.
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.
   e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD.
   f. Perumusan tujuan dan sasaran.
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.
   h. Perumusan kegiatan prioritas.
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah.
   j. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
   k. Pembahasan forum Perangkat Daerah dan
   l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja.
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
6. Penetapan Renja.

Mencermati prinsip dan tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan sekaligus proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar berikut.

Gambar 1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berdasarkan pedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berdasarkan pedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kampar untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah sejalan dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar mengacu dan berpedoman pada peraturan yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 1).
29. Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
30. Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
31. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026 ;
32. Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar jangka pendek 1 (satu) tahun untuk Tahun 2024;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam jangka 1 (satu) tahun;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar;
3. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh jajaran organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam pencapaian visi dan misi;
4. RENJA diharapkan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan dievaluasi secara objektif sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan untuk mendukung pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Kampar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada masing-masing program dan kegiatan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan perbandingan target kinerja antara tahun lalu dan tahun yang akan datang. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 (tahun berjalan*) dilakukan dengan membandingkan kinerja realisasi dengan kinerja yang direncanakan, sedangkan di masa sebelumnya dan perbandingan kinerja realisasi dengan kinerja tahun sebelumnya dan perbandingan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan kinerja dinas / instansi lain yang sejenisnya.

Kegiatan Tahun 2024 (sampai dengan Mei 2024) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh), yang pencapaian fisiknya di atas 50% atau yang mencapai target 100% sebanyak 15 sub kegiatan, yang capaian penyelesaian fisiknya di bawah 50% sebanyak 11 sub kegiatan dan di bawah 30% sebanyak 11 sub kegiatan.
2. Untuk realisasi keuangan dapat diperoleh realisasi penyerapan 50% s/d 100% sebanyak 15 sub kegiatan, yang penyerapannya antara 30% s/d 50% 101 sub kegiatan dan di bawah 30% sebanyak 11 sub kegiatan.

Lebih jelasnya hasil kegiatan Tahun 2024 (sampai dengan bulan Mei) dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

TABEL 1

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KABUPATEN KAMPAR

POSISI : BULAN MEI 2024

PAGU ANGGARAN	:	10,393,321,252
JUMLAH PROGRAM	:	10 Program
JUMLAH KEGIATAN	:	19 Kegiatan
JUMLAH SUB KEGIATAN	:	37 Sub Kegiatan
REALISASI FISIK	:	41.16
REALISASI KEUANGAN	:	4,277,773,445.00

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK			PERMASALAHAN
				TARGET		REALISASI		TARGET	REALISASI	DEVIASI	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100	9	10	11=(10-9)	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**282,552,200**									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230,819,700	2.22	128,131,000	55.51	109,681,875	47.52	55.51	47.52	(7.99)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	36,028,000	0.35	16,122,000	44.75	2,199,750	6.11	44.75	6.11	(38.64)	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,704,500	0.15	10,510,000	66.92	14,432,025	91.90	66.92	91.90	24.97	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**5,009,057,435**									
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,980,808,235	47.92	1,929,545,090	38.74	1,929,424,040	38.74	38.74	38.74	(0.00)	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28,249,200	0.27	14,421,200	51.05	23,349,200	82.65	51.05	82.65	31.60	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**671,954,545**									
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9,634,200	0.09	6,422,800	66.67	1,934,000	20.07	66.67	20.07	(46.59)	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	178,730,745	1.72	152,296,595	85.21	142,205,275	79.56	85.21	79.56	(5.65)	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,520,000	0.45	15,596,600	33.53	43,675,000	93.88	33.53	93.88	60.36	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66,309,600	0.64	40,122,700	60.51	16,962,300	25.58	60.51	25.58	(34.93)	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,248,000	0.10	4,270,000	41.67	2,562,000	25.00	41.67	25.00	(16.67)	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360,512,000	3.47	174,972,000	48.53	148,026,702	41.06	48.53	41.06	(7.47)	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**89,560,128**									
12	Pengadaan Mebel	89,560,128	0.86	89,560,128	100.00	27,772,200	31.01	100.00	31.01	(68.99)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**992,545,344**									
13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	169,860,000	1.63	70,775,000	41.67	60,725,571	35.75	41.67	35.75	(5.92)	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	822,685,344	7.92	342,785,555	41.67	323,557,996	39.33	41.67	39.33	(2.34)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**393,882,000**									
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	265,881,500	2.56	113,664,600	42.75	133,038,274	50.04	42.75	50.04	7.29	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87,500,000	0.84	87,500,000	100.00	81,960,580	93.67	100.00	93.67	(6.33)	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,500,500	0.39	13,200,000	32.59	29,558,000	72.98	32.59	72.98	40.39	
II	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**										
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**160,311,500**									
18	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	160,311,500	1.54	66,258,166	41.33	73,261,500	45.70	41.33	45.70	4.37	
III	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**										
	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**72,578,300**									
19	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	35,087,300	0.34	11,876,655	33.85	23,077,300	65.77	33.85	65.77	31.92	
20	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	37,491,000	0.36	16,473,000	43.94	-	-	43.94	0.00	(43.94)	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAN, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**										
	Pemberdayaan UMK yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**1,452,602,250**									
21	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	467,018,600	4.49	353,088,666	75.60	253,035,500	54.18	75.60	54.18	(21.42)	

22	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	289,862,300	2.79	278,632,000	96.13	258,970,600	89.34	96.13	89.34	(6.78)	
23	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	270,589,400	2.60	161,561,295	59.71	100,887,675	37.28	59.71	37.28	(22.42)	
24	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (DAK Non Fisik)	425,131,950	4.09	252,596,730	59.42	48,874,550	11.50	59.42	11.50	(47.92)	
V	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**										
	Pengembagan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**239,929,400**									
25	Pengembangan Usaha Mikro	239,929,400	2.31	126,195,000	52.60	67,174,400	28.00	52.60	28.00	(24.60)	
VI	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**										
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	**83,731,300**									
26	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	83,731,300	0.81	26,341,000	31.46	43,376,997	51.80	31.46	51.80	20.35	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**7,336,800**									
27	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7,336,800	0.07	740,000	10.09	-	-	10.09	0.00	(10.09)	
	Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**56,654,300**									
28	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	56,654,300	0.55	35,104,300	61.96	35,032,250	61.84	61.96	61.84	(0.13)	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**										
	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**42,436,300**									
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20,087,600	0.19	8,492,600	42.28	6,896,200	34.33	42.28	34.33	(7.95)	
30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	22,348,700	0.22	10,357,000	46.34	4,447,900	19.90	46.34	19.90	(26.44)	
VIII	**PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK**										
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**100,320,500**									
31	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100,320,500	0.97	38,700,500	38.58	49,561,850	49.40	38.58	49.40	10.83	

	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupten / Kota	**434,788,400**									
32	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	87,577,500	0.84	29,850,000	34.08	46,362,025	52.94	34.08	52.94	18.85	
33	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	347,210,900	3.34	50,647,400	14.59	38,972,300	11.22	14.59	11.22	(3.36)	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**20,043,900**									
34	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20,043,900	0.19	14,540,000	72.54	13,623,750	67.97	72.54	67.97	(4.57)	
IX	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**										
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**214,117,450**									
35	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	149,270,600	1.44	99,254,600	66.49	49,310,660	33.03	66.49	33.03	(33.46)	
36	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	64,846,850	0.62	37,178,850	57.33	15,574,000	24.02	57.33	24.02	(33.32)	
X	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**										
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	**68,919,200**									
37	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	68,919,200	0.66	68,919,200	100.00	58,269,200	84.55	100.00	84.55	(15.45)	
JUMLAH		**10,393,321,252**	**100**	**4,896,702,230**	**53.79**	**4,277,773,445**	**41.16**	**53.79**	**41.16**	**(7.90)**	

Bangkinang, 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL KAB. KAMPAR

Drs. H. DENDI ZULHAIRI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730304 199201 1 001

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 2024 berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023 mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 10.958.090.103,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Seratus Tiga Rupiah) yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.819.205.341,-
2. Belanja Langsung : Rp. 6.708.250.712,-
3. Dak Non Fisik : Rp. 430.634.050,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 10 (sepuluh) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Adapun evaluasi hasil kegiatan Tahun 2023 (sampai dengan triwulan IV) sebagaimana dituangkan pada tabel 2 berikut.

TABEL 2

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

APBD KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

BULAN DESEMBER 2023

PAGU ANGGARAN	:	10,958,090,103
JUMLAH PROGRAM	:	10 Program
JUMLAH KEGIATAN	:	20 Kegiatan
JUMLAH SUB KEGIATAN	:	37 Sub Kegiatan
REALISASI FISIK	:	88.23
REALISASI KEUANGAN	:	88.23

No.	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU (RP)	Bobot (%)	PROGRES KEUANGAN						PROGRES FISIK			PERMASALAHAN
				TARGET		REALISASI SP2D		REALISASI SPJ		TARGET	REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100	9	10=9/5*100	11	12	13=12*4/100	14
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**												
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**343,990,100**											
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	272,950,100	2.49	272,950,100	2.49	243,503,690	89.21	243,503,690	89.21	100.00	89.21	2.22	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50,440,000	0.46	50,440,000	0.46	49,034,000	97.21	49,034,000	97.21	100.00	97.21	0.45	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,600,000	0.19	20,600,000	0.19	20,598,000	99.99	20,598,000	99.99	100	100	0.19	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3,852,686,341**											
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,819,205,341	34.85	3,819,205,341	34.85	3,658,975,241	95.80	3,658,975,241	95.80	100.00	95.80	33.39	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33,481,000	0.31	33,481,000	0.31	33,481,000	100.00	33,481,000	100.00	100.00	100.00	0.31	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**985,548,740**											
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	28,746,000	0.26	28,746,000	0.26	28,746,000	100.00	28,746,000	100.00	100.00	100.00	0.26	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351,348,140	3.21	351,348,140	3.21	350,848,140	99.86	350,848,140	99.86	100.00	99.86	3.20	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,878,500	0.80	87,878,500	0.80	87,878,500	100.00	87,878,500	100.00	100.00	100.00	0.80	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92,484,100	0.84	92,484,100	0.84	92,484,100	100.00	92,484,100	100.00	100.00	100.00	0.84	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,850,000	0.18	19,850,000	0.18	19,850,000	100.00	19,850,000	100.00	100.00	100.00	0.18	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	405,242,000	3.70	405,242,000	3.70	369,587,883	91.20	369,587,883	91.20	100.00	91.20	3.37	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**42,010,000**											

12	Pengadaan Mebel	42,010,000	0.38	42,010,000	0.38	42,010,000	100.00	42,010,000	100.00	100.00	100.00	0.38	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1,008,594,400**											
13	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	150,816,000	1.38	150,816,000	1.38	141,912,355	94.10	141,912,355	94.10	100.00	94.10	1.30	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857,778,400	7.83	857,778,400	7.83	852,592,835	99.40	852,592,835	99.40	100.00	99.40	7.78	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**371,062,606**											
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	278,848,606	2.54	278,848,606	2.54	270,924,856	97.16	270,924,856	97.16	100.00	97.16	2.47	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,214,000	0.84	92,214,000	0.84	92,214,000	100.00	92,214,000	100.00	100.00	100.00	0.84	
II	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**												
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**237,333,850**											
17	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian dan Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	77,188,000	0.70	77,188,000	0.70	74,243,800	96.19	74,243,800	96.19	100.00	96.19	0.68	
18	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundangan - Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	160,145,850	1.46	160,145,850	1.46	160,145,850	100.00	160,145,850	100.00	100.00	100.00	1.46	
III	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**												
	Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	**36,751,050**											
19	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	36,751,050	0.34	36,751,050	0.34	36,751,050	100.00	36,751,050	100.00	100	100	0.34	
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAN, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**												
	Pemberdayaan UMK yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**1,639,515,627**											
20	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	190,707,877	1.74	190,707,877	1.74	190,574,800	99.93	190,574,800	99.93	100.00	99.93	1.74	
21	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	596,791,150	5.45	596,791,150	5.45	587,801,150	98.49	587,801,150	98.49	100.00	98.49	5.36	
22	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	421,382,550	3.85	421,382,550	3.85	420,798,550	99.86	420,798,550	99.86	100.00	99.86	3.84	
23	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan (DAK Non Fisik)	430,634,050	3.93	430,634,050	3.93	416,913,150	96.81	416,913,150	96.81	100.00	96.81	3.80	

V	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**												
	Pengembagan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**396,967,650**											
24	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	396,967,650	3.62	396,967,650	3.62	342,151,650	86.19	342,151,650	86.19	100.00	86.19	3.12	
VI	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**												
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	**59,720,000**											
25	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	59,720,000	0.54	59,720,000	0.54	59,719,775	100.00	59,719,775	100.00	100.00	100.00	0.54	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	**26,267,000**											
26	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	26,267,000	0.24	26,267,000	0.24	21,697,000	82.60	21,697,000	82.60	100.00	82.60	0.20	
	Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di	**113,190,300**											
27	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	113,190,300	1.03	113,190,300	1.03	112,620,300	99.50	112,620,300	99.50	100.00	99.50	1.03	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**												
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**585,645,439**											
28	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	585,645,439	5.34	585,645,439	5.34	67,563,310	11.54	67,563,310	11.54	100.00	11.54	0.62	
	Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**54,922,400**											
29	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	32,587,400	0.30	32,587,400	0.30	32,586,500	100.00	32,586,500	100.00	100.00	100.00	0.30	
30	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	22,335,000	0.20	22,335,000	0.20	21,685,000	97.09	21,685,000	97.09	100.00	97.09	0.20	
VIII	**PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK**												
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**143,196,300**											
31	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	143,196,300	1.31	143,196,300	1.31	138,479,797	96.71	138,479,797	96.71	100.00	96.71	1.26	
	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupten / Kota	**575,649,600**											
32	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	58,908,500	0.54	58,908,500	0.54	58,908,500	100.00	58,908,500	100.00	100.00	100.00	0.54	

33	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	516,741,100	4.72	516,741,100	4.72	116,741,100	22.59	116,741,100	22.59	100.00	22.59	1.07	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**50,783,000**											
34	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50,783,000	0.46	50,783,000	0.46	50,783,000	100.00	50,783,000	100.00	100.00	100.00	0.46	
IX	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**												
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	**358,021,700**											
35	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	247,932,800	2.26	247,932,800	2.26	222,142,172	89.60	222,142,172	89.60	100.00	89.60	2.03	
36	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	110,088,900	1.00	110,088,900	1.00	106,038,100	96.32	106,038,100	96.32	100.00	96.32	0.97	
X	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**												
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	**76,234,000**											
37	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	76,234,000	0.70	76,234,000	0.70	75,284,000	98.75	75,284,000	98.75	100.00	98.75	0.69	
JUMLAH		**10,958,090,103**	**100**	**############**	**100.00**	**9,668,269,154**	**88.23**	**9,668,269,154**	**88.23**	**100.00**	**88.23**	**2.38**	

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023
KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

Drs. H. DENDI ZULHAIRI, M.Si
NIP. 19730304 199201 1 001

Berdasarkan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024 mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (< 90%) adalah :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
   c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
   d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.
   e. Program Pengembangan UMKM.
   f. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
   g. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
   h. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   i. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.
   j. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan (90% - 100%)
   a. Program / Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Program / Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
   c. Program / Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
3. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

   N I H I L
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau tidak terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara lain :
   1. Secara internal, penghambat capaian kinerja program/kegiatan adalah : (a) terbatasnya SDM di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK baik kuntitas maupun kualitas sehingga Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dari bidang terkait kurang optimal; (b) terbatasnya sarana prasarana yang tersedia; (c) proses penentuan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi kurang efektif seperti kegiatan belum sesuai *time schedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan; serta (d) belum

optimalnya pengolahan data menyangkut perdagangan, koperasi dan UMK untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

2. Secara eksternal, kendala berhubungan dengan (a) kurangnya kesadaran untuk tertib serta patuh terhadap peraturan yang ada bagi Pengurus / Pengelola Koperasi seperti RAT tepat waktu, dan bagi pelaku usaha untuk legalitas atau izin berusaha; (b) kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemberdayaan perdagangan, Koperasi dan UMK; (c) kurangnya kemampuan pelaku UMK dalam memenuhi standar/kriteria produk sesuai pasar; dan (d) kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang.

5. Implikasi atau dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD antara lain realisasi Renja Tahun 2023 mempengaruhi terhadap pencapaian target Program Renstra OPD, di mana pada posisi bulan Mei tahun 2024 baru terealisasi sebesar 41,16% dari target 100% yang direncanakan.
6. Adapun kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
   a. Pemanfaatan SDM yang ada seoptimal mungkin dengan terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan (usaha mikro kecil).
   b. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja yang tersedia sebaik mungkin.
   c. Konsistensi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sesuai prioritas kegiatan perdagangan, Koperasi dan UMK sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai.
   d. Optimalisasi pengelolaan / pemutakhiran data dan informasi tentang perdagangan, perkoperasian dan usaha mikro agar pengambilan keputusan / kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
   e. Melakukan pembinaan dan pendampingan perdagangan, perkoperasian dan kewirausahaan secara langsung dalam rangka meningkatkan minat, memonitor dan mengevaluasi perkembangannya serta memberikan informasi yang dapat diterima akan manfaat kegiatan – kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil bagi masyarakat.

Lebih jelasnya tingkat pencapaian hasil rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada tahun 2023 dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 3 (T-C. 29)
EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2020)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Tahun 2021)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2022 (akhir periode RPJMD)			Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2023 (akhir periode RPJMD) - PERUBAHAN		Realisasi Capaian Kinerja APBD s/d Tahun Lalu (2022) (TAHUN N-1)		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 (Tahun N-2)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2023 (TAHUN N-2)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
						K (Wajib Diisi)		Rp	K (Wajib Diisi)	Rp	K (Wajib Diisi)	Rp. (000)	K (Wajib Diisi)	Rp.	K (Wajib Diisi)	Rp. (000)	K (Wajib Diisi)	Rp. (000)	K (Wajib Diisi)	Rp. (000)	K (Wajib Diisi)	Rp. (000)			K (Wajib Diisi)	Rp.					K (Wajib Diisi)	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10		11		12		13		14		15 = 11+12+13+14		16 = 15/10*100		17 = 9 + 15		18 = 17/10*100		19
1		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK																													
				URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																											
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																				8,584,020,600								
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				31,659,206,487		3,361,949,792		1,123,169,074		6,603,892,187		1,573,363,833								6,354,640,600								
	2 17 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			647,694,417		260,000,000		436,016,626		343,990,100		82,585,100	13	71,885,850						313,135,690								
	2 17 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunya Dokumen Perencanaan	30	Buku	611,850,485	24	150,000,000	12	362,534,826	12	272,950,100	3	43,775,150	3	52,836,300	3	32,380,850	3.00	114,511,390	12.00	243,503,690	100.00	89.21	24.00	606,038,516	80.00	99.05	SKPD PERDAGANGAN
	2 17 1 2.01 2			Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	12	Buku		12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,440,000	3	22,309,950	3	14,951,550	3	5,632,500	3.00	6,140,000	12.00	49,034,000	100.00	97.21	24.00	99,034,000	200.00	#DIV/0!	
	2 17 01 2.01 06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya LKJIP SKPD	40	Buku	35,843,932	11	60,000,000	1	23,481,800	10	20,600,000	3	16,500,000	7	4,098,000	-	-	-	-	10.00	20,598,000	100.00	99.99	11.00	44,079,800	27.50	122.98	SKPD PERDAGANGAN
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	95.47			153.75	#DIV/0!	
																						Predikat kinerja								
	2 17 01 2.02	Program/ Kegiatan	Indikator	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Pemenuhan Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,929,812,046		14,803,196		7,221,598		3,852,686,341		761,383,942	3	1,270,392,555						3,692,456,241								
	2 17 01 2.02 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Persentase Terhadap Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bln	22,915,232,046	24	9,039,596.128	12	4,519,798.064	12	3,819,205,341	3	739,452,942	3	1,270,392,555	3	786,305,273	3.00	862,824,471	12.00	3,658,975,241	100.00	95.80	24.00	3,663,495,039	33.33	0.16	SKPD PERDAGANGAN
	2 17 01 2.02 05	Penyusunan Pelapora Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	50	Buku	14,580,000	15	5,763,600	10	2,701,800	5	33,481,000	4	21,931,000	-	-	-	-	1.00	11,550,000	5.00	33,481,000	100.00	100.00	15.00	36,182,800	30.00	2.48	SKPD PERDAGANGAN
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	97.90					
																						Predikat kinerja								
	2 17 01 2.06	Administrasi Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah				5,328,440,000		1,383,375,516		397,826,776		985,548,740		359,320,000	24	294,809,020						949,394,623								
	2 17 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Komponen Instalasi listrik	72	Bln	258,000,000	24	36,457,201	12	7,711,201	12	28,746,000	3	14,530,000	9	14,216,000	-	-	-	-	12.00	28,746,000	100.00	100.00	24.00	36,457,201	33.33	0.14	SKPD PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 01	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penggandaan buku-buku petunjuk, pedoman peraturan perundang-undangan / Bahan atau literatur pembinaan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	Bln	423,000,000	24	403,930,220	12	52,582,080	12	351,348,140	3	131,745,000	3	124,364,700	3	7,610,300	3.00	87,128,140	12.00	350,848,140	100.00	99.86	24.00	403,430,220	33.33	0.95	SKPD PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 04	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Makanan dan Minuman	72	Bln	453,470,000	24	100,378,500	12	12,500,000	12	87,878,500	3	36,267,400	3	29,878,100	6	14,792,000		6,941,000	12.00	87,878,500	100.00	100.00	24.00	100,378,500	33.33	0.22	SKPD PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	72	Bln	247,000,000	24	141,317,800	12	48,833,700	12	92,484,100	3	34,200,000	3	27,078,000	3	5,130,000	3.00	26,076,100	12.00	92,484,100	100.00	100.00	24.00	141,317,800	33.33	0.57	SKPD PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/referensi Peraturan Perundang undangan bagi aparatur	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Tersedianya Bahan Bacaan/referensi Peraturan Perundang undangan bagi aparatur	72	Bln	109,280,000	24	27,200,000	12	7,350,000	12	19,850,000	3	600,000	3	6,600,000	-	-	6.00	12,650,000	12.00	19,850,000	100.00	100.00	24.00	27,200,000	33.33	0.25	SKPD PERDAGANGAN
	2 17 01 2.06 09	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Terlaksananya Rapat - Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar/dalam Daerah	72	Bln	3,837,690,000	24	674,091,795	12	268,849,795	12	405,242,000	3	141,977,600	3	92,672,220	3	81,332,840	3.00	53,605,223	12.00	369,587,883	100.00	91.20	24.00	638,437,678	33.33	0.17	SKPD PERDAGANGAN
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100.00	98.51					
																						Predikat kinerja								
	2 17 01 2.07	Program/ Kegiatan	Indikator	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42,010,000		42,010,000		-		42,010,000		-	1	21,110,000						42,010,000								
	2 17 01 2.07 05	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya pengadaan Meubiler	Pengadaan Mebel (DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL)	Terlaksananya pengadaan Meubiler	45	Unit	42,010,000	20	42,010,000	10	-	2	42,010,000	-	-	1	21,110,000	-	-	1.00	20,900,000	2.00	42,010,000	100.00	100.00	12.00	42,010,000	26.67	1.00	SKPD PERDAGANGAN
																						0		100.00	100.00					
																						Predikat kinerja								

| | | |

| | | |

| | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kampar 2023 – 2026 dan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026.

Tabel 4 (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Kabupaten Kampar

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 thn n-2	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kantor baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek	100%	Terlaksananya Pembangunan kantor yang nyaman dan aman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	100%	Terlaksananya RAT tepat waktu pada setiap Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah	100%	Terbentuknya UMK yang Kondusif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	100%	Terbentuknya alat timbangan tampa kecurangan di dalam perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok dan Bahan Penting lainnya	100%	Terlaksananya makanan yang tanpa bahan pengawet dan pasar murah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan lembaga teknis yang melakukan pembinaan dan pemberdayaan di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil serta dituntut untuk mampu berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah secara optimal melalui berbagai kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Perputaran roda perekonomian daerah akan dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan berupaya melakukan penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia secara optimal.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah ini merupakan strategi pada tataran kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga keterhubungan antara program yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dengan program di tingkat Kabupaten menjadi mutlak adanya. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar pada dasarnya memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib urusan pilihan Perdagangan (Pasal 7 ayat (4) dan urusan pilihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (Pasal 7 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil kinerja Tahun 2023 yang telah dicapai oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Sekretariat
    a. Terlaksananya penyampaian laporan tepat waktu, baik itu laporan rutin maupun laporan berkala.
    b. Terealisasinya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang naik pangkat.
    c. Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
    d. Bertambahnya peralatan gedung Kantor dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Aparatur.
    e. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran 2023
2. Koperasi

    Perkembangan jumlah Koperasi di Kabupaten Kampar dari Tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 yang aktif dan tidak aktif serta yang melaksanakan RAT dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif, Tidak Aktif, Koperasi yang RAT di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah (Unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Jumlah Manajer	Jumlah Anggota	RAT (Unit)
2020	523	272	251	49	100.544	70
2021	532	272	251	51	105.620	80
2022	564	312	252	49	102.962	102
2023	573	322	251	49	108.864	92

Adapun kondisi perkembangan modal usaha, asset, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 6
Perkembangan Modal Usaha, Asset, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Koperasi	Modal Usaha		Aset (Rp M)	Omset (Rp M)	SHU (Rp M)
		Sendiri (Rp M)	Luar (Rp M)			
2020	523	330.274	123.954	720.628	730.496	28.438
2021	525	360.600	140.200	850.320	810.100	30.256
2022	564	389.721	128.304	790.974	688.309	29.479
2023	573	402.881	115.287	840.660	680.426	31.141

3. Bidang UMK

Mengenai perkembangan jumlah UMK binaan dan volume usaha UKM binaan di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 sampai dengan Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7

UMKM Binaan dan Volume Usaha UKM Binaan di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Volume Usaha UKM Binaan (Rp)	Keterangan
2020	4.062	4.062	195.782.280.945	
2021	4.080	4.080	196.782.280.200	
2022	4.329	4.329	199.770.280.200	
2023	4.529	4.529	202.170.280.280	

4. Bidang Perdagangan dan Pasar

Perkembangan jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Perkembangan Jumlah Perdagangan dan Pasar di Kabupaten Kampar
Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Perdagangan	Jumlah Pasar	Keterangan
2020	16.654	106	-
2021	17.200	4	Pasar Kelurahan
2022	1.033	4	
2023	1.054	4	

5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Distribusi Barang

Perkembangan jumlah Pengendalian Distribusi Barang, di Kabupaten Kampar dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 9
Jumlah Pengendalian Distribusi Barang di Kabupaten Kampar
Tahun 2020 s/d 2023

Tahun	Jumlah Distribusi Operasi Pasar Murah	Jumlah Kepokmas	Keterangan
2020	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak boleh berkerumunan dan pencegahan penularan Covid -19	
2021	6	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	
2022	14	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	Operasi Pasar Murah
2023	16	Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Frozen Meat (Daging Beku) dan Tepung terigu	✦ 8 Operasi Pasar Murah ✦ 8 Belanja Tidak Terduga (BTT) Pasar Bersubsidi

Berikut jumlah perkembangan rekomendasi izin BBM/LPG Bersubsidi selama tahun 2020 - 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut : :

Tabel 10

Jumlah Perkembangan Rekomendasi Izin BBM/LPG Bersubsidi
Tahun 2020 s/d Mei 2023

Tahun	Jumlah Rekomendasi LPG	Jumlah Rekomendasi Toko Modern	Keterangan
2020	-	16	
2021	-	9	
2022	4	23	
2023	1	6	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Catatan Strategis

a. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan dan penumbuh kembang UMK karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Kampar di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Terdapat beberapa isu penting yang dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya pengelolaan pasar-pasar tradisional.
2. Masih kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati los-los dan kios-kios pasar yang telah disediakan pemerintah daerah.
3. Pasar Pemda yang membutuhkan rehabilitasi tetapi belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha.
5. Belum optimalnya standarisasi mutu barang.
6. Belum optimalnya kemampuan managerial Pengurus/Pengelola Koperasi dan minimnya pengetahuan tentang perkoperasian.
7. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi.
8. Masih rendahnya mutu/kualitas UMK.
9. Belum optimalnya akses pemasaran UMK.
10. Kualitas produk yang belum sesuai standar sehingga sulit dipasarkan.
11. Lemahnya manajemen dan sistem pengelolaan keuangan UMKM.

12. Kurangnya akses permodalan.
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perdagangan, koperasi dan pelaku usaha UMK.
14. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan UMK lokal.
15. Peningkatan perlindungan konsumen dan peningkatan kemetrologian daerah.

b. Rekomendasi Catatan Strategis

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdagangan, Koperasi dan UMK tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan terhadap masyarakat. Tantangan paling nyata yang dihadapi ke depan terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UMK adalah dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Perkembangan global tersebut telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan) sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

☼ <u>KEKUATAN (S) :</u>

1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.
2) Adanya peraturan perundangan yang berlaku tentang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
3) Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

4) Jumlah SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).
5) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung (teknologi komunikasi dan informasi).
6) Adanya dukungan APBD Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan kegiatan.

☼ KELEMAHAN (W) :

1) Kualitas SDM (Pegawai) belum merata dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang terkait dengan teknis pengembangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
2) Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur.
3) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil kepada aparatur.
4) Belum adanya rencana induk pengembangan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
5) Rendahnya mekanisme penegakan sanksi terhadap Koperasi dan Usaha Usaha Mikro Kecil.
6) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang kantor.
7) Belum adanya database perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
8) Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya.

2. Lingkungan Eksternal

☼ PELUANG (O) :

1) Potensi perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi.
2) Tumbuhnya Koperasi baru dan meningkatnya Koperasi aktif.
3) Meningkatnya jumlah perdagangan.
4) Legalitas dan peluang usaha perdagangan maupun koperasi.
5) Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha.
6) Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif (wirausaha baru).
7) Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan digitalisasi
8) Keanekaragaman produk Usaha Mikro Kecil yang tersebar dan adanya permintaan produk unggulan.

☼ ANCAMAN (T) :

1) Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif.
2) Kualitas SDM di Koperasi (Anggota, Pengurus/Pengelola dan Pengawas) serta pelaku Usaha Mikro belum siap menghadapi pasar global.
3) Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
4) Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah.
5) Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat dan lain-lain.
6) Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya.
7) Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil.
8) Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta patuh terhadap peraturan.

Tabel 11
Matriks SWOT (*Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, *Threat*)

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN *(S)*	KELEMAHAN *(W)*
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL / *ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL*	1. Peraturan Bupati Kampar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar 2. Adanya peraturan perundangan yang berlaku tentang Perdagangan, Koperasi dan UMK 3. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 4. Jumlah SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1) 5. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung (teknolgi komunikasi dan informasi) 6. Adanya dukungan APBD Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan kegiatan	1. Kualitas SDM (Pegawai) belum merata dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki terkait dengan teknis pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK 2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan UMK kepada aparatur 3. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan Perdagangan, Koperasi dan UMK kepada aparatur 4. Belum adanya rencana induk pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UMK 5. Rendahnya mekanisme penegakan sanksi terhadap Koperasi dan UMK 6. Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor 7. Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya
PELUANG *(O)*	**STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)**	**STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)**
1. Potensi perdagangan, Koperasi dan UMK yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi 2. Pertumbuhan jumlah koperasi 3. Legalitas dan peluang usaha koperasi 4. Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha	1. Peningkatan dan penguatan pada usaha yang mengarah pada sektor industri kecil dalam pengembangan perekonomian daerah 2. Mengefektifkan pengelolaan pasar sebagai sumber peningkatan PAD guna kelangsungan pembangunan	1. Peningkatan dan pertumbuhan pengembangan KUMK yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Mengintensifkan penarikan terhadap retribusi pelayanan pasar, tunggakan dan mencari peluang potensi baru sehingga tercapainya target pendapatan dan retribusi pasar secara optimal;

5. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif 6. Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan digitalisasi 7. Keanekaragaman produk UMK yang tersebar dan adanya permintaan produk unggulan	3. Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMK 4. Meningkatkan pengetahuan pelaku UMK dalam mengakses pasar.	3. Pengisian Galeri Produk Unggulan UMK; 4. Monitoring UMK yang telah melakukan kemitraan/kerjasama (MoU); 5. Pelatihan peningkatan kualitas produk UMK.
ANCAMAN *(T)*	**STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (S.T)**	**STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH/MENGATASI ANCAMAN (W.T)**
1. Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif. 2. Kualitas SDM di Koperasi (Anggota, Pengurus / Pengelola dan Pengawas) serta pelaku Usaha Mikro belum siap menghadapi pasar global. 3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. 4. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah. 5. Lemahnya koordinasi dengan lintas OPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat dan lain-lain. 6. Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya. 7. Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha kecil. 8. Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta patuh terhadap peraturan	1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Meningkatkan standarisasi dan pengendalian mutu barang; 3. Peningkatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen; 4. Meningkatkan standarisasi UMK dan Produk UMK; 5. Peningkatan pendidikan bagi pelaku usaha guna mengatasi bagi perkembangan lingkungan dunia usaha yang efektif; 6. Peningkatan kemampuan pemerintah daerah melalui pengembangan system, sumber daya manuasia aparatur, dan kelembagaan koperasi.	1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; 2. Pengawasan terhadap barang beredar, produk SNI wajib, barang yang diatur dan pelaksanaan sertifikasi produk; 3. Menciptakan iklim investasi perdagangan dan sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen; 4. Peningkatan standarisasi produk UMK dan perlindungan HAKI produk UMK; 5. Meningkatkan usaha guna terciptanya lingkungan usaha yang kondusif; 6. Peningkatan kualitas dan penataan organisasi koperasi dan peningkatan profesionalisme pengurus.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini dilakukan untuk mempertimbangkan urgensi Program dan Kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar, dan melakukan penyesuaian terhadap detail kegiatan yang dianggap tidak perlu untuk dilaksanakan karena dianggap tidak cocok dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026.

TABEL 12 (T-C. 31)

Review Rancangan Awal RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023

	RANCANGAN AWAL RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2024					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				10,682,047,579	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				10,682,047,579	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	100 Persen	8,627,04 7,579	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PERSENTASE PELAKSANAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	100 Persen	8,627,04 7,579	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	670,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	12 Bulan	670,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	300,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	300,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen RKA	10 Dokumen	350,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Dokumen RKA	10 Dokumen	350,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya LKJIP SKPD	10 Buku	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya LKJIP SKPD	10 Buku	20,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BUlan	4,327,047,579	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 BUlan	4,327,047,579	
	Penyediaan Gaji dan	Kab. Kampar,	Tersedianya Gaji	12 Bulan	4,317,047,579	Penyediaan Gaji dan	Kab. Kampar,	Tersedianya Gaji dan	12 Bulan	4,317,047,579	

	Tunjangan ASN	Bangkinang Kota, Langgini	dan Tunjangan ASN			Tunjangan ASN	Bangkinang Kota, Langgini	Tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	10,000,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah	12 Bulan	50,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah	12 Bulan	50,000,000	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Pengelolaan Retribusi	12 BUlan	50,000,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Pengelolaan Retribusi	12 BUlan	250,000,000	Untuk Penunjang Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	120,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	120,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Pakaian Dinas	1 OPD	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Pakaian Dinas	1 OPD	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,550,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,550,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	400,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	700,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	150,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	150,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota Langgini	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota Langgini	Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan	12 Bulan	100,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat	Kab. Kampar,	Terlaksananya	12 Bulan	700,000,000	Penyelenggaraan Rapat	Kab. Kampar,	Terlaksananya Rapat	12 Bulan	700,000,000	

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkinang Kota, Langgini	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bangkinang Kota Langgini	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Barang dan Peralatan Kantor	5 Paket	300,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Barang dan Peralatan Kantor	5 Paket	300,000,000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Mebeleur Kantor	4 Paket	100,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Mebeleur Kantor	4 Paket	100,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Bangunan Kantor	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Bangunan Kantor	1 Paket	200,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,080,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,080,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	980,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	980,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	590,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan	590,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Lapangan	12 Bulan	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Kendaraan Dinas atau Lapangan	12 Bulan	250,000,000	
	Pemeliharaan / Rehabi-litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	200,000,000	Pemeliharaan / Rehabi-litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor	1 Paket	200,000,000	
	Pemeliharaan / Rehabi-litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	80,000,000	Pemeliharaan / Rehabi-litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan	80,000,000	

	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENINGKATAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	257	400,000,000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	PENINGKATAN KEPATUHAN KOPERASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	257	400,000,000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	60 Koperasi	400,000,000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	60 Koperasi	400,000,000	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	3 Koperasi	150,000,000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	3 Koperasi	150,000,000	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan	190 Koperasi	250,000,000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	Kepatuhan Terhadap Perundang - Undangan	190 Koperasi	250,000,000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN KESEHATAN KOPERASI	50 Koperasi	80,000,000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN KESEHATAN KOPERASI	50 Koperasi	80,000,000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Permenkop No.17/per/M.KUKM/ IX/2 015	60 Koperasi	80,000,000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Permenkop No.17/per/M.KUKM/IX /2 015	60 Koperasi	80,000,000	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Permenkop 17/Per/M.KUKM/IX/ 2015	30 Koperasi	80,000,000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Permenkop 17/Per/M.KUKM/IX/20 15	30 Koperasi	80,000,000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PELATIHAN BAGI PENGURS DAN ANGGOTA KOPERASI	15 Orang	550,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PELATIHAN BAGI PENGURS DAN ANGGOTA KOPERASI	**15 Orang**	**550,000,000**	
	Pendidikan dan Latihan	Kab. Kampar,	Meningkatnya	120 Orang	400,000,000	Pendidikan dan Latihan	Kab. Kampar,	Meningkatnya	120 Orang	400,000,000	

	Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	42 Orang	400,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	42 Orang	400,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	120 Orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	120 Orang	150,000,000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlatihnya Koperasi dan UMKM	1 Tahun	150,000,000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlatihnya Koperasi dan UMKM	1 Tahun	150,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TERBINANYA UMK	15 UMK	657,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	TERBINANYA UMK	15 UMK	657,000,000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung PLUT	657,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro	1 Gedung PLUT	657,000,000	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendataan Potensi Usaha Mikro	3 Event	250,000,000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendataan Potensi Usaha Mikro	3 Event	250,000,000	

	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mitra Usaha	12 Kecamatan	55,000,000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Mitra Usaha	12 Kecamatan	55,000,000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	1 Gedung PLUT	250,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Gedung PLUT KUMKM	1 Gedung PLUT	250,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Bulan	120,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Bulan	120,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN LOKAL UMK	15 UMK	350,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN LOKAL UMK	15 UMK	350,000,000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro Kecil	3 Event	350,000,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro Kecil	3 Event	350,000,000	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	3 Event	350,000,000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Pasar, Pemasaran Produk dan Daya Kreatifitas UMKM	3 Event	350,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,840,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1,840,000,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA	100 Persen	280,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA	100 Persen	280,000,000	

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar	164 Pelaku Usaha	100,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Penerbitan Izin dan Pengelolaan Pasar	164 Pelaku Usaha	100,000,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha Perdagangan	12 Kecamatan	100,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbina dan Terawasinya Pelaku Usaha Perdagangan	12 Kecamatan	100,000,000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdatanya Tanda Daftar Gudang	21 kecamatan	100,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terdatanya Tanda Daftar Gudang	21 kecamatan	100,000,000	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	100,000,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	21 Kecamatan	100,000,000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya	5 Pasar	80,000,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya	5 Pasar	80,000,000	
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Berbahaya	21 Kecamatan	80,000,000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Berbahaya	21 Kecamatan	80,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN SARANA PASAR	4 Pasar	400,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN SARANA PASAR	4 Pasar	400,000,000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelola Distribusi Perdagangan	1 Paket	300,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Terselenggaranya Pembangunan dan Pengelola Distribusi Perdagangan	1 Paket	300,000,000	

	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar	4 Pasar	200,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pasar	4 Pasar	200,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Kecamatan	100,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21 Kecamatan	100,000,000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana DIstribusi Perdagangan	35 PKL	100,000,000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana DIstribusi Perdagangan	35 PKL	100,000,000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima	5 Pasar	50,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya Pedagang Kaki Lima	5 Pasar	50,000,000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	4 Pasar	50,000,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar	4 Pasar	50,000,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGENDALIAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100 Persen	510,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGENDALIAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100 Persen	510,000,000	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	230,000,000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab / Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Barang Kebutuhan Pokok	21 Kecamatan	230,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	12 Kecamatn	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	12 Kecamatn	150,000,000	

	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpantaunya Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	21 Kecamatan	80,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpantaunya Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	21 Kecamatan	80,000,000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang	19 Kecamatan	230,000,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang	19 Kecamatan	230,000,000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat	19 Kecamatan	50,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksanya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat	19 Kecamatan	50,000,000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat	16 Kecamatan	180,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat	16 Kecamatan	180,000,000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pupuk Pertisida Bersubsidi	7 Distributor	50,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pupuk Pertisida Bersubsidi	7 Distributor	50,000,000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsid	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrologian	7 Distributor	50,000,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsid	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrologian	7 Distributor	200,000,000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrologian	654 UTTP	550,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrologian	654 UTTP	550,000,000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrologian	654 UTTP dan 40 Pemilik Usaha	550,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrologian	654 UTTP dan 40 Pemilik Usaha	550,000,000	

	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pe	654 UTTP	280,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pe	654 UTTP	280,000,000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terawasi dan Terdatanya UTTP serta teraksananya Tera - Tera Ulang UTTP	40 Pemilik Usaha	150,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terawasi dan Terdatanya UTTP serta teraksananya Tera - Tera Ulang UTTP	40 Pemilik Usaha	150,000,000	
	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	654 UTTP	12,000,000	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	654 UTTP	12,000,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	3 Event	100,000,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	3 Event	100,000,000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya MTQ Tinggkat Provinsi, MTQ Tinggkat Kabupaten dan HUT Kampar	3 Event	100,000,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya MTQ Tinggkat Provinsi, MTQ Tinggkat Kabupaten dan HUT Kampar	3 Event	100,000,000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pasrtisipasi Pemerintah Kab. Kampar pada AcaraUlang Tahun Kabupaten Kampar, MTQ Kabupaten dan MTQ Provinsi	MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	100,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pasrtisipasi Pemerintah Kab. Kampar pada AcaraUlang Tahun Kabupaten Kampar, MTQ Kabupaten dan MTQ Provinsi	MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	100,000,000	
	TOTAL				12,522,047,579					13,172,047,579	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara prioritas tidak ada yang ditujukan langsung ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 13 (T-C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOM ENDASI MITRA	REKOM ENDASI SKPD	REKOM ENDASI TAPD
179	249169	02-03-2023	REPOL, S.Ag	Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM	Masyarakat butuh modal usaha kelompok ikan	Desa Koto Tibun, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai hasil keputusan reses yang Input oleh Anggota DPRD Kab. Kampar	-	-	-
217	250139	02-03-2023	SAID ABDULLAH	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Tidak adanya modal	Salo, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai hasil keputusan reses yang Input oleh Anggota DPRD Kab. Kampar	-	-	-
218	250144	02-03-2023	SAID ABDULLAH	Peningkatan SDM Pelaku UMKM	Kurangnya pengetahuan dan skill	Salo, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Mitra Bappeda	-	Dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai hasil keputusan reses yang Input oleh Anggota DPRD Kab. Kampar	-	-	-
305	283748	06-03-2023	FAHMIL, SE	Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM	Perlunya gerobak bakso, gerobak sate, gerobak jualan bandrek, gerobak jualan gado-gado	Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-
438	303997	08-03-2023	FAHMIL, SE	Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku UMKM	Perlunya bantuan modal usaha UMKM	Kecamatan Bangkinang Kota, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-

440	304025	08-03-2023	FAHMIL, SE	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Perlunya bantuan mesin UMKM	Dapil 1, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Pengajuan Usulan	-	-	-	-	-
501	313762	08-03-2023	MUHAMMAD FAISAL, ST	Bantuan Peralatan dan Mesin Produksi UMKM	Dibutuhkannya Peralatan Loundry di Desa Batu Belah	Desa Batu Belah, Kab. Kampar	Kabupaten / Kota	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Kampar. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya di dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, visi Presiden tahun 2020 – 2024 adalah ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".***

Berdasarkan lampiran 1 Perpres Nomor 18 Tahun 2020 telah ditetapkan 5 (lima) arah utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut keterkaitan antara rencana pembangunan nasional dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 14
Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD

Prioritas Nasional	Prioritas PD	Bidang pada Dinas
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pengendalian Ketersediaan dan Pemantauan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
	Penguatan Kelembagaan Koperasi	Bidang Koperasi
	Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Produk dan	Bidang UMK

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar menunjukkan adanya hubungan untuk urusan perdagangan, koperasi dan usaha mikro terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga ke depan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar berupaya untuk lebih meningkatkan produktivitas koperasi dan usaha mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB melalui program dan kegiatan secara lebih terarah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar

Tujuan dan sasaran Renja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 didasarkan pada isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Renstra periode 2023-2026. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi

dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Visi Pemerintah Kabupaten Kampar adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera"***. Visi tersebut dapat dicapai melalui penerapan enam misi. Dari keenam misi tersebut, ada satu misi yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Periode 2023-2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15

Kaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar

VISI : Terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025

MISI IV : Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perdagangan	- Terbinanya Pasar Rakyat	Revitalisasi Pasar	Pendataan dan Pembinaan Pedagang
	- Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Mendorong Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Konsumen	Meningkatkan Koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen
Peningkatan Kualitas KUMK	- Meningkatnya Koperasi Aktif	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi
	- Meningkatkan Kualitas UMK	Menumbuhkan Minat Pelaku Usaha untuk Berwira Usaha melalui Pelatihan dan Pembinaan	Memberikan Pengetahuan, Pelatihan, Pengolahan Teknis Usaha Bagi Pelaku Usaha

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Berikut tujuan jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Perdagangan
2. Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar. Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Berikut sasaran jangka menengah berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 :

1. Terbinanya Pasar Rakyat.
2. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan.
3. Meningkatkan Koperasi Aktif.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kampar, program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar juga mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

1. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
2. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah;

3. Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMK.

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/ kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2024. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

Pada rancangan awal RKPD, plafon anggaran Tahun 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar masih relatif kecil dan hanya ditujukan untuk program dan kegiatan yang bersifat rutin. Walaupun masing-masing perangkat daerah masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan kegiatan tambahan dan kegiatan tersebut akan diakomodir bila kondisi keuangan daerah mencukupi, mengingat asumsi pendapatan daerah untuk Tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan bila dibandingkan Tahun 2023.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar di Tahun 2024 adalah 10 (Sepuluh) Program, 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 10.393.321.252,-.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Berikut program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - ☼ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - ☼ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - ☼ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - ☼ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - ☼ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - ☼ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - ☼ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- ☼ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ☼ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ☼ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ☼ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ☼ Pengadaan Mebel
- ☼ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ☼ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- ☼ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ☼ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ☼ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ☼ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- ☼ Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ☼ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- ☼ Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- ☼ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- ☼ Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- ☼ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- ☼ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

5. Program Pengembangan UMKM

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
   - ☼ Pengembangan Usaha Mikro

6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
   - ☼ Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
   - ☼ Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

c. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   - ☼ Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
   - ☼ Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
   - ☼ Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   - ☼ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- ☼ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- ☼ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- ☼ Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

9. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- ☼ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- ☼ Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- ☼ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Berikut disajikan pada Tabel T-C. 33 rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 perubahan sebagai berikut :

Tabel 16 (T-C. 33)
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KAMPAR

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)					
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5			6,00	7	8	5	10
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL					**10.145.881.541,00**	**10.990.324.160,00**				**13.380.787.306,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**8.925.881.541,00**	**9.958.542.810,00**				**12.750.451.956,00**
	-					**8.925.881.541,00**	**9.958.542.810,00**				**12.750.451.956,00**
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan***		257 Koperasi	257 Koperasi	**100.000.000,00**	**160.311.500,00**			257 Koperasi	**147.205.500,00**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi*		125 Koperasi 60 Koperasi	125 Koperasi 60 Koperasi	100.000.000,00	160.311.500,00			60 Koperasi 125 Koperasi	147.205.500,00
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252 Unit Usaha	252 Unit Usaha	100.000.000,00	160.311.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	147.205.500,00

2	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Peningkatan Kesehatan Koperasi***		50 Koperasi	50 Koperasi	**150.000.000,00**	**72.578.300,00**			50 Koperasi	**65.087.200,00**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Permenkop 06/Per/Dep.6/IV/2016*		60 Koperasi	60 Koperasi	150.000.000,00	72.578.300,00			60 Koperasi	65.087.200,00
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252 Unit Usaha	252 Unit Usaha	50.000.000,00	35.087.300,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Unit Usaha	35.087.300,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan										
		Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252 Unit Usaha	252 Unit Usaha	100.000.000,00	37.491.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Unit Usaha	29.999.900,00
3	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Pelatihan Bagi Pengurs Dan Anggota Koperasi***		15 Orang	15 Orang	**50.000.000,00**	**-**			15 Orang	**23.550.000,00**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*		120 Orang	120 Orang	50.000.000,00	-			120 Orang	23.550.000,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi										
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang	23.550.000,00
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Terbinanya UMK***		15 UMK	15 UMK	**210.000.000,00**	**1.787.602.250,00**			15 UMK	**560.000.000,00**
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro*		1 Gedung Plut	1 Gedung Plut	210.000.000,00	1.787.602.250,00			1 Gedung Plut	560.000.000,00
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro										

		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	60.000.000,00	652.018.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Unit Usaha	85.000.000,00
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro										
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	50.000.000,00	289.862.300,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		50 Unit Usaha	75.000.000,00
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro										
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100.000.000,00	420.589.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Unit Usaha	250.000.000,00
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan										
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120 Orang	120 Orang	-	425.131.950,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		120 Orang	150.000.000,00
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Terbinanya UMK***		20 UMK	20 UMK	**50.000.000,00**	**239.929.400,00**			15 UMK	**350.000.000,00**
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil*		3 Event	3 Event	50.000.000,00	239.929.400,00			3 Event	350.000.000,00
	Pengembangan Usaha Mikro										
		Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	50.000.000,00	239.929.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		200 Unit	350.000.000,00
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**		100 Persen	100 Persen	**8.365.881.541,00**	**7.698.121.360,00**				**11.604.609.256,00**

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya dan Tersusunnya Dokumen Perencanaan*		12 Bulan	12 Bulan	520.000.000,00	281.776.150,00			12 Bulan	450.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.000,00	232.546.650,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	275.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	33.925.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	75.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	15.304.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	100.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		12 Bulan	12 Bulan	4.080.881.541,00	5.310.858.693,00			12 Bulan	5.563.336.437,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.065.881.541,00	5.242.811.193,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		33 Orang/bulan	5.543.386.437,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	68.047.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Laporan	19.950.000,00
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah*		12 Bulan	12 Bulan	300.000.000,00	-				
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah										

		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	300.000.000,00	-				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		12 Bulan	12 Bulan	90.000.000,00	-			12 Bulan	90.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	90.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*		12 Bulan	12 Bulan	1.415.000.000,00	671.954.545,00			12 Bulan	707.911.675,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	9.634.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	20.120.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	3 Paket	250.000.000,00	178.730.745,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	116.333.925,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Paket	9 Paket	155.000.000,00	46.520.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	50.575.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	66.309.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	51.056.150,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	105.000.000,00	10.248.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	15.264.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	10 Laporan	705.000.000,00	360.512.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	454.562.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*		12 Bulan	12 Bulan	1.080.000.000,00	992.545.344,00			12 Bulan	1.025.988.644,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	169.860.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	169.860.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Bulan	12 Bulan	980.000.000,00	822.685.344,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	856.128.644,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah*		12 Bulan	12 Bulan	530.000.000,00	351.426.500,00			12 Bulan	267.372.500,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	223.426.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	87.372.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	87.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Unit	180.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	40.500.500,00				
	Pengadaan Barang Milik Daerah			5 paket	5 paket	350.000.000,00	89.560.128,00				3.500.000.000,00
	Pengadaan Mebel										
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua	2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	89.560.128,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	3.500.000.000,00
			Kel/Desa								
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Langgini	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	-
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**1.220.000.000,00**	**1.031.781.350,00**				**630.335.350,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**1.220.000.000,00**	**1.031.781.350,00**				**630.335.350,00**
1	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Persentase Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha***		100 Persen	100 Persen	**210.000.000,00**	**147.722.400,00**			100 Persen	**102.374.700,00**
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Terlaksananya Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan*		164 Pelaku Usaha	164 Pelaku Usaha	50.000.000,00	83.731.300,00			164 Pelaku Usaha	44.279.500,00
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										

		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	83.731.300,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	44.279.500,00
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Terlaksananya Penerbitan tanda Daftar Gudang*		21 Kecamatan	21 Kecamatan	80.000.000,00	7.336.800,00			21 Kecamatan	7.336.800,00
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang										
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	7.336.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	7.336.800,00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Terlaksananya Uji Sample Bahan Berbahaya*		5 Pasar	5 Pasar	80.000.000,00	56.654.300,00			5 Pasar	50.758.400,00
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya										
		Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	5 Laporan	80.000.000,00	56.654.300,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	50.758.400,00
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Peningkatan Sarana pasar***		4 Pasar	4 Pasar	**100.000.000,00**	**42.436.300,00**			4 Pasar	**42.420.300,00**
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pembinaan Terhadap Sarana Distribusi Perdagangan*		35 PKL	35 PKL	100.000.000,00	42.436.300,00			35 PKL	42.420.300,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	20.087.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	20.071.600,00
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan										

		Terlaksananya Pungutan Restribusi Pelayanan Pasar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	22.348.700,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	22.348.700,00
3	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Peningkatan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting***		12 Kecamatan	12 Kecamatan	**360.000.000,00**	**555.152.800,00**			12 Kecamatan	**151.801.150,00**
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok*		21 Kecamatan	21 Kecamatan	80.000.000,00	100.320.500,00			21 Kecamatan	54.525.500,00
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	100.320.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	54.525.500,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stok Barang*		19 Kecamatan	19 Kecamatan	130.000.000,00	434.788.400,00			19 Kecamatan	72.201.950,00
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	87.577.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	47.302.250,00
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
		Jumlah Masyarakat Miskin yang Difasilitasi Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	21 Laporan	80.000.000,00	347.210.900,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	24.899.700,00
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pertisida Bersubsidi*		7 Distributor	7 Distributor	150.000.000,00	20.043.900,00			7 Distributor	25.073.700,00
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	20.043.900,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	25.073.700,00

4	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrologian***		100 Persen	100 Persen	**450.000.000,00**	**217.550.650,00**			100 Persen	**265.000.000 ,00**
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Konsumen dan Pelayanan Kemetrologian*		700 UTTP	700 UTTP	450.000.000,00	217.550.650,00			654 UTTP	265.000.000 ,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700 Unit	700 Unit	300.000.000,00	152.703.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1300 Unit	200.000.000 ,00
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal										
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	64.846.850,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Orang	65.000.000, 00
5	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri***		2 Event	2 Event	**100.000.000,00**	**68.919.200,00**			2 Event	**68.739.200, 00**
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Terselenggarakannya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar*		3 Event	3 Event	100.000.000,00	68.919.200,00			3 Event	68.739.200, 00
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota										
		Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, MTQ Tingkat Provinsi dan HUT Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Event	3 Event	100.000.000,00	68.919.200,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 UMKM	68.739.200, 00
						10.145.881.541,00	**10.990.324.160,00**				**13.380.787. 306,00**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK
KABUPATEN KAMPAR

Dr. H. ZENDI ZULHAIRI, M.Si
NIP. 19730304 199201 1 001

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar dalam menunjang tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera*". Sedangkan upaya untuk mendukung Visi tersebut dijabarkan dalam Misi yang keempat yaitu "*Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif*". Dalam visi ini yang mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar adalah menggerakkan sektor Perdagangan, Koperasi dan UMK yang berbasis sumber daya lokal.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar merupakan rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar, yang disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

5.1. Rekomendasi

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kecamatan hingga Musrenbang tingkat Pemerintah Daerah. Adapun rekomendasi perumusan program dan kegiatan antara lain :

1. Setiap program dan kegiatan baik usulan dari masyarakat hasil musrenbang maupun usulan OPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan Pemerintah.
2. Pengembangan usaha di tiap sektor harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan program / kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

Kaidah pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Renja Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
2. Renja Perubahan Tahun 2024 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan APBDP Kabupaten Kampar Tahun 2024, sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024.
3. Semua pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar.
4. Renja Perubahan Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut pembangunan dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik di masa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perdagangan, Koperasi dan usaha mikro

mutlak diperlukan, supaya masing-masing unit kerja dapat berperan aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas secara bertanggung jawab.

Mengingat bahwa Renja menjadi panduan bagi segenap Pembina serta masyarakat terkait dengan perdagangan, Koperasi dan UMK dalam melaksanakan pembangunan di sektor ini, maka diperlukan konsistensi, kerjasama, transparansi serta rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, tersusunnya Renja Perubahan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini diharapkan dapat dibangun komitmen bersama antar seluruh jajaran internal organisasi baik di Sekretariat maupun bidang-bidang dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Bangkinang, Agustus 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMK KABUPATEN KAMPAR

[illegible] ENDI ZULHAIRI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730304 199201 1 001









PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA KERJA (RENJA) 2024

BANGKINANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alakum Wr. Wb.

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen perencanaan yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar selama tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkinang, 20 September 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAMPAR

A F D A L, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700325 199903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 7

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 37

3.1 Tabel pendanaan perubahan Renja tahun 2024 sesuai

3.2 Perubahan RKPD Tahun 2024 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 45

BAB IV PENUTUP 50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2021 ini menyusun Buku Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2022. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disertai dengan upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja dalam kerangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang infrastruktur yang sudah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra SKPD secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah untuk memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan alat observasi untuk melalukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat/pemimpin instansi, menberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada tahun 2020 serta memberikan arah/acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah penjabaran Rencana Kerja Tahunan sampai dengan triwulan IV mengacu pada APBD tahun 2023.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.

Dari total nilai pagu anggaran sebesar Rp. 315.310.395.545,00 telah terealisasi sebesar Rp. 262.225.198.627,00 atau 84,75%

Adapun dibawah ini beberapa faktor-faktor penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Kegiatan bersifat rutin yang keperluannya untuk pelayanan perkantoran sehingga bisa berjalan sesuai rencana.
2. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan fisik sebagian besar sudah dilakukan karena akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.

Faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah:

1. Kesiapan aplikasi LPSE yang belum maksimal di awal tahun sehingga penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pun agak terlambat sehingga proses pengadaan pun menjadi agak terlambat. Proses pengadaan yang terlambat tersebut secara umum untuk pekerjaan konstruksi.
2. Adanya perubahan cara analisa pekerjaan.
3. Adanya perbedaan acuan nominal pagu pengadaan untuk kelas kecil, menengah dan besar berdasarkan Perpres dan Permen PU, sehingga menungggu kejelasan Perbup untuk menyikapi hal tersebut.
4. Adanya perubahan target dan sasaran sehingga dilaksanakan setelah disahkannya APBD Perubahan/ Pergeseran.

a) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra masih disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar.

b) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasinya adalah dengan mempercepat proses pengadaan sehingga bisa lebih cepat menyerap anggaran. Apabila ada pekerjaan yang beresiko tidak dapat dilaksanakan dan anggaran tidak dapat diserap, maka diusulkan untuk dilakukan perubahan pekerjaan yang prioritas dilaksanakan dan penyesuaian penganggaran.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kampar s/d Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel II.1.

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023

Kabupaten Kampar

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	1.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				77.230.546		23.173.712		30.645.000		0		0		0		0		0						
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINATAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan	100	persen 77.230.546	100	persen 23.173.712	100	persen 30.645.000		2.683.978		5.138.225		0		0		7.822.204				6.475.746		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	1.03.01.2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Dokumen Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**100**	**persen**	**280.000**	**100**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**70.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**				**250.732**		
1	1.03.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD	4	DOK	280.000	1	DOK	105.684	1	DOK	70.000		5.640		3.760						9.400	0,00	13,43	207	115.084	5.175,00	41,10
2	1.03.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD	4	DOK	280.000	1	DOK	46.452	1	DOK	70.000										0	0,00	0,00	207	46.452	5.175,00	16,59
3	1.03.01.2.01.004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD	4	DOK	280.000	1	DOK	8.161	1	DOK	70.000										0	0,00	0,00	207	8.161	5.175,00	2,91
4	1.03.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	12	Laporan	280.000	3	Laporan	81.035	3	Laporan	70.000										0	0,00	0,00	207	81.035	1.725,00	28,94
5	1.03.01.2.01.07		Evaluasi kinerja perangkat daerah		8	Laporan	-	2	Laporan	0	2	Laporan	70.000										0	0,00	0,00	207	0	2.587,50	#DIV/0!

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		K	
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
Rata-rata capaian kegiatan (%)																								0,00	2,69				
Predikat capaian kegiatan																								Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terkelolanya Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**persen**	**43.200.000**	**100**	**persen**	**9.676.946**	**100**	**persen**	**11.070.000**		**2.010.425**		**3.350.445**		**0**		**0**		**5.360.870**					**0**		
1	1.03.01.2.02.01		Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Anggaran Gaji dan Tunjangan	163	ORANG/BULAN	43.000.000	163	ORANG/BULAN	9.631.066	163	ORANG/BULAN	11.000.000	3	2.010.425	3	3.348.445					6	5.358.870	3,68	48,72					
1	1.03.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Rencana Kerja Dinas	4	Laporan	200.000	1	Laporan	45.880	1	Laporan	70.000	3	0	3	2.000					6	2.000	600,00	2,86					
Rata-rata capaian kegiatan (%)																								301,84	25,79				
Predikat capaian kegiatan																								Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
	1.03.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanany a Administrasi Kepegawaian**	**100**	**persen**	**200.000**	**100**	**persen**	**208.757**	**100**	**persen**	**30.000**		**0**		**7.228**		**0**		**0**		**7.228**					**0**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
				Daerah																									
1	1.03.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanaanya Sosialisasi	12	ORANG	200.000	12	Orang	208.757	12	Orang	30.000	0	0	0	7.228					0	7.228	0,00	24,09				
Rata-rata capaian kegiatan (%)																								0,00	24,09				
Predikat capaian kegiatan																								Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi umum**	**100**	**persen**	**5.660.000**	**100**	**persen**	**947.378**	**100**	**persen**	**895.000**		**239.187**		**274.471**		**0**		**0**		**513.658**				**1.461.036**		
1	1.03.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	PAKET	60.000	1	PAKET	13.387	1	PAKET	15.000	3		3						6	0	600,00	0,00	7	13.387	175,00	22,31
2	1.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	12	PAKET	2.000.000	3	PAKET	277.840	3	PAKET	200.000	3		3						6	0	200,00	0,00	9	277.840	75,00	13,89

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
3	1.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya kebutuhan logistik	20	PAKET	400.000	5	PAKET	77.552	5	PAKET	80.000	3	48.930	3	16.080					6	65.010	120,00	81,26	11	142.562	55,00	35,64
4	1.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (ATK) pakai habis	8	PAKET	280.000	2	PAKET	32.223	2	PAKET	50.000	3	52.565	3						6	52.565	300,00	105,13	8	84.788	100,00	30,28
5	1.03.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	8	DOK	120.000	2	DOK	69.040	2	DOK	50.000	3		3	440					6	440	300,00	0,88	8	69.480	100,00	57,90
6	1.03.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhinya kebutuhan rapat dan koordinasi	80	Laporan	2.800.000	20	Laporan	477.336	20	Laporan	500.000	3	137.692	3	257.951					6	395.643	30,00	79,13	26	872.979	32,50	31,18
																								Rata-rata capaian kegiatan (%)		258,33	44,40				
																								Predikat capaian kegiatan		Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
	1.03.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**2.000.000**	**100**	**persen**	**533.500**	**100**	**persen**	**500.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**				**533.500**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
1	1.03.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	4	UNIT	2.000.000	1	UNIT	533.500	1	UNIT	500.000	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00	1	533.500	25,00	26,68
																								Rata-rata capaian kegiatan (%)		0,00	0,00				
																								Predikat capaian kegiatan		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**persen**	**4.300.000**	**100**	**persen**	**1.180.244**	**100**	**persen**	**1.280.000**		**257.509**		**323.989**		**0**		**0**		**581.498**				**1.761.742**			
1	1.03.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Air, Listrik dan Akses Internet	144	Laporan	100.000	36	Laporan	240.430	36	Laporan	250.000	3	27.049	3	88.130					6	115.178	16,67	46,07	42	355.608	29,17	355,61
2	1.03.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Laporan	200.000	2	Laporan	30.650	2	Laporan	30.000	3	17.670	3	21.334					6	39.004	300,00	130,01	8	69.654	100,00	34,83
3	1.03.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	Laporan	4.000.000	2	Laporan	909.164	2	Laporan	1.000.000	3	212.790	3	214.526					6	427.316	300,00	42,73	8	1.336.480	100,00	33,41

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
																					Rata-rata capaian kegiatan (%)		205,56	72,94				
																					Predikat capaian kegiatan		Sangat Tinggi	Sedang				
	1.03.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**persen**	**8.400.000**	**100**	**persen**	**1.991.304**	**100**	**persen**	**2.000.000**		**98.008**		**379.425**		**0**		**0**		**477.433**				**2.468.737**		
1	1.03.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24	UNIT	600.000	6	UNIT	129.913	6	UNIT	150.000	3	21.615	3	2.600					6	24.215	100,00	16,14	12	154.128	50,00	25,69
2	1.03.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120	UNIT	1.400.000	30	UNIT	320.991	30	UNIT	350.000	3	76.393	3	78.075					6	154.468	20,00	44,13	36	475.459	30,00	33,96

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
3	1.03.01.2.09.03		Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas	92	UNIT	3.200.000	23	UNIT	770.200	23	UNIT	750.000	3		3	298.750					6	298.750	26,09	39,83	29	1.068.950	31,52	33,40
4	1.03.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Penjunjang Urusan Pemerintah Daerah	120	UNIT	3.200.000	30	UNIT	770.200	30	UNIT	750.000	3		3						6	0	20,00	0,00	36	770.200	30,00	24,07
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							41,52	25,03					
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian program (%)																							134,54	28,47					
Predikat capaian program																							Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
	1.03.02		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**100**	**Persen**	**6.519.162**	**100**	**Persen**	**1.798.708**	**100**	**persen**	**800.000**		**54.755**		**478.937**		**0**		**0**		**533.692**				**2.332.400**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	1.03.02.2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jaringan Irigasi dalam kondisi baik**	**100**	**Persen**	**6.519.162**	**100**	**Persen**	**1.798.708**	**100**	**Persen**	**800.000**		**54.755**		**478.937**		**0**		**0**		**533.692**				**2.332.400**		
1	1.03.02.2.02.01		'Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana SDA	8	DOK	1.319.468	2	DOK	228.829	2	DOK	200.000										0	0	0,00	0,00	2	228.829	25,00	17,34
2	1.03.02.2.02.4		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tolak Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4	KM	999.694	1	KM		1	KM	200.000										0	0	0,00	0,00	1	0	25,00	0,00
3	1.03.02.2.02.21		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Tolak Ukur Target Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan yang Dipelihara	4	KM	3.200.000	1	KM	1.380.124	1	KM	200.000		51.578	4	432.214					4	483.792	400,00	241,90	5	1.863.915	125,00	58,25

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
4	1.03.02.2.02.22		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi yang Dipelihara	4	BENDUNG	1.000.000	1	BENDUNG	189.756	1	BENDUNG	200.000		3.178	4	46.723					4	49.900	400,00	24,95	5	239.656	125,00	23,97
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							266,67	88,95				
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Tinggi	Tinggi				
Rata-rata capaian program (%)																							266,67	88,95				
Predikat capaian program																							Sangat Tinggi	Tinggi				
	1.03.03		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**100**	**persen**	**2.600.000**	**100**	**persen**	**274.990**	**100**	**persen**	**3.400.000**		**6.150**		**144.766**		**0**		**0**		**150.916**				**425.906**		
	1.03.03.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Presentase Rumah Tanggaa Berakses Air Bersih**	**100**	**persen**	**2.600.000**	**100**	**persen**	**274.990**	**100**	**persen**	**3.400.000**		**6.150**		**144.766**		**0**		**0**		**150.916**				**425.906**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
1	1.03.03.2.01.02		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan /Perbaikan SPAM	Terlaksananya Supervisi	4	DOK	1.000.000	1	DOK	274.990	1	DOK	200.000									0	0	0,00	0,00	1	274.990	25,00	27,50
2	1.03.03.2.01.03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan/Pengembang Jaringan Perpipaan	80	SR	800.000	20	SR	0	20	SR	200.000		6.150		144.766					0	150.916	0,00	75,46	20	150.916	25,00	18,86
3	1.03.03.2.01.04		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perluasan Jangkauan Jaringan Perpipaan	200	LITER/ DETIK	800.000	50	LITER/ DETIK	0	50	LITER/ DETIK	3.000.000									0	0	0,00	0,00	50	0	25,00	0,00
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							0,00	25,15				
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian program (%)																							0,00	8,38				
Predikat capaian program																							Sangat Rendah	Sangat Rendah				

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	1.03.05		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**100**	**persen**	**1.421.608**	**100**	**persen**	**81.390**	**100**	**persen**	**200.000**		**6.000**		**64.090**		**0**		**0**		**70.090**				**151.480**			
	1.03.05.2.01		**Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab. Kampar/Kota**	**Meningkatnya Presentase Rumah Tangga yang mempunyai sistem air limbah**	**100**	**persen**	**1.421.608**	**100**	**persen**	**81.390**	**100**	**persen**	**200.000**		**6.000**		**64.090**		**0**		**0**		**70.090**				**151.480**			
1	1.03.05.2.01.02		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Terlaksananya Supervisi Pengelolaan Air Limbah	8	DOK	1.421.608	2	DOK	81.390	2	DOK	200.000		6.000		64.090					0	70.090	0,00	35,05	2	151.480	25,00	10,66
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							0,00	35,05					
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian program (%)																							0,00	35,05					
Predikat capaian program																							Sangat Renda	Sangat Renda					

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
																								h	h				
	1.03.06		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**100**	**persen**	**2.649.777**	**100**	**persen**	**6.480.495**	**100**	**persen**	**10.400.000**		**11.945**		**114.874**		**0**		**0**		**126.819**				**6.607.315**			
	1.03.06.2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kab. Kampar**	**Meningkatnya perentase Drainase Perkotaan**	**100**	**persen**	**2.649.777**	**100**	**persen**	**6.480.495**	**100**	**persen**	**10.400.000**		**11.945**		**114.874**		**0**		**0**		**126.819**				**6.607.315**			
1	1.03.06.2.01.01		Penyusunan Rencana Kebijakan Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase	8	DOK	800.000	2	DOK	339.531	2	DOK	200.000			10	8.020					10	8.020	500,00	4,01	12	347.551	150,00	43,44
2	1.03.06.2.01.05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Saluran Drainase dibangun	2.000	M	1.049.777	500	M	5.783.432	500	M	10.000.000		5.945		31.822					0	37.767	0,00	0,38	500	5.821.199	25,00	554,52
3	1.03.06.2.01.09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Terpeliharanya Saluran	800	M	800.000	200	M	357.533	200	M	200.000		6.000		75.032					0	81.032	0,00	40,52	200	438.565	25,00	54,82
																						Rata-rata capaian kegiatan (%)		166,67	14,97				

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
Predikat capaian kegiatan																								Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian program (%)																								55,56	4,99				
Predikat capaian program																								Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.08		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**100**	**persen**	**88.129.916**	**100**	**persen**	**17.121.097**	**100**	**persen**	**19.100.000**		**82.419**		**2.145.552**		**0**		**0**		**2.227.971**				**19.349.068**		
	1.03.08.2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung**	**100**	**persen**	**88.129.916**	**100**	**persen**	**17.121.097**	**100**	**persen**	**19.100.000**		**82.419**		**2.145.552**		**0**		**0**		**2.227.971**				**19.349.068**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
1	1.03.08.2.01.01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen IMB yang diterbitkan	12	DOK	2.129.916	3	DOK	887.297	3	DOK	500.000			15	160.369					15	160.369	500,00	32,07	18	1.047.666	150,00	49,19
2	1.03.08.2.01.02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	80	DOK	20.000.000	20	DOK	11.527.827	20	DOK	2.000.000		44.058	12	1.888.784					12	1.932.842	60,00	96,64	32	13.460.668	40,00	67,30
3	1.03.08.2.01.03		Penyusunan terkait regulasi bangunan gedung	Terdata dan Terfasilitasi regulasi bangunan gedung	8	DOK		2	DOK		2	DOK	200.000	3		3	8.395					6	8.395	300,00	4,20	8	8.395	100,00	#DIV/0!
4	1.03.08.2.01.09		penilikan terhadap penyelenggara bangunan gedung oleh penilik bangunan		40	UNIT		10	UNIT		10	UNIT	200.000	3		3	13.755					6	13.755	60,00	6,88	16	13.755	40,00	#DIV/0!

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
5	1.03.08.2.01.12		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kab/Kota	Renovasi Gedung Milik Pemerintah Daerah	8	UNIT	64.000.000	2	UNIT	2.996.311	2	UNIT	16.000.000		38.362		55.896					0	94.257	0,00	0,59	2	3.090.568	25,00	4,83
6	1.03.08.2.01.13		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pemerintah Daerah	8	UNIT	2.000.000	2	UNIT	1.709.663	2	UNIT	200.000				18.353					0	18.353	0,00	9,18	2	1.728.015	25,00	86,40
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							153,33	24,93					
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian program (%)																							25,56	4,15					
Predikat capaian program																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	1.03.10		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**100**	**persen**	**227.270.378**	**100**	**persen**	**106.836.269**	**100**	**persen**	**64.454.473**		**0**		**4.404.743**		**0**		**0**		**4.404.743**				**111.241.011**			

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	1.03.10.2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan**	**100**	**persen**	**227.270.378**	**100**	**persen**	**106.836.269**	**100**	**persen**	**64.454.473**		**0**		**4.404.743**		**0**		**0**		**4.404.743**				**111.241.011**			
1	1.03.10.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	8	DOK	4.000.000	2	DOK	220.119	2	DOK	200.000				162.326					0	162.326	0,00	81,16	2	382.445	25,00	9,56
2	1.03.10.2.01.04		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	8	DOK	2.044.567	2	DOK	447.299	2	DOK	500.000				29.585					0	29.585	0,00	5,92	2	476.884	25,00	23,32
3	1.03.10.2.01.05		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Dibangun	40	KM	123.825.811	10	KM	70.145.854	10	KM	24.000.000				76.740					0	76.740	0,00	0,32	10	70.222.594	25,00	56,71
4	1.03.10.2.01.08		Rekontruksi Jalan	Panjang Jalan yang di Rekonstruksi	20	KM	4.000.000	5	KM	14.362.069	5	KM	2.000.000									0	0	0,00	0,00	5	14.362.069	25,00	359,05
5	1.03.10.2.01.09		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi	6	KM		1,5	KM		1,5	KM	500.000									0	0	0,00	0,00	2	0	25,00	#DIV/0!
6	1.03.10.2.01.10		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Dipelihara	4	KM		1	KM		1	KM	500.000									0	0	0,00	0,00	1	0	25,00	#DIV/0!
7	1.03.10.2.01.11		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Dipelihara	400	KM	16.000.000	100	KM	2.259.458	100	KM	500.000				631.870					0	631.870	0,00	126,37	100	2.891.328	25,00	18,07

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
8	1.03.10.2.01.12		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Dibangun	120	M	71.800.000	30	M	15.995.969	30	M	35.734.473			3.374.469						0	3.374.469	0,00	9,44	30	19.370.438	25,00	26,98
9	1.03.10.2.01.18		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan	80	M	1.600.000	20	M	981.379	20	M	500.000			34.193						0	34.193	0,00	6,84	20	1.015.572	25,00	63,47
10	1.03.10..2.01.23		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	8	DOK	4.000.000	2	DOK	2.424.119	2	DOK	20.000			95.560						0	95.560	0,00	477,80	2	2.519.680	25,00	62,99
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							0,00	70,79				
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Rendah	Sedang				
Rata-rata capaian program (%)																							0,00	7,08				
Predikat capaian program																							Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.12		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**100**	**persen**	**4.800.000**	**100**	**persen**	**1.259.880**	**100**	**persen**	**600.000**		**0**	**200.448**		**0**		**0**		**200.448**				**1.460.327**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K		K	
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	1.03.12.2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya dan terkoordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar**	**100**	**persen**	**4.000.000**	**100**	**persen**	**1.259.880**	**100**	**persen**	**200.000**		**0**		**150.690**		**0**		**0**		**150.690**					**1.410.570**		
1	1.03.12.2.01		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4	DOK	4.000.000	1	DOK	1.259.880	1	DOK	200.000				150.690					0	150.690	0,00	75,35	1	1.410.570	25,00	35,26
																								0,00	75,35				
																								Sangat Rendah	Sedang				
	1.03.12.2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya dan terkoordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar**	**100**	**persen**	**800.000**	**100**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**200.000**		**0**		**49.758**		**0**		**0**		**49.758**					**49.758**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K	
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
1	1.03.12.2.2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Pendataan Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Masterplan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	4	DOK	800.000	1	DOK		1	DOK	200.000	0	0	0	49.758					0	49.758	0,00	24,88	1	49.758	25,00	6,22
																								0,00	24,88				
																								Rata-rata capaian kegiatan (%)					
																								Predikat capaian kegiatan					
																								Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	1.03.12.2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselenggaranya dan terkoordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kab. Kampar**	**100**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**200.000**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**				**0**		
1	1.03.12.2.04.04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		4	DOK		1	DOK		1	DOK	200.000									0	0	0,00	0,00	1	0	25,00	#DIV/0!
																								0,00	0,00				
																								Rata-rata capaian kegiatan (%)					
																								Predikat capaian kegiatan					
																								Sangat Renda	Sangat Renda				

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
																								h	h				
																								0,00	33,41				
																								Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100	persen	4.000.000	100	persen	649.714	100	persen	200.000		0		31.220		0		0		31.220					680.934		
	2.10.05.2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya lahan untuk kepentingan umum dan pembangunan	100	persen	4.000.000	100	persen	649.714	100	persen	200.000		0		31.220		0		0		31.220					680.934		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
1	2.10..05.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ganti kerugian tanah masyarakat terselenggara dengan baik	4	DOK	4.000.000	1	DOK	649.714	1	DOK	200.000				31.220					0	31.220	0,00	15,61	1	680.934	25,00	17,02
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							0,00	15,61					
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian program (%)																							0,00	15,61					
Predikat capaian program																							Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	2.10.08		**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**		**100**	**persen**	**250.000**	**100**	**persen**	**188.382**	**100**	**persen**	**200.000**		**0**		**20.613**		**0**		**0**		**20.613**				**208.995**		

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV									
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	2.10.08.2.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Tanah milik pemerintah Kabupaten teridentifikasi dan terdata dengan baik**	**100**	**persen**	**250.000**	**100**	**persen**	**188.382**	**100**	**persen**	**200.000**		**0**		**20.613**		**0**		**0**		**20.613**				**208.995**			
1	2.10.08.2.02.01		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terselenggaranya Pendataan dan Penataan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Kampar	8	Laporan	250.000	2	Laporan	188.382	2	Laporan	200.000				20.613					0	20.613	0,00	10,31	2	208.995	25,00	83,60
																								Rata-rata capaian kegiatan (%)		0,00	10,31				
																								Predikat capaian kegiatan		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																								Rata-rata capaian program (%)		0,00	10,31				
																								Predikat capaian program		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	2.10.09		**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**		**100**	**persen**	**1.000.000**	**100**	**persen**	**122.534**	**100**	**persen**	**200.000**		**0**		**31.499**		**0**		**0**		**31.499**				**154.033**			

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
														I		II		III		IV							
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
	2.10.09.2.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Terkoordinasinya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan**	**100**	**persen**	**1.000.000**	**100**	**persen**	**122.534**	**100**	**persen**	**200.000**		**0**		**31.499**		**0**		**0**		**31.499**				**154.033**		
1	2.10.09.2.01.02		Pengendalian Pemanfaatan	Terdata dan Terfasilitasi Penyelesaan Tanah Masyarakat dan fasiltas umum yang berada di dalam kawasan hutan	4	DOK	1.000.000	1	DOK	122.534	1	DOK	200.000				31.499					0	31.499	0,00	15,75	1	154.033	25,00	15,40
Rata-rata capaian kegiatan (%)																							0,00	15,75				
Predikat capaian kegiatan																							Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian program (%)																							0,00	15,75				
Predikat capaian program																							Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Rata-Rata Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah(%)																							43,85	22,92				

No.	Kodefikasi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 s/d Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100		15=13+7		16=15/6x100	
Predikat Kinerja Organisasi Perangkat Daerah																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Kampar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Pengairan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional, pembangunan, pengelolaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasaraana jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
4. Pengelolaan rekomondasi teknis pengamanan dan pemanfaatan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
5. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa dan konstruksi terhadap masyarakat jasa kontruksi dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyedia jasa dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahan dinas, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.

Kinerja pelayanan SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2023 didasarkan pada Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) sebagai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR BULAN DESEMBER

APBD TAHUN ANGGARAN 2023

SUB KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	NILAI KEGIATAN KONTRAK (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KETERANGAN
						FISIK			KEUANGAN		
						RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
	KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PPERANGKAT DAERAH										
	1.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH	320.869.350,00	320.869.350,00	0,00	0,10	0,1037	0,1037	0,0000	290.434.300,00	0,0939	
	1.1.2. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	104.460.000,00	104.460.000,00	0,00	0,03	0,0338	0,0338	0,0000	103.060.000,00	0,0333	
	1.1.3. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	16.608.000,00	16.608.000,00	0,00	0,01	0,0054	0,0054	0,0000	8.070.000,00	0,0026	
	1.1.4 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	81.852.000,00	81.852.000,00	0,00	0,03	0,0265	0,0265	0,0000	81.181.000,00	0,0262	
	1.1.5 SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.150.000,00	66.150.000,00	0,00	0,02	0,0214	0,0214	0,0000	66.150.000,00	0,0214	
	JUMLAH KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PPERANGKAT DAERAH	**589.939.350,00**	**589.939.350,00**	**0,00**	**0,19**	**0,19**	**0,19**	**0,00**	**548.895.300,00**	**0,177**	

KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
1.2.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.100.229.726,00	10.100.229.726,00	0,00	3,26	3,2644	3,2644	0,0000	9.870.591.784,00	3,1902
1.2.2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	61.535.000,00	61.535.000,00	0,00	0,02	0,0199	0,0199	0,0000	55.933.422,00	0,0181
JUMLAH KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**10.161.764.726,00**	**10.161.764.726,00**	**0,00**	**3,28**	**3,28**	**3,28**	**0,00**	**9.926.525.206,00**	**3,208**
KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
1.3.2. SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	94.000.000,00	94.000.000,00		0,03	0,0304	0,0304	0,0000	12.627.500,00	0,0041
JUMLAH KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**94.000.000,00**	**94.000.000,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,00**	**12.627.500,00**	**0,004**
KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
1.4.1. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	0,0050	0,0050	0,0000	7.779.500,00	0,0025
1.4.2 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.145.952.250,00	1.107.777.000,00	38.175.250,00	0,36	0,3580	0,3580	0,0000	1.045.405.000,00	0,3379
1.4.3. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	263.164.000,00	263.164.000,00	0,00	0,09	0,0851	0,0851	0,0000	192.332.400,00	0,0622
1.4.4. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN	118.393.000,00	118.393.000,00	0,00	0,04	0,0383	0,0383	0,0000	115.824.900,00	0,0374
1.4.5. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,01	0,0106	0,0094	(0,0012)	9.020.000,00	0,0029
1.4.6. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.277.824.000,00	1.277.824.000,00	0,00	0,41	0,4130	0,4130	0,0000	1.240.693.141,00	0,4010
JUMLAH KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**2.849.733.250,00**	**2.811.558.000,00**	**38.175.250,00**	**0,91**	**0,91**	**0,91**	**(0,00)**	**2.611.054.941,00**	**0,844**
KEGIATAN 1.5 : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH									
1.5.1 SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	600.860.000,00	600.860.000,00	0,00	0,19	0,1942	0,1942	0,0000	600.860.000,00	0,1942
1.5.2 SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	282.040.000,00	232.040.000,00	50.000.000,00	0,07	0,0750	0,0750	0,0000	232.040.000,00	0,0750

	JUMLAH KEGIATAN 1.5 : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH	**882.900.000,00**	**832.900.000,00**	**50.000.000,00**	**0,27**	**0,27**	**0,27**	**0,00**	**832.900.000,00**	**0,27**	
	KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	1.6.1 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	298.818.000,00	298.818.000,00	0,00	0,10	0,0966	0,0966	0,0000	281.542.693,00	0,0910	
	1.6.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	0,05	0,0507	0,0507	0,0000	129.239.500,00	0,0418	
	1.6.3 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	967.806.000,00	967.806.000,00	0,00	0,31	0,3128	0,3128	0,0000	881.623.500,00	0,2849	
	JUMLAH KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**1.423.624.000,00**	**1.423.624.000,00**	**0,00**	**0,46**	**0,46**	**0,46**	**0,00**	**1.292.405.693,00**	**0,418**	
	KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
	1.7.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	167.455.800,00	167.455.800,00	0,00	0,05	0,0541	0,0541	0,0000	88.695.000,00	0,0287	
	1.7.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	363.332.400,00	363.332.400,00	0,00	0,12	0,1174	0,1174	0,0000	305.416.578,00	0,0987	
	1.7.3 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	877.670.000,00	782.360.000,00	95.310.000,00	0,25	0,2529	0,2529	0,0000	749.690.000,00	0,2423	
	1.7.4 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,03	0,0275	0,0275	0,0000	0,00	0,0000	
	JUMLAH KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**1.493.458.200,00**	**1.398.148.200,00**	**95.310.000,00**	**0,45**	**0,45**	**0,45**	**0,00**	**1.143.801.578,00**	**0,370**	
	JUMLAH PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**17.495.419.526,00**	**17.311.934.276,00**	**183.485.250,00**	**5,60**	**5,60**	**5,60**	**(0,00)**	**16.368.210.218,00**	**5,290**	
2	**PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**										
	KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA										

	2.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	218.984.000,00	217.507.500,00	1.476.500,00	0,07	0,0703	0,0703	0,0000	215.971.500,00	0,0698	
	2.1.2. SUB KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	3.549.190.000,00	3.067.139.489,00	482.050.511,00	0,99	0,9913	0,9913	0,0000	3.041.432.745,00	0,9830	
	2.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.879.397.700,00	1.878.864.900,00	532.800,00	0,61	0,6073	0,6073	0,0000	1.708.754.900,00	0,5523	
	2.1.4. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI	391.809.400,00	391.809.400,00	0,00	0,13	0,1266	0,1266	0,0000	310.893.900,00	0,1005	
	JUMLAH KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.039.381.100,00**	**5.555.321.289,00**	**484.059.811,00**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**0,00**	**5.277.053.045,00**	**1,706**	
	JUMLAH PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**6.039.381.100,00**	**5.555.321.289,00**	**484.059.811,00**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**0,00**	**5.277.053.045,00**	**1,706**	
3	**PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** **KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA**										
	3.1.1. SUB KEGIATAN SUVERVISI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PERLUASAN/PERBAIKAN SPAM	108.020.000,00	107.698.000,00	322.000,00	0,03	0,0348	0,0348	0,0000	107.698.000,00	0,0348	
	3.1.2. SUB KEGIATAN PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DIKAWASAN PERKOTAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
	3.1.3. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN	2.517.740.000,00	2.517.740.000,00	0,00	0,81	0,8137	0,8137	0,0000	2.446.023.176,00	0,7906	
	JUMLAH KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.625.760.000,00**	**2.625.438.000,00**	**322.000,00**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,00**	**2.553.721.176,00**	**0,825**	
	JUMLAH PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**2.625.760.000,00**	**2.625.438.000,00**	**322.000,00**	**0,85**	**0,85**	**0,85**	**0,00**	**2.553.721.176,00**	**0,825**	
4	**PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** **KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA**										

	4.1.1. SUB KEGIATAN SUVERVISI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA KOTA	3.402.465.000,00	3.346.465.000,00	56.000.000,00	1,08	1,0816	1,0498	(0,0318)	3.113.813.180,00	1,0064	
	JUMLAH KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA	**3.402.465.000,00**	**3.346.465.000,00**	**56.000.000,00**	**1,08**	**1,08**	**1,05**	**(0,03)**	**3.113.813.180,00**	**1,006**	
	JUMLAH PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**3.402.465.000,00**	**3.346.465.000,00**	**56.000.000,00**	**1,08**	**1,08**	**1,05**	**(0,03)**	**3.113.813.180,00**	**1,006**	
5	**PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**										
	KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR										
	5.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN STRATEGIS DAN TEKNIK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	417.400.000,00	415.512.600,00	1.887.400,00	0,13	0,1343	0,1343	0,0000	415.512.600,00	0,1343	
	5.1.2. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	13.119.475.847,00	12.428.356.487,00	691.119.360,00	4,02	4,0169	4,0169	0,0000	12.353.738.941,00	3,9928	
	5.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE	886.133.520,00	886.133.520,00	0,00	0,29	0,2864	0,2864	0,0000	732.061.500,00	0,2366	
	JUMLAH KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR	**14.423.009.367,00**	**13.730.002.607,00**	**693.006.760,00**	**4,44**	**4,44**	**4,44**	**0,00**	**13.501.313.041,00**	**4,364**	
	JUMLAH PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**14.423.009.367,00**	**13.730.002.607,00**	**693.006.760,00**	**4,44**	**4,44**	**4,44**	**0,00**	**13.501.313.041,00**	**4,364**	
6	**PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**										
	KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG										
	6.1.1. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	633.499.750,00	633.499.750,00	0,00	0,20	0,2048	0,2048	0,0000	555.369.350,00	0,1795	

	6.1.2. SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.814.234.271,00	34.193.619.868,88	620.614.402,12	11,05	11,0516	11,0516	0,0000	33.875.710.897,50	10,9488	
	6.1.3. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN/KOTA	126.069.500,00	126.069.500,00	0,00	0,04	0,0407	0,0407	0,0000	112.945.336,00	0,0365	
	6.1.4. SUB KEGIATAN PENILIKAN TERHADAP PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG OLEH PENILIK BANGUNAN	173.590.000,00	173.590.000,00	0,00	0,06	0,0561	0,0561	0,0000	69.375.000,00	0,0224	
	6.1.5. SUB KEGIATAN REHABILITASI, RENOVASI, DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KAB/KOTA	19.683.692.300,00	18.156.255.592,00	1.527.436.708,00	5,87	5,8682	5,8682	0,0000	15.365.138.829,00	4,9661	
	6.1.6. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KAB/KOTA	576.694.000,00	576.138.400,00	555.600,00	0,19	0,1862	0,1862	0,0000	475.764.256,00	0,1538	
	JUMLAH KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	**56.007.779.821,00**	**53.859.173.110,88**	**2.148.606.710,12**	**17,41**	**17,41**	**17,41**	**0,00**	**50.454.303.668,50**	**16,307**	
	JUMLAH PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**56.007.779.821,00**	**53.859.173.110,88**	**2.148.606.710,12**	**17,41**	**17,41**	**17,41**	**0,00**	**50.454.303.668,50**	**16,307**	
7	**PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN**										
	KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA										
	7.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1.805.742.000,00	1.798.946.070,00	6.795.930,00	0,58	0,5814	0,5814	0,0000	1.770.951.570,00	0,5724	
	7.1.2. SUB KEGIATAN SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	1.556.429.000,00	1.554.708.000,00	1.721.000,00	0,50	0,5025	0,5025	0,0000	1.547.083.000,00	0,5000	
	7.1.3. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN	51.982.999.198,00	51.406.935.755,00	576.063.443,00	16,61	16,6150	14,0891	(2,5259)	43.436.618.955,00	14,0389	
	7.1.4. SUB KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN	41.407.370.000,00	40.720.599.000,00	686.771.000,00	13,16	13,1611	5,4048	(7,7563)	16.494.349.000,00	5,3311	
	7.1.5. SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
	7.1.6. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	510.840.000,00	510.173.350,00	666.650,00	0,16	0,1649	0,1649	0,0000	510.173.350,00	0,1649	

	7.1.7. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.722.123.000,00	1.718.598.950,00	3.524.050,00	0,56	0,5555	0,5555	0,0000	1.615.867.150,00	0,5223	
	7.1.8. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	105.745.676.925,00	104.781.411.925,00	964.265.000,00	33,87	33,8659	32,2705	(1,5954)	97.186.740.424,00	31,4113	
	7.1.9. SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN	1.532.240.000,00	1.530.170.357,00	2.069.643,00	0,49	0,4946	0,4946	0,0000	1.518.323.857,00	0,4907	
	7.1.10. SUB KEGIATAN PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN	4.240.892.208,00	4.140.743.731,50	100.148.476,50	1,34	1,3383	1,0125	(0,3258)	2.913.335.206,50	0,9416	
	KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	**210.504.312.331,00**	**208.162.287.138,50**	**2.342.025.192,50**	**67,28**	**67,28**	**55,08**	**(12,20)**	**166.993.442.512,50**	**53,973**	
	JUMLAH PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN	**210.504.312.331,00**	**208.162.287.138,50**	**2.342.025.192,50**	**67,28**	**67,28**	**55,08**	**(12,20)**	**166.993.442.512,50**	**53,973**	
8	**PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** **KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA** 8.1.1. SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	2.307.014.300,00	2.307.014.300,00	0,00	0,75	0,7456	0,7456	0,0000	1.817.114.048,00	0,5873	
	JUMLAH KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	**2.307.014.300,00**	**2.307.014.300,00**	**0,00**	**0,75**	**0,75**	**0,75**	**0,00**	**1.817.114.048,00**	**0,587**	
	KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.2.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	475.143.800,00	475.143.800,00	0,00	0,15	0,1536	0,1536	0,0000	362.606.300,00	0,1172	
	JUMLAH KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	**475.143.800,00**	**475.143.800,00**	**0,00**	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**362.606.300,00**	**0,117**	
	KEGIATAN 8.3 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.3.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	222.014.200,00	222.014.200,00	0,00	0,07	0,0718	0,0718	0,0000	121.939.200,00	0,0394	

	JUMLAH KEGIATAN 8.3 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	**222.014.200,00**	**222.014.200,00**	**0,00**	**0,07**	**0,07**	**0,07**	**0,00**	**121.939.200,00**	**0,039**	
	JUMLAH PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**3.004.172.300,00**	**3.004.172.300,00**	**0,00**	**0,97**	**0,97**	**0,97**	**0,00**	**2.301.659.548,00**	**0,744**	
9	**PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** **KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA** 9.1.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.335.451.000,00	1.333.915.930,00	1.535.070,00	0,43	0,4311	0,4311	0,0000	1.230.932.930,00	0,3978	
	JUMLAH KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.335.451.000,00**	**1.333.915.930,00**	**1.535.070,00**	**0,43**	**0,43**	**0,43**	**0,00**	**1.230.932.930,00**	**0,398**	
	JUMLAH PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**1.335.451.000,00**	**1.333.915.930,00**	**1.535.070,00**	**0,43**	**0,43**	**0,43**	**0,00**	**1.230.932.930,00**	**0,398**	
10	**PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG** **KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG** 10.1.1. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH KOSONG	322.423.400,00	321.986.400,00	437.000,00	0,10	0,1041	0,1041	0,0000	310.033.900,00	0,1002	
	JUMLAH KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	**322.423.400,00**	**321.986.400,00**	**437.000,00**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**310.033.900,00**	**0,100**	
	JUMLAH PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**322.423.400,00**	**321.986.400,00**	**437.000,00**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**310.033.900,00**	**0,100**	
11	**PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** **KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH**										

	11.1.1. SUB KEGIATAN Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	150.221.700,00	150.221.700,00	0,00	0,05	0,0486	0,0486	0,0000	120.715.408,00	0,0390	
	JUMLAH KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	**150.221.700,00**	**150.221.700,00**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**120.715.408,00**	**0,039**	
	JUMLAH PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**150.221.700,00**	**150.221.700,00**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,00**	**120.715.408,00**	**0,039**	
	TOTAL PROGRAM TAHUN 2023	**315.310.395.545,00**	**309.400.917.751,38**	**5.909.477.793,62**	**100,00**	**100,00**	**87,76**	**(12,24)**	**262.225.198.627,00**	**84,75**	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	NILAI KEGIATAN KONTRAK (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KETERANGAN
						FISIK			KEUANGAN		
						RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PPERANGKAT DAERAH										
	1.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH	320.869.350,00	320.869.350,00	0,00	0,10	0,1037	0,1037	0,0000	290.434.300,00	0,0939	
	1.1.2. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	104.460.000,00	104.460.000,00	0,00	0,03	0,0338	0,0338	0,0000	103.060.000,00	0,0333	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	1.1.3. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	16.608.000,00	16.608.000,00	0,00	0,01	0,0054	0,0054	0,0000	8.070.000,00	0,0026	
	1.1.4 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	81.852.000,00	81.852.000,00	0,00	0,03	0,0265	0,0265	0,0000	81.181.000,00	0,0262	
	1.1.5 SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.150.000,00	66.150.000,00	0,00	0,02	0,0214	0,0214	0,0000	66.150.000,00	0,0214	
	JUMLAH KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PPERANGKAT DAERAH	589.939.350,00	589.939.350,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,00	548.895.300,00	0,177	
	KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
	1.2.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.100.229.726,00	10.100.229.726,00	0,00	3,26	3,2644	3,2644	0,0000	9.870.591.784,00	3,1902	
	1.2.2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	61.535.000,00	61.535.000,00	0,00	0,02	0,0199	0,0199	0,0000	55.933.422,00	0,0181	
	JUMLAH KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.161.764.726,00	10.161.764.726,00	0,00	3,28	3,28	3,28	0,00	9.926.525.206,00	3,208	
	KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										
	1.3.2. SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	94.000.000,00	94.000.000,00		0,03	0,0304	0,0304	0,0000	12.627.500,00	0,0041	
	JUMLAH KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	12.627.500,00	0,004	
	KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
	1.4.1. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	0,0050	0,0050	0,0000	7.779.500,00	0,0025	
	1.4.2 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.145.952.250,00	1.107.777.000,00	38.175.250,00	0,36	0,3580	0,3580	0,0000	1.045.405.000,00	0,3379	
	1.4.3. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	263.164.000,00	263.164.000,00	0,00	0,09	0,0851	0,0851	0,0000	192.332.400,00	0,0622	
	1.4.4. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN	118.393.000,00	118.393.000,00	0,00	0,04	0,0383	0,0383	0,0000	115.824.900,00	0,0374	
	1.4.5. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	0,01	0,0106	0,0094	(0,0012)	9.020.000,00	0,0029	
	1.4.6. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.277.824.000,00	1.277.824.000,00	0,00	0,41	0,4130	0,4130	0,0000	1.240.693.141,00	0,4010	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	JUMLAH KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.849.733.250,00	2.811.558.000,00	38.175.250,00	0,91	0,91	0,91	(0,00)	2.611.054.941,00	0,844	
	KEGIATAN 1.5 : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH										
	1.5.1 SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	600.860.000,00	600.860.000,00	0,00	0,19	0,1942	0,1942	0,0000	600.860.000,00	0,1942	
	1.5.2 SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	282.040.000,00	232.040.000,00	50.000.000,00	0,07	0,0750	0,0750	0,0000	232.040.000,00	0,0750	
	JUMLAH KEGIATAN 1.5 : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH	882.900.000,00	832.900.000,00	50.000.000,00	0,27	0,27	0,27	0,00	832.900.000,00	0,27	
	KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	1.6.1 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	298.818.000,00	298.818.000,00	0,00	0,10	0,0966	0,0966	0,0000	281.542.693,00	0,0910	
	1.6.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	0,05	0,0507	0,0507	0,0000	129.239.500,00	0,0418	
	1.6.3 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	967.806.000,00	967.806.000,00	0,00	0,31	0,3128	0,3128	0,0000	881.623.500,00	0,2849	
	JUMLAH KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.423.624.000,00	1.423.624.000,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,00	1.292.405.693,00	0,418	
	KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
	1.7.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	167.455.800,00	167.455.800,00	0,00	0,05	0,0541	0,0541	0,0000	88.695.000,00	0,0287	
	1.7.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	363.332.400,00	363.332.400,00	0,00	0,12	0,1174	0,1174	0,0000	305.416.578,00	0,0987	
	1.7.3 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	877.670.000,00	782.360.000,00	95.310.000,00	0,25	0,2529	0,2529	0,0000	749.690.000,00	0,2423	
	1.7.4 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,03	0,0275	0,0275	0,0000	0,00	0,0000	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	JUMLAH KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.493.458.200,00	1.398.148.200,00	95.310.000,00	0,45	0,45	0,45	0,00	1.143.801.578,00	0,370	
	JUMLAH PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.495.419.526,00	17.311.934.276,00	183.485.250,00	5,60	5,60	5,60	(0,00)	16.368.210.218,00	5,290	
2	PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	2.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	218.984.000,00	217.507.500,00	1.476.500,00	0,07	0,0703	0,0703	0,0000	215.971.500,00	0,0698	
	2.1.2. SUB KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	3.549.190.000,00	3.067.139.489,00	482.050.511,00	0,99	0,9913	0,9913	0,0000	3.041.432.745,00	0,9830	
	2.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.879.397.700,00	1.878.864.900,00	532.800,00	0,61	0,6073	0,6073	0,0000	1.708.754.900,00	0,5523	
	2.1.4. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI	391.809.400,00	391.809.400,00	0,00	0,13	0,1266	0,1266	0,0000	310.893.900,00	0,1005	
	JUMLAH KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.039.381.100,00	5.555.321.289,00	484.059.811,00	1,80	1,80	1,80	0,00	5.277.053.045,00	1,706	
	JUMLAH PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.039.381.100,00	5.555.321.289,00	484.059.811,00	1,80	1,80	1,80	0,00	5.277.053.045,00	1,706	
3	PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA										
	3.1.1. SUB KEGIATAN SUVERVISI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PERLUASAN/PERBAIKAN SPAM	108.020.000,00	107.698.000,00	322.000,00	0,03	0,0348	0,0348	0,0000	107.698.000,00	0,0348	
	3.1.2. SUB KEGIATAN PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DIKAWASAN PERKOTAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	3.1.3. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN	2.517.740.000,00	2.517.740.000,00	0,00	0,81	0,8137	0,8137	0,0000	2.446.023.176,00	0,7906	
	JUMLAH KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA	2.625.760.000,00	2.625.438.000,00	322.000,00	0,85	0,85	0,85	0,00	2.553.721.176,00	0,825	
	JUMLAH PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.625.760.000,00	2.625.438.000,00	322.000,00	0,85	0,85	0,85	0,00	2.553.721.176,00	0,825	
4	PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA										
	4.1.1. SUB KEGIATAN SUVERVISI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA KOTA	3.402.465.000,00	3.346.465.000,00	56.000.000,00	1,08	1,0816	1,0498	(0,0318)	3.113.813.180,00	1,0064	
	JUMLAH KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA	3.402.465.000,00	3.346.465.000,00	56.000.000,00	1,08	1,08	1,05	(0,03)	3.113.813.180,00	1,006	
	JUMLAH PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.402.465.000,00	3.346.465.000,00	56.000.000,00	1,08	1,08	1,05	(0,03)	3.113.813.180,00	1,006	
5	PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR										
	5.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN STRATEGIS DAN TEKNIK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	417.400.000,00	415.512.600,00	1.887.400,00	0,13	0,1343	0,1343	0,0000	415.512.600,00	0,1343	
	5.1.2. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	13.119.475.847,00	12.428.356.487,00	691.119.360,00	4,02	4,0169	4,0169	0,0000	12.353.738.941,00	3,9928	
	5.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE	886.133.520,00	886.133.520,00	0,00	0,29	0,2864	0,2864	0,0000	732.061.500,00	0,2366	
	JUMLAH KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR	14.423.009.367,00	13.730.002.607,00	693.006.760,00	4,44	4,44	4,44	0,00	13.501.313.041,00	4,364	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	JUMLAH PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	14.423.009.367,00	13.730.002.607,00	693.006.760,00	4,44	4,44	4,44	0,00	13.501.313.041,00	4,364	
6	PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										
	KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG										
	6.1.1. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	633.499.750,00	633.499.750,00	0,00	0,20	0,2048	0,2048	0,0000	555.369.350,00	0,1795	
	6.1.2. SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.814.234.271,00	34.193.619.868,88	620.614.402,12	11,05	11,0516	11,0516	0,0000	33.875.710.897,50	10,9488	
	6.1.3. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN/KOTA	126.069.500,00	126.069.500,00	0,00	0,04	0,0407	0,0407	0,0000	112.945.336,00	0,0365	
	6.1.4. SUB KEGIATAN PENILIKAN TERHADAP PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG OLEH PENILIK BANGUNAN	173.590.000,00	173.590.000,00	0,00	0,06	0,0561	0,0561	0,0000	69.375.000,00	0,0224	
	6.1.5. SUB KEGIATAN REHABILITASI, RENOVASI, DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KAB/KOTA	19.683.692.300,00	18.156.255.592,00	1.527.436.708,00	5,87	5,8682	5,8682	0,0000	15.365.138.829,00	4,9661	
	6.1.6. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KAB/KOTA	576.694.000,00	576.138.400,00	555.600,00	0,19	0,1862	0,1862	0,0000	475.764.256,00	0,1538	
	JUMLAH KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	56.007.779.821,00	53.859.173.110,88	2.148.606.710,12	17,41	17,41	17,41	0,00	50.454.303.668,50	16,307	
	JUMLAH PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	56.007.779.821,00	53.859.173.110,88	2.148.606.710,12	17,41	17,41	17,41	0,00	50.454.303.668,50	16,307	
7	PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN										

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA										
	7.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1.805.742.000,00	1.798.946.070,00	6.795.930,00	0,58	0,5814	0,5814	0,0000	1.770.951.570,00	0,5724	
	7.1.2. SUB KEGIATAN SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	1.556.429.000,00	1.554.708.000,00	1.721.000,00	0,50	0,5025	0,5025	0,0000	1.547.083.000,00	0,5000	
	7.1.3. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN	51.982.999.198,00	51.406.935.755,00	576.063.443,00	16,61	16,6150	14,0891	(2,5259)	43.436.618.955,00	14,0389	
	7.1.4. SUB KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN	41.407.370.000,00	40.720.599.000,00	686.771.000,00	13,16	13,1611	5,4048	(7,7563)	16.494.349.000,00	5,3311	
	7.1.5. SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
	7.1.6. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	510.840.000,00	510.173.350,00	666.650,00	0,16	0,1649	0,1649	0,0000	510.173.350,00	0,1649	
	7.1.7. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.722.123.000,00	1.718.598.950,00	3.524.050,00	0,56	0,5555	0,5555	0,0000	1.615.867.150,00	0,5223	
	7.1.8. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	105.745.676.925,00	104.781.411.925,00	964.265.000,00	33,87	33,8659	32,2705	(1,5954)	97.186.740.424,00	31,4113	
	7.1.9. SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN	1.532.240.000,00	1.530.170.357,00	2.069.643,00	0,49	0,4946	0,4946	0,0000	1.518.323.857,00	0,4907	
	7.1.10. SUB KEGIATAN PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN	4.240.892.208,00	4.140.743.731,50	100.148.476,50	1,34	1,3383	1,0125	(0,3258)	2.913.335.206,50	0,9416	
	KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	210.504.312.331,00	208.162.287.138,50	2.342.025.192,50	67,28	67,28	55,08	(12,20)	166.993.442.512,50	53,973	
	JUMLAH PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN	210.504.312.331,00	208.162.287.138,50	2.342.025.192,50	67,28	67,28	55,08	(12,20)	166.993.442.512,50	53,973	
8	PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA										
	8.1.1. SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	2.307.014.300,00	2.307.014.300,00	0,00	0,75	0,7456	0,7456	0,0000	1.817.114.048,00	0,5873	
	JUMLAH KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	2.307.014.300,00	2.307.014.300,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	1.817.114.048,00	0,587	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	8.2.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	475.143.800,00	475.143.800,00	0,00	0,15	0,1536	0,1536	0,0000	362.606.300,00	0,1172	
	JUMLAH KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	475.143.800,00	475.143.800,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00	362.606.300,00	0,117	
	KEGIATAN 8.3 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	8.3.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	222.014.200,00	222.014.200,00	0,00	0,07	0,0718	0,0718	0,0000	121.939.200,00	0,0394	
	JUMLAH KEGIATAN 8.3 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.014.200,00	222.014.200,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	121.939.200,00	0,039	
	JUMLAH PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.004.172.300,00	3.004.172.300,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,00	2.301.659.548,00	0,744	
9	PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										
	KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	9.1.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.335.451.000,00	1.333.915.930,00	1.535.070,00	0,43	0,4311	0,4311	0,0000	1.230.932.930,00	0,3978	
	JUMLAH KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.335.451.000,00	1.333.915.930,00	1.535.070,00	0,43	0,43	0,43	0,00	1.230.932.930,00	0,398	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	NILAI KEGIATAN	SISA DANA (Rp)	BOBOT	REALISASI					KETERANGAN
	JUMLAH PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.335.451.000,00	1.333.915.930,00	1.535.070,00	0,43	0,43	0,43	0,00	1.230.932.930,00	0,398	
10	PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG										
	KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG										
	10.1.1. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH KOSONG	322.423.400,00	321.986.400,00	437.000,00	0,10	0,1041	0,1041	0,0000	310.033.900,00	0,1002	
	JUMLAH KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	322.423.400,00	321.986.400,00	437.000,00	0,10	0,10	0,10	0,00	310.033.900,00	0,100	
	JUMLAH PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG	322.423.400,00	321.986.400,00	437.000,00	0,10	0,10	0,10	0,00	310.033.900,00	0,100	
11	PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH										
	KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH										
	11.1.1. SUB KEGIATAN Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	150.221.700,00	150.221.700,00	0,00	0,05	0,0486	0,0486	0,0000	120.715.408,00	0,0390	
	JUMLAH KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	150.221.700,00	150.221.700,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	120.715.408,00	0,039	
	JUMLAH PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	150.221.700,00	150.221.700,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00	120.715.408,00	0,039	
	TOTAL PROGRAM TAHUN 2023	315.310.395.545,00	309.400.917.751,38	5.909.477.793,62	100,00	100,00	87,76	(12,24)	262.225.198.627,00	84,75	

		NILAI KEGIATAN	SISA	BOBOT	REALISASI		
					FISIK	KEUANGAN	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DALAM DPPA (Rp)	DANA (Rp)	(%)	RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	KET.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
	KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PPERANGKAT DAERAH									
	1.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERANGKAT DAERAH	229.843.350,00		0,09	0,0374	0,0523	0,0149	9.400.000,00	0,0037	
	1.1.2. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD	83.480.000,00		0,03	0,0130	0,0190	0,0060	0,00	0,0000	
	1.1.3. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD	11.448.000,00		0,00	0,0022	0,0026	0,0004	0,00	0,0000	
	1.1.4 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	81.852.000,00		0,03	0,0133	0,0316	0,0182	79.500.000,00	0,0310	
	1.1.5 SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	66.150.000,00		0,03	0,0065	0,0151	0,0086	4.350.000,00	0,0017	
	JUMLAH KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PPERANGKAT DAERAH	**472.773.350,00**	**0,00**	**0,18**	**0,07**	**0,12**	**0,05**	**93.250.000,00**	**0,036**	
	KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
	1.2.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.790.892.657,00		3,82	1,5918	2,2285	0,6367	5.358.869.980,00	2,0910	
	1.2.2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	59.035.000,00		0,02	0,0230	0,0134	(0,0096)	2.000.000,00	0,0000	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	JUMLAH KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**9.849.927.657,00**	**0,00**	**3,84**	**1,61**	**2,24**	**0,63**	**5.360.869.980,00**	**2,091**	
	KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
	1.3.2. SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	235.000.000,00		0,09	0,0408	0,0000	(0,0408)	7.227.500,00	0,0028	
	JUMLAH KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**235.000.000,00**	**0,00**	**0,09**	**0,04**	**0,00**	**(0,04)**	**7.227.500,00**	**0,003**	
	KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
	1.4.1. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.360.000,00		0,01	0,0025	0,0035	0,0010	0,00	0,0000	
	1.4.2 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	483.910.000,00		0,19	0,0787	0,1101	0,0315	0,00	0,0000	
	1.4.3. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	263.164.000,00		0,10	0,0513	0,0599	0,0086	65.010.400,00	0,0254	
	1.4.4. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN	118.393.000,00		0,05	0,0231	0,0269	0,0038	52.565.000,00	0,0205	
	1.4.5. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29.040.000,00		0,01	0,0038	0,0066	0,0028	440.000,00	0,0002	
	1.4.6. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	979.930.000,00		0,38	0,1593	0,2230	0,0637	395.642.529,00	0,1544	
	JUMLAH KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**1.889.797.000,00**	**0,00**	**0,74**	**0,32**	**0,43**	**0,11**	**513.657.929,00**	**0,200**	
	KEGIATAN 1.5 : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH									
	1.5.1 SUB KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	666.000.000,00		0,26	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	
	JUMLAH KEGIATAN 1.5 : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DAERAH	**666.000.000,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	1.6.1 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	298.818.000,00		0,12	0,0486	0,0706	0,0221	115.178.434,00	0,0449	
	1.6.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	108.700.000,00		0,04	0,0193	0,0236	0,0043	39.003.500,00	0,0152	
	1.6.3 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	829.266.000,00		0,32	0,1348	0,1906	0,0558	427.316.000,00	0,1667	
	JUMLAH KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**1.236.784.000,00**	**0,00**	**0,48**	**0,20**	**0,28**	**0,08**	**581.497.934,00**	**0,227**	
	KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
	1.7.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	167.455.800,00		0,07	0,0272	0,0381	0,0109	24.215.000,00	0,0094	
	1.7.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	363.332.400,00		0,14	0,0591	0,0827	0,0236	154.467.578,00	0,0603	
	1.7.3 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	927.670.000,00		0,36	0,1508	0,2111	0,0603	298.750.000,00	0,1166	
	1.7.4 SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	75.000.000,00		0,03	0,0122	0,0171	0,0049	0,00	0,0000	
	JUMLAH KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**1.533.458.200,00**	**0,00**	**0,60**	**0,25**	**0,35**	**0,10**	**477.432.578,00**	**0,186**	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	JUMLAH PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**15.883.740.207,00**	**0,00**	**6,20**	**2,50**	**3,43**	**0,93**	**7.033.935.921,00**	**2,744**	
2	**PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** **KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
	2.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONTRUKSI IRIGASI DAN RAWA	320.474.000,00		0,13	0,1250	0,0047	(0,1204)	0,00	0,0000	
	2.1.2. SUB KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	4.072.830.000,00		1,59	0,7946	0,0109	(0,7837)	0,00	0,0000	
	2.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	1.663.010.200,00		0,65	0,2360	0,3311	0,0951	483.791.800,00	0,1888	
	2.1.4. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI	467.510.400,00		0,18	0,0663	0,1064	0,0401	49.900.000,00	0,0195	
	JUMLAH KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.523.824.600,00**	**0,00**	**2,55**	**1,22**	**0,45**	**(0,77)**	**533.691.800,00**	**0,208**	
	JUMLAH PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**6.523.824.600,00**	**0,00**	**2,55**	**1,22**	**0,45**	**(0,77)**	**533.691.800,00**	**0,208**	
3	**PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**									

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA									
	3.1.1. SUB KEGIATAN SUVERVISI PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/PERLUASAN/PERBAIKAN SPAM	196.280.000,00		0,08	0,0219	0,0048	(0,0170)	0,00	0,0000	
	3.1.2. SUB KEGIATAN PERLUASAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DIKAWASAN PERKOTAAN	328.080.000,00		0,13	0,0366	0,0064	(0,0302)	0,00	0,0000	
	3.1.3. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN DI KAWASAN PERDESAAN	3.168.690.000,00		1,24	0,3533	0,1249	(0,2284)	150.916.376,00	0,0589	
	JUMLAH KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.693.050.000,00**	**0,00**	**1,44**	**0,41**	**0,14**	**(0,28)**	**150.916.376,00**	**0,059**	
	JUMLAH PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**3.693.050.000,00**	**0,00**	**1,44**	**0,41**	**0,14**	**(0,28)**	**150.916.376,00**	**0,059**	
4	**PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA**									
	4.1.1. SUB KEGIATAN SUVERVISI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PERLUASAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA KOTA	3.519.205.000,00		1,37	0,6103	0,1193	(0,4909)	70.090.000,00	0,0273	
	JUMLAH KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA	**3.519.205.000,00**	**0,00**	**1,37**	**0,61**	**0,12**	**(0,49)**	**70.090.000,00**	**0,027**	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	JUMLAH PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**3.519.205.000,00**	**0,00**	**1,37**	**0,61**	**0,12**	**(0,49)**	**70.090.000,00**	**0,027**	
5	**PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**									
	KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR									
	5.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN STRATEGIS DAN TEKNIK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	167.400.000,00		0,07	0,0653	0,0040	(0,0613)	8.020.000,00	0,0031	
	5.1.2. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	8.621.217.500,00		3,36	1,2615	0,0333	(1,2282)	37.767.000,00	0,0147	
	5.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE	1.021.237.000,00		0,40	0,1811	0,1603	(0,0208)	81.032.499,00	0,0316	
	JUMLAH KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR	**9.809.854.500,00**	**0,00**	**3,83**	**1,51**	**0,20**	**(1,31)**	**126.819.499,00**	**0,049**	
	JUMLAH PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**9.809.854.500,00**	**0,00**	**3,83**	**1,51**	**0,20**	**(1,31)**	**126.819.499,00**	**0,049**	
6	**PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**									
	KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG									
	6.1.1. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG	633.499.750,00		0,25	0,0899	0,1459	0,0561	160.369.350,00	0,0626	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	6.1.2. SUB KEGIATAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGAWASAN, DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.748.469.000,00		8,48	2,1212	0,7139	(1,4072)	1.932.841.612,00	0,7542	
	6.1.3. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN REGULASI TERKAIT BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN/KOTA	126.069.500,00		0,05	0,0488	0,0180	(0,0308)	8.395.000,00	0,0033	
	6.1.4. SUB KEGIATAN PENILIKAN TERHADAP PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG OLEH PENILIK BANGUNAN	173.590.000,00		0,07	0,0271	0,0360	0,0089	13.755.000,00	0,0054	
	6.1.5. SUB KEGIATAN REHABILITASI, RENOVASI, DAN UBAHSUAI BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KAB/KOTA	17.264.905.300,00		6,74	3,3682	0,0777	(3,2905)	94.257.300,00	0,0368	
	6.1.6. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH KAB/KOTA	576.694.000,00		0,23	0,1125	0,0620	(0,0506)	18.352.500,00	0,0072	
	JUMLAH KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	**40.523.227.550,00**	**0,00**	**15,81**	**5,77**	**1,05**	**(4,71)**	**2.227.970.762,00**	**0,869**	
	JUMLAH PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**40.523.227.550,00**	**0,00**	**15,81**	**5,77**	**1,05**	**(4,71)**	**2.227.970.762,00**	**0,869**	
7	**PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN**									
	KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA									
	7.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	313.700.000,00		0,12	0,0699	0,0878	0,0179	162.325.680,00	0,0633	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	7.1.2. SUB KEGIATAN SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	573.810.000,00		0,22	0,0814	0,0000	(0,0814)	29.585.000,00	0,0115	
	7.1.3. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN	41.129.705.291,00		16,05	2,0060	0,0994	(1,9066)	76.740.000,00	0,0299	
	7.1.4. SUB KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN	15.906.000.000,00		6,21	0,7758	0,0000	(0,7758)	0,00	0,0000	
	7.1.5. SUB KEGIATAN REHABILITASI JALAN	2.376.000.000,00		0,93	0,1159	0,0000	(0,1159)	0,00	0,0000	
	7.1.6. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	2.138.400.000,00		0,83	0,1043	0,0000	(0,1043)	0,00	0,0000	
	7.1.7. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	1.530.910.000,00		0,60	0,0747	0,3156	0,2409	631.870.250,00	0,2465	
	7.1.8. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN	104.795.777.000,00		39,32	0,0000	0,5312	0,5312	3.374.468.899,00	1,3167	
	7.1.9. SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN	1.138.025.000,00		0,44	0,0555	0,0200	(0,0355)	34.192.500,00	0,0133	
	7.1.10. SUB KEGIATAN PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN	4.334.720.000,00		1,65	0,2069	0,1282	(0,0786)	95.560.489,00	0,0373	
	KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	**174.237.047.291,00**	**0,00**	**66,38**	**3,49**	**1,18**	**(2,31)**	**4.404.742.818,00**	**1,719**	
	JUMLAH PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN	**174.237.047.291,00**	**0,00**	**66,38**	**3,49**	**1,18**	**(2,31)**	**4.404.742.818,00**	**1,719**	
8	**PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**									
	KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA									
	8.1.1. SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	2.403.127.200,00		0,94	0,2344	0,5470	0,3126	150.690.340,00	0,0588	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	JUMLAH KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	**2.403.127.200,00**	**0,00**	**0,94**	**0,23**	**0,55**	**0,31**	**150.690.340,00**	**0,059**	
	KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.2.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG UNTUK INVESTASI DAN PEMBANGUNAN DAERAH	344.762.400,00		0,13	0,0448	0,0762	0,0314	49.757.500,00	0,0194	
	JUMLAH KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	**344.762.400,00**	**0,00**	**0,13**	**0,04**	**0,08**	**0,03**	**49.757.500,00**	**0,019**	
	KEGIATAN 8.3 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.3.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	222.087.000,00		0,09	0,0289	0,0505	0,0217	0,00	0,0000	
	JUMLAH KEGIATAN 8.3 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	**222.087.000,00**	**0,00**	**0,09**	**0,03**	**0,05**	**0,02**	**0,00**	**0,000**	
	JUMLAH PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**2.969.976.600,00**	**0,00**	**1,16**	**0,31**	**0,67**	**0,37**	**200.447.840,00**	**0,078**	
9	**PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**									

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.1.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.607.201.000,00		1,02	0,3391	0,0382	(0,3009)	31.220.000,00	0,0122	
	JUMLAH KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.607.201.000,00**	**0,00**	**1,02**	**0,34**	**0,04**	**(0,30)**	**31.220.000,00**	**0,012**	
	JUMLAH PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**2.607.201.000,00**	**0,00**	**1,02**	**0,34**	**0,04**	**(0,30)**	**31.220.000,00**	**0,012**	
10	**PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG** **KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG** 10.1.1. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH KOSONG	479.308.400,00		0,19	0,0623	0,0863	0,0240	20.612.500,00	0,0080	
	JUMLAH KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	**479.308.400,00**	**0,00**	**0,19**	**0,06**	**0,09**	**0,02**	**20.612.500,00**	**0,008**	
	JUMLAH PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**479.308.400,00**	**0,00**	**0,19**	**0,06**	**0,09**	**0,02**	**20.612.500,00**	**0,008**	
11	**PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH** **KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH**									

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NILAI KEGIATAN DALAM DPPA (Rp)	SISA DANA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI					KET.
					FISIK			KEUANGAN		
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	DEVIASI (+/-)	(Rp)	(%)	
	11.1.1. SUB KEGIATAN Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	151.536.700,00		0,06	0,0197	0,0345	(0,0148)	31.499.300,00	0,0123	
	JUMLAH KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	**151.536.700,00**	**0,00**	**0,06**	**0,02**	**0,03**	**(0,01)**	**31.499.300,00**	**0,012**	
	JUMLAH PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**151.536.700,00**	**0,00**	**0,06**	**0,02**	**0,03**	**(0,01)**	**31.499.300,00**	**0,012**	
	TOTAL PROGRAM TAHUN 2023	**260.397.971.848,00**	**0,00**	**100,00**	**16,24**	**7,45**	**(8,78)**	**14.831.946.816,00**	**5,79**	

1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar antara lain :

1. Aksesibilitas

   Aksesibiltas merupakan salah satu komponen penting daya saing dan daya tarik sebuah daerah. Tanpa akses yang memadai wilayah tersebut akan kehilangan pamor dan ditinggalkan para pelaku jasa. Aksesibilitas ini lebih terasa dibutuhkan pada daerah yang belum berkembang dan terisolasi. Pembukaan daerah dengan memberi akses yang besar akan membawa dampak ikutan yang besar dan cepat pada sektor pertumbuhan ekonomi setempat.

2. Tingkat Pelayanan Jalan dan Jembatan

   Besarnya akses ke suatu tempat tanpa didukung oleh kondisi infrastruktur yang baik akan mendorong penurunan nilai ekonomis jalan tersebut. Manajemen lalulintas dari aspek pengoptimalan kapasitas jalan dan jembatan harus terus ditingkatkan, sementara dari aspek struktur perkerasan, pola pemeliharaan jalan dan jembatan harus ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas struktur yang baik dan umur struktur yang layak.

3. Meningkatkan fungsi sungai dan danau sebagai sarana angkutan dan sumber daya air serta normalisasi sungai guna mengantisipasi bahaya banjir dengan tujuan:
   1) Terpeliharanya daerah aliran sungai dan danau guna meminimalisasikan kemungkinan terjadinya banjir.
   2) Meningkatnya pasokan air bagi masyarakat dengan memanfaatkan secara seimbang air permukaan dan air tanah dengan pola conjunctive usebagi kebutuhan rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri.

4. ` Mengoptimalkan Pendataan, Pengelolaan, Serta Pemanfaatan Ruang dan Bangunan serta Tataguna Lahan Pertanahan yang ada di Kabupaten Kampar.

5. Optimalisasi Pemanfaatan serta pemeliharaan Aset Bangunan Pemda yang Meliputi Bangunan Kantor, Infrastruktur Drainase, Serta Pengelolaan Air Baku Kabupaten Kampar.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tabel Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2023 sesuai Perubahan RKPD Tahun 2023

a. Perubahan Indikator Kinerja

Tidak ada program, kegiatan yang mengalami perubahan indikator kinerja, tetapi pada sub kegiatan terdapat perubahan indikator karena menyesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 yang telah ditetapkan dengan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

b. Jumlah program dan jumlah kegiatan;

Terdapat 11 program, 19 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, diantaranya ada yang mengalami pengurangan, penambahan dan pergeseran anggaran.

c. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;dan

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut program/ kegiatannya adalah Rp 260.397.971.848,- yang dirinci seperti halnya pada tabel 3.1. Sumber dana kegiatan tersebut ada yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d. Alasan dilakukan perubahan.

Secara umum alasan dilakukan perubahan baik perubahan indikator kinerja, jumlah program dan jumlah kegiatan maupun perubahan dana/ pagu indikatif dikarenakan:

1. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Perubahan Indikator sub kegiatan menyesuaikan Kepmendagri Nomor 050- 5889 yang telah ditetapkan dengan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan

`

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR BULAN JANUARI

APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE KEGIATAN / URAIAN PEKERJAAN	PPK /PPTK	NILAI KEGIATAN DALAM DPA (Rp)	NILAI KEGIATAN KONTRAK (Rp)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)	NAMA PERUSAHAAN	BOBOT (%)	REALISASI			KETERANGAN
		NAMA / NIP						FISIK	KEUANGAN		
								REALISASI (%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	1.03 PEKERJAAN UMUM										
	PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH										
	1.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANNAN PERANGKAT DAERAH										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7.605.000,00	7.605.000,00	-		0,00345	8,33		-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		15.000.000,00	15.000.000,00	-		0,00680	8,33		-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		20.600.000,00	20.600.000,00	-		0,00934	8,33		-	
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		54.000.000,00	54.000.000,00	-		0,02449	8,33		-	
	Belanja Lembur		22.640.000,00	22.640.000,00	-		0,01027	8,33		-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		159.710.000,00	159.710.000,00	-		0,07243	8,33		-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		107.660.000,00	107.660.000,00	-		0,04882	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA KEGIATAN PENUSUNAN DOKUMEN PERANGKATDAERAH		**387.215.000,00**	**387.215.000,00**	**-**		**0,18**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.1.2. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMENRKA SKPD										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.735.500,00	3.735.500,00	-		0,00169	8,33		-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4.500.000,00	4.500.000,00	-		0,00204	8,33		-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.150.000,00	8.150.000,00	-		0,00370	8,33		-	
	Belanja Jasa Kantor							8,33			
	Belanja Lembur		22.640.000,00	22.640.000,00	-		0,01027	8,33		-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		44.400.000,00	44.400.000,00	-		0,02013	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD		**83.425.500,00**	**83.425.500,00**	**-**		**0,04**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.1.3. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMENDPA SKPD										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		13.710.500,00	13.710.500,00	-		0,00622	8,33		-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		7.500.000,00	7.500.000,00	-		0,00340	8,33		-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.650.000,00	9.650.000,00	-		0,00438	8,33		-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		33.300.000,00	33.300.000,00	-		0,01510	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD		**64.160.500,00**	**64.160.500,00**	**-**		**0,03**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.1.4 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		15.000.000,00	15.000.000,00	-		0,00680	8,33		-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		29.500.000,00	29.500.000,00	-		0,01338	8,33		-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		25.900.000,00	25.900.000,00	-		0,01175	8,33		-	

JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIANKINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD		**70.400.000,00**	**70.400.000,00**	**-**		**0,03**	**8,33**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	JUMLAH KEGIATAN 1.1 : PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EEVALUASI KINERJA PPERANGKATDAERAH		**605.201.000,00**	**605.201.000,00**	**-**		**0,27**	**8,33**	**-**	**-**	
	KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
	1.2.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN										
	belanja pegawai		13.071.975.651,00	13.071.975.651,00	-		5,92789	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGANASN		**13.071.975.651,00**	**13.071.975.651,00**	**-**		**5,93**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.2.2 SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.777.500,00	2.777.500,00	-		0,00126	8,33		-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.000.000,00	3.000.000,00	-		0,00136	8,33		-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3.180.000,00	3.180.000,00	-		0,00144	8,33		-	
	Belanja Lembur		28.750.000,00	28.750.000,00	-		0,01304	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD		**37.707.500,00**	**37.707.500,00**	**-**		**0,02**	**8,33**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 1.2 : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		**13.109.683.151,00**	**13.109.683.151,00**	**-**		**5,94**	**8,33**	**-**	**-**	
	KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										
	1.3.1. SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTAATRIBUT KELENGKAPANNYA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		350.142.000,00	350.142.000,00	-		0,15878	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINASBESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA		**350.142.000,00**	**350.142.000,00**	**-**		**0,16**	**8,33**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 1.3 : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		**350.142.000,00**	**350.142.000,00**	**-**		**0,16**	**8,33**	**-**	**-**	
	KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUM PERANGKATDAERAH										
	1.4.1. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR										
	belanja komponen lainnya		23.082.000,00	23.082.000,00	-		0,01047	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		**23.082.000,00**	**23.082.000,00**	**-**		**0,01**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.4.2 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR										
	Belanja Modal Personal Computer		105.000.000,00	105.000.000,00	-		0,04762	8,33		-	
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		38.239.500,00	38.239.500,00	-		0,01734	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		**143.239.500,00**	**143.239.500,00**	**-**		**0,06**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.4.3. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR										
	makan minum rapat		300.864.000,00	300.864.000,00	-		0,13644	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIKKANTOR		**300.864.000,00**	**300.864.000,00**	**-**		**0,14**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.4.4. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN										
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor		65.639.000,00	65.639.000,00	-		0,02977	8,33		-	
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak		80.090.000,00	80.090.000,00	-		0,03632	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGADAAN		**145.729.000,00**	**145.729.000,00**	**-**		**0,07**	**8,33**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	1.4.5. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		37.895.000,00	37.895.000,00	-		0,01718	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		**37.895.000,00**	**37.895.000,00**	**-**		**0,02**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.4.6. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD										
	perjalanan dinas biasa		1.129.300.000,00	1.129.300.000,00	-		0,51212	8,33		-	
	perjalanan dinas dalam kota		214.260.000,00	214.260.000,00	-		0,09716	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		**1.343.560.000,00**	**1.343.560.000,00**	**-**		**0,61**	**8,33**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 1.4 : ADMINISTRASI UMUMPERANGKAT DAERAH		**1.994.369.500,00**	**1.994.369.500,00**	**-**		**0,90**	**8,33**	**-**	**-**	
	KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	1.6.1 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYAAIR DAN LISTRIK										
	belanja tagihan air		101.200.000,00	101.200.000,00	-		0,04589	8,33		-	
	belanja tagihan listrik		144.500.000,00	144.500.000,00	-		0,06553	8,33		-	
	belanja kawat/faksimili/internet/tv langganan		70.356.000,00	70.356.000,00	-		0,03191	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		**316.056.000,00**	**316.056.000,00**	**-**		**0,14**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.6.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		30.000.000,00	30.000.000,00	-		0,01360	8,33		-	
	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik		20.000.000,00	20.000.000,00	-		0,00907	8,33		-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-		18.150.000,00	18.150.000,00	-		0,00823	8,33		-	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan		15.000.000,00	15.000.000,00	-		0,00680	8,33		-	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		29.200.000,00	29.200.000,00	-		0,01324	8,33		-	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer		27.600.000,00	27.600.000,00	-		0,01252	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		**139.950.000,00**	**139.950.000,00**	**-**		**0,06**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.6.3 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR										
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		20.386.000,00	20.386.000,00	-		0,00924	8,33		-	
	jasa tenaga administrasi		1.546.582.400,00	1.546.582.400,00	-		0,70135	8,33		-	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		443.520.000,00	443.520.000,00	-		0,20113	8,33		-	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		209.100.000,00	209.100.000,00	-		0,09482	8,33		-	
	Belanja Jasa Tenaga Supir		23.760.000,00	23.760.000,00	-		0,01077	8,33		-	
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik		26.611.200,00	26.611.200,00	-		0,01207	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANANUMUM KANTOR		**2.269.959.600,00**	**2.269.959.600,00**	**-**		**1,03**	**8,33**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 1.6 : PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		**2.725.965.600,00**	**2.725.965.600,00**	**-**		**1,24**	**8,33**	**-**	**-**	
	KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH										
	1.7.1 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN										
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		88.250.000,00	88.250.000,00	-		0,04002	8,33		-	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		6.784.000,00	6.784.000,00	-		0,00308	8,33		-	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		16.000.000,00	16.000.000,00	-		0,00726	8,33		-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		75.430.000,00	75.430.000,00	-		0,03421	8,33		-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN		**186.464.000,00**	**186.464.000,00**	**-**		**0,08**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.7.2 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN										
	bahan bakar dan pelumas		88.250.000,00	88.250.000,00	-		0,04002	8,33		-	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		42.000.000,00	42.000.000,00	-		0,01905	8,33		-	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-		258.300.000,00	258.300.000,00	-		0,11713	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		**388.550.000,00**	**388.550.000,00**	**-**		**0,18**	**8,33**	**-**	**-**	
	1.7.3 SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR										
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya		730.000.000,00	730.000.000,00	-		0,33104	8,33		-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIA JASA PEMELIHARAAN,BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR		**730.000.000,00**	**730.000.000,00**	**-**		**0,33**	**8,33**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 1.7 : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		**1.305.014.000,00**	**1.305.014.000,00**	**-**		**0,59**	**8,33**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 1 : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		**20.090.375.251,00**	**20.090.375.251,00**	**-**		**9,11**	**8,33**	**-**	**-**	
	PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										
	KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	2.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONTRUKSI IRIGASI DAN RAWA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.195.600,00	2.195.600,00	-		0,00100			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		750.000,00	750.000,00	-		0,00034			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air				-		-			-	
	D.I Kuok II		50.000.000,00	50.000.000,00	-		0,02267			-	
	D.I Natopang		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	D.I Sei Tambang		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	D.I Sei Tanjung		50.000.000,00	50.000.000,00	-		0,02267			-	
	D.I Tanjung Berulak		50.000.000,00	50.000.000,00	-		0,02267			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		9.000.000,00	9.000.000,00	-		0,00408			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONTRUKSI IRIGASI DAN RAWA		**311.945.600,00**	**311.945.600,00**	**-**		**0,14**	**-**	**-**	**-**	
	2.1.2. SUB KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASIPERMUKAAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.095.100,00	2.095.100,00	-		0,00095			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		750.000,00	750.000,00	-		0,00034			-	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi				-		-			-	
	D.I SALO TANJUNG BELIT		30.000.000,00	30.000.000,00	-		0,01360			-	
	D.I SEI MAKI		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		9.000.000,00	9.000.000,00	-		0,00408			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN		**116.845.100,00**	**116.845.100,00**	-		**0,05**	-	-	-	
	2.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGANIRIGASI PERMUKAAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9.217.100,00	9.217.100,00	-		0,00418			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		7.458.300,00	7.458.300,00	-		0,00338			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		400.000,00	400.000,00	-		0,00018			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		212.000,00	212.000,00	-		0,00010			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.900.000,00	6.900.000,00	-		0,00313			-	
	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air		290.400.000,00	290.400.000,00	-		0,13169			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		958.000.000,00	958.000.000,00	-		0,43443			-	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1.000.000,00	1.000.000,00	-		0,00045			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		84.624.000,00	84.624.000,00	-		0,03838			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		94.200.000,00	94.200.000,00	-		0,04272			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAANJARINGAN IRIGASI PERMUKAAN		**1.452.411.400,00**	**1.452.411.400,00**	-		**0,66**	-	-	-	
	2.1.4. SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.095.100,00	2.095.100,00	-		0,00095			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.200.000,00	1.200.000,00	-		0,00054			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air		40.000.000,00	40.000.000,00	-		0,01814			-	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi		1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	-		0,65301			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		20.550.000,00	20.550.000,00	-		0,00932			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG IRIGASI		**1.703.845.100,00**	**1.703.845.100,00**	-		**0,77**	-	-	-	
	2.1.5. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNGIRIGASI										
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		2.661.000,00	2.661.000,00	-		0,00121			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.199.200,00	2.199.200,00	-		0,00100			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.388.500,00	3.388.500,00	-		0,00154			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		200.000,00	200.000,00	-		0,00009			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		318.000,00	318.000,00	-		0,00014			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.450.000,00	3.450.000,00	-		0,00156			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		220.000.000,00	220.000.000,00	-		0,09977			-	
	Belanja Perjalanan Dinas		21.600.000,00	21.600.000,00	-		0,00980			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAANBENDUNG IRIGASI		**253.816.700,00**	**253.816.700,00**	-		**0,12**	-	-	-	
	JUMLAH KEGIATAN 2.1 : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDERPADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 1000 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		**3.838.863.900,00**	**3.838.863.900,00**	-		**1,74**	-	-	-	
	JUMLAH PROGRAM 2 : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		**3.838.863.900,00**	**3.838.863.900,00**	-		**1,74**	-	-	-	
	PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										
	KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA										

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	3.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		14.271.270,00	14.271.270,00	-		0,00647			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.330.000,00	3.330.000,00	-		0,00151			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya										
	Penyusunan Dokumen FS dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi										
	Reviu Rencana Induk SPAM Kabupaten Kampar Tahun 2024		800.000.000,00	800.000.000,00	-		0,36278			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11.100.000,00	11.100.000,00	-		0,00503			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)		**928.701.270,00**	**928.701.270,00**	**-**		**0,42**	**-**	**-**	**-**	
	3.1.2. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		14.638.265,00	14.638.265,00	-		0,00664			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		8.325.000,00	8.325.000,00	-		0,00378			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.800.000,00	4.800.000,00	-		0,00218			-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		170.400.000,00	170.400.000,00	-		0,07727			-	
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		237.600.000,00	237.600.000,00	-		0,10775			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		42.000.000,00	42.000.000,00	-		0,01905			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		84.968.000,00	84.968.000,00	-		0,03853			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		134.400.000,00	134.400.000,00	-		0,06095			-	
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya										
	Optimalisasi Desa-Desa Pasca Pamsimas yang berfungsi sebagian dan tidak berfungsi		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-		0,45348			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Mesjid Desa Rumbio Kec. Kampar		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Pembangunan SPAM Dusun Sei. Deras Desa Lereng Kec. Kuok		90.000.000,00	90.000.000,00	-		0,04081			-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (SPAM BM		3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	-		1,45114			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PERLUASAN SPAM JARINGANPERPIPAAN DIKAWASAN PEDESAAN	**5.387.131.265,00**		**5.387.131.265,00**	**-**	**2,44**		**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 3.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DIDAERAH KABUPATEN/KOTA		**6.315.832.535,00**	**6.315.832.535,00**	**-**	**2,86**		**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 3 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		**6.315.832.535,00**	**6.315.832.535,00**	**-**		**2,86**	**-**	**-**	**-**	
	PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										
	KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA										
	4.1.1. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.077.028,00		6.077.028,00	-						
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.484.951,00		8.484.951,00	-						
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00		4.800.000,00	-						
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.500.000,00		37.500.000,00	-						
	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	237.600.000,00		237.600.000,00	-						

	Belanja Jasa Tenaga Ahl	150.000.000,00	150.000.000,00	-	

0,00276	-
0,00385	-
0,00218	-
0,01701	-
0,10775	-
0,06802	-

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		129.212.000,00	129.212.000,00	-		0,05860			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		73.350.000,00	73.350.000,00	-		0,03326			-	
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya										
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Batu Langka Kecil Kec. Kuok		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Koto Tuo Kec. XIII Koto Kampar		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kuok Kec. Kuok		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Naumbai Kec. Kampar		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Salo Kec. Salo		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Siabu Kec. Salo		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu		500.000.000,00	500.000.000,00	-		0,22674			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALAPERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT		**5.647.023.979,00**	**5.647.023.979,00**	**-**		**2,56**	**-**	**-**	**-**	
	4.1.2. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERKOTAAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7.721.000,00	7.721.000,00	-		0,00350			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.996.000,00	3.996.000,00	-		0,00181			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi										
	Perencanaan Masterplan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Bangkinang		400.000.000,00	400.000.000,00	-		0,18139			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		19.000.000,00	19.000.000,00	-		0,00862			-	
	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya										
	Pembangunan Tangki Septik Individual Desa Kijang Rejo Kec. Tapung		140.000.000,00	140.000.000,00	-		0,06349			-	
	Pembangunan Tanki Septik Pasar Desa Sungai Simpang Dua Kec. Perhentian Raja		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
					-		-			-	
					-		-			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALAPERKOTAAN		**670.717.000,00**	**670.717.000,00**	**-**		**0,30**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 4.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR/KOTA		**6.317.740.979,00**	**6.317.740.979,00**	**-**		**2,86**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 4 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		**6.317.740.979,00**	**6.317.740.979,00**	**-**		**2,86**	**-**	**-**	**-**	
	PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										
	KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR										
	5.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKANSTRATEGIS DAN TEKNIK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4.995.000,00	4.995.000,00	-		0,00227			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		14.900.000,00	14.900.000,00	-		0,00676			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN STRATEGIS DAN TEKNIK SISTEM DRAINASE PERKOTAAN		**19.895.000,00**	**19.895.000,00**	**-**		**0,01**	**-**	**-**	**-**	
	5.1.2. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASEPERKOTAAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		13.744.764,00	13.744.764,00	-		0,00623			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		7.872.453,00	7.872.453,00	-		0,00357			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		42.000.000,00	42.000.000,00	-		0,01905			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung										
	Pengawasan Pembangunan Drainase Desa Tarai Bangun Kec. Tambang		85.500.000,00	85.500.000,00	-		0,03877			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		76.250.000,00	76.250.000,00	-		0,03458			-	
	belanja modal air kotor lainnya										
	Pembangunan Drainase Desa Batang Betindih Kec. Rumbio Jaya		124.655.000,00	124.655.000,00	-		0,05653			-	
	Pembangunan Drainase Desa Batu Langka Kecil Kec. Kuok		149.800.000,00	149.800.000,00	-		0,06793			-	
	Pembangunan Drainase Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir		199.555.000,00	199.555.000,00	-		0,09049			-	
	Pembangunan Drainase Desa Binuang Kec. Bangkinang		199.555.000,00	199.555.000,00	-		0,09049			-	
	Pembangunan Drainase Desa Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya		124.655.000,00	124.655.000,00	-		0,05653			-	
	Pembangunan Drainase Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang		145.520.000,00	145.520.000,00	-		0,06599			-	
	Pembangunan Drainase Desa Bukit Sakai Kec. Kampar Kiri Tengah		99.510.000,00	99.510.000,00	-		0,04513			-	
	Pembangunan Drainase Desa Bukit Sembilan Kec. Bangkinang		149.800.000,00	149.800.000,00	-		0,06793			-	
	Pembangunan Drainase Desa Gobah Kec. Tambang		96.300.000,00	96.300.000,00	-		0,04367			-	
	Pembangunan Drainase Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah		99.510.000,00	99.510.000,00	-		0,04513			-	
	Pembangunan Drainase Desa Kayu Aro Kec. Kampar Utara		124.655.000,00	124.655.000,00	-		0,05653			-	
	Pembangunan Drainase Desa Kemang Indah Kec. Tambang		123.050.000,00	123.050.000,00	-		0,05580			-	
	Pembangunan Drainase Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Pembangunan Drainase Desa Kubang Kec. Siak hulu		197.950.000,00	197.950.000,00	-		0,08977			-	
	Pembangunan Drainase Desa Laboy Jaya Kec. Bangkinang		149.800.000,00	149.800.000,00	-		0,06793			-	
	Pembangunan Drainase Desa Limau Manis Kec. Kampar		144.985.000,00	144.985.000,00	-		0,06575			-	
	Pembangunan Drainase Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Pembangunan Drainase Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung		99.510.000,00	99.510.000,00	-		0,04513			-	
	Pembangunan Drainase Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang		199.555.000,00	199.555.000,00	-		0,09049			-	
	Pembangunan Drainase Desa Sungai Putih Kec. Kampa		124.655.000,00	124.655.000,00	-		0,05653			-	
	Pembangunan Drainase Desa Tambusai Kec. Rumbio Jaya		124.655.000,00	124.655.000,00	-		0,05653			-	
	Pembangunan Drainase Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar		144.985.000,00	144.985.000,00	-		0,06575			-	
	Pembangunan Drainase Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung		99.510.000,00	99.510.000,00	-		0,04513			-	
	Pembangunan Drainase Desa Tarai Bangun Kec. Tambang		786.450.000,00	786.450.000,00	-		0,35664			-	
	Pembangunan Drainase Dusun Botiong Desa Kuapan Kec. Tambang		139.100.000,00	139.100.000,00	-		0,06308			-	
	Pembangunan Drainase Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar		149.800.000,00	149.800.000,00	-		0,06793			-	
	Pembangunan Drainase Dusun Sukajadi Desa Bina Baru Kec. Kampar Kiri		96.300.000,00	96.300.000,00	-		0,04367			-	
	Pembangunan Drainase Pasar Kuok Kec. Kuok		144.985.000,00	144.985.000,00	-		0,06575			-	
	Pembangunan Drainase Perum YLZ RT.03 RW.19 Kec. Bangkinang Kota		197.950.000,00	197.950.000,00	-		0,08977			-	
	Pembangunan Drainase RT. 002 Dusun Kampung Baru Desa Pulau Jambu Kec. Kuok		99.510.000,00	99.510.000,00	-		0,04513			-	
	Pembangunan Drainase RT 02 RW 01 Dusun Merbau Desa Salo Timur Kec.		98.975.000,00	98.975.000,00	-		0,04488			-	
	Pembangunan Drainase RT. 03 RW. 01 Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota		192.600.000,00	192.600.000,00	-		0,08734			-	
	Pembangunan Drainase RT.03 RW.08 Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Pembangunan Drainase RT.05 Desa Batang Betindih Kec. Rumbio Jaya		144.985.000,00	144.985.000,00	-		0,06575			-	
	Pembangunan Drainase RT. 05 RW. 06 Jalan Agussalim Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota		144.985.000,00	144.985.000,00	-		0,06575			-	
	Pembangunan Drainase RT.05 RW.08 Kel. Bangkinang Kec. Bangkinang Kota		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Pembangunan Drainase RW. 02 Dusun 2 Desa Baru		199.555.000,00	199.555.000,00	-		0,09049			-	
	Pembangunan Drainase RW.15 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Pembangunan Drainase RW.19 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Pembangunan Drainase RW.20 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Pembangunan Drainase TK Mutiara Bunda Desa Kumantan Kec. Bangkinang		193.670.000,00	193.670.000,00	-		0,08783			-	
	Penutupan drainase kota bangkinang di jl. Ahmad yani dan sudirman		197.950.000,00	197.950.000,00	-		0,08977			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN		**7.290.042.217,00**	**7.290.042.217,00**	**-**		**3,31**	**-**	**-**	**-**	
	5.1.3. SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEMDRAINASE PERKOTAAN										
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		188.589.000,00	188.589.000,00	-		0,08552			-	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		11.100.000,00	11.100.000,00	-		0,00503			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Belanja Bahan-Bahan Baku		30.297.450,00	30.297.450,00	-		0,01374			-	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		9.648.120,00	9.648.120,00	-		0,00438			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		4.995.000,00	4.995.000,00	-		0,00227			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas		1.941.390,00	1.941.390,00	-		0,00088			-	
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum		418.000.000,00	418.000.000,00	-		0,18955			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		42.000.000,00	42.000.000,00	-		0,01905			-	
	Belanja Sewa Sepatu Lapangan		7.412.580,00	7.412.580,00	-		0,00336			-	
	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air		5.994.000,00	5.994.000,00	-		0,00272			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		18.310.000,00	18.310.000,00	-		0,00830			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.400.000,00	7.400.000,00	-		0,00336			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAANSISTEM DRAINASE		**745.687.540,00**	**745.687.540,00**	**-**		**0,34**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 5.1 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN KAMPAR		**8.055.624.757,00**	**8.055.624.757,00**	**-**		**3,65**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 5 : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		**8.055.624.757,00**	**8.055.624.757,00**	**-**		**3,65**	**-**	**-**	**-**	
	PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										
	KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG										
	6.1.1. SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG(RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG										
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor		12.817.200,00	12.817.200,00	-		0,00581			-	
	belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak		7.180.300,00	7.180.300,00	-		0,00326			-	
	belanja makan minum rapat		16.500.000,00	16.500.000,00	-		0,00748			-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatandan Sekretariat Tim PelaksanaKegiatan		177.000.000,00	177.000.000,00	-		0,08027			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		420.000.000,00	420.000.000,00	-		0,19046			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENERBITANIZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), PERAN TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG), PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG, SERTA IMPLEMENTASI SIMBG		**633.497.500,00**	**633.497.500,00**	**-**		**0,29**		**-**	**-**	
	6.1.2. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUKKEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12.817.200,00	12.817.200,00	-		0,00581			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.180.300,00	7.180.300,00	-		0,00326			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		26.400.000,00	26.400.000,00	-		0,01197			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		140.000.000,00	140.000.000,00	-		0,06349			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya										
	DED Pedestrian Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	DED Pedestrian Jl. M. Yamin Kec. Bangkinang Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	DED Pembangunan Masjid Nurul Rahman Desa Sungai Pinang Kec. Tambang		50.000.000,00	50.000.000,00	-		0,02267			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung										
	Pengawasan Pembangunan Masjid Nurul Rahman Desa Sungai Pinang Kec. Tambang		34.431.950,00	34.431.950,00	-		0,01561			-	

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Prasarana dan Sarana Masjid Di Desa Kumantan		75.296.000,00	75.296.000,00	-		0,03415			-	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor										
	DED Pembangunan Aula Rapat KEJARI Kampar		30.000.000,00	30.000.000,00	-		0,01360			-	
	DED Pembangunan Lanjutan Prasarana dan Sarana Rumah Dinas PJU POLRES Kampar		60.000.000,00	60.000.000,00	-		0,02721			-	
	DED Pembangunan Rumah Dinas KASI KEJARI Kampar		40.000.000,00	40.000.000,00	-		0,01814			-	
	Pembangunana Sarana Dan Prasarana Masjid Al-Irsyad Desa Sawah Kec. Kampar Utara		98.640.000,00	98.640.000,00	-		0,04473			-	
	Pembangunan Aula Kantor Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu		186.320.000,00	186.320.000,00	-		0,08449			-	
	Pembangunan Aula Kantor Desa Sekijang Pencing Kec. Tapung Hilir		95.900.000,00	95.900.000,00	-		0,04349			-	
	Pembangunan Aula Rapat KEJARI Kampar		645.000.000,00	645.000.000,00	-		0,29250			-	
	Pembangunan Etalase POLRES Kampar		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Pembangunan Gedung Muhammadiyah Kec. Kuok		290.440.000,00	290.440.000,00	-		0,13171			-	
	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Tambang Kec. Tambang		149.604.000,00	149.604.000,00	-		0,06784			-	
	Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Lanjutan Prasarana dan Sarana Rumah Dinas PJU POLRES Kampar		1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-		0,63487			-	
	Pembangunan Masjid Babul Ihsan Kelurahan Air Tiris Kec. Kampar		147.960.000,00	147.960.000,00	-		0,06710			-	
	Pembangunan Masjid Nurul Rahman Desa Sungai Pinang Kec. Tambang		1.178.200.000,00	1.178.200.000,00	-		0,53429			-	
	Pembangunan Pagar Kantor Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu		126.040.000,00	126.040.000,00	-		0,05716			-	
	Pembangunan Pagar Masjid At-Taqwa Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara		131.520.000,00	131.520.000,00	-		0,05964			-	
	Pembangunan Pagar Masjid Nurul Islam Desa Baru Kec. Siak Hulu		147.960.000,00	147.960.000,00	-		0,06710			-	
	Pembangunan Pagar Masjid Taqwa Desa Bandur Picak Kec. Koto Kampar Hulu		126.040.000,00	126.040.000,00	-		0,05716			-	
	Pembangunan Pagar Mushalla Nurul Ihsan Desa Lipat Kain Kec. Kampar Kiri		164.400.000,00	164.400.000,00	-		0,07455			-	
	Pembangunan Pagar PDTA Al-Yaqin Desa Sialang Kec. Salo		145.220.000,00	145.220.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Pendopo Masjid Jami' Desa Suka Maju Kec. Tapung Hilir		71.240.000,00	71.240.000,00	-		0,03231			-	
	Pembangunan Poliklinik Lapas Kelas II A Bangkinang		197.280.000,00	197.280.000,00	-		0,08946			-	
	Pembangunan Rumah Dinas KASI KEJARI Kampar		830.000.000,00	830.000.000,00	-		0,37639			-	
	Pembangunan Rumah Gharim Masjid Miftahul Jannah Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang Kota		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Rumah Tahfiz Masjid Al-Ikhlas Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Falah Dusun Merbau Desa Salo Timur Kec. Salo		149.604.000,00	149.604.000,00	-		0,06784			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Al-Ihsan Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara		149.604.000,00	149.604.000,00	-		0,06784			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Ikhlas Desa Sungai Petai Kec. Kampar Kiri Hilir		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Al-Jamaah Tu Wal Jamaah Desa Aur Sari Kec. Tambang		149.604.000,00	149.604.000,00	-		0,06784			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Al-Madinah Kec. Bangkinang		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Al-Mukhlisin Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Al-Qiram Kec. Bangkinang Kota		97.544.000,00	97.544.000,00	-		0,04423			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Ar-Rehan Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu		95.900.000,00	95.900.000,00	-		0,04349			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid At-Taqwa Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota		147.960.000,00	147.960.000,00	-		0,06710			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid At-Taqwa Desa Simpang Kubu Kec. Kampar		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid At-Tarmizi		98.640.000,00	98.640.000,00	-		0,04473			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Awliyah Koto Tengah Desa Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar		145.220.000,00	145.220.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Babussalam Desa Pulau Permai Kec. Tambang		147.960.000,00	147.960.000,00	-		0,06710			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Baiturrahman Desa Sungai Simpang Dua Kec. Kampar Kiri Hilir		147.960.000,00	147.960.000,00	-		0,06710			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Desa Sumber Sari Kec. Tapung		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Falah Desa Pulau Rambai Kec. Kampa		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Nurul Falah Desa Suka Ramai Kec. Tapung Hulu		95.900.000,00	95.900.000,00	-		0,04349			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Iman Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu		95.900.000,00	95.900.000,00	-		0,04349			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Masjid Ubudiyah Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang Kota		194.540.000,00	194.540.000,00	-		0,08822			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana MDA Masjid Muawwanah Desa Salo Kec. Salo		148.400.000,00	148.400.000,00	-		0,06730			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Mushalla Air Dingin Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang		115.080.000,00	115.080.000,00	-		0,05219			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushalla At-Taqwa Desa Silam Kec.		97.544.000,00	97.544.000,00	-		0,04423			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushalla Baiturrahman Desa Pancuran Gading Kec. Tapung		115.080.000,00	115.080.000,00	-		0,05219			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Mushalla Darul Amilin Desa Pulau Godang Kec. XIII Koto Kampar		150.700.000,00	150.700.000,00	-		0,06834			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Mushalla Darul Hijrah Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota		145.220.000,00	145.220.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Mushalla Darussolihin Desa Pulau Godang Kec. XIII Koto Kampar		153.440.000,00	153.440.000,00	-		0,06958			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Mushalla Kampung Baru Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang Kota		147.960.000,00	147.960.000,00	-		0,06710			-	
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Mushalla Nurma Rifatullah Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu		145.220.000,00	145.220.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushalla Raidussholihin Desa Padang Luas Kec. Tambang		65.760.000,00	65.760.000,00	-		0,02982			-	
	Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Mujahidin Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang		97.544.000,00	97.544.000,00	-		0,04423			-	
	Pembangunan Turap Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir		97.650.000,00	97.650.000,00	-		0,04428			-	
	Pembangunan Turap Desa Pulau Jambu Kec. Kampar		194.700.000,00	194.700.000,00	-		0,08829			-	
	Pembangunan Turap Koperasi Kodim		97.650.000,00	97.650.000,00	-		0,04428			-	
	embangunan Turap Masjid Jami' Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu		195.300.000,00	195.300.000,00	-		0,08856			-	
	Pembangunan Turap Pondok Pesantren Darun Na'im Desa Simpang Kubu Kec. Kampar		195.300.000,00	195.300.000,00	-		0,08856			-	
	Pembangunan Turap RW.04 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		195.300.000,00	195.300.000,00	-		0,08856			-	
	Pembangunan Turap Tebing MTS YPUI Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya		67.425.000,00	67.425.000,00	-		0,03058			-	
	Penataan Bundaran Kota Bangkinang		1.890.600.000,00	1.890.600.000,00	-		0,85735			-	
	Penataan Halaman Mesjid Nurul Yakin Desa Sungai Jalau		198.750.000,00	198.750.000,00	-		0,09013			-	
	Penataan Kawasan Balai Bupati Kampar		3.233.200.000,00	3.233.200.000,00	-		1,46619			-	
	Penataan Kawasan Islamic Centre		3.534.600.000,00	3.534.600.000,00	-		1,60287			-	
	Pengawasan Pembangunan Aula Rapat KEJARI Kampar		25.000.000,00	25.000.000,00	-		0,01134			-	
	Pengawasan Pembangunan Lanjutan Prasarana dan Sarana Rumah Dinas PJU POLRES Kampar		40.000.000,00	40.000.000,00	-		0,01814			-	
	Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas KASI KEJARI Kampar		30.000.000,00	30.000.000,00	-		0,01360			-	
	Pengawasan Penataan Bundaran Kota Bangkinang		75.076.000,00	75.076.000,00	-		0,03405			-	
	Pengawasan Penataan Kawasan Balai Bupati Kampar		75.021.200,00	75.021.200,00	-		0,03402			-	
	Pengawasan Penataan Kawasan Islamic Centre		75.076.000,00	75.076.000,00	-		0,03405			-	
	Prasarana dan Sarana Bangkinang River Side Kec. Bangkinang Kota		190.156.000,00	190.156.000,00	-		0,08623			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Camat Bangkinang Kec. Bangkinang		151.050.000,00	151.050.000,00	-		0,06850			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Camat Kec. Kampar Kiri		98.050.000,00	98.050.000,00	-		0,04446			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Camat Rumbio Jaya		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Bencah Kelubi Kec. Tapung		150.000.600,00	150.000.600,00	-		0,06802			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Indra Puri Kec. Tapung		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Indra Sakti Kec. Tapung		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Naumbai Kec. Kampar		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Pelambaian Kec. Tapung		150.000.600,00	150.000.600,00	-		0,06802			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Persiapan Sei Genduang Jaya Kec. Perhentian Raja		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Sari Galuh Kec.Tapung		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir		150.000.600,00	150.000.600,00	-		0,06802			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa		151.050.000,00	151.050.000,00	-		0,06850			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor Kepala Desa Naumbai Kec. Kampar		116.600.000,00	116.600.000,00	-		0,05288			-	
	Prasarana dan Sarana Kantor KPU Kampar Kec. Bangkinang Kota		151.050.000,00	151.050.000,00	-		0,06850			-	
	Prasarana dan Sarana Kegiatan MTQ (Swakelola)		493.200.000,00	493.200.000,00	-		0,22366			-	
	Prasarana dan Sarana Masjdi At-Taqwa Desa Koto Masjid Kec. XIII Koto		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Agung Baitul Hikmah Desa Gerbang Sari Kec. Tapung Hilir		100.284.000,00	100.284.000,00	-		0,04548			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Attaqwa Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri		185.500.000,00	185.500.000,00	-		0,08412			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Falah 1 Dusun Koto Menanti Desa Salo Timur Kec. Salo		150.152.000,00	150.152.000,00	-		0,06809			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Falah Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang		100.284.000,00	100.284.000,00	-		0,04548			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Furqon Dusun II Pasar Kampa Kec. Kampa		110.505.000,00	110.505.000,00	-		0,05011			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Hidayah Kec. Tapung		198.750.000,00	198.750.000,00	-		0,09013			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Hijriyah Desa Koto Masjid Kec. XIII Koto		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Huda Desa Sipungguk Kec. Salo		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Ali-Alkhatib Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu		98.050.000,00	98.050.000,00	-		0,04446			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Ikhlas Desa Sungai Pinang Kec. Tambang		180.200.000,00	180.200.000,00	-		0,08172			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Irsyad Dusun Tanjung Desa Sawah Kec. Kampar Utara		150.255.000,00	150.255.000,00	-		0,06814			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Islah Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara		153.700.000,00	153.700.000,00	-		0,06970			-	
	Prasarana Dan Sarana Masjid Al-Istiqomah Desa Ganting Damai Kec. Kuok		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Muhajirin		148.400.000,00	148.400.000,00	-		0,06730			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Muhajirin Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah		150.152.000,00	150.152.000,00	-		0,06809			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Mujaddah Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Mukminin Desa Danau Lancang Kec. Tapung		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Muttaqin Desa Koto Perambahan Kec. Kampa		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Al-Muttaqin Desa Simalinyang Kec. Kampar Kiri Tengah		129.850.000,00	129.850.000,00	-		0,05888			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Arrahmah Desa Koto Perambahan Kec. Kampa		196.100.000,00	196.100.000,00	-		0,08893			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid As-Sa'adah Desa Sungai Tarap Kec. Kampar		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid At Taqwa Dusun II Desa Padang Luas Kec. Tambang		143.100.000,00	143.100.000,00	-		0,06489			-	
	Prasarana dan Sarana masjid at taqwa dusun sei. Paduko ghajo desa padang mutung Kec. Kampar		196.100.000,00	196.100.000,00	-		0,08893			-	
	Prasarana Dan Sarana Masjid At-Taqwa Pasar Rumbio Kec. Rumbio Jaya		191.800.000,00	191.800.000,00	-		0,08698			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid At-Tauhid Desa Penghidupan Kec. Kampar Kiri Tengah		149.725.000,00	149.725.000,00	-		0,06790			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Babul Huda Dusun 3 Langgam Desa Alam Panjang Kec. Rumbio		196.100.000,00	196.100.000,00	-		0,08893			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Baiturrahman Dusun I Desa Padang Luas Kec.		143.100.000,00	143.100.000,00	-		0,06489			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Baiturrahman Dusun Suka Maju Desa Ganting Damai Kec. Salo		150.255.000,00	150.255.000,00	-		0,06814			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Baitussalam Desa Batu Belah Kec. Kampar		148.400.000,00	148.400.000,00	-		0,06730			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Darul Huda Desa Sipungguk Kec. Salo		150.004.040,00	150.004.040,00	-		0,06802			-	
	Prasarana Dan Sarana Masjid Darussalam Dusun Sei. Putih Kec. Tambang		159.000.000,00	159.000.000,00	-		0,07210			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Desa Bukit Sembilan Kec. Bangkinang		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Desa Koto Aman Kec. Tapung Hilir		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Desa Tebing Lestari Kec. Tapung Hilir		150.000.600,00	150.000.600,00	-		0,06802			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid di PPMTI Tanjung Berulak		150.255.000,00	150.255.000,00	-		0,06814			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Dusun Rimbo Tampui Desa Lereng Kec. Kuok		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Ibnu Mas'ud Dusun Kampung Panjang Desa Koto Perambahan Kec. Kampa		150.255.000,00	150.255.000,00	-		0,06814			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Ibnu Rasyid		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Ikhwatun Mukmin Desa Karya Indah Kec.		140.450.000,00	140.450.000,00	-		0,06369			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Prasarana dan Sarana Masjid Jami' At-Taqwa Desa Mekar Jaya Kec. Kampar Kiri Tengah		147.960.000,00	147.960.000,00	-		0,06710			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Miftahul Jannah Kec. Tapung		198.750.000,00	198.750.000,00	-		0,09013			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Muhajirin Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja		125.875.000,00	125.875.000,00	-		0,05708			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Mujahidin Desa Bukit Sakai Kec. Kampar Kiri		149.040.000,00	149.040.000,00	-		0,06759			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Muksinin Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang		151.050.000,00	151.050.000,00	-		0,06850			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Nurul Huddah Desa Sumber Sari Kec. Tapung		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Nurul Ikhlas Desa Jawi-Jawi Kec. Kampa		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Nurul Islam Kec. Kuok		150.255.000,00	150.255.000,00	-		0,06814			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Nurul Qomar Desa Karya Indah Kec. Tapung		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Nurul Yakin Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana Dan Sarana Masjid Rahmatullah 3 Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Raya Darussalam Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri		98.050.000,00	98.050.000,00	-		0,04446			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Raya Sukaramai Desa Sukaramai Kec. Tapung		185.500.000,00	185.500.000,00	-		0,08412			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Syuhada Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu		198.750.000,00	198.750.000,00	-		0,09013			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Taqwa Desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang		116.600.000,00	116.600.000,00	-		0,05288			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Toriqul Huda Desa Tanah Datar Kec. Tapung Hulu		196.100.000,00	196.100.000,00	-		0,08893			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Ubudiyah Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Zaid Bin Arqam Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya		111.300.000,00	111.300.000,00	-		0,05047			-	
	Prasarana dan Sarana Masjid Zaid Bin Tsabit Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana MDA Desa Sibuak Kec. Tapung		172.250.000,00	172.250.000,00	-		0,07811			-	
	Prasarana dan Sarana MDA TI DUA Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara		135.150.000,00	135.150.000,00	-		0,06129			-	
	Prasarana dan Sarana MDTA Muhammadiyah Kampung Baru Kec. Kuok		150.255.000,00	150.255.000,00	-		0,06814			-	
	Prasarana dan Sarana Mess Wanita KEJARI Kampar		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Abbasiyah Desa Kualu Kec. Tambang		58.300.000,00	58.300.000,00	-		0,02644			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Al-Barokah Desa Tambusai Kec. Rumbio Jaya		56.975.000,00	56.975.000,00	-		0,02584			-	

	Prasarana dan Sarana Mushalla Al-Ikhlas Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu	96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Al-Muhajirin Desa Kayu Aro Kec. Kampar UtaraPrasarana	62.275.000,00	62.275.000,00	-		0,02824			-	
	dan Sarana Mushalla An Nur Dusun Telo Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang	193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla At-Tauhid Seribu Maqrifat Desa Pulau	193.450.000,00	193.450.000,00		-	0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Baiturrahman Desa Bukit Kratai Kec. Rumbio Jaya	71.550.000,00	71.550.000,00		-	0,03245			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Darul Salam Desa Gerbang Sari	66.250.000,00	66.250.000,00	-		0,03004			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Hakikal Insan Desa Kampa Kec. Kampa	96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Hidayatul Mubtadi'in Desa Sialang Kubang	96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Jalur 11 Desa Sibuak Kec. Tapung	106.000.000,00	106.000.000,00	-		0,04807			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Jalur 2 Desa Sibuak Kec. Tapung	145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Jalur 7 Desa Sibuak Kec. Tapung	121.635.000,00	121.635.000,00	-		0,05516			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla Jalur 8 Desa Sibuak Kec. Tapung	47.700.000,00	47.700.000,00	-		0,02163			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla KUD Desa Sibuak Kec. Tapung	145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Mushalla PSHT Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja	145.750.000,00	145.750.000,00		-	0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Musholla Al-Istiqomah Desa Kota Bangun Kec. Tapung Hilir	150.000.600,00	150.000.600,00		-	0,06802			-	
	Prasarana dan Sarana Musholla Darul Istiqomah Dusun IV Palo Koto Desa Desa Ranah Sungkai	98.050.000,00	98.050.000,00	-		0,04446			-	
	Prasarana dan Sarana Pesantren Al-Faruqi Kec. Tambang	150.255.000,00	150.255.000,00	-		0,06814			-	
	Prasarana dan Sarana Pondok Pesantren Baitul Hikmah Indonesia Dusun II Balai Jering Desa Sungai Jalau Kec. Kampar Utara	150.152.000,00	150.152.000,00	-		0,06809			-	
	Prasarana dan Sarana Puskesmas Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu	96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Rumah Arsip Desa Sibuak Kec. Tapung	145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Prasarana dan Sarana Rumah Dinas KEJARI Kampar	200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Prasarana dan Sarana Rumah Ibadah GKPI Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana Dan Sarana SD IT Ibnu Jarir Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota		193.450.000,00	193.450.000,00	-		0,08773			-	
	Prasarana dan Sarana TK Pertiwi Bangkinang Kota		120.045.000,00	120.045.000,00	-		0,05444			-	
	Prasarana dan Sarana TPA Sulamul Huda Desa Sungai Simpang Dua Kec. Perhentian Raja		96.725.000,00	96.725.000,00	-		0,04386			-	
	Prasarana dan Sarana Tugu Helikopter Kota Bangkinang Kec. Bangkinang Kota		190.156.000,00	190.156.000,00	-		0,08623			-	
	Sarana Dan Prasarana Kantor Desa Tanjung Bungo Kec. Kampa		145.750.000,00	145.750.000,00	-		0,06609			-	
	Timbunan Masjid Al-Husna Desa Lubuk Sakat		198.000.000,00	198.000.000,00	-		0,08979			-	
	Belanja Modal Pagar										
	Lanjutan Pembangunan Pagar Pengadilan Agama Kec. Bangkinang Kota		131.308.990,00	131.308.990,00	-		0,05955			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		**38.575.188.680,00**	**38.575.188.680,00**	**-**		**17,49**	**-**	**-**	**-**	
	6.1.3. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12.817.200,00	12.817.200,00	-		0,00581			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.180.300,00	7.180.300,00	-		0,00326			-	
	JUMLAH BIAYASUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG		**19.997.500,00**	**19.997.500,00**	**-**		**0,01**	**-**	**-**	**-**	
	6.1.4. SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12.817.200,00	12.817.200,00	-		0,00581			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.180.300,00	7.180.300,00	-		0,00326			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16.500.000,00	16.500.000,00	-		0,00748			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENILIKAN TERHADAP PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG OLEH PENILIK BANGUNAN		**36.497.500,00**	**36.497.500,00**	**-**		**0,02**	**-**	**-**	**-**	
	6.1.5. SUB KEGIATAN PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12.885.600,00	12.885.600,00	-		0,00584			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.180.300,00	7.180.300,00	-		0,00326			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16.500.000,00	16.500.000,00	-		0,00748			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENGUBAHSUAIAN BANGUNANGEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		**36.565.900,00**	**36.565.900,00**	**-**		**0,02**	**-**	**-**	**-**	
	6.1.6. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		14.935.000,00	14.935.000,00	-		0,00677			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.161.500,00	2.161.500,00	-		0,00098			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.190.000,00	7.190.000,00	-		0,00326			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		16.500.000,00	16.500.000,00	-		0,00748			-	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			-							
	DED Rehabilitasi Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang		30.000.750,00	30.000.750,00	-		0,01360			-	
	Pengawasan Rehabilitasi Aula Rumah DInas Bupati Kampar		75.060.700,00	75.060.700,00	-		0,03404			-	
	Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang		20.000.500,00	20.000.500,00	-		0,00907			-	
	Rehabilitasi Alun Alun Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu		94.120.000,00	94.120.000,00	-		0,04268			-	
	Rehabilitasi Aula Kantor Desa Salo Kec. Salo		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Rehabilitasi Aula Rumah Dinas Bupati Kampar		2.925.000.182,00	2.925.000.182,00	-		1,32643			-	
	Rehabilitasi Balai Adat Desa Teratak Buluh		352.950.000,00	352.950.000,00	-		0,16006			-	
	Rehabilitasi Balai Adat Kenegerian Kec. Kuok		192.946.000,00	192.946.000,00	-		0,08750			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Rehabilitasi Balai Desa Pancuran Gading Kec. Tapung		194.122.500,00	194.122.500,00	-		0,08803			-	
	ehabilitasi Bangunan SATRESKRIM POLRES Kampar		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Rehabilitasi Gedung Politeknik Kampar		150.003.750,00	150.003.750,00	-		0,06802			-	
	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu		120.008.700,00	120.008.700,00	-		0,05442			-	
	Rehabilitasi Kantor Camat Kec. Kampar Kiri		150.500.000,00	150.500.000,00	-		0,06825			-	
	Rehabilitasi Kantor Camat XIII Koto Kampar		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Rehabilitasi Kantor Desa Binuang Kec. Bangkinang		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Rehabilitasi Kantor Desa Lipat Kain Kec. Kampar Kiri		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Rehabilitasi Kantor Desa Lipat Kain Selatan Kec. Kampar Kiri		120.400.000,00	120.400.000,00	-		0,05460			-	
	Rehabilitasi Kantor Kecamatan Kampar Utara		149.886.100,00	149.886.100,00	-		0,06797			-	
	Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir		144.480.000,00	144.480.000,00	-		0,06552			-	
	Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya		140.025.200,00	140.025.200,00	-		0,06350			-	
	Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Pulau Rambai Kec. Kampa		94.120.000,00	94.120.000,00	-		0,04268			-	
	Rehabilitasi Kantor Lurah Langgini Kec. Bangkinang Kota		90.300.000,00	90.300.000,00	-		0,04095			-	
	Rehabilitasi Masjid Al-Huda RW 1 Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota		130.032.000,00	130.032.000,00	-		0,05897			-	
	Rehabilitasi Masjid At-Taqwa Kel. Air Tiris Kec. Kampar		190.021.300,00	190.021.300,00	-		0,08617			-	
	Rehabilitasi Masjid Rahmatulloh Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu		165.550.000,00	165.550.000,00	-		0,07507			-	
	Rehabilitasi Mushola Darul Amal Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota		135.703.328,00	135.703.328,00	-		0,06154			-	
	Rehabilitasi Musholla Perumahan Villa Kesturi Indah Kel. Bangkinang Kec.		115.283.000,00	115.283.000,00	-		0,05228			-	
	Rehabilitasi PDTA Al-Yaqin Desa Salo Kec. Salo		144.480.000,00	144.480.000,00	-		0,06552			-	
	Rehabilitasi Ruangan KASAT LANTAS POLRES Kampar		141.489.283,00	141.489.283,00	-		0,06416			-	
	Rehabilitasi Ruangan Wakil Kepala POLRES Kampar		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Rehabilitasi Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang		500.012.500,00	500.012.500,00	-		0,22675			-	
	Rehabilitasi Rumah Ibadah HKBP Desa Karya Indah Kec. Tapung		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Rehabilitasi Rumah Ibadah HKI Desa Karya Indah Kec. Tapung		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Masjid Raya Bangkinang		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Renovasi Gapura Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		195.650.000,00	195.650.000,00	-		0,08872			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		199.748.000,00	199.748.000,00	-		0,09058			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		94.560.000,00	94.560.000,00	-		0,04288			-	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor										
	Rehabilitasi Musholla Al-Hikmah Desa Salo Timur Kec. Salo		140.288.000,00	140.288.000,00	-		0,06362			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA		**9.007.078.293,00**	**9.007.078.293,00**	**-**		**4,08**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 6.1 : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG		**48.308.825.373,00**	**48.308.825.373,00**	**-**		**21,91**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 6 : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		**48.308.825.373,00**	**48.308.825.373,00**	**-**		**21,91**	**-**	**-**	**-**	
	PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN										
	KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA										
	7.1.1. SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN										
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		82.800.000,00	82.800.000,00	-		0,03755			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		54.000.000,00	54.000.000,00	-		0,02449			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi										
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung										
	Perencanaan Jalan Dan Jembatan		300.000.000,00	300.000.000,00	-		0,13604			-	

1	2 4	3		5 - 12	6 = 5	7	8 10	12	13	14
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN		436.800.000,00	**436.800.000,00**	**-**		0,20	-	-	-
	7.1.2. **SUB KEGIATAN SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN**	**JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN**								
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi			40.200.000,00			40.200.000,00	-		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			99.000.000,00			99.000.000,00	-		
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi			99.000.000,00			99.000.000,00	-		
	Survei Kondisi Jalan Dan Jembatan Kabupaten Wil I			99.000.000,00			99.000.000,00	-		
	Survei Kondisi Jalan Dan Jembatan Kabupaten Wil II			99.000.000,00			99.000.000,00	-		
	Survei Kondisi Jalan Dan Jembatan Kabupaten Wil III			99.000.000,00			99.000.000,00	-		
	Survei Kondisi Jalan Dan Jembatan Kabupaten Wil IV			99.000.000,00			99.000.000,00	-		
	Survei Kondisi Jalan Dan Jembatan Kabupaten Wil V			**535.200.000,00**			**535.200.000,00**	**-**		

				0,04489								
			0,04489	0,04489	-	-		**0,24**	-	-	-	
0,01823	-		0,04489	0,04489	-	-						
7.1.3. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN												
Belanja Jasa Kantor			P	angunan Lapen Jalan Bukit Suligi Desa Koto Tibun Kec. Kampar Pembangunan Lapen Jalan Desa Ranah Singkuang Kec. Kampar Pembangunan Lapen Jalan Perjuangan Desa Penyesawan Kec. Kampar								
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			u l a u	Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Pulau Tinggi Kec. Kampar Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Poros Tanjung Indah Desa Tanjung Berulak Kec. Kampar Pembukaan Badan Jalan Desa Rumbio Kec. Kampar Pembukaan Badan Jalan Dusun III Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar Perkerasan Bahu Jalan Desa Bukit Ranah Kec. Kampar Perkerasan Bahu Jalan Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Perkerasan Beton Jalan Ngoghik Desa Batu Belah Kec. Kampar Perkerasan Jalan Bolou Desa Tanjung Rambutan Kec. Kampar								
Belanja Modal Jalan Kabupaten			J a m b u									
Kecamatan Bangkinang Pembukaan Badan Jalan Desa Binuang Kec. Bangkinang Perkerasan Jalan RT. 03 RW. 08 Bangkinang **Kecamatan Bangkinang Kota** AC-WC Jalan Pinang (Pesantren Al-Furqan) dan Jalan Kulim Desa Ridan Permai Pembangunan Lapen Jalan Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Pembangunan Lapen Jalan RT.02 RW.08 Stanum Kec. Bangkinang Kota Pembukaan Badan Jalan Lemping Kapas Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota Perkerasan Bahu Jalan Mahmud Marzuki Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota Perkerasan Beton Jalan Perum. Mutiara Candika Kec. Bangkinan Kota			K e c . K a m p a r	**Kecamatan Kampar Kiri** Pembangunan Lapen Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Pembangunan Lapen Desa Kuntu Kec. Kampar Kiri Pembangunan Lapen Desa Sei Liti Kec. Kampar Kiri Perkerasan Beton Jalan Desa Sungai Rambai Kec. Kampar Kiri **Kecamatan Kampar Kiri Hilir** Pembukaan Badan Jalan Desa Gading Permai Kec. Kampar Kiri Hilir Pembukaan Badan Jalan Desa Rantau Kasih Kec. Kampar Kiri Hilir								
Kecamatan Kampar AC-WC Jalan Desa Penyesawan Kec. Kampar Pembangunan Lapen Desa			Pemb									

8.952.000,00	148.500.000,00	8.952.000,00	-	0,00406 -
30.000.000,00	148.500.000,00	30.000.000,00	-	0,01360 -
640.792.647,00		640.792.647,00	-	0,29059 -
195.750.000,00		195.750.000,00	-	0,08877 -
196.938.170,00		196.938.170,00	-	0,08931 -
2.217.600.000,00		2.217.600.000,00	-	1,00564 -
191.664.000,00		191.664.000,00	-	0,08692 -
191.664.000,00		191.664.000,00	-	0,08692 -
135.000.000,00		135.000.000,00	-	0,06122 -
191.400.000,00		191.400.000,00	-	0,08680 -
198.000.000,00		198.000.000,00	-	0,08979 -
679.140.000,00		679.140.000,00	-	0,30798 -
191.664.000,00		191.664.000,00	-	0,08692 -
145.200.000,00		145.200.000,00	-	0,06585 -
191.664.000,00		191.664.000,00	-	0,08692 -
191.664.000,00		191.664.000,00	-	0,08692 -
198.550.000,00		198.550.000,00	-	0,09004 -
146.630.000,00		146.630.000,00	-	0,06649 -
148.500.000,00		148.500.000,00	-	0,06734 -
195.750.000,00		195.750.000,00	-	0,08877 -
143.550.000,00		143.550.000,00	-	0,06510 -
143.550.000,00		143.550.000,00	-	0,06510 -
349.234.276,00		349.234.276,00	-	0,15837 -
196.938.170,00		196.938.170,00	-	0,08931 -
145.200.000,00		145.200.000,00	-	0,06585 -
145.200.000,00		145.200.000,00	-	0,06585 -
145.200.000,00		145.200.000,00	-	0,06585 -
583.000.000,00		583.000.000,00	-	0,26438 -

148.500.000,00	-	0,06734	-
148.500.000,00	-	0,06734	-

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Kecamatan Kampar Kiri Tengah										
	AC-WC Jalan Mayang Pongkai - Lubuk Sakai (Sp. Tugu) Kec. Kampar Kiri Tengah (DBH)		5.154.010.000,00	5.154.010.000,00	-		2,33724			-	
	Kecamatan Kampar Utara										
	Pembangunan Tembok Penahan Jalan Desa Sendayan Kec. Kampar Utara		188.100.000,00	188.100.000,00	-		0,08530			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Dusun Toluok Desa Kp. Panjang Kec. Kampar Utara		143.550.000,00	143.550.000,00	-		0,06510			-	
	Kecamatan Koto Kampar Hulu										
	Pembukaan Badan Jalan Desa Gunung Malelo Kec. Koto Kampar Hulu		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Pembukaan Badan Jalan Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Pembukaan Badan Jalan Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu		182.250.000,00	182.250.000,00	-		0,08265			-	
	Pembukaan Badan Jalan Dusun II Desa Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Pembukaan Badan Jalan Sungai Kopu Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Desa Bandur Picak Kec. Koto Kampar Hulu		191.400.000,00	191.400.000,00	-		0,08680			-	
	Perkerasan Beton Jalan Menuju Air Terjun Panisan		198.000.000,00	198.000.000,00	-		0,08979			-	
	Kecamatan Kuok										
	Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Pulau Jambu Kec. Kuok		177.650.000,00	177.650.000,00	-		0,08056			-	
	Pembukaan Badan Jalan Dusun Mangin Desa Merangin Kec. Kuok		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Kecamatan Perhentian Raja										
	AC-WC Jalan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja		194.040.000,00	194.040.000,00	-		0,08799			-	
	AC-WC Jalan RT 02 RW 02 Desa Baru dan Jalan Menuju Pesentren Mahad Taffaquh		2.772.000.000,00	2.772.000.000,00	-		1,25705			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja		147.523.200,00	147.523.200,00	-		0,06690			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Garuda Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja		145.200.000,00	145.200.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Kulim Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Kura Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja		145.200.000,00	145.200.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Kuras Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Mandiri Desa Lubuk Sakat Kec. Perhentian Raja		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Melati Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja		145.200.000,00	145.200.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Singkep Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja		145.200.000,00	145.200.000,00	-		0,06585			-	
	Pembangunan Tembok Penahan Jalan Turi Desa Sialang Kubang Kec. Perhentian Raja		146.300.000,00	146.300.000,00	-		0,06634			-	
	Perkerasan Beton Jalan Afdeling Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja		193.987.200,00	193.987.200,00	-		0,08797			-	
	Kecamatan Rumbio Jaya										
	Pembangunan Lapen Jalan Dusun III Langgam Desa Alam Panjang Kec. Rumbio Jaya		98.736.000,00	98.736.000,00	-		0,04477			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Desa Pulau Payung Kec. Rumbio Jaya		143.550.000,00	143.550.000,00	-		0,06510			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Simp. Puskesmas Desa Simpang Petai Kec. Rumbio Jaya		143.550.000,00	143.550.000,00	-		0,06510			-	
	Perkerasan Beton Jalan Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya		143.000.000,00	143.000.000,00	-		0,06485			-	
	Kecamatan Salo			-							
	Pembangunan Lapen Desa Sipungguk Kec. Salo		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Anggrek Desa Salo Timur Kec. Salo		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Tampang Desa Salo Timur Kec. Salo		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Usaha Tani Desa Ganting Kec. Salo		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Perkerasan Beton Jalan Lingkungan Desa Siabu Kec. Salo		143.000.000,00	143.000.000,00	-		0,06485			-	
	Kecamatan Siak Hulu			-							
	AC-WC Jalan Buana Desa Kubang Jaya Kec. Siak Sulu		194.040.000,00	194.040.000,00	-		0,08799			-	
	AC-WC Jalan Depnaker Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Sulu		144.144.000,00	144.144.000,00	-		0,06537			-	
	Pembangunan Lapen Dusun IV Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembukaan Badan Jalan Menuju Perum. Putri Molek Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Dagang Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu		191.400.000,00	191.400.000,00	-		0,08680			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Rajawali Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu		191.400.000,00	191.400.000,00	-		0,08680			-	
	Perkerasan Jalan Kruwing Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		196.938.170,00	196.938.170,00	-		0,08931			-	
	Perkerasan Jalan Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu		196.938.170,00	196.938.170,00	-		0,08931			-	
	Kecamatan Tambang										
	Penanganan Long Segment Jalan Haf Jaya - Uka - Jawa (DAK)		6.240.000.000,00	6.240.000.000,00	-		2,82972			-	
	AC-WC Jalan Danau Bingkuang - Gobah Kec. Tambang (DBH)		7.263.910.000,00	7.263.910.000,00	-		3,29404			-	
	AC-WC Jalan BPD Rimbo Panjang		2.772.000.000,00	2.772.000.000,00	-		1,25705			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	AC-WC Jalan Desa Padang Luas Kec. Tambang		679.140.000,00	679.140.000,00	-		0,30798			-	
	AC-WC Jalan Desa Pulau Permai Kec. Tambang		679.140.000,00	679.140.000,00	-		0,30798			-	
	Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Karya Masa Desa Tarai Bangun Kec. Tambang		198.550.000,00	198.550.000,00	-		0,09004			-	
	Pembukaan Badan Jalan Dusun Durian Sebatang Desa Kualu Nenas Kec. Tambang		148.500.000,00	148.500.000,00	-		0,06734			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Desa Sungai Pinang Kec. Tambang		191.400.000,00	191.400.000,00	-		0,08680			-	
	Kecamatan Gunung Sahilan										
	Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan		198.550.000,00	198.550.000,00	-		0,09004			-	
	Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Sahilan Darussalam Kec. Gunung Sahilan		198.550.000,00	198.550.000,00	-		0,09004			-	
	Perkerasan Beton Jalan Desa Makmur Sejahtera Kec. Gunung Sahilan		198.000.000,00	198.000.000,00	-		0,08979			-	
	Kecamatan Tapung										
	AC-WC Jalan Sp. Robert - Gading Sari Kec. Tapung (DBH)		3.391.880.000,00	3.391.880.000,00	-		1,53815			-	
	AC-WC Jalan Tj. Sawit - Indra Purih Kec. Tapung (DBH)		11.300.490.000,00	11.300.490.000,00	-		5,12455			-	
	AC-WC Jalan Akasia 7 Desa Gading Sari Kec. Tapung		1.108.800.000,00	1.108.800.000,00	-		0,50282			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Desa Gerbang Sari Kec. Tapung		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembangunan Lapen Jalan Desa Kijang Jaya Kec. Tapung		191.664.000,00	191.664.000,00	-		0,08692			-	
	Pembukaan Badan Jalan Handayani Desa Karya Indah Kec. Tapung		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Perkerasan Beton Jalan Baru Desa Petapahan Kec. Tapung		198.000.000,00	198.000.000,00	-		0,08979			-	
	Kecamatan Tapung hilir			-							
	AC-WC Jalan Poros Penghubung Desa Tandan Sari - Desa Tapung Makmur		1.108.800.000,00	1.108.800.000,00	-		0,50282			-	
	Perkerasan Jalan Dusun II Pencing Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir		143.916.355,00	143.916.355,00	-		0,06526			-	
	Kecamatan Tapung Hulu										
	Pembangunan Lapen Jalan Desa Rimba Makmur Kec. Tapung Hulu		197.472.000,00	197.472.000,00	-		0,08955			-	
	Perkerasan Beton Jalan Desa Muara Intan Kec. Tapung Hulu		198.000.000,00	198.000.000,00	-		0,08979			-	
	Perkerasan Beton Jalan Menuju Puskesmas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu		198.000.000,00	198.000.000,00	-		0,08979			-	
	Kecamatan XIII Koto Kampar			-							
	Pembukaan Badan Jalan Desa Koto Mesjid Kec. XIII Koto Kampar		94.500.000,00	94.500.000,00	-		0,04285			-	
	Pembukaan Badan Jalan Desa Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar		94.500.000,00	94.500.000,00	-		0,04285			-	
	Pembukaan Badan Jalan Desa Tanjung Alai Kec. XIII Koto Kampar		195.750.000,00	195.750.000,00	-		0,08877			-	
	Perkerasan Bahu Jalan Desa Koto Mesjid Kec. XIII Koto Kampar		191.400.000,00	191.400.000,00	-		0,08680			-	
	Perkerasan Beton Jalan Sumpah Pemuda Desa Koto Mesjid Kec. XIII Koto Kampar		143.000.000,00	143.000.000,00	-		0,06485			-	
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya										
	Kecamatan Bangkinang										
	Pembangunan Drainase Jalan Jalur 9 Desa Sibuak Kec. Bangkinang		119.625.000,00	119.625.000,00	-		0,05425			-	
	Pembangunan Drainase Jalan Makmur Jaya Desa Muara Uwai Kec. Bangkinang		156.310.000,00	156.310.000,00	-		0,07088			-	
	Pembangunan Drainase Jalan Padang Lawas - Pematang Kulim		159.500.000,00	159.500.000,00	-		0,07233			-	
	Kecamatan Bangkinang Kota										
	Pembangunan Drainase Jalan Sahabat Candika Kec. Bangkinang Kota		175.450.000,00	175.450.000,00	-		0,07956			-	
	Kecamatan Kampa										
	Pembangunan Drainase Jalan Desa Pulau Birandang Kec. Kampa		175.450.000,00	175.450.000,00	-		0,07956			-	
	Kecamatan Tambang										
	Pembangunan Drainase Jalan Dusun IV Desa Kualu Nenas Kec. Tambang		191.400.000,00	191.400.000,00	-		0,08680			-	
	Kecamatan Salo										
	Pembangunan Drainase Jalan Mangga Desa Salo Kec. Salo		148.335.000,00	148.335.000,00	-		0,06727			-	
	Kecamatan XIII Koto Kampar										
	Pembangunan Drainase Jalan Desa Ranah Sungkai Kec. XIII Koto Kampar		98.890.000,00	98.890.000,00	-		0,04484			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN		**62.335.800.358,00**	**62.335.800.358,00**	**-**		**28,27**	**-**	**-**	**-**	
	7.1.4. SUB KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN										
	Belanja Modal Jalan Kabupaten										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.896.000,00	2.896.000,00	-		0,00131			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		1.500.000,00	1.500.000,00	-		0,00068			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		502.500.000,00	502.500.000,00	-		0,22787			-	
	Kecamatan Bangkinang Kota										

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Penanganan Long Segment Jalan Cik Ditiro Bangkinang		3.760.000.000,00	3.760.000.000,00	-		1,70509			-	
	Overlay AC-WC Jalan Desa Kumantan Kec. Bangkinang Kota		653.400.000,00	653.400.000,00	-		0,29630			-	
	Overlay AC-WC Jalan Mutiara Desa Ridan Permai dan Jalan Kasturi Kec. Bangkinang Kota		784.080.000,00	784.080.000,00	-		0,35557			-	
	Kecamatan Kampar										
	Penanganan Long Segment Jalan kotoman - Koto Onda		1.101.848.900,00	1.101.848.900,00	-		0,49967			-	
	Penanganan Long Segment Jalan Singkawang - Sp. Polsek		3.212.600.000,00	3.212.600.000,00	-		1,45685			-	
	Overlay AC-WC Jalan Dahlia III Desa Sungai Putih		849.420.000,00	849.420.000,00	-		0,38520			-	
	Overlay AC-WC Jalan Desa Simpang Kubu Kec. Kampar		653.400.000,00	653.400.000,00	-		0,29630			-	
	Overlay AC-WC Jalan Sp. Sei. Putih Menuju Pesantren Desa Tanjung Berulak		707.000.000,00	707.000.000,00	-		0,32061			-	
	Kecamatan Kampar Utara										
	Overlay AC-WC Jalan Desa Sendayan Kec.Kampar Utara		653.400.000,00	653.400.000,00	-		0,29630			-	
	Kecamatan Koto Kampar Hulu										
	Penanganan Long Segment Jalan Link. Tanjung		8.834.045.000,00	8.834.045.000,00	-		4,00607			-	
	Penanganan Long Segment Jalan Tabing - Pongkai Baru		1.264.121.000,00	1.264.121.000,00	-		0,57325			-	
	Kecamatan Kuok										
	Penanganan Long Segment Jalan Sei. Maki Desa Kuok		7.585.551.100,00	7.585.551.100,00	-		3,43990			-	
	Overlay AC-WC Jalan Desa Pulau Jambu Kec. Kuok		653.400.000,00	653.400.000,00	-		0,29630			-	
	Kecamatan Rumbio Jaya										
	Overlay AC-WC Jalan Desa Teratak Kec. Rumbio Jaya		767.091.600,00	767.091.600,00	-		0,34786			-	
	Overlay AC-WC Jalan Poros Dusun V Desa Alam Panjang		914.760.000,00	914.760.000,00	-		0,41483			-	
	Kecamatan Kiri Hilir										
	Overlay AC-WC Jalan SMA Teratak Buluh Kec. Siak Hulu dan Jalan Lingkar Kp. Tengah Desa Sei. Petai Kec. Kampar Kiiri Hilir		1.306.800.000,00	1.306.800.000,00	-		0,59261			-	
	Kecamatan Siak Hulu										
	Overlay AC-WC Jalan Suka Karya - Batas Kota		1.176.120.000,00	1.176.120.000,00	-		0,53335			-	
	Overlay AC-WC Jalan Teropong Desa Kubang Jaya dan Jalan Mesjid Al-Fajri Desa Tanah Merah		1.306.800.000,00	1.306.800.000,00	-		0,59261			-	
	Kecamatan Perhentian Raja										
	Overlay Jalan Utama		326.700.000,00	326.700.000,00	-		0,14815			-	
	Kecamatan Tambang										
	Overlay AC-WC Jalan Desa Balam Jaya Kec. Tambang		653.400.000,00	653.400.000,00	-		0,29630			-	
	Overlay AC-WC Jalan Desa Terantang Kec. Tambang		653.400.000,00	653.400.000,00	-		0,29630			-	
	Kecamatan Tapung Hulu										
	Overlay AC-WC Jalan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu		980.100.000,00	980.100.000,00	-		0,44446			-	
	Kecamatan XIII Koto Kampar										
	Overlay AC-WC Jalan Link. Binamang dan Jalan Link. Koto Tuo Barat		1.176.120.000,00	1.176.120.000,00	-		0,53335			-	
	Overlay AC-WC Jalan Link. Tanjung Alai dan Jalan Link. Ranah Sungkai		1.176.120.000,00	1.176.120.000,00	-		0,53335			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN REKONTRUKSI JALAN		**41.656.573.600,00**	**41.656.573.600,00**	**-**		**18,89**	**-**	**-**	**-**	
	7.1.7. SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN										
	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten										
	Pemeliharaan Jalan Sei. Pantau Desa Karya Indah Kec. Tapung		184.800.000,00	184.800.000,00	-		0,08380			-	
	Pemeliharaan Rutin Jalan Di Kabupaten Kampar		897.600.000,00	897.600.000,00	-		0,40704			-	
	Perkerasan Jalan Tanjung Belit Selatan - Danau Sontul		2.640.000.000,00	2.640.000.000,00	-		1,19719			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN		**3.722.400.000,00**	**3.722.400.000,00**	**-**		**1,69**	**-**	**-**	**-**	
	7.1.8. SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.686.000,00	3.686.000,00	-		0,00167			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		7.500.000,00	7.500.000,00	-		0,00340			-	
	Makan minum rapat		8.150.000,00	8.150.000,00	-		0,00370			-	
	Belanja Jasa Kantor										
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten										
	Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Desa Gobah		904.750.000,00	904.750.000,00			0,41029			-	
	Kecamatan Salo										
	Box Culvert Desa Salo Kec. Salo		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	Kecamatan Kampar Kiri Hulu										
	Pembangunan Jembatan Besi Desa Bukit Betung Kec. Kampar Kiri Hulu		756.250.000,00	756.250.000,00	-		0,34294			-	
	Box Culvert Desa Tanjung Belit Kec. Kampar Kiri Hulu		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Pulau Pencong Desa Tanjung Belit Selatan 3x3x7 M (Double)		687.610.000,00	687.610.000,00	-		0,31182			-	
	Kecamatan Bangkinang										
	Box Culvert Desa Pulau Lawas Kec. Bangkinang		142.175.000,00	142.175.000,00	-		0,06447			-	
	Box Culvert Jalan SP. 1 Desa Laboy Jaya Kec. Bangkinang		96.250.000,00	96.250.000,00	-		0,04365			-	
	Kecamatan Bangkinang Kota										
	Pembangunan Jembatan Sei. Sonsang Kec. Bangkinang Kota		3.850.000.000,00	3.850.000.000,00	-		1,74590			-	
	Box Culvert Jalan Datuk Bandaro Uban Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Jalan Sudirman dan Jalan Agussalim Kec. Bangkinang Kota		1.034.000.000,00	1.034.000.000,00	-		0,46890			-	
	Box Culvert RT.08 RW.08 Kelurahan Bangkinang Kec. Bangkinang Kota		96.250.000,00	96.250.000,00	-		0,04365			-	
	Kecamatan Kampa										
	Box Culver Jalan Pulau Lawas Pematang Kulim RT 001 RW 001 Dusun IV Selat Aur Desa Pulau Birandang Kec. Kampa		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Kecamatan Kampar										
	Box Culvert Desa Batu Belah Kec. Kampar		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Desa Naumbai Kec. Kampar		142.175.000,00	142.175.000,00	-		0,06447			-	
	Box Culvert Dusun V Desa Batu Belah Kec. Kampar		142.175.000,00	142.175.000,00	-		0,06447			-	
	Box Culvert Kelurahan Air Tiris Kec. Kampar		142.175.000,00	142.175.000,00	-		0,06447			-	
	Kecamatan Kampar Kiri										
	Box Culvert Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kir		168.025.000,00	168.025.000,00	-		0,07620			-	
	Box Culvert Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Kecamatan Koto Kampar Hulu										
	Box Culvert Jalan Lingkar Desa Tanjung		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Kecamatan Kuok										
	Box Culvert Desa Merangin Kec. Kuok		142.175.000,00	142.175.000,00	-		0,06447			-	
	Box Culvert Dusun Simpang Pawou Desa Pulau Terap Kec. Kuok		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Kecamatan Siak Hulu										
	Box Culvert Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Dusun V Sei. Tangon Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Jalan Amal Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Jalan Kruing Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Jalan Menuju Perum. Putri Molek Kec. Siak Hulu		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Pandau Makmur Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		155.100.000,00	155.100.000,00	-		0,07033			-	
	Box Culvert RW. 12 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Kecamatan Tambang										
	Box Culvert Jalan Poro Sungai Pinang kec. Tambang		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Kecamatan Tapung										
	Box Culvert Desa Air Terbit Kec. Tapung		180.950.000,00	180.950.000,00	-		0,08206			-	
	Kecamatan XIII Koto Kampar										
	Box Culvert Desa Balung Kec. XIII Koto Kampar		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Desa Koto Mesjid Kec. XIII Koto Kampar		193.875.000,00	193.875.000,00	-		0,08792			-	
	Box Culvert Desa Lubuk Agung Kec. XIII Koto Kampar		142.175.000,00	142.175.000,00	-		0,06447			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN		**12.366.321.000,00**	**12.366.321.000,00**	**-**		**5,61**	**-**	**-**	**-**	
	7.1.9. SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		2.220.000,00	2.220.000,00	-		0,00101			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		30.000.000,00	30.000.000,00	-		0,01360			-	
	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten			-							
	Kecamatan Tambang			-							
	Rehabilitasi Jembatan Tanjung Kudu Desa Kualu Kec. Tambang		459.195.000,00	459.195.000,00	-		0,20824			-	
	Kecamatan Kuok			-							
	Rehabilitasi Jembatan Singgolan Desa Bukit Melintang Kec. Kuok		199.650.000,00	199.650.000,00	-		0,09054			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN		**691.065.000,00**	**691.065.000,00**	**-**		**0,31**	**-**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	7.1.10. SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA										
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi										
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas										
	Pengawasan AC-WC Jalan Akasia 7 Desa Gading Sari		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan BPD Rimbo Panjang		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Dahlia III Desa Sungai Putih dan Jalan Desa Birandang		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Desa Padang Luas, Jalan Desa Pulau Permai, Jalan Desa Balam Jaya Dan Jalan Desa Terantang		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Desa Teratak, Jalan Desa Simpang Kubu, Jalan Desa Sendayan dan Jalan Desa Penyesawan		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Pinang (Pesantren Alfauzan) dan Jalan Kulim Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Poros Penghubung Desa Tandan Sari - Desa Tapung Makmur dan Jalan Desa Kasikan		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan RT 02 RW 02 Desa Baru dan Jalan Menuju Pesentren Mahad Taffaquh		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan Box Culvert Pulau Pencong Desa Tanjung Belit Selatan 3x3x7 M (Double)		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Pengawasan Jalan Desa Kumantan, dan Jalan Desa Pulau Jambu		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan Link. Binamang dan Jl. Link. Koto Tuo		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan Link. Tanjung Alai dan Jl. Lingk Ranah Sungkai		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan Mutiara Desa Ridan Permai dan Jalan Kasturi Kec. Bangkinang Kota		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan Poros Dusun V Desa Alam Panjang		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan SMA Teratak Buluh Kec. Siak Hulu dan Jalan Lingkar Kp. Tengah Desa Sei. Petai Kec. Kampar Kiiri Hilir		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan Sp. Sei. Putih Menuju Pesantren Desa Tanjung Berulak		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan Suka Karya - Batas Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan Overlay AC-WC Jalan Teropong Desa Kubang Jaya dan Jalan Masjid Al-Fajri Desa Tanah Merah		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Sudirman dan Jalan Agussalim Kec. Bangkinang Kota		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Pengawasan Pembangunan Jembatan Besi Desa Bukit Betung		75.000.000,00	75.000.000,00	-		0,03401			-	
	Pengawasan Pembangunan Jembatan Sei. Sonsang Kec. Bangkinang Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	-		0,09070			-	
	Pengawasan DAK Fisik			-							
	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Cik Ditiro Bangkinang		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Haf Jaya - Uka - Jawa		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan kotoman - Koto Onda		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Link. Tanjung		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Sei. Maki Desa Kuok		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Singkawang - Sp. Polsek		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan Penanganan Long Segment Jalan Tabing - Pongkai Baru		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan DBH										
	Pengawasan AC-WC Jalan Danau Bingkuang - Gobah		300.000.000,00	300.000.000,00	-		0,13604			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Mayang Pongkai - Lubuk Sakai (Sp.Tugu)		250.000.000,00	250.000.000,00	-		0,11337			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Sp. Robert - Gading Sari		150.000.000,00	150.000.000,00	-		0,06802			-	
	Pengawasan AC-WC Jalan Tj. Sawit - Indra Purih		300.000.000,00	300.000.000,00	-		0,13604			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN		**4.100.000.000,00**	**4.100.000.000,00**	**-**		**1,86**	**-**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	JUMLAH KEGIATAN 7.1 : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA		**125.844.159.958,00**	**125.844.159.958,00**	-		**57,07**	-	-	-	
	JUMLAH PROGRAM 7 : PENYELENGGARA JALAN		**125.844.159.958,00**	**125.844.159.958,00**	-		**57,07**	-	-	-	
	PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										
	KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG(RRTR) KABUPATEN/KOTA										
	8.1.1. SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.919.700,00	8.919.700,00	-		0,00404			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.178.200,00	2.178.200,00	-		0,00099			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		2.340.000,00	2.340.000,00	-		0,00106			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		18.550.000,00	18.550.000,00	-		0,00841			-	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		71.400.000,00	71.400.000,00	-		0,03238			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		306.000.000,00	306.000.000,00	-		0,13877			-	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi			-							
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		238.334.000,00	238.334.000,00	-		0,10808			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		129.960.000,00	129.960.000,00	-		0,05893			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENETAPAN KEBIJAKAN DALAMRANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG		**777.681.900,00**	**777.681.900,00**	-		**0,35**	-	-	-	
	JUMLAH KEGIATAN 8.1 : PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RT/RW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA		**777.681.900,00**	**777.681.900,00**	-		**0,35**	-	-	-	
	KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	8.2.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAANRUANG										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.265.250,00	8.265.250,00	-		0,00375			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		400.000,00	400.000,00	-		0,00018			-	
	Belanja Jasa Kantor			-							
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		46.680.000,00	46.680.000,00	-		0,02117			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAANPENATAAN RUANG		**155.345.250,00**	**155.345.250,00**	-		**0,07**	-	-	-	
	8.2.2. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.511.700,00	8.511.700,00	-		0,00386			-	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli		100.000.000,00	100.000.000,00	-		0,04535			-	
	Belanja Sewa Buku Laporan		10.600.000,00	10.600.000,00	-		0,00481			-	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		10.000.000,00	10.000.000,00	-		0,00453			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		54.400.000,00	54.400.000,00	-		0,02467			-	
	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah		15.000.000,00	15.000.000,00	-		0,00680			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN SINKRONISASIPROGRAM PEMANFAATAN RUANG		**198.511.700,00**	**198.511.700,00**	-		**0,09**	-	-	-	
	JUMLAH KEGIATAN 8.2 : KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGDAERAH KABUPATEN/KOTA		**353.856.950,00**	**353.856.950,00**	-		**0,16**	-	-	-	
	JUMLAH PROGRAM 8 : PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		**1.131.538.850,00**	**1.131.538.850,00**	-		**0,51**	-	-	-	
	PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN										

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTIKERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	9.1.1. SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAHUNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.768.500,00	8.768.500,00	-		0,00398			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.200.000,00	2.200.000,00	-		0,00100			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.170.000,00	1.170.000,00	-		0,00053			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.050.000,00	7.050.000,00	-		0,00320			-	
	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya										
	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah		35.000.000,00	35.000.000,00	-		0,01587			-	
	Pembuatan Dokumen Jasa Appraisal Perencanaan Pengadaan Tanah		45.000.000,00	45.000.000,00	-		0,02041			-	
	Pembuatan Ricikan Peta Bidang, Jasa Notaris untuk Pelepasan Hak, Sertifikat Tanah		30.000.000,00	30.000.000,00	-		0,01360			-	
				-	-		-			-	
				-	-		-			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		**129.188.500,00**	**129.188.500,00**	**-**		**0,06**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 9.1 : PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		**129.188.500,00**	**129.188.500,00**	**-**		**0,06**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 9 : PENYELESAIAN GANTI KERUGIANDAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		**129.188.500,00**	**129.188.500,00**	**-**		**0,06**	**-**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG										
	KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATANTANAH KOSONG										
	10.1.1. SUB KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAHKOSONG										
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		25.000.000,00	25.000.000,00	-		0,01134			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.242.000,00	6.242.000,00	-		0,00283			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		710.000,00	710.000,00	-		0,00032			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.170.000,00	1.170.000,00	-		0,00053			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.050.000,00	7.050.000,00	-		0,00320			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		38.200.000,00	38.200.000,00	-		0,01732			-	
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya		90.000.000,00	90.000.000,00	-		0,04081			-	
			-	-	-		-			-	
			-	-	-		-			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN INVENTARISASITANAH KOSONG		**168.372.000,00**	**168.372.000,00**	**-**		**0,08**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 10.1 : INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG		**168.372.000,00**	**168.372.000,00**	**-**		**0,08**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 10 : PENGELOLAAN TANAH KOSONG		**168.372.000,00**	**168.372.000,00**	**-**		**0,08**	**-**	**-**	**-**	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH										
	KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH										
	11.1.1. SUB KEGIATAN Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.425.350,00	5.425.350,00	-		0,00246			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.375.000,00	5.375.000,00	-		0,00244			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.170.000,00	1.170.000,00	-		0,00053			-	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.300.000,00	5.300.000,00	-		0,00240			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		57.850.000,00	57.850.000,00	-		0,02623			-	
			-	-	-		-			-	
			-	-	-		-			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERIAN IZIN MEMBUKA TANAH		**75.120.350,00**	**75.120.350,00**	**-**		**0,03**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 11.1 : PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH		**75.120.350,00**	**75.120.350,00**	**-**		**0,03**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 11 : PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		**75.120.350,00**	**75.120.350,00**	**-**		**0,03**	**-**	**-**	**-**	
	PROGRAM 12 : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										
	KEGIATAN 12.1 : PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	12.1.1. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNGLAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI										
	Belanja Modal Personal Computer		34.926.500,00	34.926.500,00	-		0,01584			-	
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		44.872.400,00	44.872.400,00	-		0,02035			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERANGKAT PENDUKUNG LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI		**79.798.900,00**	**79.798.900,00**	**-**		**0,04**	**-**	**-**	**-**	
	12.1.2. SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		11.527.250,00	11.527.250,00	-		0,00523			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.200.000,00	7.200.000,00	-		0,00327			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA		**18.727.250,00**	**18.727.250,00**	**-**		**0,01**	**-**	**-**	**-**	
	12.1.3. SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLASIPJAKI										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		11.527.250,00	11.527.250,00	-		0,00523			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.200.000,00	7.200.000,00	-		0,00327			-	
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATANPENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA SIPJAKI		**18.727.250,00**	**18.727.250,00**	**-**		**0,01**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 12.1 : PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**117.253.400,00**	**117.253.400,00**	**-**		**0,05**	**-**	**-**	**-**	
	KEGIATAN 12.2 : PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI										
	12.2.1. SUB KEGIATAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA										
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		11.527.250,00	11.527.250,00	-		0,00523			-	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.972.800,00	4.972.800,00	-		0,00226			-	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		107.138.000,00	107.138.000,00	-		0,04859			-	
					-		-			-	

1	2	3	4	5	6 = 5 - 12	7	8	10	12	13	14
	JUMLAH BIAYA SUB KEGIATAN PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI		**123.638.050,00**	**123.638.050,00**	**-**		**0,06**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH KEGIATAN 12.2 : PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI		**123.638.050,00**	**123.638.050,00**	**-**		**0,06**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH PROGRAM 12 : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		**240.891.450,00**	**240.891.450,00**	**-**		**0,11**	**-**	**-**	**-**	
	TOTAL PROGRAM TAHUN 2023		**220.516.533.903,00**	**220.516.533.903,00**	**-**	**100,00**		**0,76**	**-**	**-**	

Bangkinang, Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAMPAR

AFDAL, ST.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700325 199903 1 004

-

7h

BAB IV

PENUTUP

Penetapan Rencana kerja perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang kebinamargaan dan pengairan. Renja Tahun 2024 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, dan berkembang secara dinamis, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun 2023 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia baik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, maupun oleh pihak penyedia jasa, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka menyiapkan infrastruktur khususnya di bidang Kebinamargaan dan Pengairan.

Bangkinang, 20 September 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAMPAR

A F D A L, ST., MT
NIP. 19700325 199903 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Bapenda Kabupaten Kampar dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Kampar Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah.

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD). Renja merupakan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar 2005 – 2025. Dokumen Renja Bapenda Kabupaten Kampar Tahun 2024, merupakan penjabaran tahun kedua Renstra Bapenda Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Kampar Tahun 2024, diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Bapenda dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Bapenda Kabupaten Kampar dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi organisasi Dalam rangka mewujudkan *good governance.*

Akhir kata, semoga Renja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kabupaten Kampar.

Bangkinang, 12 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
KABUPATEN KAMPAR

KHOLIDAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670518 199401 2 0013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 13

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 33

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 33

3.2.1 Tujuan 33

3.2.2 Sasaran 33

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 38

BAB V PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	7
Tabel 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	14
Tabel 3.	Matrik SWOT Dalam Rangka Menentukan Isu-Isu Strategis	16
Tabel 4.	Penetapan Urutan Strategi	17
Tabel 5.	Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	18
Tabel 6.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	20
Tabel 7.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	37
Tabel 8.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kampar	38
Tabel 9.	Rencana Kerja dan Pendanaan PD	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Memimpin seluruh kegiatan Badan, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan baik intern maupun ekstern.
3. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD serta mengendalikan pelaksanaan anggaran.

5. Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam bidang ketata usahaan, pendapatan, perencanaan program, pajak dan retribusi serta pendapatan lainnya.
6. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan pelaksanaan tugas badan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta.
7. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan serta program kerja daerah.
8. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktifitas kerja.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan Visi dan Misi daerah.
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis urusan lingkup bidang pendapatan.
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, unit pelaksana teknis dinas dan kelompok jabatan fungsional,
4. Pembinaan administrasi perkantoran,
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang pendapatan, serta pelaksanana hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan,
7. Pelaksanaan tugas selaku Penggunaan Anggaran/Pengguna Barang,
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, yang transparan dan akuntabel. Di Kabupaten Kampar. Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar 2005 – 2025 serta mendukung ***Visi Kabupaten Kampar Yaitu Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025*** dan ***Misi 2 Kabupaten Kampar yaitu "Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat"***. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2023 – 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai mandat bagi Kepala Daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupten Kampar secara serasi, selaras dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar didalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan keseragaman pembangunan;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan kewenangan daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten kampar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 disajikan dengan sistematika berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

  Meliputi uraian latar belakang penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika penulisan.
- **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

  Memuat informasi tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar , isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

  Bab ini Berisikan Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

- **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

  Bab ini berisikan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah serta rumusan rencana program dan kegiatan PD tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Kabupaten Kampar.

- **BAB V PENUTUP**

  Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6+8	10=9/3
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Nilai SAKIP perangkat daerah**								
a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	12.5 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6+8	10=9/3
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
b. Adminstrasi keuangan perangkat daerah	**Nilai SAKIP perangkat daerah yang tepat waktu**								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	2 Bulan	5 %
Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64 Laporan	-	-	-	-	16 Laporan	2 Laporan	3 %
c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	360 Paket	-	-	-	-	79 Paket	0 Paket	0 %
Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	16 Orang	0 Orang	0 %

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6+8	10=9/3
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel**								
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	40 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	0 Paket	0 %
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	12.5 %
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	12.5 %
Penyediaan bahan bacaan dana peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Paket	0 %
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0 %
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	8 Unit	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**								

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6+8	10=9/3
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	4 %
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	4 %
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	2 Laporan	4 %
g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**Jumlah waktupemeliharaanbarang milik daerahpenunjang urusanPemerintah Daerah**								
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	9 Unit	2 Unit	3.7 %
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	0 %
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah**								
a. Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah**								
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6+8	10=9/3
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	0 Laporan	0 %
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	20 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	0%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0 %
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	-	-	-		1 Laporan	0 Laporan	0%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1,460,000 SPPT	350,000 SPPT	350,000 SPPT	350,000 SPPT	100%	395,000 SPPT	350,000 SPPT	100%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	44 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	0 Dokumen	0 %
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	0 Layanan	0 %
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0 %

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6+8	10=9/3
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	0 %
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	0 %
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	-	-	-		1 Laporan	1 Laporan	0 %

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar di dalam pelaksanaan kegiatannya, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan nilai capaian kegiatan tersebut, maka dapat diartikan bahwa program dan kegiatan sebagian besar dapat dilaksanakan dan kebijakan yang ditetapkan sudah tepat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Untuk lebih jelas lihat tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kampar

No	Indikator	Target Renstra					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analis
		Tahun 2018 (Thn n-5)	Tahun 2019 (Thn n-4)	Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2018 (Thn n-5)	Tahun 2019 (Thn n-4)	Tahun 2020 (Thn n-3)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	
1	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	213,084,825,553	262,682,780,345	238,691,177,900	252,157,288,694	252,925,053,734	229,958,839,238	262,724,440,062	246,053,581,866	267,610,288,176	260,868,433,208	278,735,827,642	
2	Jumlah Aparatur Pengelola Pajak Daerah	60	70	74	80	86	60	70	74	80	86	86	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tidak terlepas dari hal-hal utama yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Untuk pemasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dapat diidentifikasi sebagai berikut

Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD:

1. Database wajib pajak belum optimal
2. Pelaksanaan Ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah masih belum optimal. Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar;
3. Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan;
4. Kualitas SDM masih belum optimal baik dari segi jumlah maupun kebutuhan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Diantaranya Belum ada sertifikasi kompetensi untuk pegawai Bapenda ;
5. Penggunaan sistem teknologi informasi harus dioptimalkan;
6. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya;

Dari hal-hal tersebut, maka rekomendasi dan dan catatan strategis yang dapat diambil dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Terus melakukan validasi terhadap objek pajak daerah khususnya PBB-P2, sehingga dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah;
2. Akan melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak daerah secara terukur dan tepat sasaran. Sehingga Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.;
3. Melakukan kegiatan pemetaan potensi pajak daerah yang terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi yang berbasis geospasial dan mempertajam kalkulasi dengan pemilihan asumsi-asumsi yang memperkuat kuantitas dan kualitas target pendapatan daerah ;
4. Terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur pengelola pendapatan daerah agar berdaya saing dengan mengikutsertakan bimtek;
5. Terus melanjutkan inovasi inovasi penggunaan Sistem Teknologi Informasi dengan membangun Sistem/Aplikasi yang terintegrasi utamanya kepada Perangkat Daerah

penghasil pajak dan retribusi daerah. Penggunaan IT ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak;

6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat atau Wajib pajak;

Tabel 3
Matrik SWOT Dalam Rangka Menentukan Isu-Isu Strategis

MATRIKS	STRENGTHS (S)	WEAKNESS (W)
	1. Dukungan Kepala Daerah terhadap peningkatan penerimaan pajak 2. Sudah mempunyai SIMPAD 3. Besarnya potensi pajak daerah	1. Kurangnya Jumlah SDM yang propesional 2. Pelayanan kepada WP belum Optimal 3. Database WP belum optimal
OPPORTUNITIES (O)	*(SO)*	*(WO)*
1. Kemajuan teknologi informasi 2. Dukungan KPK terhadap pemda 3. Mou antara Pemda dgn DJP Riau	1. Menitoring secara berkala terhadap MoU KPK dan DJP 2. Terus melakukan Intensifikasi dan ektensifikasi kepada WP 3. Selalu melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi informasi	1. Melaksanakan Pelatihan / Bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi 3. Membuat NPWPD agar database semakin baik
TRHEATHS (T)	*(ST)*	*(WT)*
1. Kondisi perekonomian yang belum stabil 2. Rendahnya animo masyarakat dalam membayar pajak 3. Perda RTRW belum terintegrasi	1. Melakukan sosialisasi, Surat edaran dan himbauan kepada WP 2. Melakukan integrasi sistem informasi kepada BPN, PTSP dan pihak pihak yang membutuhkan 3. Melakukan penegakan hukum kepada penunggak pajak	1. Melakukan gerakan bulan sadar pajak 2. Turun ke masyarakat dengan pemungutan pajak melalui oto banking 3. Melakukan pendataan kepada potensi WP baru

Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT di atas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut:

Tabel 4
Penetapan Urutan Strategi

ASUMSI STRATEJIK		KETERKAITAN DENGAN						URUTAN PILIHAN STRATEGI	
		VISI			MISI			(2+3)	
1		2			3			5	
S-O :									
1.	Menitoring secara berkala terhadap MoU KPK dan DJP	4	3	4	3	4	4	22	II
2.	Terus melakukan Intensifikasi dan ektensifikasi kepada WP	3	3	3	3	4	4	20	V
3.	Selalu melakukan inovasi dengan menggunakan teknologi informasi	3	4	4	2	4	4	21	VI
S-T :									
1.	Melakukan sosialisasi, Surat edaran dan himbauan kepada WP	4	4	4	4	4	4	24	I
2.	Melakukan integrasi sistem informasi kepada BPN, PTSP dan pihak pihak yang membutuhkan	4	3	3	3	3	3	19	
3.	Melakukan penegakan hukum kepada penunggak pajak	4	3	3	3	3	4	20	IV
W-O :									
1	Melaksanakan Pelatihan / Bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur	3	4	4	4	4	4	23	II
2	Meningkatkan sarana dan prasarana dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi	4	4	4	4	4	2	22	III
3	Membuat NPWPD agar database semakin baik	3	3	3	2	3	4	18	
W-T :									
1.	Melakukan gerakan bulan sadar pajak	4	4	4	3	4	4	23	III
2.	Turun ke masyarakat dengan pemungutan pajak melalui oto banking	4	3	4	4	4	3	22	V
3.	Melakukan pendataan kepada potensi WP baru	4	4	3	4	3	3	21	IV

Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi menggunakan Skala Likert (Model skala 1-4), yaitu:

4 = Paling Terkait
3 = Terkait
2 = Kurang Terkait
1 = Tidak Terkait

Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 5
Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

FKK (*CFS*) / MISI	1. PENINGKATAN KINERJA DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2. MENINGKATNYA VALIDASI OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK; 3. TERINTEGRASI JARINGAN INFORMASI PENDAPATAN DAERAH DENGAN SKPD PENGHASIL PAD 4. MENINGKATNYA KEMUDAHAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN DAN PEMBAYARAN 5. MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT/WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM PERPAJAKAN 6. MENINGKATNYA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 7. MENINGKATNYA PENGGUNAAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata kerja dan SDM aparatur yang Berkualitas 2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah;	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan melalui tata laksana organisasi dan kualitas SDM aparatur 2. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah secara proporsional sesuai dengan potensi dan peraturan yang berlaku

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPENDA 5 (lima) ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
3. Rendahnya validitas wajib pajak;
4. Sosialisai ke masyarakat tentang peraturan dan perundang-udangan tentang pajak daerah;

5. Pengembangan aplikasi perpajakan untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam tahapan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD sebagai berikut:

Tabel 6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
Provinsi Riau

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(1)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota							
a		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	107,233,728		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	107,233,728	
1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	39,443,691			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	39,443,691	
2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,930,407			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,930,407	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,434,774			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,434,774	
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,386,953			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,386,953	
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,475,225			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,475,225	
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Dokumen	44,312,678			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	44,312,678	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,250,000			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,250,000	
b		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Tersedianya Adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**12,377,141,246**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**Tersedianya Adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**12,377,141,246**	
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang / 12 Bulan	12,327,295,119			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang / 12 Bulan	12,327,295,119	
2			Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14,248,227			Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14,248,227	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	35,597,900			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	35,597,900	
c		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**TersedianyaAdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah**	100%	**407,000,000**		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**TersedianyaAdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah**	100%	**407,000,000**	
1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	208,950,000			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	208,950,000	
2			Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	198,050,000			Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	198,050,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
d		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2,200,972,038**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**2,200,972,038**	
1			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	10 Paket	525,079,500			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	10 Paket	525,079,500	
2			Penyediaan bahan logistik kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	198,972,000			Penyediaan bahan logistik kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	198,972,000	
3			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	498,120,900			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	498,120,900	
4			Penyediaan bahan bacaan dana peraturan perundang-undangan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	27,560,000			Penyediaan bahan bacaan dana peraturan perundang-undangan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	27,560,000	
5			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	951,239,638			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	951,239,638	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
e		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**673,000,000**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**673,000,000**	
1			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	300,000,000	
2			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	175,000,000			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	175,000,000	
3			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	198,000,000			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	198,000,000	
f		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1,512,034,500**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1,512,034,500**	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	342,800,000			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	342,800,000	
2			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185,725,000			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	185,725,000	
3			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	983,509,500			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	983,509,500	
g		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**608,939,769**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**608,939,769**	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	351,950,769			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	351,950,769	
2			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	256,989,000			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	256,989,000	
(2)	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**							
a		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			**Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah**	100%	**3,145,185,140**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			**Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah**	100%	**3,145,185,140**	
1			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	65,952,000			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	65,952,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	285,690,000			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	285,690,000	
3			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	248,263,000			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	248,263,000	
4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	155,585,000			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	155,585,000	
5			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	125,060,070			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	125,060,070	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
6			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	165,289,000			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	165,289,000	
7			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400.000 Obyek Pajak	495,156,000			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400.000 Obyek Pajak	495,156,000	
8			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	552,400,000			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	552,400,000	
9			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	125,860,070			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	125,860,070	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	85,258,000			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	85,258,000	
11			Penagihan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	175,480,000			Penagihan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	175,480,000	
12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	95,864,000			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	95,864,000	
13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	185,025,000			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	185,025,000	
14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	225,653,000			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	225,653,000	

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
15			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	158,650,000			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda Kab. Kampar	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	158,650,000	
TOTAL							21,031,506,421			TOTAL				21,031,506,421	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Bab ini hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Proses perencanaan bottom – up yang telah dilakukan hingga saat ini belum ada usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 belum melakukan telahaan terhadap kebijakan nasional yang tertuang pada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap RKPD yang direncanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar menetapkan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program-program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang khususnya menyangkut bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang mendukung kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan lintas SKPD.

Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang berisi tentang penjabaran rincian belanja yang mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kampar. Oleh karena itu,

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2024 hanya mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kampar.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selanjutnya menetapkan arah kebijakan yang merupakan sinerji dari Lingkungan Startegis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *Critical Sucses Faktor* (CFS) sebagai modal awal untuk mengurai permasalahan yang komplek.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Koordinasi Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi perkantoran;
3. Memenuhi kebutuhan sarana parasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
5. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
   - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Adminstrasi keuangan perangkat daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dana peraturan perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
   - Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah
   - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
   - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
   - Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
   - Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
   - Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   - Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu:

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama (IKU)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	SAKIP, Opini BPK	Mengoptimalkan pendataan atas potensi pajak baru dan menghitung kembali wajib pajak yang telah terdaftar	Meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah
				Meningkatkan Pengawasan/Pelaporan Wajib Pajak (Pemasangan Alat Perekam Transaksi/Tappingbox)	Meningkatnya pendapatan pajak daerah
				Mengoptimalkan Validasi Objek Pajak dan penyuluhan perundang-undangan tentang pajak daerah	Memperkecil jumlah piutang pajak daerah dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Melaksanakan Pelatihan / Bimtek Teknis Pajak Daerah	Peningkatan kualitas dan pemahaman aparatur pengelola pajak paerah dalam rangka upaya peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam Pengelolaan Pajak Daerah.
				Meningkatkan Teknologi Informasi Dengan Melakukan Integrasi Antar OPD Penghasil Pendapatan Asli Daerah	Melakukan koordinasi bersama perangkat daerah penghasil retribusi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 8
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kampar

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5.02		Keuangan								
5.02.0.00.0.00.02.00		Badan Pendapatan Daerah				21,031,506,421				24,342,892,000
5.02.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	107,233,728			100%	112,594,613
5.02.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	2 Dokumen	39,443,691	APBD		2 Dokumen	41,415,076

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	3,930,407	APBD		1 Dokumen	4,126,928
5.02.01.2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	4,434,774	APBD		1 Dokumen	4,656,512
5.02.01.2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	4,386,953	APBD		1 Dokumen	4,606,300
5.02.01.2.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	5,475,225	APBD		1 Dokumen	5,748,986
5.02.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	44,312,678	APBD		1 Dokumen	46,528,311
5.02.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	5,250,000			1 Dokumen	5,512,500
5.02.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**12,377,141,246**			**100%**	**12,588,509,838**
5.02.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda Kab. Kampar	41 Orang / 12 Bulan	12,327,295,119	APBD		41 Orang / 12 Bulan	12,537,298,250
5.02.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	14,248,227	APBD		1 Laporan	14,960,638
5.02.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bapenda Kab. Kampar	16 Laporan	35,597,900	APBD		16 Laporan	36,250,950

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**	**407,000,000**			**100%**	**2,399,073,754**
5.02.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda Kab. Kampar	2 Paket	208,950,000	APBD		2 Paket	2,153,673,754
5.02.01.2.05.11			Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Bapenda Kab. Kampar	20 Orang	198,050,000	APBD		20 Orang	245,400,000
5.02.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**2,200,972,038**			**100%**	**2,364,020,095**
5.02.01.2.06.02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bapenda Kab. Kampar	10 Paket	525,079,500	APBD		10 Paket	560,825,070
5.02.01.2.06.04			Penyediaan bahan logistik kantor	Bapenda Kab. Kampar	2 Paket	198,972,000	APBD		2 Paket	199,525,000
5.02.01.2.06.05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bapenda Kab. Kampar	2 Paket	498,120,900	APBD		2 Paket	525,070,025
5.02.01.2.06.06			Penyediaan bahan bacaan dana peraturan perundang-undangan	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	27,560,000	APBD		1 Dokumen	29,650,000
5.02.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	951,239,638	APBD		1 Laporan	1,048,950,000
5.02.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**100%**	**673,000,000**			**100%**	**998,000,000**

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.01.2.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda Kab. Kampar	1 Unit	300,000,000	APBD		1 Unit	500,000,000
5.02.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bapenda Kab. Kampar	5 Unit	175,000,000	APBD		5 Unit	300,000,000
5.02.01.2.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bapenda Kab. Kampar	1 Unit	198,000,000	APBD		1 Unit	198,000,000
5.02.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**1,512,034,500**			**100%**	**1,545,125,000**
5.02.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda Kab. Kampar	12 Laporan	342,800,000	APBD		12 Laporan	356,500,000
5.02.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda Kab. Kampar	12 Laporan	185,725,000	APBD		12 Laporan	195,500,000
5.02.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda Kab. Kampar	12 Laporan	983,509,500	APBD		12 Laporan	993,125,000
5.02.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**608,939,769**			**100%**	**735,755,100**
5.02.01.2.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bapenda Kab. Kampar	11 Unit	351,950,769	APBD		11 Unit	375,496,200

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bapenda Kab. Kampar	2 Unit	256,989,000	APBD		2 Unit	360,258,900
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**									
5.02.04.2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**			**100%**	**3,145,185,140**			**100%**	**3,599,813,600**
5.02.04.2.01.01			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	65,952,000	APBD		1 Dokumen	72,150,000
5.02.04.2.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	285,690,000	APBD		1 Dokumen	354,286,000
5.02.04.2.01.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	248,263,000	APBD		1 Laporan	258,524,000
5.02.04.2.01.04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	3 Unit	155,585,000	APBD		3 Unit	296,520,000
5.02.04.2.01.05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	125,060,070	APBD		1 Laporan	152,400,000
5.02.04.2.01.06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	165,289,000	APBD		1 Laporan	184,526,000

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.02.04.2.01.07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda Kab. Kampar	400.000 Obyek Pajak	495,156,000	APBD		400.000 Obyek Pajak	512,065,000
5.02.04.2.01.08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	552,400,000	APBD		1 Dokumen	624,000,000
5.02.04.2.01.09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Layanan	125,860,070	APBD		1 Layanan	135,056,000
5.02.04.2.01.10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	85,258,000	APBD		1 Dokumen	95,250,000
5.02.04.2.01.11			Penagihan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	175,480,000	APBD		1 Dokumen	190,908,500
5.02.04.2.01.12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	95,864,000	APBD		1 Dokumen	102,500,000
5.02.04.2.01.13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	185,025,000	APBD		1 Dokumen	196,582,500
5.02.04.2.01.14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	225,653,000	APBD		1 Laporan	256,000,000
5.02.04.2.01.15			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	158,650,000	APBD		1 Laporan	169,045,600
Total						**21,031,506,421**				**24,342,892,000**

Tabel 9
Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Urusan Pemerintahan : 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan : 5.02 Keuangan
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
5.02		Keuangan						
5.02.0.00.0.00.02.00		Badan Pendapatan Daerah					21,031,506,421	
5.02.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	107,233,728	
5.02.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	2 Dokumen	39,443,691	APBD
5.02.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	3,930,407	APBD

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	4,434,774	APBD
5.02.01.2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	4,386,953	APBD
5.02.01.2.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	5,475,225	APBD
5.02.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	44,312,678	APBD
5.02.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	5,250,000	
5.02.01.2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100%**	**12,377,141,246**	
5.02.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda Kab. Kampar	41 Orang / 12 Bulan	12,327,295,119	APBD

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	14,248,227	APBD
5.02.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bapenda Kab. Kampar	16 Laporan	35,597,900	APBD
5.02.01.2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**407,000,000**	
5.02.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bapenda Kab. Kampar	2 Paket	208,950,000	APBD
5.02.01.2.05.11			Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda Kab. Kampar	20 Orang	198,050,000	APBD
5.02.01.2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**2,200,972,038**	

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.06.02			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	10 Paket	525,079,500	APBD
5.02.01.2.06.04			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	2 Paket	198,972,000	APBD
5.02.01.2.06.05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Bapenda Kab. Kampar	2 Paket	498,120,900	APBD
5.02.01.2.06.06			Penyediaan bahan bacaan dana peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	27,560,000	APBD
5.02.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	951,239,638	APBD
5.02.01.2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**673,000,000**	
5.02.01.2.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	1 Unit	300,000,000	APBD

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	5 Unit	175,000,000	APBD
5.02.01.2.07.09			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	1 Unit	198,000,000	APBD
5.02.01.2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**1,512,034,500**	
5.02.01.2.08.02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	12 Laporan	342,800,000	APBD
5.02.01.2.08.03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	12 Laporan	185,725,000	APBD
5.02.01.2.08.04			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda Kab. Kampar	12 Laporan	983,509,500	APBD
5.02.01.2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**100%**	**608,939,769**	

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.01.2.09.01			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bapenda Kab. Kampar	11 Unit	351,950,769	APBD
5.02.01.2.09.10			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda Kab. Kampar	2 Unit	256,989,000	APBD
5.02.04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**							
5.02.04.2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**		**Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**100%**	**3,145,185,140**	
5.02.04.2.01.01			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	65,952,000	APBD
5.02.04.2.01.02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	285,690,000	APBD
5.02.04.2.01.03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	248,263,000	APBD

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.04.2.01.04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	3 Unit	155,585,000	APBD
5.02.04.2.01.05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	125,060,070	APBD
5.02.04.2.01.06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	165,289,000	APBD
5.02.04.2.01.07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Bapenda Kab. Kampar	400.000 Obyek Pajak	495,156,000	APBD
5.02.04.2.01.08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	552,400,000	APBD
5.02.04.2.01.09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Layanan	125,860,070	APBD
5.02.04.2.01.10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	85,258,000	APBD

Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.04.2.01.11			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	175,480,000	APBD
5.02.04.2.01.12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	95,864,000	APBD
5.02.04.2.01.13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Dokumen	185,025,000	
5.02.04.2.01.14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	225,653,000	
5.02.04.2.01.15			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Bapenda Kab. Kampar	1 Laporan	158,650,000	APBD
Total							**21,031,506,421**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2023 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kampar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi lnstansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Bangkinang, 13 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

KHOLIDAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670518 199401 2 0013

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Kampar
Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					BADAN PENDAPATAN DAERAH								**21.031.506.421,00**					**24.342.892.000,00**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								**21.031.506.421,00**					**24.342.892.000,00**
5	**02**				**KEUANGAN**								**21.031.506.421,00**					**24.342.892.000,00**
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**3.145.185.140,00**					**3.599.813.600,00**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**3.145.185.140,00**					**3.599.813.600,00**
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	65.952.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	72.150.000,00
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	285.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	354.286.000,00
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	248.263.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	258.524.000,00
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	155.585.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	296.520.000,00
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	125.060.070,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	152.400.000,00
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	165.289.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	184.526.000,00
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	45000 Obyek Pajak	100 %	495.156.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	45000 Obyek Pajak	512.065.000,00
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	552.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	624.000.000,00
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Layanan	100 %	125.860.070,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	135.056.000,00
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	85.258.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	95.250.000,00
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	175.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	190.908.500,00
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	95.864.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	102.500.000,00
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	185.025.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	196.582.500,00
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	225.653.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	256.000.000,00
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah													
						Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	158.650.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	169.045.600,00
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**17.886.321.281,00**					**20.743.078.400,00**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**107.233.728,00**					**112.594.613,00**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % undefined undefined	2 Dokumen	100 %	39.443.691,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.415.076,00
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % undefined undefined	1 Dokumen	100 %	3.930.407,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.126.928,00
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % undefined undefined	1 Dokumen	100 %	4.434.774,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.656.512,00
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % undefined undefined	1 Dokumen	100 %	4.386.953,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.606.300,00
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % undefined undefined	1 Dokumen	100 %	5.475.225,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.748.986,00
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % undefined undefined	1 Laporan	100 %	44.312.678,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	46.528.311,00
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % undefined undefined	1 Laporan	100 %	5.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5.512.500,00
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12.377.141.246,00**					**12.588.509.838,00**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	41 Orang/bulan	100 %	12.327.295.119,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang /bulan	12.537.298.250,00
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	14.248.227,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.960.638,00
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	16 Laporan	100 %	35.597.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	36.250.950,00
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**407.000.000,00**					**2.399.073.754,00**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	208.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2.153.673.754,00
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	20 Orang	100 %	198.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	245.400.000,00
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2.200.972.038,00**					**2.364.020.095,00**
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Paket	100 %	525.079.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	560.825.070,00
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	198.972.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	199.525.000,00
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	498.120.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	525.070.025,00
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	27.560.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	29.650.000,00
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	951.239.638,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.048.950.000,00
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**673.000.000,00**					**998.000.000,00**
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Unit	100 %	175.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	300.000.000,00
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	198.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	198.000.000,00
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1.512.034.500,00**					**1.545.125.000,00**
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	342.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	356.500.000,00
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	185.725.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195.500.000,00
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	983.509.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	993.125.000,00
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**606.939.769,00**					**735.755.100,00**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	11 Unit	100 %	351.950.769,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	375.496.200,00
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Unit	100 %	256.989.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	360.258.900,00
												TOTAL	**21.031.506.421,00**					**24.342.892.000,00**

TARGET PENDAPATAN DAERAH PADA APBD 2024
KABUPATEN KAMPAR T.A. 2024

KODE REKENING						JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN		SELISIH	%	KET
							APBD 2023	APBD 2024			
4	1	01				A. PAJAK DAERAH	154,143,211,242.00	161,075,385,267.00	6,932,174,025.00	4.50	
						PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) :	81,682,898,263.00	87,133,086,563.00	5,450,188,300.00	6.67	
						- Pajak Makanan dan/atau Minuman	6,279,706,000.00	7,658,709,000.00	1,379,003,000.00	21.96	
						- Pajak Tenaga Listrik	73,510,592,263.00	75,581,192,263.00	2,070,600,000.00	2.82	
						- PPJ PLN	73,510,592,263.00	73,510,592,263.00	-	-	
						- PPJ Non PLN	-	2,070,600,000.00	2,070,600,000.00	100.00	
						- Pajak Jasa Perhotelan	1,712,100,000.00	1,952,700,000.00	240,600,000.00	14.05	
						- Pajak Jasa Parkir	180,500,000.00	115,500,000.00	(65,000,000.00)	(36.01)	
						- Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan	-	1,824,985,300.00	1,824,985,300.00	100.00	
4	1	01	09			Pajak Reklame	1,050,000,000.00	1,782,000,000.00	732,000,000.00	69.71	
4	1	01	12			Pajak Air Tanah	1,649,514,275.00	1,967,500,000.00	317,985,725.00	19.28	
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet	82,000,000.00	150,000,000.00	68,000,000.00	-	
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	4,235,000,000.00	3,599,000,000.00	(636,000,000.00)	(15.02)	
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2)	24,651,298,704.00	25,051,298,704.00	400,000,000.00	1.62	
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40,792,500,000.00	41,392,500,000.00	600,000,000.00	1.47	

Bangkinang, 17 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

KHOLIDAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670518 199401 2 001

REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022

KODE REKENING						JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1						2	3	4	5
4	**1**	**01**				**PAJAK DAERAH**	**151,227,920,126.00**	**142,416,372,726.00**	**94.17**
4	1	01	06			Pajak Hotel	1,512,100,000.00	1,339,473,174.00	88.58
4	1	01	07			Pajak Restoran	6,455,647,500.00	7,524,552,787.00	116.56
4	1	01	08			Pajak Hiburan	0	-	
4	1	01	09			Pajak Reklame	953,090,000.00	937,847,222.00	98.40
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan	73,144,868,351.00	74,030,004,053.00	101.21
4	1	01	10	01		PPJ PLN	73,144,868,351.00	73,852,916,195.00	100.97
4	1	01	10	02		PPJ NON PLN	0	177,087,858.00	
4	1	01	11			Pajak Parkir	180,500,000.00	107,066,250.00	59.32
4	1	01	12			Pajak Air Tanah	1,649,514,275.00	1,739,085,751.00	105.43
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet	82,000,000.00	22,840,000.00	27.85
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasir Kerikil)	10,298,555,901.00	10,780,496,363.00	104.68
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan	19,951,644,099.00	16,695,289,368.00	83.68
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	37,000,000,000.00	29,239,717,758.00	79.03

Bangkinang, 17 Juli 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

KHOLIDAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670518 199401 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl.Prof. M. Yamin,SH No. 768 Telp. (0762) 20259 Fax. (0762) 322625
BANGKINANG KOTA
Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNAAN BARANG
NOMOR : KPTS. 821/BAPENDA-SET/04

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, perlu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438;

6. Undang-Undang No. 29 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5049);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar;
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2.412/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 Tentang Pengangkatan kembali/pengukuhan atau pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas an. Ir. KHOLIDAH, MM Eselon II/b sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama – nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyusun, menghitung dan mengetahui / menyetujui Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

Ir. KHOLIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670518 199401 2 001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Kampar di Bangkinang
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Kampar di Bangkinang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : Kpts.821/Bapenda-set/04
TANGGAL : 02 JANUARI 2023

No	Nama/Nip	Jabatan Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	JAKA PUTRA, SE. M.Si NIP. 19840210 201001 1 020	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar	Ketua
2.	ZAMZUL AZMI, SE. MM NIP.19790912 200012 1 004	Kabid Pendataan dan Pendaftaran	Wakil Ketua
3.	ABDUL ROCHIM, ST NIP. 19860612 201003 1 001	Perencana Muda	Sekretaris
4.	WILLIANDRIE A.R, ST. M.Si NIP. 19870423 201001 1 009	Kabid Penagihan dan Keberatan	Anggota
5.	EDISON, SE NIP. 19720524 199303 1 001	Kabid Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan	Anggota
6.	KURNIAWITA, SE. M.Si NIP.19830124 200605 2 001	Kabid Perhitungan dan Penetapan	Anggota
7.	NUR AFNI, SE NIP. 19811212 200701 2 004	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
8.	DEVI DESNITA NIP. 19841118 200901 2 005	Pelaksana Sekretariat	Anggota
9.	M. SATRIA NOPENDRA, SE	Pelaksana Sekretariat	Anggota
10.	KAMALIA MUSLIMAH, S.Pd. MM	Pelaksana Sekretariat	Tikrey

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

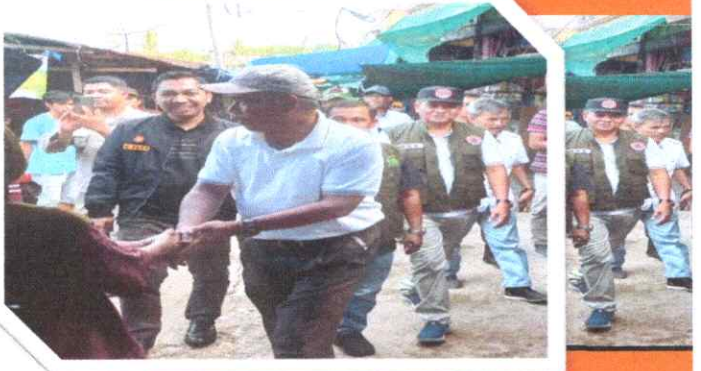
Ir. KHOLIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670518 199401 2 001

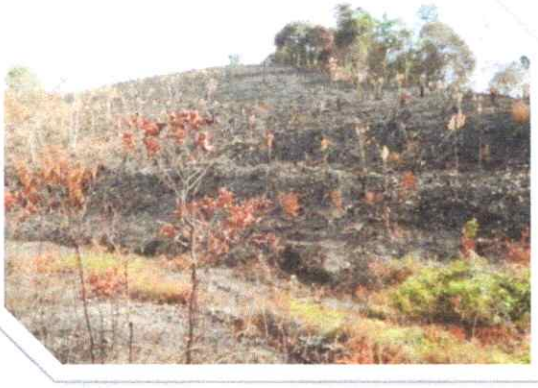
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

2024

RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2024









BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja OPD Tahun 2024 merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2023-2026, dan diserasikan dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dimana setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap perubahan, dengan jenjang perencanaan, yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek.

Ucapan terimakasih Kami sampaikan kepada semua pihak dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang telah menyumbangkan fikiran, hingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan Pemerintah an dan Kesejahteraan sosial.

Bangkinang, 31 Mei 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KAMPAR

PEMERINTAH KABUPATEN BPBD KAMPAR

Drs. AGUSTAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720619 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistimatika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 26
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD 34
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 54
3.3 Program dan Kegiatan 57

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 61

BAB V PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kabupaten Kampar	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar	25
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kampar.....	35
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar	42
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 2025	62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD. Yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen Perencanaan atau Rencana yang memuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dengan pengertian diatas, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan untuk mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Kampar tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan terkait Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai satuan kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2024, Renja OPD merupakan dokumen rencana Pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2023 -2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut : "Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana"

Tanggap adalah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.

Tangguh adalah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan didalam pengendalian bencana.

Terampil adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.

Tuntas adalah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2021 adalah :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
15. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklator perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah.

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penangulangan Bencana;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
30. Peraturan Daerah Bupati Kampar Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar
31. Peraturan Bupati Kampar, Nomor 39 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 40 Tahun 2020 tentang rencana Kerja Perangkat daerah tahun 2021.
32. Surat Edaran Bupati Kampar Nomor : 050.13/Bappeda-I.2/374 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar pembangunan desa. Kecamatan dan daerah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efesiensi alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.
2. Mengembangkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan regulasi yang lengkap dalam penanggulangan bencana.
4. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembanguan.
5. Tercapainya penggunaan sumber daya alam secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Membangun kemitraan dengan stakeholder dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan pencapaian renstra tahun lalu.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penalahaan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
3.2 Tujuan dan sasaran renja SKPD.
3.3 Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01^{0}00'40" Lintang Utara sampai 00^{0}27'00" Lintang Selatan dan 100^{0}28'30"-101^{0}14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

2.1.1. Daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu: (1) Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kadalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar, Kampa, Siak Hulu dan Kampar Kiri; (2) Sungai Siak bagian hulu yang panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

2.1.2. Karakteristik fisik alami yang relatif rentan terhadap terjadinya bencana dan berkembangnya kegiatan perekonomian yang pesat di berbagai sektor pembangunan berdampak terhadap meningkatnya risiko bencana di Kabupaten Kampar. Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa 10 kabupaten/kota di Provinsi Riau yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, **Kampar,** Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru dikategorikan sebagai kabupaten/kota dengan kelas rawan tinggi, adapun Kabupaten

Bengkalis dan Kota Pekanbaru dikategorikan sebagai kabupaten/kota dengan kelas rawan sedang.

2.1.3. Risiko bencana di Kabupaten Kampar dikelompokkan menjadi risiko bencana akibat kejadian alam, risiko bencana akibat intervensi kegiatan manusia, dan atau risiko bencana akibat kejadian alam dan intervensi kegiatan manusia. Risiko bencana tentunya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus ditanggung sebagai biaya sosial (*social costs*) serta rusaknya hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kampar menjadi penting untuk dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36, agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Salah satu upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana di daerah adalah dengan adanya Rencana Kerja yang bagus, sesuai sosial ekonomi, dan potensi kerawanan bencana yang berpeluang terjadi. Rencana Kerja tersebut menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah, dimana di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data, baik spasial maupun non spasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi, termasuk data dan informasi spasial, serta Pemerintah Daerah harus membangun sistem informasi daerah yang terintegrasi.

Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kampar selama tahun 2024 dan Perkiraan target tahun 2024.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui penjabaraan perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kampar.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar pada Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran, sebagai berikut.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kampar adalah penjabaran penjelasan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kampar tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja. Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kampar selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2024 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

b. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja PD dan capaian Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun lalu dapat disampaikan antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran (<90%) yang direncanakan sebagai berikut :
   a. Program Penanggulangan Korban Bencana kegiatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana 100%.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran (>90%) yang direncanakan sebagai berikut :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
   b. Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Perjenis Bencana.
   c. Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanna Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat/TRC Bencana Kabupaten/Kota.

d. Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
e. Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan sebagai berikut :
   a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah adanya beberapa item pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor kondisi di lapangan, untuk selengkapnya tertuang dalam Laporan Kinerja.
   b. Faktor penyebab tercapainya target kinerja program / kegiatan disebabkan oleh dukungan dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan target kinerja.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD adalah tidak tercapainya target beberapa program.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah dengan melakukan urutan skala prioritas PD dan pelayanan publik.

   Data – data hasil evaluasi hasil pelaksanaan dan realisasi Renja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Kabupaten Kampar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1					URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	80%	20%	20%	100%	25%	100%	100%	BPBD
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	25%	100%	100%	BPBD
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	21 Dokumen	100%	BPBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	BPBD
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	BPBD
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	BPBD
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	BPBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org/36 Bln	30 Org/24 Bln	30 Org/12 Bln	30 Org/12 Bln	100%	30 Org/12 Bln	30 Org/36 Bln	100%	BPBD
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%	BPBD
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Palet Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%	BPBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	05	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%	BPBD
1	05	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%	BPBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Barang yang disediakan	3 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	100%	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	BPBD
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	200 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	1 Laporan	300 Laporan	100%	BPBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	100%	BPBD
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**
1	01	01	2.08	02	Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	6 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	100%	BPBD
1	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%	BPBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**
1	01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannnya	18 Unit	12 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 Unit	100%	BPBD
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 Unit	100%	BPBD
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	9 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	100%	BPBD
1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%	BPBD
1	05	03	2.01	02	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	200 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	300 Orang	100%	BPBD
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	240 Orang	160 Orang	80 Orang	80 Orang	100%	80 Orang	240 Orang	100%	BPBD
1	05	03	2.02	04	Penyediaan peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas kebencanaan / pemadaman kebakaran	45 Unit	30 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	45 Unit	100%	BPBD
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	60 Paket	40 Paket	20 Paket	20 Paket	100%	30 Paket	60 Paket	100%	BPBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	45 Orang	30 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	45 Orang	100%	BPBD
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayananan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target Kinerja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2022 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11	12
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Koraban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750 Orang	500 Orang	250 Orang	250 Orang	100%	250 Orang	750 Orang	100%	BPBD
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**BPBD**
1	01	02	04	01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penangulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%	BPBD

Narasi : Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menunjukkan target pertahun dan tingkat realisasi pertahunnya tercapai, sehingga terpenuhinya realisasi capaian pada target RPJMD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar merupakan Badan yang mengelola urusan pilihan yang tidak mempunyai indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007. Namun untuk menentukan tolok ukur kinerja PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan target capaian tingkat penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, dimana pelayanan publik terbagi 3 (tiga) Bidang yaitu Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Kedaruratan dan Logistik.

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
   Kepala Seksi Pencegahan
   Kepala Seksi Kesiapsiagaan
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terdiri dari :
   Kepala Seksi Kedaruratan
   Kepala Seksi Logistik
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi yang terdiri dari :
   Kepala Seksi Rehabilitasi
   Kepala Seksi Rekonstruksi

1. Cakupan (macam-macam pelayanan OPD)

Dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan (pra bencana) adalah :

- Menyusun peta rawan bencana sehingga memudahkan aparat dalam mendata daerah rawan bencana dan mensosialisasikan kepada

masyarakat tentang peraturan-peraturan tentang penanggulangan bencana

- Melaksanakan survei dan pendataandaerah-daerah yang rawan terjadi bencana.

Saat terjadinya bencana adalah :

- Memberikan bantuan logistik dan menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penanggulang bencana.

Setelah terjadinyanya bencana adalah :

- Rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah terjadinya bencana pada suatu daerah maka kerusakan yang terjadi akan didata dan dibuat laporan untuk mengetahui apa saja kerusakan yang terjadi dan berapa nilai kerugian terhadap bencana tersebut serta membangun kembali sarana prasarana yang rusak akibat bencana.

TABEL. 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR

No	Indikator *)	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 2021	Tahun n-1 2022	Tahun n 2023	Tahun n+1 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Desa Tangguh Bencana.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	740.839	370.420	370.420	370.420	740.839	370.420	370.420	370.420	
2	Prosentase Evakuasi Korban Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Kampar	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	240	120	120	120	240	120	120	120	
3	Angka Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kampar	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	6.062	3.031	3.031	3.031	6.062	3.031	3.031	3.031	
4	Jumlah Fasilitas Pasca Bencana yang terbangun		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	7.689	3.845	3.845	3.845	7.689	3.845	3.845	3.845	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Ditataran internasional, salah satu langkah strategis dalam rangka "Membangun Ketangguhan Bangsa Melalui Upaya Pengurangan Risiko Bencana" yaitu melalui implementasi komitmen dunia dalam pencapaian target global yang tertuang dalam kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana.

   Demikian disampaikan Direktur Managemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) Syafrizal pada special session seminar bertajuk Sosialisasi Kebijakan Teknis Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana. Acara ini dilakukan di Novotel Bangka Hotel and Convention Centre oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada hari Kamis (10/10) dan merupakan salah satu agenda dalam rangkaian acara mengawali Bulan Peringatan Risiko Bencana 2019, di Kepulauan Bangka Belitung.

   Keberadaan Indonesia di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik disatu sisi membuatnya menjadi salah satu negara yang sering terlanda bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, gunungapi dan gerakan tanah. Contoh nyata dari aktivitas ini adalah kejadian bencana besar tahun 2018 yang terjadi susul menyusul mulai dari gempa bumi Lombok pada bulan Juli – Agustus 2018, gempa bumi dan tsunami Palu pada tanggal 28 September 2018, Tsunami Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 dan kejadian longsor Cisolok dipenutup tahun tanggal 31 Desember 2018 sehingga banyak ahli menyebutkan bahwa tahun 2018 sebagai tahun bencana.

   Dampak dari kejadian–kejadian ini membuka kembali lembar sejarah bahwa Indonesia belum cukup memiliki persiapan yang baik dalam upaya (PRB) dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan banyaknya korban dan kerugian harta benda. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini dirasa masih belum maksimal karena masih bersifat parsial dan belum menyentuh semua lini

masyarakat Indonesia. Dari kejadian ini pemerintah mulai lebih memperhatikan upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran yang lebih besar,

Di depan sekitar 150 peserta yang terdiri dari BPBD tingkat kabupatan dan kota, para pembicara menjelaskan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini jelas tertera dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana.

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana'.

Seminar yang diisi juga oleh pembicara dari Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Bappenas ini membahas pentinganya kebijkan penganggaran penanggulangan bencana dalam APBD dan arah perencanaan dan pendanaan nasional tahun 2020-2024 dalam pemenuhan urusan wajib terkait pelayanan dasar pemerintah daerah.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, DR. Raditya Jati, S.Si, M.Si menyatakan bahwa 90% kejadian bencana yang terjadi di Indonesia umumnya merupakan bencana hidrometeorologi. Sedangkan bencana geologi yang paling banyak memakan korban. "Bukan gempanya, tetapi bangunannya yang membunuh. Tahap PRB merupakan tahap yang harus dilakukan karena ini merupakan hal yang paling vital. Mengelola tata ruang

yang memperhatikan daerah rawan tinggi bencana saja setidaknya sudah dapat meminimalisasi jumlah korban," jelasnya.

"Menghadapi kondisi tersebut, seharusnya perlu dilakukan, pertama evaluasi tata ruang pasca bencana. Kedua proyeksi pengembangan, pengkajian perencanaan dan tata ruang wilayah. Ini merupakan investasi PRB," tambah Raditya.

UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana juga menyatakan selain pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.

Maka dalam memahami betul arti penting implementasi Kerangka Sendai perlu diterapkan pendekatan melalui pentahelix pengurangan risiko bencana pada konsep pembangunan, yang meliputi antara lain, pemerintah/pemerintah daerah, akademis/ahli, lembaga usaha, serta organisasi masyarakat sipil, dan media.

Jenis-jenis pelayanan dasar (pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana) yang bisa diperankan oleh para pihak terkait penanggulangan bencana.

Dalam penanggulangan bencana, terutama guna memenuhi SPM sub-urusan bencana, pemerintah perlu dukungan para pihak (*stakeholders*). "Kemitraan pemerintah dengan para pihak terkait penanggulangan bencana harus dibangun, dipelihara dan diperkuat."

Keberhasilan pencapaian SPM sub-urusan bencana dipengaruhi oleh bagaimana BPBD menjabarkan dokumen kajian risiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen rencana

pembangunan daerah dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah (BPBD) sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.

Salah satu tujuan penerapan SPM adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhnya konstitusional setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan diharap melakukan langkah-langkah berikut:

- Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada yang berdimensi PRB atau bentuk kebijakan lainnya sesuai peruu.
- Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyusun dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) sebagaidokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai encaman bencana, nilai kerentanan dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi PRB serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.
- Menginisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana.

2. Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui "FORUM" atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut disebut "FORUM KABUPATEN/KOTA SEHAT" atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

Tatanan : adalah sasaran kegiatan Program Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten.

Kawasan sehat : adalah kondisi wilayah tertentu yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat dikawasan tersebut dengan mengoptimalkan potensi masyarakat dan pekerja, melalui pemberdayaan pelaku pembangunan yang terkait, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah.

Desa sehat : adalah suatu upaya untuk menyehatkan kondisi pedesaan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya dengan mengoptimalkan potensi masyarakat , melalui pemberdayaan kelompok kerja masyarakat , difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan wilayah.

Forum Kabupaten/Kota adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpatisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.

Untuk mendukung kinerja forum, dibentuk "TIM PEMBINA KABUPATEN/KOTA SEHAT" untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah dengan anggota dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.

Forum Komunikasi Desa Sehat adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan kabupaten untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa lainnya diwilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa Sehat mewujutkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni warganya.

Kelompok Kerja (pokja) adalah wadah bagi masyarakat desa / kelurahan di kecamatan perkotaan / di pedesaan atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi kegiatan yang disepakati mereka sehingga dapat mewujutkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan bekerja.

Tujuan :

Tercapainya kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat untuk bekerja dan berkarya bagi warganya dengan terlaksananya berbagai program pembangunan berwawasan kesehatan, sehingga dapat maningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakat .

Tatanan dan sasaran Kabupaten Sehat sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten, dikelompokkan dalam 9 tatanan berdasarkan tatanan/kawasan dan permasalahan khusus sebagai berikut :

1.Tatanan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat
2.Tatanan Sarana Lalu Lintas Tertib & Pelayanan Transportasi sehat
3.Tatanan Industri dan Perkantoran yang Sehat
4.Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat
5.Tatanan Pertambangan Sehat
6.Tatanan Hutan Sehat
7.Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri
8.Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi
9.Tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat.

Dinas/Instansi/lembaga koordinator menjadi penanggung jawab pada tiap-tiap

tatanan, dengan beranggotakan dinas/lembaga lainnya yang mempunyai peran dan fungsi untuk mewujudkan tatanan tersebut menjadi tatanan sehat.

3. Berdasarkan hasil penelitian dalam pemetaan resiko bencana Kabupaten Kampar dengan Karakteristik fisik alami yang relatif rentan terhadap terjadinya bencana dan berkembangnhya kegiatan perekonomian yang pesat diberbagai sector pembangunan berdampak terhadap meningkatnya risiko bencana di Kabupaten Kampar. Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan bahwa 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yaitu Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, **Kampar,** Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kuantan Sengingi, Siak, Dumai dan Kota Pekanbaru dikatagorikan sebagai Kabupaten/Kota dengan kelas rawan Tinggi. Wilayah Kabupaten Kampar merupakan salah Risiko bencana di Kabupaten Kampar dikelompokkan menjadi Risiko bencana akibat kejadian alam, risiko bencana akibat intervensi kegiatan manusia, dan atau risiko bencana akibat kejadian alam dan intervensi kegiatan manusia. Data historis kejadian bencana data hasil survey lapangan, tercatat selama ini menunjukan bahwa terdapat 8 (delapan) jenis bencana di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu banjir, Kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemic dan wabah penyakit, konflik social, kegagalan teknologi dan angin putting beliung. Kejadian bencana tersebut secara khusus menimbulkan risiko bagi kehidupan social-ekonomi masyarakat. Menurut informasi terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Petir dimasukan ke dalam salah satu potensi bencana di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Provinsi Riau merupakan daerah yang rawan terhadap bencana petir, terutama Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
4. Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar diuraikan didalam analisa factor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dipublikasikan pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2016 di Manado adalah :

Beberapa prioritas yang bisa dilakukan untuk menentukan indeks Risiko Bencana Daerah, antara lain :

Prioritas I

Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang efektif untuk membangun ketangguhan di daerah. Regulasi atau payung hukum yang harus dimiliki antara lain.

1. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana
2. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana Daerah
3. Memiliki Perda Forum Pengurangan Resiko Bencana
4. Memiliki Aturan Penyebaran Informasi Kebencanaan
5. Memiliki Perda Rencana Penanggulangan Bencana
6. Memiliki Perda Tata Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana

Prioritas II

Membangun proses perencanaan yang terpadu mempertimbangkan Kajian Risiko Bencana, yaitu :

1. Memiliki kajian risiko bencana dan visualisasi spasial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Memiliki Rencana Penanggulangan Bencana berbasis kajisan Risiko yang diarustamakan kedalam perencanaan pembangunan daerah.

Prioritas III

Mengembangkan system informasi yang terintegrasi dan efektif, yaitu :

1. Memiliki sistem informasi yang menjangkau langsung masyarakat.
2. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi antar tingkat pemerintah dari nasional sampai lokal.

Prioritas IV

Mencukupi kualitas dan kualitas logistik daerah dalam mengantisipasi bencana, yaitu :

1. Memiliki pemahaman kebutuhan logistik daerah untuk setiap ancaman bencana.

2. Pengelolaan logistik dengan melaksanakan efektif dan efisien.
3. Tersedianya pemenuhan kebutuhan hidup di masa darurat.

Prioritas V

Meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana yaitu :

1. Kemampuan memberdayakan masyarakat dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana.
2. Memperkuat penegakan hukum dan optimalisasi kebijakan.
3. Melakukan restorasi dan konservasi sumber daya alam.

Prioritas VI

Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yaitu :

1. Menyiapkan rencana cadangan setiap ancaman bencana.
2. Membangun sistem peringatan dini hulu ke hilir.

Prioritas VII

Mengembangkan sistem pemulihan bencana, yaitu :

1. Membangun infrastruktur penting
2. Membangun pemukiman/rumah penduduk
3. Membangun penghidupan masyarakat

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Secara politis, Tahun 2024 merupakan masa awal jabatan Bupati Kampar dalam mencapai Pembangunan Jangka Menengah 2023 – 2026, dengan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Pencegahan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Kampar seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir perlu dilakukan, melalui peningkatan penataan lingkungan dan kebersihan.

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kampar

Nama PD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Kampar	Persentase Cakupan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100%	17.028.703.724	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Kampar	Persentase Cakupan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100%	19.561.207.277	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Kampar	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.055.122.718	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Kampar	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	13.132.391.866	Kebutuhan Pokok BPBD
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kampar	Indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	177.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kampar	Indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	175.172.750	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	98.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	98.981.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	40.000.000	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	38.200.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.170.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.170.000	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.170.000	
8	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000	Koordinasi danPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	16.481.750	
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.802.142.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.165.526.886**	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.163.265.886	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.142.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2.261.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**181.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**35.209.200**	
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kampar	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125 Paket	180.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kampar	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125 Paket	35.209.200	
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	1.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Paket	70.000.000	
15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.449.155.345**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.508.231.482**	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	19.252.250	Penyediaan Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	35.209.200	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	183.322.225	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	202.158.408	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	101.619.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	118.425.000	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	31.338.870	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	38.815.874	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang yang disediakan	1 Dokumen	6.750.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang yang disediakan	1 Dokumen	6.750.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	100 Laporan	1.106.873.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	100 Laporan	1.106.873.000	
22	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**2.343.966.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**3.020.929.760**	
23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.700.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	2.600.000.000	
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	623.966.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	420.929.760	
25	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	
27	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.833.427.748**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**3.092.583.748**	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	156.258.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	1.156.258.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	167.844.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.509.325.748	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.936.325.748	
31	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.267.531.625**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1.134.738.040**	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	662.734.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	672.146.500	
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	254.797.625	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	312.591.540	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	150.000.000	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar**	**100%**	**4.973.581.006**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar**	**100%**	**6.428.815.411**	**Banyaknya Sub Kegiatan yang Belum tertampung karena Pagu yang belum sesuai kebutuhan**
37	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100%**	**101.000.000**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**100%**	**358.294.940**	
38	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	
39	Sosialiasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	100.000.000	Sosialiasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Kabupaten Kampar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	358.294.940	
40	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100%**	**1.683.385.900**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100%**	**3.874.746.753**	
41	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Bencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Bencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1.245.328.338	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 Orang	200.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	80 Orang	700.830.000	
43	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	
44	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Peralatan Penyelematan Dini bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas	15 Unit	750.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Peralatan Penyelematan Dini bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas	15 Unit	782.779.250	
45	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tingggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	71.500.000	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tingggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	100.000.000	
46	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	71.500.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	289.700.000	
47	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	121.500.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	100.000.000	
48	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	121.500.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 ORang	80.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 ORang	85.792.640	
50	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	100.000.000	
51	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Kampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	82.385.900	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kabupaten Kampar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	120.316.525	
52	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**642.000.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100%**	**1.524.831.910**	
53	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	10.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Laporan	-	
54	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan PalingLama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	10.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan PalingLama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	326.798.000	
55	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	180.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	110.769.300	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	216.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 Orang	442.700.000	
57	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	216.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	531.495.310	
58	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Kampar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	3 Dokumen	10.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kabupaten Kampar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	3 Dokumen	113.069.300	
59	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**100%**	**2.547.195.106**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kabupaten Kampar**	**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**100%**	**670.941.808**	
60	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	
61	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	100.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	50.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	222.495.458	
63	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	3 Dokumen	500.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kabupaten Kampar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	3 Dokumen	150.000.000	
64	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	150.800.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten Kampar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	98.446.350	
65	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Dokumen	1.696.395.106	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Dokumen	200.000.000	
TOTAL					17.028.703.724					19.561.207.277	

Dari keterangan tabel Hasil Analisis Kebutuhan diatas merupakan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk tahun 2024, dimana mengingat sarana operasional untuk penanggulangan bahaya kebakaran belum terpehuni dan memadai serta kegiatan yang mendukung untuk program penanggulangan bencana baik itu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun 2024, merupakan masukan dari internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, disamping merupakan masukan dari instansi terkait, tokoh masyarakat, Ormas/LSM, Musrenbang serta dari pokok pikiran anggota legislatif. Dunia usaha, yang langsung ditujukan kepada kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar berdasarkan hasil pengumpulan informasi, proposal, pendataan dan penelitian lapangan tidak adanya usulan yang diberikan.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
1	***Program Penanggulangan Bencana***	**Kab. Kampar**	**Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar**	**%**	
I	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab. Kampar**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kecamatan**	
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	
2	Sosialisasi, Komunikasi, Infomasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kampar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	
II	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kab. Kampar**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**%**	
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Kampar	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas kebencanaan/pemadaman kebakaran	Unit	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	
6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Kampar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	
7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	Unit	
8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	
9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	
10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Kampar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	
11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	
12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	
III	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kab. Kampar**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	
IV	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kab. Kampar**	**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**%**	
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	
2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6
3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kampar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	
5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kampar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	
6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke berupa pengurangan risiko bencana yang terkandung dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah masih menghadapi tantangan. Untuk itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga yang diamanatkans Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan Fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi harus bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Disadari bahwa kita hidup dan tinggal di daerah rawan bencana. Sudah seharusnya kita harus tangguh menghadapi semua ancaman bencana. Tangguh merupakan kesadaran yang terinternalisasi dalam sebuah komunitas, sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang tinggi dalam menghadapi bencana.

Terbentuknya Kelembagaan Penanggulangan bencana, baik di Pusat maupun di daerahmerupakan wujud fungsi protektif pemerintah dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul terkait bencana. Dasar pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomr 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Ruang lingkup penanggulangan bencana tidak saja pada saat terjadi bencana, namun mulai dari proses deteksi, pencegahan dini hingga pasca bencana.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa potensi bencana terbesar yang terjadi di Indonesia adalah bencana banjir sebesar 45%, selanjutnya angin puting, selanjutnya angin puting beliung sebesar 36 %, dan disusul longsor dengan persentase sebesar 19, Provinsi

Riau termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi bencana terbesar terhadap bencana banjir, angin putting beliung, dan bencana longsor.

Memperhatikan pola hujan di Indonesia ada tiga tipe yakni Ekuatorial, Monsunal, dan Lokal. Wilayah yang tipe hujan Monsunal yaitu sebagaian wilayah Riau, Sumsel, Jambi, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalsel dan Kalteng. Puncak Hujan akan terjadi pada Januari.

Bencana banjir dan longsor merupakan tipe bencana yang slow on set, artinya terjadi secara perlahan namun dapat dideteksi keberadaannya, sehingga kesiapsiagaan bisa dilakukan oleh semua pihak. Dalam menangani bencana banjir dan longsor, BNPB melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga. Diantaranya, Kementerian Kesehatan, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Lpan dan Basarnas.

Secara garis besar, peran dan fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah di tingkat pusat adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana lintas kementerian dan Lembaga.
2. Kementerian Dalam Negeri mengendalikan kegiatan pembinaan pembanguan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
3. Kementerian Luar Negeri mendukung program-program dan kegiatan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan mitra Internasional.
4. Kementerian Pertahanan mendukung pengamanan daerah-daerah yang terkena bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun pasca bencana.
5. Kementerian Hukum dan HAM mendorong peningkatan dan penyelarasan perangkat-perangkat hukum terkait kebencanaan.
6. Kementerian Keuangan penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat dan pasca bencana bencana.
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merecanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait dengan bencana geologi.

8. Kementerian pertanian merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait bidang pertanian.
9. Kementerian kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi khususnya kebakaran hutan/lahan.
10. Kementerian Perhubungan merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi.
11. Bencana Kementerian Kelautan dan perikanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai.
12. Kementerian Pekerjaan Umum merencanakan tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana publik
13. Kementerian Kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medic termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedic
14. Kementerian Pendidikan Nasional merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana.
15. Kementerian Sosial merencanakan kebutuhan pangan, sandang dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi.
16. Kementerian Komunikasi dan Informatika merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana.
17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merencanakan pengarahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.
18. Kementerian Riset dan Teknologi melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggarakan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
19. Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif bagi warga masyarakat miskin di daerah-daerah pasca bencana untuk mempercepat pemulihan.

20. Kementerian lingkungan hidup merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup.
21. Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal merencanakan dan mengendalikan program-program pembangunan di daerah tertinggal yang berdasarkan kajian risiko bencana.
22. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung perencanaan program-program pembangunan yang peka risiko bencana.
23. Kementerian Perumahan Rakyat mengkoordinasikan pengadaan perumahan untuk warga-warga yang menjadi korban bencana.
24. Tentara Nasional Indonesia membantu dalam kegiatan pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian dan menyelenggarakan kegiatan penyarian dan penyelematan (SAR).
25. Kepolisian Republik Indonesia membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.
26. Basarnas mendukung BNPB dakm mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR).
27. Bakosurtanal merencanakan dan mengendalikan pemetaan risiko bencana bekerjasama dengan kementerian/lembaga teknis.
28. BMKG membantu dalam bidang pemantauan potensi bencana yang terkait dengan dengan meteorology, klimatologi dan geofisika.
29. BPPT membantu dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi khususnya teknologi yang berkaitan dengan penanggulagan bencana.
30. BPS membantu dalam bidang penyiapan data-data statistik
31. BPN membantu dalam bidang penyediaan data-data pertanahan.
32. LIPI membantu dalam bidang pengkajian ilmu penegetahuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
33. LAPAN membantu dalam bidang penyediaan informasi dan data spasial khususnya dari satelit.
34. BSN membantu dalam bidang standarisasi pedoman-pedoman maupun panduan penanggulangan bencana.

35. Bapeten membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya nuklir.
36. BATAN membantu dalam bidang pemantauan, pemanfaatan dan pengendalian bahaya akibat tenaga atom.

Dalam situasi normal atau dalam situai tidak terdapat bencana, program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Kegiatan mitigasi structural seperti mambangun tanggulpenahan banjir dan jalu-jalur Evakuasi misalnya saja, menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Persiapan logistik untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang mengungsi dalam situasi darurat menjadi tugas dan tanggung jawab kementerian social.

Dalam situasi normal, BNPB dan BPBD di tingkat daerah lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dn kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan pengurangan risik bencana tertentu akan memerlukan kerjasama antara berbagai intansi seperti sosialisasi system peringatan dini dan pelatihan penggunaannya akan melibatkan dinas pendidikan, perguruan tinggi dan LSM, dengan BNPB/BPBD sebagai coordinator pelaksanaannya.

Dalam situasi darurat BNPB dan BPBD menjalankan fungsi Komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BNPB BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat. Dalam situasi pasca bencana BNPB dan BPBD kembali menjalankan fungsinya dalam hal Koordinasi dan pelaksana kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sector masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan bencana di pusat maupun daerah akan memerlukan koordinasi dengan semua sektor dan unsure masyarakat. Pembagian peran diantara para pemangku kepentingan pengurangan risijo bencana juga akan menjadi hal yang diatur melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana ini.

BNPB memiliki Rencana Kontinjensi Nasional menghadapi Bencana Banjir dan Longsor Tahun 2014/2015. Isinya tentang kebijakan, Strategi,

Koordinasi, komando, upaya yang dilakukan, pengarahan, pengarahan sumber daya. Bencana-bencana tersebut juga telah melanda beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau, dan bahkan ada yang sudah merupakan bencana rutin pada setiap tahun, seperti bencana banjir dan angin puting beliung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan Bencana, upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan pada aspek-aspek yang meliputi ekonomi dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan ekfektivitas serta lingkungan luas daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran Renja OPD BPBD Kabupaten Kampar merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Dalam hal ini, perumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka meralisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sebagai perangkat daerah Kabupaten Kampar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana, dalam kondisi terjadi bencana, maupun pasca terjadinya bencana. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai BPBD Kabupaten Kampar Tahun 2024 :

- Tujuan

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan resiko bencana.
2. Memantapkan pelaksanaan penanggulangan bencana pada setiap tahapan bencana.
3. Meningkatkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur publik pasca bencana.
4. Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan dalam rangka Efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan bencana.

- Sasaran

1. Terwujudnya Kesiapsiagaan dan Kemampuan Pemerintah dalam upaya pengurangan Resiko Bencana.
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penanggulangan yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya fasilitasi dan Koordinasi dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana.
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan Kelembagaan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. Terwujudnya Masyarakat dan Dunia Usaha Peduli Bencana.

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Optimalisasi Penanggulangan bencana	1. Terkoordinasinya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana a. Jumlah regulasi yang disusun b. Jenis data yang dimiliki c. Jumlah masyarakat yang sudah menerima sosialisasi d. Jumlah peralatan yang dimiliki untuk penanggulangan bencana

		2. Terlaksana dan terintegrasinya penanganan tanggap darurat bencana a. Prosentase petugas penanggulangan bencana yang mempunyai skill b. Prosentase masyarakat yang menerima logistik bencana 3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca a. Prosentase infrastruktur/fasilitas umum b. Jumlah kasus trauma heling c. Panjang jalan yang direhabilitasi dan di rekonstruksi d. Jumlah das yang rawan bencana

BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar. Untuk itu, disusun visi dan Misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2023-2026. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut : "Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas Dalam Menanggulangi Bencana"

Tanggap adalah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.

Tangguh adalah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan didalam pengendalian bencana

Terampil adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.

Tuntas adalah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2 Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3 Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4 Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5 Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis (Renstra) OPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 yang telah disusun. Didalam proses Rencana Kerja, Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di Implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja, Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (benchmarks) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2024 pada OPD BPBD Kabupaten Kampar berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam renstra BPBD Kabupaten Kampar 2023-2026, yang terdiri dari :

Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kampar, Pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Kampar adalah sebagai OPD pendukung dalam Pembangunan Kabupaten Kampar 2023-2026.

Selanjutnya jenis-jenis pelayanan dasar (pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana) yang bisa diperankan oleh para pihak terkait penanggulangan bencana.

Dalam penanggulangan bencana, terutama guna memenuhi SPM sub-urusan bencana, pemerintah perlu dukungan para pihak (*stakeholders*). "Kemitraan pemerintah dengan para pihak terkait penanggulangan bencana harus dibangun, dipelihara dan diperkuat."

Keberhasilan pencapaian SPM sub-urusan bencana dipengaruhi oleh bagaimana BPBD menjabarkan dokumen kajian risiko bencana dan dokumen rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah dari RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah (BPBD) sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah terpadu, terstruktur, terarah dan terukur.

Salah satu tujuan penerapan SPM adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhnya konstitusional setiap warga negara. Arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan adalah melalui penerapan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota. SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah.
Pemerintah daerah dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ke depan diharap melakukan langkah-langkah berikut:

- Menyusun regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada yang berdimensi PRB atau bentuk kebijakan lainnya sesuai peruu.
- Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyusun dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) sebagaidokumen dasar yang secara ilmiah menjelaskan mengenai nilai encaman bencana, nilai kerentanan dan nilai kapasitas yang akan menjadi landasan untuk memilih strategi PRB serta menjadi dasar daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana.

Menginisiasi kerjasama daerah yang berbatasan dalam penanggulangan bencana.

Sedangkan program BPBD Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas yang merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan lintas OPD. Oleh karena itu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis ini hanya mencakup program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kampar.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada Rencana Kerja Tahun 2024 pada OPD BPBD Kabupaten Kampar berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra BPBD Kabupaten Kampar 2023-2026 yang terdiri dari :

1. Tersedianya sarana dan prasarana serta data dan informasi tentang penanggulangan bencana.
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan OPD
3. Terlaksananya penyusunan perencananan umum penanggulangan bencana.
4. Terlaksananya pengurangan resiko bencana.
5. Meningkatkan kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
6. Meningkatkan kemampuan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Program-program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis terdiri dari 2 Program, yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah,
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah,
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penanggulangan Bencana
   - Kegiatan Pelayanan Informasi Kabupaten/Kota
     - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian
     - Resiko Bencana Kabupaten/Kota. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Perjenis Bencana.
   - Kegiatan Pelayanna Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
     - Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota,
     - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
     - Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota,
     - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat/TRC Bencana Kabupaten/Kota.
   - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
     - Sub Kegiatan Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
   - Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
     - Sub Kegiatan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota,
     - Sub Kegiatan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kampar

Nama PD : BADAN PENANGGULANGA BENCANA DAERAH

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.561.207.277	APBD		100%	22.783.358.825
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	100%	13.132.391.866	APBD		100%	15.160.128.590
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator: Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	100%	175.172.750	APBD		100%	220.105.400
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	7 Dokumen	98.981.000	APBD		7 Dokumen	128.675.300
1	05	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	38.200.000	APBD		1 Dokumen	45.840.000
1	05	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	7.170.000	APBD		1 Dokumen	8.604.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	7.170.000	APBD		1 Dokumen	8.604.000
1	05	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	7.170.000	APBD		1 Dokumen	8.604.000
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	1 Laporan	16.481.750	APBD		1 Laporan	19.778.100
1	**05**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar**	**100%**	**4.165.526.886**	**APBD**		**100%**	**4.998.632.263**
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	30 Orang/12 bulan	4.163.265.886	APBD		30 Orang/12 bulan	4.995.919.063
1	05	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kampar	1 Dokumen	2.261.000	APBD		1 Dokumen	2.713.200
1	**05**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar**	**100%**	**35.209.200**	**APBD**		**100%**	**42.251.040**
1	05	01	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar	125 Paket	35.209.200	APBD		125 Paket	42.251.040

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	125 Paket	70.000.000	APBD		4 Orang	70.000.000
1	**05**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Kampar**	**100%**	**1.508.231.482**	**APBD**		**100%**	**1.588.503.178**
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Lsitrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	35.209.200	APBD		1 Paket	42.251.040
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	1 Paket	202.158.408	APBD		1 Paket	242.590.090
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	118.425.000	APBD		1 Paket	142.110.000
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kampar	1 Paket	38.815.874	APBD		1 Paket	46.579.049
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang yang disediakan	Kab. Kampar	1 Dokumen	6.750.000	APBD		1 Dokumen	8.100.000
1	05	01	2,06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	Kab. Kampar	100 Laporan	1.106.873.000	APBD		100 Laporan	1.106.873.000
1	**05**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Kampar**	**100%**	**3.020.929.760**	**APBD**		**100%**	**3.625.115.712**

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Unit	2.600.000.000	APBD		1 Unit	3.120.000.000
1	05	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Unit	420.929.760	APBD		1 Unit	505.115.712
1	05	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Unit	0	APBD		1 Unit	0
1	05	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Unit	0	APBD		1 Unit	0
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kampar**	**100%**	**3.092.583.748**	**APBD**		**100%**	**3.323.835.348**
1	5	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kampar	2 Laporan	1.156.258.000	APBD		2 Laporan	1.387.509.600
1	5	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kampar	1 Laporan	0	APBD		1 Laporan	0
1	5	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.936.325.748	APBD		12 Laporan	1.936.325.748
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kampar**	**100%**	**1.134.738.040**	**APBD**		**100%**	**1.361.685.648**

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kampar	6 Unit	672.146.500	APBD		6 Unit	806.575.800
1	5	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kampar	6 Unit	312.591.540	APBD		6 Unit	375.109.848
1	5	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kampar	3 Unit	150.000.000	APBD		3 Unit	180.000.000
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0	APBD		1 Unit	0
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar**	**Kab. Kampar**	**100%**	**6.428.815.411**	**APBD**		**100%**	**7.623.230.235**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Kab. Kampar**	**100%**	**358.294.940**	**APBD**		**100%**	**358.294.940**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Kampar	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03	2.01	02	Sosialiasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		100 Orang	358.294.940	APBD		100 Orang	358.294.940
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kab. Kampar**	**100%**	**3.874.746.753**	**APBD**		**100%**	**4.649.696.104**
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Kab. Kampar	1 Dokumen	1.245.328.338	APBD		1 Dokumen	1.494.394.006
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Kampar	80 Orang	700.830.000	APBD		80 Orang	840.996.000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelematan Dini bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun petugas	Kab. Kampar	15 Unit	782.779.250	APBD		15 Unit	939.335.100

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tingggi Menimbulkan Bencana	Kab. Kampar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kampar	1 Kawasan	289.700.000	APBD		5 Kawasan	347.640.000
1	05	03	2.02	07	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Kampar	15 Orang	100.000.000	APBD		15 Orang	120.000.000
1	05	03	2.02	08	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Kampar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1	5	3	2.02	09	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Kampar	200 ORang	85.792.640	APBD		200 ORang	102.951.168
1	5	3	2.02	10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Kab. Kampar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1	5	3	2.02	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kampar	100 Keluarga	120.316.525	APBD		100 Keluarga	144.379.830
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kab. Kampar**	**100%**	**1.524.831.910**	**APBD**		**100%**	**1.829.798.292**
1	5	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab. Kampar	2 Laporan	0	APBD		2 Laporan	0

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan PalingLama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Kampar	3 Dokumen	326.798.000	APBD		3 Dokumen	392.157.600
1	5	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Kampar	250 Orang	110.769.300	APBD		250 Orang	132.923.160
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Kampar	300 Orang	442.700.000	APBD		300 Orang	531.240.000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kampar	1 Laporan	531.495.310	APBD		1 Laporan	637.794.372
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kab. Kampar	3 Dokumen	113.069.300	APBD		3 Dokumen	135.683.160
1	**05**	**03**	**2.03**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kab. Kampar**	**100%**	**670.941.808**	**APBD**		**100%**	**785.440.900**

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	05	03	2.03	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab. Kampar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1	05	03	2.03	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kab. Kampar	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1	05	03	2.03	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Kampar	1 Dokumen	222.495.458	APBD		1 Dokumen	266.994.550
1	05	03	2.03	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kab. Kampar	3 Dokumen	150.000.000	APBD		3 Dokumen	180.000.000
1	05	03	2.03	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kampar	2 Dokumen	98.446.350	APBD		2 Dokumen	98.446.350
1	05	03	2.03	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Kampar	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	240.000.000
TOTAL									19.561.207.277				22.783.358.825

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah berbagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholder) dalam menciptakan Pemerintahan yang bagus sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kampar adalah Program Tahunan BPBD Kabupaten Kampar yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program BPBD Kabupatn Kampar. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kampar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Kampar. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi sluruh jajaran BPBD Kabupaten Kampar. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD Kabupaten Kampar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat BPBD Kabupaten Kampar selama kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Kampar juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2024. Adapun fungsi dari Renja tahun 2024 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2024 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) BPBD kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Bangkinang, 31 Mei 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN KAMPAR

Drs. AGUSTAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720619 199201 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN
(RENJA P)

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KAMPAR
2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji Syukur Kehadirat Allah SWT kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dan pedoman dasar dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2024 sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2024.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2024 masih belum sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan Rencan Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2024 diucapkan terima kasih.

Bangkinang, Juni 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA



NUR ILAHI ALI, SP.MMA.
NIP: 19690608199803200 2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistimatika Penulisan 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 7
1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 7
1.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD 14
1.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 16
1.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD 24
1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 35
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 38
3.3. Program dan Kegiatan 40

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan OPD 43

BAB V Penutup 47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. ***Rencana Kerja Tahunan*** tersebut merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berkesinambungan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis kegiatan-kegiatan, melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan strategi dan arahan kebijakan Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Kampar mengacu pada strategi dan arahan kebijakan RPJPD Kabupaten Kampar "Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional"

Untuk arahan strategi dan arahan kebijakan dan program kerja OPD maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyusun Rencana Kerja tahun 2024 yang

akan digunakan sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lampiran Negara RI tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Negara RI tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3851);
3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara RI tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4438;
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6322);
11. Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2018 nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1243);
15. Peraturan Menteri Pertanian nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementrian Pertanian tahun 2015-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 21 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2009 nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016 nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 20 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 nomor 6).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2023-2026.

22. Peraturan Bupati Kampar Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar.
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;

29. Perda No.5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024.
2. Sebagai pedoman umum dalam menetapkan perencanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah :

1. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan terarah.
2. Untuk mensinkronkan program atau kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD.

2.2. Analisis kinerja pelayanan OPD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

2.4. Reviuw terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024

2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

3.2. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2023 s/d tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2026
Kabupaten Kampar

Nama OPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Lembar : 1

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra OPD s/d tahun 2021	
								Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Renja OPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Dinas Pertanian Tananaman Pangan Dan Hortikultura									
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaan listrik, telepon dan internet	72 bln	36	12	12	100 %	12	60	83,33 %
			03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36 bln	0	12	12	100 %	12	12	33,33 %
			08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor	72 Bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			12	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu, skalar, fitting dan kabel listrik	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan	36 bln	0	12	12	100 %	12	12	33,33 %

				kantor	kantor								
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi ke Provinsi dan keluar Provinsi	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			19	Penyediaan jasa tenaga harian lepas	Pembayaran honor tenaga harian lepas	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
			07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	36 bln	24	0	0	0	0	24	66,67 %
			23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	72 bln	36	12	12	100%	12	60	83,33 %
			26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya service AC, komputer, printer dan mesn tik	36 bln	24	0	0	0	0	24	66,67 %
			42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi kantor UPTD	5 unit	2	0	0	0	0	2	40 %
		05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
			03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terikutinya bimbingan teknis oleh pegawai	5 thn	2	1	1	100%	1	4	80 %
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP	60 buku	30	10	10	100%	10	50	83,33 %
			04	Penyusunan	Tersusunnya laporan keuangan	60 buku	30	10	10	100%	10	50	83,33 %

				pelaporan keuangan akhir tahun	akhir tahun								
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani									
			03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah penigkatan kelembagaan petani pemula	1820 klpk	600	200	200	100%	200	1000	55 %
			07	Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP)	Jumlah pengembangan usaha agribisnis pedesaan	250 gapoktan	100	0	0	0	0	100	40 %
			08	Pembinaan dan monitoring dana bergulir	Jumlah penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir	1500 org	500	200	200	100%	200	900	60 %
		16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan									
			02	Penyusunan data base potensi produk pangan	Tersedianya data base pertanian	240 buku	80	40	40	100%	40	160	66,67 %
			12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	5thn	2	1	1	100 %	1	4	80 %
			14	Pengembangan desa mandiri pangan	Terlaksaanya pengembangan jagung	175 Ha	60	0	0	0	0	0	0
			17	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Terciptanya sentra produksi pertanian pada lahan kering	5 thn	2	1	1	100 %	1	4	80 %
			18	Pengembangan lumbung pangan desa	Pengembangan padi sawah IP 200	7.338 Ha	3.000	350	350	100 %	350	3.700	50,43 %
			20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Tersedianya benih tanaman pangan dan hortikultura	115 Ha	0	0	0	0	0	0	0
			22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Terkendalinya serangan OPT lebih dini	3.000 Ha	1000	500	500	100 %	500	2.000	66,67 %
			29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Peningkatan produksi, produktifitas tanaman pangan dan hortikultura	5 thn	2	1	1	100 %	1	4	80 %
			32	Peningkatan pengelolaan lahan	Meningkatnya produksi tanaman pangan	220 Ha	70	50	50	100 %	35	155	70,46 %
			34	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan dan air (DAK)	Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan lahan dan air	5 thn	2	1	1	100 %	1	4	80 %

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
			38	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian (sharing dan tugas pembantuan)	Penyediaan dan perlengkapan sarana dan prasarana pertanian	5 thn	2	1	1	100%	1	4	80 %
		17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan									
			07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Jumlah pameran gelar promosi produksi pertanian unggulan daerah	10 kali	4	0	0	0	0	4	40 %
			14	Agribisnis tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya kemampuan agribisnis petani	260 org	80	35	35	100%	40	155	60 %
		18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan									
			02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi petanian /perkebunan tepat guna	Trsedianya sarana dan prasarana pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
			03	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Pembinaan UPJA dan pemeliharaan alsintan	40 UPJA	12	8	8	100 %	8	28	70 %
			04	Peningkatan pengembangan penerapan teknologi pertanian	Terlaksananya metode penerapan teknologi pertanian	5 thn	1	0	0	0	0	1	20 %
			05	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlatihnya petani dalam penerapan teknologi pertanian	155 org	-	-	-	-	-	-	-
		19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan									
			02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Tersedianya sarana produksi pertnian	5 thn	-	-	-	-	-	-	-

			03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Tersedianya potensi bibit unggul pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
		20		Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan									
			01	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian	6 thn	2	1	1	100 %	1	4	66,67 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2024 pelayanan kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi :

1. Pelayanan perizinan penangkar

Pada tahun 2024 pelayanan perizinan penangkar yang dikeluarkan hanya penangkaran hortikultura yang terdiri dari komoditi jeruk manis, durian, mangga, jambu air, jambu biji dan lain-lain, izin penangkar hortikutura yang dikeluarkan ini kebanyakan berasal dari Kecamatan Tambang, Kecamatan Kuok dan Kecamatan Kampar, izin penangkar hortikultura pada tahun 2020 yang sudah dikeluarkan sebanyak 18 izin.

2. Pelayanan jasa Alsintan

Pelayanan jasa Alsintan pada tahun 2024 diutamakan untuk melayani petani dalam penggunaan alat dan mesin pertanian, dimana alat dan mesin pertanian tersebut dialokasikan kepada petani maupun kelompok tani melalui Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) seperti Hand Traktor, Hidro Tiller, Power Threser, Cultivator, Pompa air dan lain-lain.

Tabel : 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pertanian Tananaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar

Sektor Pertanian

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2018 (Ton)	Tahun 2019 (Ton)	Tahun 2020 (Ton)	Tahun 2021 (Ton)	Tahun 2022 (Ton)	Tahun 2019 (Ton)	Tahun 2020 (Ton)	Tahun 2023 (Ton)	Tahun 2024 (Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura		- Padi - Jagung - Cabe - Jeruk	42.017,50 927.60 1.78,40 3.689,40	52.390,70 14.246,20 1.874,67 3.803,30	57.588,00 15.275,60 1.921,53 4.068,40	64.207,05 16.326,70 1.959,97 4.271,82	72.680 17.246,78 2.008,97 4.505,42	36.823,04 10.296,90 2.397,36 14.028,98	57.750,00 15.290,60 2.075,85 14.260,40	31.261 8.508 1.472 15.500	33.696 9.359 1.619 17.442	
2.			Persentase petani yang menerapkan teknologi tepat guna (%)	64.91	68,56	72,67	76,30	80.87	69,52	74,50	62.97	64.91	
3.			Jumlah KK yang menekuni bidang pertanian	44.419	46.639	48.505	50.445	52.969	46.725	48.700	42.642	44.419	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Seiring perkembangan pertanian di Kabupaten Kampar tahun 2024 ada beberapa isu-isu sentral yang berkembang menjadi isu-isu strategis terutama dalam perencanaan pembangunan pertanian empat tahun kedepan (2023-2026) yaitu :

1. Terjadinya alih fungsi lahan.
2. Terbatasnya ketersediaan benih unggul yang bermutu.
3. Belum maksimalnya penerapan teknologi pertanian.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
5. Terbatasnya permodalan untuk mengembangkan usaha tani.
6. Tingkat kehilangan hasil yang masih tinggi akibat bencana banjir, kekeringan dan OPT.

Untuk memberikan gambaran beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD maka perlu dianalisa kondisi internal dan kondisi eksternal melalui metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats)

2.3.1. Faktor Internal = Kekuatan (*Strenghts*)

- Kelembagaan yang kuat

  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar merupakan organisasi yang mempunyai posisi tawar yang strategis untuk melakukan pengelolaan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Posisi ini merupakan kekuatan untuk menjadikan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan di Kabupaten Kampar.

- Dukungan pemimpin

  Komitmen pimpinan untuk menjadikan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar sebagai organisasi yang berkompeten dalam pembangunan Pertanian, merupakan modal dasar yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Konsolidasi internal dengan berbagai bidang untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta konsolidasi eksternal dengan berbagai pihak yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi merupakan langkah yang nyata dalam membangun kompetensi.

- Potensi sumber daya manusia

  Kondisi sumber daya manusia yang berpendidikan SLTA, D4, S1 dan S2 sangat mendukung untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang akan memajukan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Kampar serta sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 63,65 %.

- Ketersediaan dana

  Ketersediaan dana pemerintah yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertanian.

2.3.2. Faktor Internal = Kelemahan (*Weakneses*)

- Sarana dan prasarana pendukung

  Kurangnya sarana dan prasarana pendukung akan berpengaruh pada optimalisasi hasil, keterbatasan sarana dan prasarana unit pengolah data,

sarana transportasi bagi petugas penyuluhan yang berpengaruh pada capaian kinerja yang optimal.

- Penguasaan teknologi

  Pentingnya penguasaan teknologi bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil merupakan faktor yang harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak termasuk dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar. Bimbingan teknis berupa pembinaan dan penyuluhan merupakan cara yang dapat ditempuh dan cukup efisien untuk meningkatkan penguasaan teknologi.
- Permodalan petani yang masih terbatas.
- Informasi Pasar yang lemah

  Akses informasi pasar yang lemah mengakibatkan harga yang diterima petani tanaman pangan dan hortikultura cenderung dipermainkan. Untuk itu perlu digiatkan kembali koperasi sebagai sentra pemasaran dan lebih aktif memantau informasi harga melalui media cetak/elektronik, bursa atau pameran/ekspo.
- Tingkat penyerapan teknologi yang masih rendah.
- Penanganan pasca panen, pembinaan mutu dan pemasaran hasil pertanian.
- Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman pangan dan hortikultura.
- Ketersediaan benih/bibit unggul yang bermutu masih terbatas.

2.3.3. Faktor Eksternal = Peluang (*Opportunities*)

- Meningkatnya kebutuhan produk pertanian yang berkualitas.

Dalam era maju masyarakat semakin sadar bahwa produk pertanian khusunya padi, palawija dan hortikultura harus lebih bermutu serta berkualitas.

- Terbukanya ppasar untuk produk pertanian.

  Di sektor agribisnis pertanian tanaman pangan dan hortikultura masing - masing pelaku usaha memiliki peluang dan pangsa pasar yang baik.

- Peraturan perundang–undangan

  Tersedianya peraturan perundang–undangan yang mendukung mekanisme penyelenggaraan pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Kampar.

- Potensi sumber daya alam

  Potensi sumber daya alam yang sangat besar bagi perkembangan Pertanian, dimana dengan potensi yang cukup luas Potensi Lahan Sawah Tahun 2023 di Kabupaten Kampar seluas 3.080 Ha dengan Lahan sawah yang dimanfaatkan seluas 2.673,34 Ha, yang belum dimanfaatkan seluas 407 Ha,

- Tenaga kerja yang masih tersedia

  Tenaga kerja yang tersedia di bidang pertanian masih cukup banyak dan cukup menjanjikan secara ekonomis selama dikelola secara benar dan profesional.

- Iklim investasi terhadap produk pertanian cukup kondusif.

  Dukungan pemerintah yang sangat positif dalam investasi terhadap produk pertanian sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif.

2.3.4. Faktor Eksternal = Ancaman (*Threats*)

- Kebijakan fiskal

  Terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia dalam memenuhi aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Kampar.

- Kebijakan Moneter

  Kebijakan Perbankan yang kurang berpihak kepada petani berdampak pada sulitnya para pelaku agribisnis pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk mendapatkan bantuan kredit maupun penguatan modal. Keharusan adanya agunan bagi petani yang akan mengajukan kredit perbankan merupakan kendala yang cukup serius karena sebagian besar petani kebun maupun peternak tidak memiliki agunan kredit.

- Penegakan hukum

  Masih lemah penegakan hukum di bidang pertanian diakibatkan karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan masih terbatasnya peraturan pelaksana yang menjadi pegangan aparatur dalam menjalankan tugasnya.

- Fluktuasi Harga

  Produk pertanian memiliki fluktuasi harga yang cukup signifikan. Fluktuasi ini disebabkan pengaruh supply dan demand produk tersebut. Di saat produk melimpah yaitu pada saat panen, harga akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Jika supply produk kurang sedangkan permintaan besar maka harga akan mengalami kenaikan. Harga akan stabil jika petani dapat memprogram produk agar tidak over di pasaran tetapi juga tidak sampai pasar kekurangan stok.

- Lemahnya kelembagaan kelompok tani

Kelembagaan kelompok tani sebagian besar masih lemah, organisasi yang telah dibentuk dan berjalan kurang terkoordinasi, banyak kelemahan didalam pendokumentasian kegiatan organisasinya. Kegiatan - kegiatan yang perlu dicatat / didokumentasikan banyak tidak dilaksanakan pencatatan sehingga kemajuan yang dicapai tidak terbaca dengan jelas.

- Produktivitas hasil pertanian masih rendah
- Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan

  Tingginya persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian baru yang semakin terbatas antar sesama petani / pengusaha yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan lahan secara illegal.

2.3.5. Analisis Strategis

Berdasarkan hasil analisa lingkungan faktor internal dan eksternal, maka ditetapkan strategi pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagai berikut :

1. Strategi (*Strenghts-Opportunities*)

   Strategi pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan hasil analisis Kekuatan (*Strenghts*) dan Peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut :

   - Pemantapan kelembagaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai instansi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
   - Pengkajian dan penerapan teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mampu mengoptimalkan peningkatan produksi dan produktifitas hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

2. Strategi (*Weakneses-Opportunities*)

   Strategi pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan hasil analisis Kelemahan (*Weakneses*) dan Peluang (*Opportunities*) adalah sebagai berikut :

   - Pemberdayaan sumberdaya manusia petani.
   - Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang peka terhadap perkembangan informasi pertanian.

3. Strategi (*Strenghts-Threats*)

   Strategi pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan hasil analisis Kekuatan (*Strenghts*) dan Ancaman (*Threats*) adalah sebagai berikut :

   - Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan sebagai bentuk pelayanan publik di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagai keamanan berusaha.
   - Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

4. Strategi (*Weakneses-Threats*)

   Strategi pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan hasil analisis Kelemahan (*Weakneses*) dan Ancaman (*Threats*) adalah sebagai berikut:

   - Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
   - Penguatan kelembagaan kelompok tani.
   - Pengembangan permodalan petani.
   - Pengembangan jaringan informasi pasar produk hasil pertanian.

- Pemberdayaan pelaku usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap pengendalian lingkungan.
- Peningkatan pengendalian organisme penyakit tanaman (OPT).

Kekuatan (*Strengths*)	**Peluang (*Opportunities*)**
1. Kelembagaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kuat. 2. Dukungan pemimpin. 3. Potensi sumber daya manusia pertanian dan petani yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 63,65 %. 4. Ketersediaan dana pemerintah yang besar dalam pengembangan sektor pertanian	1. Meningkatnya kebutuhan produk pertanian yang berkualitas. 2. Terbukanya pangsa pasar untk produk pertanian. 3. Peraturan perundang-undangan yang mendukung. 4. Potensi sumber daya alam pertanian yang cukup luas sebesar 179.384 Ha. 5. Tenaga kerja yang masih tersedia di bidang pertanian. 6. Iklim investasi terhadap produk pertanian cukup kondusif.
Kelemahan (*Weaknesses*)	**Ancaman (*Threats*)**
1. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian. 2. Ketersediaan benih/bibit unggul yang bermutu masih terbatas. 3. Tingkat penyerapan teknologi yang masih rendah. 4. Penguasaan teknologi yang masih rendah. 5. Informasi pasar yang lemah. 6. Permodalan petani yang masih terbatas. 7. Tingkat kehilangan hasil yang masih tinggi. 8. Pengendalian organisme	1. Kebijakan fiskal. 2. Kebijakan moneter yang kurang berfihak kepada petani. 3. Penegakan hukum yang tidak jelas. 4. Fluktuasi harga komoditi pertanian. 5. Lemahnya kelembagaan kelompok tani. 6. Produktivitas hasil pertanian masih rendah. 7. Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan.

pengganggu tanaman (OPT) masih terbatas.	

2.4. Reviuw terhadap rancangan awal RKPD

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang disusun mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan terakhir melalui Musyawarah Perencanan Pembangunan Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun merupakan rencana program dan kegiatan tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.4

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. KAMPAR TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							**31.164.592.676,00**	**31.234.314.717,00**	**32.719.549.851,00**	**1.554.957.175,00**							**35.344.751.714,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**31.164.592.676,00**	**31.234.314.717,00**	**32.719.549.851,00**	**1.554.957.175,00**							**35.344.751.714,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**31.164.592.676,00**	**31.234.314.717,00**	**32.719.549.851,00**	**1.554.957.175,00**							**35.344.751.714,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**				**100 Porsen**	**100 Porsen**	**20.578.988.482,00**	**24.710.846.989,00**	**26.196.125.023,00**	**235.632.135,00**							**20.814.620.617,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Laporan Kinarja OPD*				100 Porsen	100 Porsen	7.236.285,00	7.235.600,00	7.235.600,00	-685,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Laporan Kinerja Kegiatan, keuangan dan laporan akhir Tahunan		6.237.285,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.236.285,00	7.235.600,00	7.235.600,00	-685,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			6.237.285,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN, P3K dan laporan keuangan OPD*				100 porsen	100 porsen	16.474.207.212,00	19.612.776.639,00	21.098.055.518,00	4.623.848.306,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Laporan Akhir Keuangan dan pembayaran gaji,tunjangan ASN dan P3K		16.474.207.212,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				151 Orang/ bulan	151 Orang/ bulan	16.467.971.927,00	19.606.344.839,00	21.091.623.718,00	4.623.651.791,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			16.467.971.927,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.235.285,00	6.431.800,00	6.431.800,00	196.515,00	Kab. Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			6.235.285,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Meningkatnya Disiplin perkantoran*				100 Porsen	100 Porsen	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Terlaksananya perlengkapan perkantoran dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				150 Paket	150 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan perkantoran*				100 Porsen	100 Porsen	1.009.161.699,00	1.469.137.800,00	1.479.137.800,00	469.976.101,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Jasa Komunikasi, air dan listrik, jasa peralatan kantor dan jasa pelayanan Umum kantor		882.915.058,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	7.243.632,00	7.243.500,00	7.243.500,00	-132,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			7.967.955,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	219.535.283,00	368.510.800,00	378.510.800,00	158.975.517,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			241.488.811,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	199.557.530,00	199.508.000,00	199.508.000,00	-49.530,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			122.079.785,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25.701.552,00	150.921.500,00	150.921.500,00	125.219.948,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			28.271.707,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	20.790.000,00	221.400.000,00	221.400.000,00	200.610.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			20.790.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	536.333.702,00	521.554.000,00	521.554.000,00	-14.779.702,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			462.316.800,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Kenderaan Dinas Jabatan, Kenderaan Operasional dan Alat Mesin Pertanian*				100 Porsen	35 unit	800.000.000,00	1.551.386.400,00	1.551.386.400,00	751.386.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Pengadaan kenderaan dinas Jabatan, Kenderaan Operasional dan alat mesin Pertanian		1.050.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	35 Unit	800.000.000,00	1.551.386.400,00	1.551.386.400,00	751.386.400,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuhinya kebutuhan perkantoran dan terlaksananya pembayaran Honorarium THL dan Petugas lainnya*				100 Porsen	100 Porsen	1.649.095.514,00	1.663.234.150,00	1.653.233.305,00	4.137.791,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Jasa telekominikasi,air, listrik, jasa peralatan kantor dan jasa pelayanan umum kantor		1.658.300.065,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	85.054.200,00	85.364.750,00	75.363.905,00	-9.690.295,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			93.559.620,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.991.314,00	41.139.000,00	41.139.000,00	34.147.686,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			7.690.445,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.557.050.000,00	1.536.730.400,00	1.536.730.400,00	-20.319.600,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.557.050.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Aset Dinas*				100 Porsen	100 Porsen	639.287.772,00	407.076.400,00	407.076.400,00	-232.211.372,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Pemeliharaan dan pajak kenderaan Dinas Jabatan dan Operasional dan Rehabilitasi Perkantoran		542.960.997,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	69.101.172,00	85.017.200,00	85.017.200,00	15.916.028,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			76.011.289,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	70.186.600,00	105.209.200,00	105.209.200,00	35.022.600,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			76.949.708,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	500.000.000,00	216.850.000,00	216.850.000,00	-283.150.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			390.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.037.493.720,00**	**549.947.200,00**	**628.137.900,00**	**-446.250.629,00**							**591.243.091,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Terlaksananya pengawasan dan Perawatan Mesin Alsintan dan Pembinaan UPJA*				100 Porsen	100 Porsen	1.037.493.720,00	549.947.200,00	628.137.900,00	-409.355.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	UPJA dan Alsintan		591.243.091,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	3 Laporan	219.480.045,00	199.997.200,00	278.187.900,00	58.707.855,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			131.428.049,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				21 Laporan	21 Laporan	818.013.675,00	349.950.000,00	349.950.000,00	-468.063.675,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			459.815.042,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.250.931.984,00**	**3.854.383.203,00**	**3.854.383.203,00**	**4.022.866.853,00**							**12.273.798.837,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya pengembangan tanaman padi dan sarana saprodi lainnya*				100 Porsen	100 Porsen	1.522.833.515,00	883.273.382,00	883.273.382,00	-639.560.133,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Palawija tanaman Hortikultura dan pemurnian Varietas dan sarana pendukung pertanian		1.227.350.207,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	2 Laporan	375.134.978,00	242.714.882,00	242.714.882,00	-132.420.096,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			375.134.978,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	897.698.537,00	640.558.500,00	640.558.500,00	-257.140.037,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			602.215.229,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi, jalan Usaha tani lainya*				100 Porsen	100 Porsen	6.728.098.469,00	2.971.109.821,00	2.971.109.821,00	-3.756.988.648,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Jalan Usaha tani dan Jaringan Irigasi dan pembangunan Lainnya		11.046.448.630,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			650.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	21 Unit	860.924.469,00	1.008.349.821,00	1.008.349.821,00	147.425.352,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			315.718.606,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	5 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	198.000.000,00	0,00	0,00	-198.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	21 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	21 Unit	3.879.174.000,00	1.962.760.000,00	1.962.760.000,00	-1.916.414.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			7.579.174.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				21 Unit	21 Unit	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.601.556.024,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**150.012.640,00**	**300.487.025,00**	**300.487.025,00**	**349.987.360,00**							**500.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Terpenuhinya pengendalian penyakit tanaman pertanian*				100 Porsen	100 Porsen	150.012.640,00	300.487.025,00	300.487.025,00	150.474.385,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Lahan bidang pertanian		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1000 Ha	1000 Ha	150.012.640,00	300.487.025,00	300.487.025,00	150.474.385,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**132.568.910,00**	**235.433.500,00**	**157.199.900,00**	**13.256.891,00**							**145.825.801,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pembinaa dan pengawasan izin usaha pertanian*				100 Porsen	100 Porsen	132.568.910,00	235.433.500,00	157.199.900,00	24.630.990,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Penerapan Izin Usaha Pertanian		145.825.801,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				2 Laporan	2 Laporan	132.568.910,00	235.433.500,00	157.199.900,00	24.630.990,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			145.825.801,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.014.596.940,00**	**1.583.216.800,00**	**1.583.216.800,00**	**4.666.428,00**							**1.019.263.368,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Terlaksananya peningkatan SDM Petugas Penyuluh Pertanian*				100 Porsen	100 Porsen	1.014.596.940,00	1.583.216.800,00	1.583.216.800,00	568.619.860,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Petugas Penyuluh Lapangan dan Petani		1.019.263.368,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				271 Unit	271 Unit	497.932.659,00	1.172.957.300,00	1.172.957.300,00	675.024.641,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			497.932.659,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1820 Unit	1820 Unit	246.664.281,00	410.259.500,00	410.259.500,00	163.595.219,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			271.330.709,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				21 Unit	21 Unit	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	J U M L A H								**2.165.481.158.592,00**	**2.899.838.280.550,00**	**3.305.433.318.835,00**	**1.139.952.160.243,00**							**2.684.224.072.030,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat dikumpulkan melalui acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kampar (Musrenbangcam) setiap tahunnya, dan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5. Usulan program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar.

Tabel 2.5. Usulan program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kampar.

Nama OPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar.

NO	PROGRAM/KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2		3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan dan pengadaan dan Rehabilitasi prasarana lainya dan perkantoran Bidang Pertanian	Kampar Utara	pengadaan alat mesin pertanian	1 unit	
		Pembangunan dan pengadaan dan Rehabilitasi prasarana lainya dan perkantoran Bidang Pertanian	Kampar Utara	Pengadaan Four Whell Tractor / Traktor Roda Empat	1 unit	
		Pembangunan dan pengadaan dan Rehabilitasi prasarana lainya dan perkantoran Bidang Pertanian	Salo	pengadaan alat mesin pertanian (Handtractor)	1 unit	Tahapan Verifikasi kecamatan
		Pembangunan dan pengadaan dan Rehabilitasi prasarana lainya dan perkantoran Bidang Pertanian	Perhentian Raja	Pengadaan Handtractor	2 unit	
		Pembangunan dan pengadaan dan Rehabilitasi prasarana lainya dan perkantoran Bidang Pertanian	Siak Hulu	Rehabilitasi sedang perkantoran	1 unit	
2.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengambangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Kampar Kiri Hulu	Pengembangan komoditi Hortikultura	1 Keg	
		Pengambangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Tambang	Pengembangan komoditi Hortikultura	1 Keg	Tahapan Verifikasi kecamatan
3.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengembangan padi sawah sawah	Tambang	pengadaan saprodi pertanian	1 Keg	Tahapan Verifikasi kecamatan
		Pengembangan padi sawah sawah	Kampar Utara	pengadaan saprodi	1 Keg	

				pertanian		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	Siak Hulu	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	200 m	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	Tambang	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	200 m	Tahapan Verifikasi kecamatan
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	Kampar	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	200 m	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	Rumbio Jaya	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	200 m	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	Kuok	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	200 m	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Kampar Kiri	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	Salo	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	133 m3	Tahapan Verifikasi kecamatan
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Siak Hulu	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Salo	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	Tahapan Verifikasi kecamatan
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Tambang	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Tambang	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Tambang	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan	Kampar Kiri	Pembangunan	133 m3	

		pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Hilir	dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.		
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	Salo	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Tambang	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Tambang	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Kuok	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
		Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	Bangkinang	Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Jalan Usaha tani.	133 m3	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan dan pengadaan dan Rehabilitasi prasarana lainya dan perkantoran Bidang Pertanian	Bangkinang	Pembangunan Saung / Balai pertanian untuk kelompok tani desa muara uwai,karena selama ini kelompok tani atau petani khusus nya petani padi belum memiliki saung/balai pertemuan	1 unit	
4.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**					
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Penyakit Tanaman pangan, dan Alat Pengukur bidang pertanian lainnya.	Siak Hulu	Terdapat kelompok tani yang gagal panen dikarenakan ketidaktahuan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman serta tidak mempunyai alat pendukung pengukur pH tanah	1 Tahun	

		Pengendalian Penyakit Tanaman pangan, dan Alat Pengukur bidang pertanian lainnya.	Salo	pengadaan obat obat dan alat pertanian lainnya	1 Tahun	
		Pengendalian Penyakit Tanaman pangan, dan Alat Pengukur bidang pertanian lainnya.	Rumbio Jaya	pengadaan obat obat dan alat pertanian lainnya	1 Tahun	
5.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas dan Kebutuhan SDM Tenaga Penyuluh Pertanian, P3K, PPL Swadaya dan Pembinaan KTNA.	Siak Hulu	Meningkatkan kapasitas petani	1 Tahun	
		Peningkatan Kapasitas dan Kebutuhan SDM Tenaga Penyuluh Pertanian, P3K, PPL Swadaya dan Pembinaan KTNA.	Koto Kampar Hulu			
		Peningkatan Kapasitas dan Kebutuhan SDM Tenaga Penyuluh Pertanian, P3K, PPL Swadaya dan Pembinaan KTNA.	Bangkinang Kota	kapasitas SDM KWT Kenanga Belum Mencukupi	1 Tahun	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Kampar sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra Kementerian Pertanian RI tahun 2015-2022 yang terdiri dari 1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, 4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, 5) Peningkatan pendapatan keluarga petani, 6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar pada tahun 2024 merencanakan program peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Tanaman pangan yang menjadi titik fokus dalam pembangunan pertanian tanaman pangan adalah padi, jagung dan kedelai, sedangkan untuk hortikultura adalah jeruk, nenas dan cabe, dengan demikian semua program/kegiatan prioritas di seluruh provinsi dan kabupaten/kota harus merujuk pada program prioritas Kementerian Pertanian RI ini, sedangkan untuk mendukung program dan kegiatan tersebut tak kalah pentingnya yaitu peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, peningkatan

infrastruktur dan sarana pertanian, pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, penguatan kelembagan petani, pengembangan dan penguatan pembiayaan, pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi serta penguatan jaringan pasar dan produk pertanian.

Kementerian Pertanian RI menggerakkan seluruh kegiatannya lewat 4 Direktorat Jenderal yaitu :

1. Ditjen Tanaman Pangan

   Pelaksanaan program/kegiatan yang didukung pendanaan lewat dana Tugas Pembantuan Tanaman Pangan (APBN), melalui Ditjen ini terdapat kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale), kategori pelaksanaan kegiatan ini di Kabupaten Kampar adalah untuk kawasan pengembangan dan pemantapan yang dilaksanakan dengan sistim jajar legowo untuk padi sawah, pengembangan kawasan jagung yang diberikan kepada petani dalam bentuk bantuan sarana produksi.
2. Ditjen Tanaman Hortikultura

   Pelaksanaan program/kegiatan yang didukung pendanaan lewat dana Tugas Pembantuan Tanaman Pangan (APBN), melalui Ditjen ini terdapat kegiatan pengembangan cabe, bawang merah dan jeruk.
3. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

   Pelaksanaan program/kegiatan yang didukung pendanaan lewat dana Tugas Pembantuan PSP adalah Optimalisasi lahan mendukung tanaman pangan dan hortikultura, Pengembangan System Rice of Intensification (SRI), Pengadaan Alsintan, Pembinaan PUAP, Pembinaan P3A, Pembangunan Embung/Dam Parit, Pembangunan/Rehab Jaringan Irigasi.
4. Ditjen Pengolahan Hasil dan Pasca Panen

Bentuk dukungan dana untuk pelaksanaan program/kegiatan melalui ditjen ini adalah Pelatihan Petani pengolah kripik nenas dan kripik nangka, Pengadaan Mesin Pengolah padi (RMU, Power Threser), pengadaan sabit bergerigi, pelatihan packaging produk pertanian

Sedangkan program Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 yang berhubungan dengan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura antara lain :

1. Menguatkan dan memantapkan jaringan infrastruktur.
    - Perbaikan/penyediaan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi dan jalan produksi) terutama di sentra produksi tebu dan kapas, pembuatan sumur resapan, sumur dalam dan dangkal, embung, pengadaan pompa air, springkler, pencetakan lahan tebu dan kapas serta pengadaan traktor, pengadaan pupuk dan inventasi.
2. Menurunkan angka kemiskinan
    - Peningkatan pendapatan keluarga petani.
3. Peningkatan daya saing perekonomian.
    - Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan subtitusi impor.
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan
    - Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

3. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.
4. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian pada kelompok tani
5. Memberbaiki dan membangun infrastruktur pertanian dan perbenihan.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian.
7. Menumbuhkan kawasan-kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

3.2.2. Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.
3. Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui perbaikan mutu produk pertanian.
4. Terwujudnya penerapan teknologi perkebunan
5. Terwujudnya perbaikan infrastruktr pertanian dan perbenihan.
6. Terwujudnya sarana dan prasarana pertanian sebagai komponen pendukung.
7. Terwujudnya kawasan-kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 3.2. Hubungan isu, tujuan dan sasaran Rencana Kerja

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Kampar.

No	ISU	TUJUAN	SASARAN	KET
1	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	
2	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	
3	Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani	Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani	
4	Peningkatan penerapan teknologi melalui sarana dan prasarana pertanian	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian	Terwujudnya penerapan teknologi pertanian	
		Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pertanian	
5	Penumbuhan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Menumbuhkan kawasan-kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Terwujudnya kawasan-kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	

3.3. Program dan Kegiatan

Program Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian disektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan untuk peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) dan hortikultura (bawang merah, cabe dan jeruk) untuk mendukung program nasional dalam rangka mencapai swasembada beras dan berjaya hortikultura. Dengan melihat potensi lahan dan kondisi agroklimat Kabupaten Kampar sangat menjanjikan di masa depan untuk mempertahankan dan melindungi lahan pangan demi ketersediaan beras sebagai komoditi pokok dan produk hortikultura unggulan untuk memenuhi kebutuhan perkapita penduduk Kabupaten Kampar.

Program/kegiatan dari Ditjen Tanaman Pangan :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk mencapai Swasembada Pangan dengan kegiatan :

1. Pengelolaan Produksi Tanaman padi
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
3. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka kacang dan Umbi
4. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
5. Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman pangan

Program /Kegiatan Ditjen Tanaman Hortikultura :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan dengan kegiatan :

1. Peningkatan produksi, produkivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan (Pengembangan Jeruk)
2. Pengembangan kawasan tanaman sayuran (bawang merah dan cabe)

Program/kegiatan Ditjen PSP :

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan kegiatan :

1. Pengembangan jaringan irigasi mendukung tanaman
2. Pemberdayaan kelembagaan P3A mendukung tanaman pangan
3. Pengembangan Optimalisasi Lahan mendukung tanaman pangan dan hortikultura
4. Pengembangan SRI mendukung tanaman pangan
5. Pembinaan PUAP.

Beberapa program yang mendukung upaya peningkatan produksi padi, palawija dan hortikultura yang sejalan dengan program nasional adalah :

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Sub Kegiatan :
- Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
- Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan :
- Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B
- Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya

b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

- Sub Kegiatan :
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Program PerizinanUsaha Pertanian

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

Program Penyuluhan Pertanian

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2024 berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

BAB V PENUTUP

Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Kampar adalah menselaraskan antara usulan yang datang dari masyarakat dengan perencanaan kegiatan yang dianjurkan atau didukung oleh sumber dana APBD Propinsi dan APBN. Bila dalam penganggaran di tingkat Kabupaten tidak bisa dilaksanakan seluruh kegiatan yang telah diusulkan perlu dilakukan perhatian lebih pada pengajuan e-proposal pengajuan usulan lewat sumber dana diluar APBD II. Catatan penting lainnya dalam pelaksanaan kegiatan diluar yang dianggarkan lewat APBD II yaitu APBD I dan APBN adalah diperlukannya komitmen yang jelas dan tegas dari pemerintah daerah dalam hal ini pelaksana kegiatan pertanian dikabupaten Kampar untuk dapat mempertahankan kinerja yang baik sebagai bahan evaluasi yang baik untuk pengusulan kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarkat Kabupaten Kampar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan bisa dijadikan acuan untuk diselaraskan dengan program nasional.

Lampiran 1 : Potensi Lahan Sawah di Kabupaten Kampar Tahun 2021.

No	Kecamatan	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)
1.	Kampar Kiri	129	103	26
2.	Kampar Kiri Hulu	-	-	-
3.	Kampar Kiri Hilir	-	-	-
4.	Gunung Sahilan	-	-	-
5.	Kampar Kiri Tengah	-	-	-
6.	XIII Koto Kampar	10	-	10
7.	Koto Kampar Hulu	140	140	-
8.	Kuok	600	548	52
9.	Salo	377	377	-
10.	Tapung	54	54	-
11.	Tapung Hulu	17	17	-
12.	Tapung Hilir	58	20	38
13.	Bangkinang Kota	-	-	-
14.	Bangkinang	347	347	20
15.	Kampar	703	603	100
16.	Kampa	437	437	-
17.	Rumbio Jaya	182	182	-
18.	Kampar Utara	473	320	153
19.	Tambang	515	515	-
20.	Siak Hulu	500	95	405
21.	Perhentian Raja	-	-	-
Jumlah		**4.542**	**3.758**	**784**

Lampiran 2 : Potensi Lahan Sawah Data Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

No	Kecamatan	Luas Baku (Ha)
1.	Kampar Kiri	129
2.	Kampar Kiri Hulu	-
3.	Kampar Kiri Hilir	-
4.	Gunung Sahilan	
5.	Kampar Kiri Tengah	
6.	XIII Koto Kampar	5.2
7.	Koto Kampar Hulu	-
8.	Kuok	278.8
9.	Salo	307.4
10.	Tapung	53.7
11.	Tapung Hulu	16.7
12.	Tapung Hilir	-
13.	Bangkinang Kota	1.7
14.	Bangkinang	387.4
15.	Kampar	517.2
16.	Kampa	368.8
17.	Rumbio Jaya	167.9
18.	Kampar Utara	314.1
19.	Tambang	468.7
20.	Siak Hulu	204.8
21.	Perhentian Raja	-
Jumlah		**3.220**

Lampiran 3 : Potensi Lahan Kering di Kabupaten Kampar Tahun 2021.

No.	Kecamatan	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Belum Dimanfaatkan (Ha)
1.	Kampar Kiri	43,288	23,987	19,310
2.	Kampar Kiri Hulu	12,197	3,732	8,465
3.	Kampar Kiri Hilir	29,057	8,895	20,162
4.	Gunung Sahilan	3,332	1,732	1,600
5.	Kampar Kiri Tengah	2,640	2,440	200
6.	XIII Koto Kampar	14,863	938	13,925
7.	Koto Kampar Hulu	4,621	3,213	1,408
8.	Kuok	2,863	2,571	292
9.	Salo	2,591	1,511	1,080
10.	Tapung	19,742	16,896	2,846
11.	Tapung Hulu	7,725	7,630	95
12.	Tapung Hilir	14,155	5,018	9,137
13.	Bangkinang Kota	6,991	2,801	4,190
14.	Bangkinang	2,071	1,651	420
15.	Kampar	2,764	2,664	100
16.	Kampa	2,738	2,713	25
17.	Rumbio Jaya	3,101	3,051	50
18.	Kampar Utara	1,773	936	837
19.	Tambang	13,534	10,434	3,100
20.	Siak Hulu	3,967	3,047	920
21.	Perhentian Raja	2,006	1, 574	432
Jumlah		**196,019**	**107,425**	**88,594**

Lampiran 4 : Data Jumlah Kelompok Tani menurut Kelas di Kab. Kampar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok	Kelas Kelompok					Jumlah Anggota
			Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Dikukuhkan	
1.	Kampar Kiri	96	79	3	0	0	14	2,190
2.	Kampar Kiri Hulu	92	61	14	0	0	17	1,732
3.	Kampar Kiri Hilir	67	60	5	0	0	2	1,453
4.	Gunung Sahilan	130	61	3	0	0	39	2,512
5.	Kampar Kiri Tengah	119	62	14	0	0	17	2,346
6.	XIII Koto Kampar	146	119	24	1	0	2	3,648
7.	Kuok	135	95	25	6	0	9	3,849
8.	Salo	71	49	15	3	0	4	2,742
9.	Tapung	476	464	2	0	0	10	6,605
10.	Tapung Hulu	252	242	2	0	0	7	3,742
11.	Tapung Hilir	317	294	12	0	0	11	5,825
12.	Bangkinang Kota	56	33	6	2	0	14	834
13.	Bangkinang	181	107	49	14	1	10	3,930
14.	Kampar	130	73	33	7	0	17	2,990
15.	Kampa	79	54	24	1	0	0	2,062
16.	Rumbio Jaya	116	27	66	11	0	12	2,654
17.	Kampar Utara	104	60	29	5	0	9	2,182
18.	Tambang	106	58	29	1	0	18	2,559
19.	Siak Hulu	117	92	23	1	0	2	1851
20.	Perhentian Raja	93	81	3	0	0	9	1,901
21.	Koto Kampar Hulu	73	59	8	0	0	6	2,110
Jumlah		**2,956**	**2,230**	**416**	**53**	**1**	**253**	**5,863**

A PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Buku Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27 dan Pasal 40 Ayat (5)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahan daerah.

12. Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau telah dicapai.

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep ***Value for Money***. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. ***Indikator Masukan (Input)***, yaitu indikator yang mengambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia , maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. ***Indikator keluaran (Output)***, yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. ***Indikator hasil (Outcome)***, yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisiensi. Selanjutnya, seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif. Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penilaian (muliti years effect).

Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tahun 2022. Input yang dimaksud disini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam upaya mencapai tujuan, misi dan visi daerah.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

TABEL 2-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

KABUPATEN KAMPAR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (OutPout)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Hasil Program (Renstra PD) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capain Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
2					**Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan**									
2	**07**				**Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja**									
2	**07**	**03**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**									
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**									
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Penyuluhan RTK Mikro	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

2	**07**	**03**			**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**									
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**									
2	07	03	2.01	01	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Kompeten	32 Orang	16 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	32 Orang	68 Orang	2.125%
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Kompeten	32 Orang	-	-	-	-	32 Orang	32 Orang	100%
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**									
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Terbitnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**									
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan	Jumlah izin yang diberikan kepada Lembaga	5 Perizinan	-	-	-	-	5 Perizinan	5 Perizinan	100%

					Kerja Secara Terintegrasi	Pelatihan Kerja							
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**								
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	10 Kali	-	-	-	-	10 Kali	10 Kali	100%
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	3 Kali	-	-	-	-	3 Kali	3 Kali	100%
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar kerja	Persentase Pelayanan Antar Tenaga Kerja	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Pelayanan Antar Tenaga Kerja	12 Bulan	-	-	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	100%
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Pelayanan Antar Tenaga Kerja	12 Bulan	-	-	-		12 Bulan	12 Bulan	100%
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Persentase Pelayanan Antar	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%

					Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja							
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pelayanan Antar Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	36 Bulan	100%
2	07	04	2.02		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Kabupaten Kampar	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Kabupaten Kampar	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**									
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya Informasi Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	36 Bulan	100%

2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terlaksananya Informasi Tenaga Kerja	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	12 Bulan	36 Bulan	100%
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Kabupaten Kampar	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Kabupaten Kampar	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Kabupaten Kampar	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	100%
2	07	05			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**									
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi	Jumlah Perusahaan yang	20 Perusahaan	-	-	-	-	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100%

					Perusahaan	melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di Kabupaten Kampar								
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di Kabupaten Kampar	15 Perjanjian	15 Perjanjian	-	15 Perjanjian	-	15 Perjanjian	45 Perjanjian	100%
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di Kabupaten	20 Perusahaan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	20 Perusahaan	-	-

						Kampar								
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**									
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	15 Kasus	50 Kasus	-	50 Kasus	-	15 Kasus	115 Kasus	100%
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	115 Kasus	50 Kasus	-	50 Kasus	-	15 Kasus	115 Kasus	100%
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaran Verivikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha,	Jumlah Perselisihan yang dicegah	45 Serikat	15 Serikat	-	15 Serikat	-	15 Serikat	45 Serikat	100%

					Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi									
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	15 Perkara	-	-	-	-	15 Perkara	15 Perkara	100%
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Perselisihan yang dicegah	15 Perkara	-	-	-	-	15 Perkara	15 Perkara	100%
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
3	**31**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
3	31	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	7 Dokumen	11 Dokumen	100%
3	31	01	2.01	02	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	1	-	1 Dokumen	-	7	11 Dokumen	100%

					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen				Dokumen		
3	31	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	7 Dokumen	11 Dokumen	100%
3	31	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	7 Dokumen	8 Dokumen	100%
3	31	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	7 Dokumen	8 Dokumen	100%
3	31	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan,	7 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	7 Dokumen	9 Dokumen	100%

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	7 Dokumen	9 Dokumen	100%
3	31	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	100%
3	31	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya laporan keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	100%

						akhir tahun PD								
3	31	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Bulan	1 Dokumen		1 Dokumen		12 Bulan		100%
3	**31**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
3	31	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
3	31	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Administrasi	12 Orang	10 Orang		-		12 Orang	22 Orang	100%

						Kepegawaian Perangkat Daerah								
3	**31**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	100%
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	100%
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	100%
3	31	01	2.06	15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	100%
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	100%

						Daerah							
3	31	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	36 Bulan	100%
3	**31**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**									
3	31	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat	1 Unit	-		-		1 Unit	1 Unit	100%
3	31	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat	1 Unit	-		-		1 Unit	1 Unit	100%
3	31	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat	1 Unit	-		-		1 Unit	1 Unit	100%
3	**31**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa	Persentase	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%

					Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan								
3	**31**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%
3	31	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset tak berwujud	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%

3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**									
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**									
3	31	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terealisasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terealisasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terealisasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**									
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**									
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%

					Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pembinaan Terhadap IUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten								
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembinaan Terhadap IUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten	12 Bulan	12 Bulan		-		12 Bulan	24 Bulan	100%	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**										
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**										
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	Terpenuhinya Informasi Industri untuk IUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan	1 Tahun	1 Dokumen		-		1 Tahun		100%	

					serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Kampar							
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terpenuhinya Informasi Industri untuk IUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	1 Dokumen		-		1 Tahun		100%
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Informasi Industri untuk IUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kampar	1 Tahun	-		-		1 Tahun		100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Tugas Pokok dan Fungsi utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perindustrian dan bidang Tenaga Kerja yang meliputi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar;
b. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah (BUPATI KAMPAR) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Kontribusi PDRB Sektor Industri			31.75%	32.37%							
2.	Penuruna TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada sektor ekonomi unggulan daerah											

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisa SWOT.

LINGKUNGAN INTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
1. Dukungan jumlah anggaran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana 3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengaturdengan jelas menyangkut eksistensi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4. Visi dan Misi Kepala Daerah yang mengedepankan industri	1. Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan. 2. Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan pengembangan SDM.
Kelemahan (Weaknesses)	Ancaman (Threats)

1. Kurangnya data yang valid tentang jumlah industri baik industri kecil maupun industri menengah. 2. Kedislipinan pegawai yang kurang. 3. Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas. 4. Kurangnya partisipasi perusahaan tentang jumlah lowongan pekerjaan	1. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi tepat guna 2. Meningkatnya daya kritis Masyarakat 3. Jumlah produksi IKM yang cendrung tidak meningkat 4. Masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Kabupaten Kampar

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau critical success faktor adalah :

a. Kemampuan anggaran serta infrastruktur yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.
b. Pengembangan SDM aparatur serta anggota dewan dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas.
c. Perkembangan teknologi informasi perlu mendapatkan intervensi positif dari pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
d. Meningkatkan kedislipinan aparatur untuk menghindari sikap kritis masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemrintah untuk satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

.

TABEL 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Kampar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**				Rp. 225.000.000,00	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**				Rp. 225.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				Rp. 225.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				Rp. 225.000.000,00	
I	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				Rp. 1.700.000.000,00	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				Rp. 1.700.000.000,00	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				Rp. **1.550.000.000,00**	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				Rp. **1.550.000.000,00**	

	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. **100.000.000,00**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				Rp. **100.000.000,00**	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Rp. 490.000.000,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				Rp. 490.000.000,00	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 250.000.000,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 250.000.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				Rp. 210.000.000,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				Rp. 210.000.000,00	
I	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 30.000.000,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 30.000.000,00	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Rp. 725.000.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				Rp. 725.000.000,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi				Rp. 345.000.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi				Rp. 345.000.000,00	

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 380.000.000,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 380.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. **6.808.721.197,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp. **6.808.721.197,00**	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 255.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 255.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.700.744.612,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.700.744.612,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp.	

					840.000.000,00					840.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 900.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 900.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 837.976.585,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 837.976.585,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 240.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 240.000.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				Rp. 1.246.742.506,00	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				Rp. 1.246.742.506,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp. 1.246.742.506,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				Rp. 1.246.742.506,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN				Rp. 100.000.000,00	**PROGRAM PENGENDALIAN**				Rp. 100.000.000,00	

	IZIN USAHA INDUSTRI					**IZIN USAHA INDUSTRI**					
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 100.000.000,00	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 100.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses dan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mengacu kepada hasil proses musrenbang yang dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan sampai pada musrenbang tingkat kabupaten. Dimana usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat ini disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Nama PD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian Perindustrian telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan target pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015 – 2019, serta mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu,

Visi Pembangunan Industri Nasional tahun 2015 – 2035 adalah:

Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalamProduk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Renstra propinsi

Industri Potensi ketersediaan bahan baku CPO, kelapa, karet dan minyak mentah yang tersedia dalam jumlah yang besar di Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10 dan Gambar 2.11, selama ini sebagian besar di ekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit, kelapa, karet serta pengolahan minyak bumi relatif tidak berkembang. Pengembangan industri hilir perlu dilakukan agar nilai tambah dapat diperoleh oleh Provinsi Riau, pengembangan industri hilir ini tidak saja meningkatkan devisa negara dan PDRB Provinsi Riau tetapi juga akan membuka lapangan kerja dan menggerakan industri pendukung lainnya. Pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit dan kelapa di Provinsi Riau sudah menjadi kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Menteri perindustrian melalui Peraturan Menteri Republik

Indonesia Nomor 13/M-IND/PER/I/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/10/2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit. Peraturan Menteri Perindustrian ini telah menetapkan Provinsi Riau sebagai klaster industri hilir kelapa sawit. Sasaran jangka menengah (2010 – 2014) adalah (1) terbentuk klaster industri pengolahan CPO dan turunannya di Riau dan (2) iklim usaha dan investasiyang kondusif. Sasaran jangka panjang (2015 – 2025) adalah (1) memperluas pengembangan produk akhir, (2) terbentuknya center of excelent industri oleokimia, (3) penguasaan pasar, (4) pemantapan industri berwawasan lingkungan, dan (5) terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Riau.

Pengembangan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah terhadap bahan baku yang tersedia secara lokal seperti minyak mentah, CPO, kelapa dan karet penting menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019. Pengembangan industri pengolahan ini akan memberikan multiplier efek yang positif terhadap sektor-sektor lainnya sehingga pertumbuhan PDRB dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat signifikan dan berkelanjutan

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-TM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 19,28%. Pada tahun 2014, realisasi kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-TM Provinsi Riau sebesar 17,40%. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-DM Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 89,46%

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan masing-masingnya sebesar 64,25% dan 5,15%. Pada tahun 2014, realisasi tingkat realisasi amgkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka masing-masingnya sebesar 63,31% dan 6,56%. Kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja relatif sesuai target (98,54%) dan realisasi kinerja indikator tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target yang ditetapkan (78,51%).

Sektor penyedia lapangan kerja utama masih sektor Pertanian dengan persentase sebesar 46,30% dari total angkatan kerja yang bekerja (Tahun 2013). Sektor penyedia lapangan kerja terbesar kedua dan ketiga sektor jasa yaitu sektor

perdagangan, rumah makan dan hotel (20,60%) dan jasa-jasa (15,205). Ke depan, seiring dengan peningkatan angkatan kerja dan semakin terbatasnya kemampuan sektor pertanian menyerap limpahan tenaga kerja maka upaya pengembangan sektor industri perlu dilakukan yang didukung dengan pelatihan peningkatan skill angkatan kerja.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, TPAK di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 64,25%. Pada tahun 2014, realisasi TPAK di Provinsi Riau sebesar 63,31%, sehingga realisasi kinerja TPAK di Provinsi Riau relatif sesuai targetyang ditetapkan yaitu sebesar 98,54%. Meski TPAK relatif sesuai target, namun upaya peningkatan TPAK perlu terus di tingkatkan.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, TPT di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 5,15%. Pada tahun 2014, realisasi TPT di Provinsi Riau sebesar 6,56%, sehingga realisasi kinerja TPT di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 78,51%.

SPM PROPINSI DI TENAGA KERJA

KETENAGA KERJAAN, Pelayanan Pelatihan Kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 75% 2016 70.70% 72.96 % 81.69 % 62,76 % Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 60% 2016 66.66% 82.90 % 87.11 % 59,97 % Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 60% 2016 82.64% 93.02 % 93.19 % 66,66 % Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 70% 2016 19.51% 2.79% 5.01% Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 50% 2016 34,37 % 48,00 % Pelayanan Kepesertaan Jamsostek Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 50% 2016 69,81 % 47,72 %.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatkan Pembangunan Industri
3. Meningkatkan Kesempatan Kerja

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah daerah

2. Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan menengah
3. Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan menengah
4. Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
5. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
6. Meningkatnya Kesempatan Kerja
7. Meningkatnya perbaikan iklim ketenagakerjaan

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

(1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

(2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
2. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

(3) Program Penempatan Tenaga Kerja

1. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan informasi pasar kerja
3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

(4) Program Hubungan Industrial

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusanaan di Daerah Kabupaten/Kota

(5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(6) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

(7) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

(8) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewewnangan Kabupaten/ Kota

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar sebagai Instansi teknis daerah yang mempunyai tugas pokok ***Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja***, untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan teknis dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Bertitik tolak dari tugas pokok dan fungsi tersebut, program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah merupakan kegiatan yang mampu mewujudkan kepentingan masyarakat dan juga sebagai prioritas utama yang harus dilaksanakan demi meningkatkan keterampilan teknis dan kemampuan untuk mengelola usaha dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja agar Usaha Industri mampu bersaing, tumbuh dan berkembang seiring dengan permintaan pasar, dan pengawasan peredaran barang kebutuhan pokok masyarakat dan jasa dapat terkontrol dengan baik tidak merugikan masyarakat sesuai dengan Visi, Misi, dan Renstra. Seluruh Program kegiatan yang dilaksanakan pendanaanya bersumber dari APBD Kabupaten Kampar.

Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha sehingga menghasilkan mutu produk yang baik dan mampu mengantisipasi cepatnya perubahan keinginan masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang tepat dan yang efektif/efisien, feasible dan akuntable. Seluruh program dan Prakiraan maju mundur kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pagu indikatif anggaran.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar tahun 2024 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perez ncanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan khususnya bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim pasar global, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya perbaikan, kajian, dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia, dan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kampar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan ***good governance*** di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

Bangkinang, Juni 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

TENAGA KERJA KABUPATEN KAMPAR

HAMBALI, SE. MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681024 200003 1 00

RENCANA KERJA
(RENJA)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Kampar NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar untuk priode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c. BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024).

(3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja PD Kabupaten Kampar Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Rencana Kerja Dinas Sosial;

h. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
k. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan ;
o. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
t. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
u. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
v. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
w. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK;
x. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
y. Rencana Kerja Inspektorat;
z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dd. Rencana Kerja Sekertariat Daerah;
ee. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
ff. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hilir;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hulu;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Tapung;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Tambang;
ll. Rencana Kerja Kecamatan Kampar;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Siak Hulu;
oo. Rencana Kerja Kecamatan XIII Koto Kampar;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Rumbio Jaya;

qq. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Utara;
rr. Rencana Kerja Kecamatan Kampa;
ss. Rencana Kerja Kecamatan Salo;
tt. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang;
uu. Rencana Kerja Kecamatan Kuok;
vv. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang Kota;
ww. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
xx. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
yy. Rencana Kerja Kecamatan Gunung Sahilan;
zz. Rencana Kerja Kecamatan Perhentian Raja;
aaa. Rencana Kerja Kecamatan Koto Kampar Hulu;

Pasal 5

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 13 Juli 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

MHD. FIRDAUS

Diundangkan Di Bangkinang
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 19

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA PD dan RPD Kabupaten Kampar.

Diharapkan nantinya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kaupaten Kampar Tahun 2024.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan sosial.

Bangkinang Kota, Juni 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN KABUPATEN KAMPAR

YURICHO EFRIL, S.STP
Pembina
NIP.19820111 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistimatika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 23
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD 29
2.5 Penelahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49
3.3 Program dan Kegiatan 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB V PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d tahun 2022	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.....	21
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	31
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar	47
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	58

BAB I

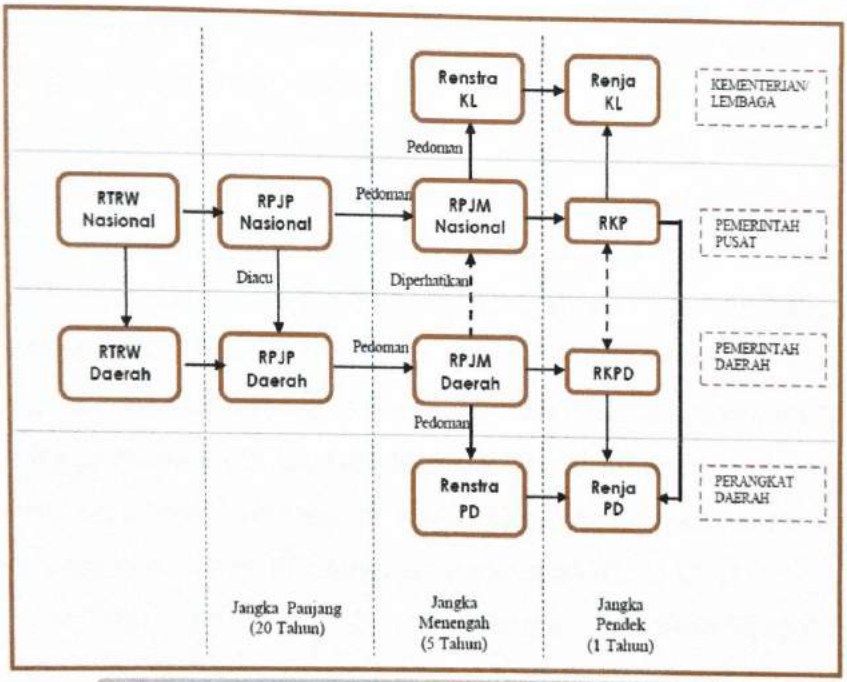
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan, Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kampar, terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kampar sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian menjadi sektor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dalam membangun Kabupaten Kampar. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan Nama Domain, Pengelolaan E- Government, Pengelolaan informasi serta komunikasi publik, Penyelenggaraan statistik sektoral, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Secara hierarki penyusunan Renja OPD merupakan turunan dari penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD tersebut. Renja OPD juga diselaraskan dengan Renstra OPD yang merupakan dokumen perencanaan empat tahunan OPD. Rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis, Renja OPD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD/Perangkat Daerah.



Gambar 1.1. Hubungan Antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD

Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD. Selain itu, Renja Perangkat Daerah memiliki sinergisitas dengan Renja K/L dan RPJMN karena program prioritas dalam Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional yang ada di dalam Renja K/L dan RPJMN berupa usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) atau APBN.

Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2023. Selanjutnya, ditindaklanjuti sebagai pedoman penyusunan KUA–PPAS dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dalam rangka proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2024. Setelah itu, RAPBD dibahas, disepakati dan kemudian disahkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2024. Dalam prosesnya berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat empat tahapan utama dalam Renja OPD yakni: persiapan penyusunan Renja OPD, tahap penyusunan rancangan Renja, Pelaksanaan Forum PD dantahap penetapan Renja OPD.

Guna mewujudkan visi kabupaten Kampar yang akan dicapai pada tahun 2025, yaitu menjadi Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025. Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 "Menjadikan Kampar yang Berdaya Saing,

Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Provinsi Riau" dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sektor Komunikasi Informasi yang meliputi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan E-Government, Pengembangan Sumber Daya Layanan Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian salah satu sektor yang memegang kunci keberhasilan pencapaian Visi tersebut.

Dalam penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi renja tahun sebelumnya (evaluasi renja tahun 2022) dan memperhatikan kondisi eksisting (renja 2023) serta usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan bidang komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, Renja Organisasi Perangkat Daerah harus mengacu pada RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023 2036. Hal ini tentunya disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kabupaten Kampar dalam menyusunRenja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kampar Tahun 2023 untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan di bidang komunikasi, informatika Persandian Kabupaten Kampar yang berkelanjutan dan berkeadilan serta mendukung kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru Tahun 2023 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar;
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;
17. Surat Edaran Bupati Kampar Nomor : 050.13/Bappeda-I.2/36 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dan Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi pada tahun 2024.

Adapun Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 antara lain :

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dalam melaksanakannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kampar.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman melalui implementasi program dan kegiatan tahun anggaran 2024.

- Untuk Mencapai visi, misi, serta tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar

Gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2022 diperoleh dari evaluasi capaian kinerja dan e-Monev hingga triwulan IV. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022 hingga triwulan IV.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Realisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2022 yang tidak atau belum memenuhi target kinerja hasil keluaran adalah sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Kampar dikarenakan adanya wabah covid 19.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada dasarnya hampir Seluruh Program Kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Adapun Program kegiatan tersebut adalah:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
  - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Pelayanan Informasi Publik
  - Manajemen Komunikasi Krisis
  - Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
  - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
  - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
  - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Membangun Metadata Statistik Sektoral

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
  - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Untuk Program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, tidak terlihat signifikan yang melebihi target program kegiatan.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Pelaksanaan Program Kegiatan di Lingkunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar adalah :

- Kegiatan mengalami kebijakan Refocusing/Rasionalisasi anggaran akibat dampak Covid-19
- Terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia

- Belum optimalnya data sektoral/geospasial yang diberikan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar sehingga berdampak pada data yang ada pada rumah data.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi atau dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Terjaganya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
3. Terselengaranya Fasilitasi SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi
4. Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Media Massa

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia baik SDM maupun alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu-isu strategis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian.
3. Mempercepat proses pengajuan keuangan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Mengoptimalkan peran kontrol internal pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau agar lebih reaktif dan proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

5. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi terkait maupun stakeholders dalam mensinkronkan dan menyelaraskan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Persandian.

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Kampar s/d Tahun 2022

NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN KAMPAR

Kode Rekening					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcames) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Realisasi s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Skpd Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**								
2	16	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LKj dan Laporan-laporan lainnya**						100%		
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	3	100%
2	16	01	2.01	02	Koordinasi, dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordiansi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6	75%

2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun**						100%		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	100%	30 Orang/bulan	90	75%
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	75%
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis**								
2	**16**	**1**	**2.05**	**2**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1	25%
2	**16**	**1**	**2.05**	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	-	-	-	1 Orang	2	50%
2	**16**	**1**	**2.05**	**11**	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	22 Orang	-	6 Orang	6 Orang	100%	5 Orang	12	55%
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Pelayanan Umum/terlaksananya Operasional Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar**								
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	75%
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6	75%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	75%

2	16	01	2.08	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Dokumen	3	75%
2	16	01	2.08	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%
2	16	01	2.08	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	75%
2	**16**	**01**	**2.08**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerrintah Daerah**	**Tersedianya Barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor**								
2	16	01	2.08	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1	25%
2	**16**	**01**	**2**	**8**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Dinas Kominfo dan Persandian Kab.Kampar**						**100%**		
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	75%
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	75%
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Pada Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Kampar**								
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6	75%
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	2 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	8	66%

2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3	75%
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1	33%
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1	33%
2	16	01			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi Publik yang disediakan**						100%		
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pelayanan Informasi Daerah Kabupaten Kampar**								
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersedianya Dokumen Index Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	100%		1	100%
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%
2	16	02	2.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1	25%
2	16	02	2.01	13	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	480 Unit	120 Unit	120 Unit	120 Unit	100%	120 Unit	3	75%

2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA**	**Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas**									
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Jumlah OPD Yang Terintegritas**									
2	**16**	**03**	**2**	**01**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terkelolanya Website di LIngkungan Pemda Kabupaten Kampar**						100%			
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	75%	
2	16	03	2	02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pusat Data Pemda, dan Terlaksananya Pengembangan dan Pembangunan Aplikasi**						100%			
2	16	3	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	75%	
2	16	3	2.02	06	Koordinasi dan sinkronisasi data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan sinkronisasi data dan Informasi Elektronik	124 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	100%	31 Perangkat Daerah	96	75%	
2	16	3	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	75%	
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**										
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi**									
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Peningkatan SDM yang Handal dalam Pengelolaan dan Pengumpulan Data**						100%			
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3	75%	

2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Data yang telah dipetatematikkan	1 Unit	1 Unit	-	-	-	100%	1	100%
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Index Keamanan Informasi**								
2	21	02	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Index Keamanan Informasi**						100%		
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	75%
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Infromasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3	75%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Untuk urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar masih mempunyai pekerjaan yang masih belum terselesaikan yaitu tentang keterbukaan informasi public, SPBE, Statistik Sektoral dan Keamanan Informasi. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE; Data Sektoral Daerah dan Keamanan Informasi di Pemerintahan Daerah adalah pekerjaan yang harus dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis kinerja dilakukan terhadap hasil kinerja dan pencapaian sasaran. Agar mencapai hasil maka Analisa kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komuniksi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Sesuai dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 terdapat 5 Misi RPJPD strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini. Oleh karena itu analisis kinerja untuk tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Kampar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun N-2 2022	Tahun N-1 2023	Tahun N 2024	Tahun N+1 2025	Tahun N-2 2022	Tahun N-1 2023	Tahun N 2024	Tahun N+1 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INDIKATOR SASARAN RENSTRA												
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)			-	14,29	28,57	42,86	-	-	28,57	42,86	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi			-	50	60	70	-	-	60	70	
3	Indeks SPBE			D	C	C	B	C	-	C	B	
4	Tersedianya Sistem data dan statistik yang terintegrasi			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	
5	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah			70	75	78	80	71,69	-	78	80	
INDIKATOR KINERJA PROGRAM												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
6	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
7	Persentase Informasi Publik yang Disediakan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
8	Persentase Jumlah OPD yang Terintegrasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												
9	Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi			100%	100%	47 Data	47 Data	100%	100%	47 Data	47 Data	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
10	Indeks Keamanan Informasi			100%	100%	75%	78%	100%	100%	75%	78%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang pada OPD serta situasi dan kondisi.

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal merupakan hal penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors) suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal akan tergambar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi.

Analisis ini diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan dan dinamika lingkungan. Metode yang diterapkan dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan menerapkan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities dan Threats).

Implementasi metode ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya dengan menangkap peluang yang ada atau menekan kelemahannya melalui penyelesaian terhadap tantangan yang dihadapi. Hal yang paling buruk akan terjadi, apabila organisasi mengembangkan kelemahannya karena ketidakmampuannya untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi. Identifikasi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Sebagaimana yang terlihat dalam matrik SWOT diatas, terdapat empat kelompok strategi pembangunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, yang berisikan strategi-strategi :

Pertama Strategi S – O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup :

a. Adanya Komitmen Pimpinan yang tinggi;
b. Tersedianya Peraturan Bupati Kampar Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar;
c. Adanya Regulasi Pendukung bidang komunikasi dan informatika;
d. Tersedianya Sarana dan Prasarana : Server Data,layanan internet 200 Mbps (dedicated);
e. Adanya pelaksanaan dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh Badan Publik;
f. Tersedianya aparatur pengelola multimedia, jurnalistik;
g. Tersedianya website www.kamparkab.go.id;
h. Tersedianya sistem aplikasi *online* yang terintegrasi;
i. Adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar;
j. Adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyebarluasan informasi publik.

Kedua Strategi W – O, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, yang mencakup:

a. Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kampar baik dari domain kebijakan, domain tata kelola dan domain manajemen;

b. Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi tentang pengembangan kelompok informasi masyarakat, pembinaan komunitas komunikasi dan informatika serta pembinaan media tradisional;
c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi;
d. Masih rendahnya pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi di pemerintahan Kabupaten Kampar;
e. Belum optimalnya Pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisiensi;
f. Masih belum adanya dukungan kebijakan untuk penetapan pola hubungan komunikasi sandi perangkat daerah di Kabupaten Kampar;
g. Masih terbatasnya sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar;
h. Ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang dikelola belum optimal, hal ini dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah;
i. Dari sisi penyebarluasan dapat dilihat dari website Rumah data namun penyajian belum optimal;
j. Belum seluruh data mempunyai petadata;
k. Belum seluruh perangkat daerah menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi;
l. Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan database, sehingga implementasi *e-government* dapat didukung sepenuhnya oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

Ketiga Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman/tantangan, yang mencakup:

a. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
b. Kebutuhan Pengembangan Muatan E-Government di Kabupaten Kampar;
c. Kesadaran Masyarakat Kampar Akan Pentingnya Data, Informasi Dan Komunikasi;

d. Kebutuhan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar Berbasis Elektronik;
e. Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Peningkatan Efisiensi Dan Efektifitas Pembangunan Daerah;
f. Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar;
g. Pemberdayaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
h. Mengembangkan sistem aplikasi *online* OPD yang terintegrasi dalam *website* Pemerintah Kabupaten Kampar.

Keempat Strategi W – T, yaitu strategi yang menggunakan kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, yang mencakup:

a. Persaingan global;
b. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
c. Adanya kesenjangan digital (tidak meratanya) sarana komunikasi dan informatika di daerah perdesaan dan perbatasan;
d. Content digital yang kurang mendidik, sesat dan/atau merusak moral & tatanan sosial masyarakat;
e. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang penyiaran dan keterbukaan informasi;
f. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
g. Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI;
h. Keterbatasan anggaran.

Permasalahan yang dihadapi oleh dinas Komunikas, Informatika dan Persandian berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Kesekretariatan

1. Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia ASN
2. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifasi untuk mendukung palayan administrasi
3. Minimnya kesempatan dan anggaran peningkatan komptensi PNS.

b. Bidang e-Government

1. Penerapan e-Government masih rendah.
2. Masih rendahnya infrastruktur bidang Teknologi Informasi dan Teknologi (TIK) hingga kepedesaan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Masih kurangnya pemahaman OPD dalam rangka Transformasi Digital
5. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Government.
6. Belum adanya dokumen perencanaan pembangunan TIK Kabupaten Kampar.
7. Lemahnya koordinasi dengan OPD dalam penyelenggaraan e Government.
8. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi.
9. Keterbatasan anggaran dalam pengembangan penyelenggaraan e Government.
10. Belum optimalnya Pengelolaan Website oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
11. Kurangnya tenaga IT.
12. Tidak tersedianya Tenaga IT berstatus ASN.

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Statistik dan Informasi Publik.
2. Masih kurangnya komitmen pimpinan OPD terhadap integrasi data pertukaran data dan keterisian data.
3. Sistim Informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Belum berjalannya fungsi kelompok informasi masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
5. Belum tersedianya data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung bidang Statistik.
6. Pengunaan data rujukan bagi OPD yang tidak seragam.
7. Sangat minimnya anggaran kemitraan dalam rangka penyabaran informasi.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Dan Layanan Publik

1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan Persandian dengan Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pembinaan aparatur pelayanan Publik.
3. Terbatasnya aparatur yang handal dan profesional dalam membangun narasi positif kinerja Pemerintah.
4. Masih terbatasnya sarana pendukung, anggaran dalam penyebarluasan informasi, layanan permohonan informasi dan pengaduan publik.
5. Masih rendahnya komitmen stakeholder dalam implementasi Undang-undang KIP.
6. Masih minimnya pelaksanaan minitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pelaporan informasi dan pengaduan masyarakat.
7. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap keterbukaan informasi.
8. Belum terlaksananya sosialisasi SP4N Lapor dan PPID.

9. Masih rendahnya pengelolaan dan pemahaman Pengelolaan PPID Utama dan SP4N Lapor dalm rangka pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat.
10. Terbatasnya anggaran diklat pengelola layanan informasi.

e. Bidang Persandian
1. Kurangnya fasilitas alat pendukung bidang Persandian.
2. Terbatasnya SDM PNS yang mau dijadikan pejabat sandiman.
3. Minimnya anggaran untuk pemeliharaan alat/sarana Persandian.
4. Belum adanya sarana mobilitas untuk memonitor 21 Kecamatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari hasil perncermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah jumlah anggaran pada rancangan RKPD Tahun 2024. Tetapi masih ada pergeseran anggaran antar program dan kegiatan yang perlu dilakukan karena masih adanya ketidaksesuaian wewenang tupoksi pada bidang.

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar yang membahas Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2024, yang mencakup target program kegiatan beserta anggarannya. Program kegiatan tahun anggaran 2024 berasal dari anggran APBD mempunyai lima (5) program, tiga belas (12) kegiatan dan enam puluh tiga (41) sub kegiatan.

Sasaran Diskominfo berdasarkan Renstra 2023-2026 mengampu 3 sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Transparan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral.

Sararan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Transparan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didukung oleh

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Sasaran Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sasaran Meningkatnya Layanan Akses Data Statistik Sektoral didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat kami sajikan pada tabel 2.4 seperti terlampir (T-C. 31)

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.756.653.756	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20.836.581.907	
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.705.653.756	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.810.581.907	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				490.581.907	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				490.581.907	
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencana Perangkat Daerah	4 Dokumen	125.000.000	
	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	125.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	125.000.000	

	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	190.581.907	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	190.581.907	

	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000	
	2.16.01.2.02	**Administrsi Keuangan Perangkat Daerah**				**3,883,295,807**	**Administrsi Keuangan Perangkat Daerah**				**4,231,000,000**	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	3,852.295.807	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32 Orang/ bulan	4.200.000.000	Penambahan ASN
	2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	
	2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	

	2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**315.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**315.000.000**	
	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	
	2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	55.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	55.000.000	
	2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	110,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6 Orang	110.000.000	
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,255.009.375**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**1,650,000,000**	
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	50,000,000	Kebutuhan akan komponen instalasi listrik kantor
	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	350,009,375	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	450.000.000	Kabutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	180,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	180,000,000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	85,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	200,000,000	Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	750.000.000	Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**120.600.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**267,000,000**	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	18.600,000	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	165,000,000	Kebutuhan Pengadaan Mebel
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.000.000	

2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,139.166.667**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1,250,000,000**	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	889.166.667	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000	Penambahan Jumlah nan kerja
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**502.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.507.000.000**	

	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	196.000.000	Sesuai Kebutuhan untuk kendaraan dinas jabatan
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	200.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	282.000.000	Sesuai kebutuhan untuk kendaraan operasional
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	125,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	175.000.000	Sesuai kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	555.000.000	Sesuai kebutuhan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	398.000.000	Sesuai kebutuhan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor

	2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000	
	2.16.02	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**2.372.000.000**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**6.327.000.000**	
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**2.372.000.000**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**6.327.000.000**	
	2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.000.000	
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1.000.000	
	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Perioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Perioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Perioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Perioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000	

	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	265,000,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	400,000,000	Biaya mobilitas pimpinan daerah yang harus di publikasikan secara masif
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.000,000,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	4,000,000,000	Penyebarluasan informasi kegiatan Pimpinan daerah melalui media massa, media luar ruang, live streaming, radio swara kampar
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	275,000,000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	570,000,000	Video kampanye stunting dan sosialisai PPID di Pemerintahan Kabupaten Kampar
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1.000.000	Layanan Hubungan Media	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1,000,000	
	2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1.000.000	

	2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dokumen	175,000,000	Manajemen Komunikasi Krisis	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajeme	1 Dokumen	350,000,000	Sosialisasi SP4N Lapor se Kabupaten Kampar
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitas nya	1 Orang	1.000.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitas nya	1 Orang	1.000.000	
	2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1.000.000	
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	100,000,000	Kelompok Informasi Masyarakat
	2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	120 Unit	600,000,000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	120 Unit	900,000,000	Menyemarakkan/memeriahkan kegiatan pimpinan daerah dalam bentuk penyebaran informasi, dan mendukung pemilu 2024

	2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**385,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**4,240,000,000**	
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**125,000,000**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**3,400,000,000**	
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200,000,000	Sosialisasi website, digitalisasi desa dan kelurahan se kabupaten kampar
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	75,000,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	3,200,000,000	Kebutuhan Bandwitch (internet dedicated), Infrastruktur TIK dan Penyempurnaan Command Center.
	2.16.03.2.01	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**260,000,000**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**840,000,000**	
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokum Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokum Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1.000.000	

	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	185,000,000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	185.000.000	
	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	32 Perangkat daerah	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	32 Perangkat daerah	200.000.000	Evaluasi penilaian SPBE Tahun 2024
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	35,000,000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	450.000.000	Pengembangan Aplikasi SPBE Kab. Kampar
	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1.000.000	
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan Smart city	1 Dokumen	1.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan Smart city	1 Dokumen	1.000.000	

	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000	
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1.000.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1.000.000	
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**112.000,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**212.000,000**	
	2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**112.000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**112.000,000**	
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**112.000,000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**112.000,000**	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1.000.000	

	2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	10.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1 Orang	10.000.000	
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	100.000,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	200,000,000	Pentingnya data sectoral untuk pembangunan daerah
	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastuktur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1.000.000	Pengembangan Infrastuktur	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1.000.000	
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**182,000,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**247,000,000**	
	2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**182,000,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**247,000,000**	
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**181,000,0000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**246,000,0000**	
	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	1 Dokumen	1.000.000	

	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	145,000,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	145,000,000	
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	35,000,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahaan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	100,000,000	Pembentukam , pengembangan dan Sosialisasi CSIRT di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar
	2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1.000.000**	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**				**1,000,000**	
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	1.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 Perangkat Daerah	1.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Kampar, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun dengan tema ***"Menjadikan Kampar yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Provinsi Riau"*** **dengan prioritas :**

1. PENINGKATAN BIDANG EKONOMI
2. PENINGKATAN BIDANG INFRASTRUKTUR
3. PENINGKATAN BIDANG PENDIDIKAN
4. PENINGKATAN BIDANG KESEHATAN
5. PENINGKATAN BIDANG SOSIAL

. Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dalam pengelolaan Komunikasi Informatika dan Persandian serta tugas lain bidang Pemerintahan telah disusun rencana program kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.5, sebagai berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para PemangkuKepentingan Tahun 2024
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program pengelolaan aplikasi informatika				
1	Kegiatan : Pengelolaan nama domain yang telah ditepkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Kecamatan Koto Kampar Hulu Kecamatan Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar Kecamatan Bangkinang Kota	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah Jumlah sistem jaringan intra pemerintah Jumlah sistem jaringan intra pemerintah Jumlah sistem jaringan intra pemerintah	Rp. 150.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 150.000.000 Rp. 150.000.000	Internet Dediceted(Internet gratis bagi masyarakat)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat Nasional maupun Daerah (Propinsi Riau, Kabupaten Kampar).

Kebijakan nasional pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika diarahkan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut maka sesuai dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

a. terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
b. tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial,budaya, pertahanan, dan keamanan
c. terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
d. terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah telah dituangkan dalam UU Nomor 11 tahun 2008, yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu untuk menindaklanjuti UU Nomor 11 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Untuk mencapai keterpaduan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar telah ditetapkan arah dan kebijakan yang harus ditepati untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar adalah :

" Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan"

Sasaran merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 4 (empat) tahun.

Sasaran yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika Dan persandian Kabupaten Kampar merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan

memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya peningkatan.

Sasaran - sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Transparan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Akses Data Statistik Sektoral
3. Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2023 adalah:

a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;

d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar;

e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar.

f. Meningkatnya koordinasi, kerjasama, fungsi dan penguatan lembaga komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah serta pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat dalam mewujudkan informasi yang berkualitas dan pengembangan kelompok informasi masyarakat guna peningkatan kecerdasan masyarakat, optimalisasi penyebarluasan informasi masyarakat melalui berbagai media serta identifikasi, distribusi dan analisa informasi.

3.3. Program dan Kegiatan Diskominfo dan Persandian Kabupaten Kampar

Strategi dan Arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 yang akan digunakan untuk menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten KamparTahun 2023-2026 khususnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan di implementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke Dua ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar adalah : Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Oleh sebab itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut, untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Kabupaten Kampar, sehingga dapat menciptakan tata kelola yang handal, perlu melakukan terobosan melalui kinerja

yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kampar.

Dalam kurun waktu 4 tahun ke depan (2023-2026) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar telah merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Optimisme perlu ditumbuhkan diikuti dengan kerja keras seluruh elemen yang terkait dengan sektor Komunikasi dan Informatika.

Rencana Strategis Dinas Komuikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, terdapat program yang menunjang program pembangunan dan pengembangan sektor Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Perprogram, kegiatan dan sub kegiatan.

Program dan Kegiatan yang akan diusulkan Dinas Koamunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2024:

01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Perangkat Daerah
        1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        2. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
        4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
        6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
        7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
        3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
        4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
    3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
    6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Pengadaan Mebel
    2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paja Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pajak, dan perizinan kendaraaan dinas operasional atau lapangan.
    3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
    4. Pemelihaaran/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
    a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
        1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang *Informasi dan Komunikasi* Publik
        2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
        3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
        4. Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
        5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
        6. Pelayanan Informasi Publik
        7. Layanan Hubungan Media
        8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
        9. Manajemen Komunikasi Krisis
        10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
        11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
        12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
        13. Penyediaan/Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

03. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
6. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
7. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
8. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

04. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Pengembangan Infrastruktur

05. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar pada tahun 2024 mempunyai 5 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada 4 program sedangkan 1 program sebagai pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan program yang medukung capaian sasaran ada 4 yaitu Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pendanaan program kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.756.653.756.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kampar

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN						10.756.653.756,00							28.335.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.756.653.756,00							28.335.000.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.462.653.756,00							28.135.000.000,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.706.653.756,00						-	16.055.000.000,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	490.581.907,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	490.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	125.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	125.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MULAI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	190.581.907,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3.883.295.807,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	3.220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.852.295.807,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		3.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	315.000.000,00								
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0005	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	55.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	110.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	1.255.609.375,00				Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Pengelolaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur				
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	350.009.375,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	180.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	85.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	600.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	120.600.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-		
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Meubel yang Disediakan				30 Unit	18.600.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.139.166.667,00				Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	250.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	889.166.667,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	502.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	1.325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	120.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	200.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	125.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	-	-			-	**2.372.000.000,00**						-	**7.005.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.372.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	7.005.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	265.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN KERJA YG DIRENCANA, Tahun 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1.000.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			3.750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	275.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 Dokumen	175.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				1 Orang	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				120 Unit	600.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
3	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	-	-			-	**385.000.000,00**						-	**5.075.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	125.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	3.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	75.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MASUK RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-				260.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		[redacted]	[redacted]
	2.16.03.2.02.0001	Penyelenggaraan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		[redacted]	[redacted]
	2.16.03.2.02.0005	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	185.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		[redacted]	[redacted]
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				32 Perangkat Daerah	35.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		[redacted]	[redacted]
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				1 Unit	35.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		[redacted]	[redacted]
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			Jumlah Layanan Publik yang Tehubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		[redacted]	[redacted]
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**112.000.000,00**							**575.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	-			-	**112.000.000,00**							**575.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	112.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				1 Orang	10.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur														
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**182.000.000,00**								
1	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	-			-	**182.000.000,00**						-		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	181.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	145.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	35.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur	-			DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU PERUBAHAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-					1.000.000,00				Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	[illegible]
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				10 Perangkat Daerah	1.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Pelayanan publik Peningkatan Bidang Infrastruktur			[illegible]	[illegible]
	JUMLAH							10.756.653.756,00							[illegible]	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam berbagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholder) dalam menciptakan Pemerintahan yang bagus sesuai dengan tuntutan paradigma baru Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Output Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran Program Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Rencana Kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar selama kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Kampar juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Diskominfo Persandian Tahun 2024.

Adapun fungsi dari Renja tahun 2024 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2024 bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

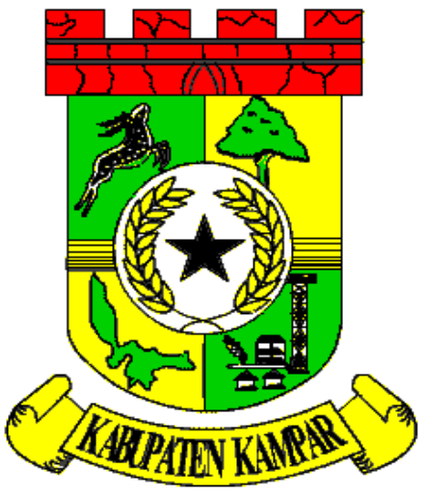
Bangkinang, Juni 2023.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN KAMPAR

YURICHO EFRIL, S.STP
Pembina
NIP. 19820111 200212 1 001

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
BANGKINANG
2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika penulisan 7

BAB. II EVALUAASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu..... 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 25
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD..... 31
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD 34
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. 44

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 54
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional..... 54
3.2. Tujuan 60
3.3. Sasaran 60
3.4. Program dan Kegiatan 61

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) 76

BAB. V PENUTUP **83**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Hadhirat Allah SWT berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar tahun 2023 – 2026.

Dalam mendorong efektifitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah fungsi sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisifasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2024. Semoga Rencana Kerja ini dapat berhasil guna dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangkinang, Juni 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KAMPAR

Drs. MUHAMMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711015 199303 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun atas dasar kebutuhan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tuntutan dan perubahan serta berupaya secara dinamis sesuai dengan perkembang zaman, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembar Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) merupakan salah satu perangkat daerah merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar adalah :

a. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
c. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai landasan kewenangan daerah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan Negara/ Lembaga
l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
n. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

u. Permentan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan (Kabupaten Kampar Tipe A) Dan Bidang Pertanian

v. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Pertmentan/Ot/010/08 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

w. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar 2005 – 2025.

x. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembar Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6)

y. Peraturan Bupati Kampar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar.

z. Surat Bupati Kampar Nomor : 050/Bappeda-I.2/374 perihal Permintaan dan Pelaksanaan Verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif tahun 2024 yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Merumuskan program, kegiatan dan pendanaan untuk 1(satu) tahun mendatang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Memasukan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau tahun sebelumnya.
4. Mensinergikan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar dengan dokumen RKPD Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Landasan hukum

1.3. Maksud dan tujuan

1.4. Sistematika penulisan

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan

3.3. Sasaran

3.4. Program dan Kegiatan

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BAB. V PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.934.137.288,00 (Tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Berdasarkan analisis laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar mencapai ***94,77 % fisik dan 91,89 % keuangan***. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar sebagai kategori **baik.**

Program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.

   1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Program Penunjang Ururusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini terdapat 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan rata rata capaian Fisik 100,00 % dan Keuangan 96,89 %.

2. **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**

2.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK Fisik)

2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Pada Program Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota ini terdapat 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan rata rata capaian Kegiatan dengan rata rata capaian Fisik 78,05 % dan Keuangan 80,98 %.

Belum terpenuhi progres fisik sesuai yang diharapkan pada :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK Fisik)

   Penyebabnya :

   - Pengembangan UV Driyer di Desa Domo Kec Kampar Kiri tidak dilaksanakan karena Lahan Beralih fungsi
   - OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah ada yang tidak digunakan

3. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

   Penyebabnya :

   - Tidak Tersedianya Stok pada penyedia E-Katalok untuk pengadaan Cultivator 4 unit

4. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

3.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

3.1.2 Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

3.2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

3.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

3.2.2 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

3.3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ini terdapat 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan rata rata capaian Fisik 95,86 % dan Keuangan 92,25 %.

Belum terpenuhi progres fisik sesuai yang diharapkan pada :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

   Penyebabnya :

   - Transportasi Beras Premium dari BULOG ke Lokasi Tidak di Distribusikan

- OH Perjalanan Dinas Dalam Daerah ada yang tidak digunakan

4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

4.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

4.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Pada Program Penanganan Kerawanan Pangan ini terdapat 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rata rata capaian Fisik 100,00 % dan Keuangan 99,56 %.

5. **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan ini terdapat 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan rata rata capaian Fisik 100,00 % dan Keuangan 99,16 %.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapian Renstra PD sampai tahun 2022.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD

s/d Tahun 2023Kabupaten Kampar

Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							
2.09.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%							
2.09.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	80 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100	20 Dokumen	60 Dokumen	75.00
2.09.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	80 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	80 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	80 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	80 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.01.06	Sud Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerka dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100	20 Dokumen	60 Dokumen	75.00
2.09.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	40 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							
2.09.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	80 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100	20 Dokumen	60 Dokumen	75.00
2.09.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	40 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	40 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							
2.09.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	40 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.03.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	40 Dokumen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							
2.09.01.2.05.01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya finger Print	1 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersdianya Pakaian Dinas Harian	60 Stel	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sumber daya aparatur	10 Orang	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	16 Media	4 Media	4 Media	4 Media	100	4 Media	12 Media	75.00

2.09.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	70 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya mesin ginset	1 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersdiang gedung laboratorium uji pangan segar dan pangan olahan	1 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

2.09.01.2.07.10	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan uji laboratorium pangan segar dan pangan olahan	1 Unit	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							
2.09.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %							

2.09.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00
2.09.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	75.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit		1 unit	1 unit	100			0.00
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga	100%							
2.09.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Infrasrtuktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrasrtuktur kemandirian pangan	100%							

2.09.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK Fisik)	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia	21 Gapoktan	17 Gapoktan	16 Gapoktan	16 Gapoktan	100	1 Gapoktan	17	85.00
2.09.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah infrastruktur lantai jemur yang tersedia	4 Gapoktan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00
2.09.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	150 KWT	Rumah bibit 2 unit dan perlengkapan, peralatan lainnya untuk 38 KWT	Rumah bibit 2 unit dan perlengkapan, peralatan lainnya untuk 6 KWT	Rumah bibit 2 unit dan perlengkapan, peralatan lainnya untuk 6 KWT	100	Rumah bibit 2 unit, saung 12 unit dan perlengkapan, peralatan lainnya untuk 21 KWT	65 KWT	43.33
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Pola Pangan Harapan	95.21							0.00
2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tercapinya Angka Pola Pangan Harapan	100%							0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100.00
2.09.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100.00
2.09.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Tersedianya bahan pertanian dan tersalurkannya produksi pertanian	21 Kecamatan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

2.09.03.2.01.07	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga	21 Kecamatan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Kebutuhan dan Cadangan Pangan	21 Kecamatan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersedianya sarana produksi lumbung pangan	21 Lumbung Pangan	0	16 Lumbung Pangan	16 Lumbung Pangan	100	1 Lumbung Pangan	17 Lumbung Pangan	80.95
2.09.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan pemerintah Daerah	365 Ton	0	30 Ton	30 Ton	100	20 Ton	50 Ton	13.70
2.09.03.2.02.04	Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya cadangan pangan daerah	365 Ton	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainnya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun	100%							0.00
2.09.03.2.04.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi dan terlaksananya lomba cipta menu	1 Dokumen dan 2 Iven							0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.03.2.04.02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Penguatan dan pengembangan kelompok wanita tani dalam intensifikasi pekarangan	150 KWT	16 KWT	Rumah bibit 9 unit dan perlengkapan, peralatan lainnya untuk 12 KWT	Rumah bibit 9 unit dan perlengkapan, peralatan lainnya untuk 12 KWT	100	Rumah bibit 7 unit, saung 12 unit dan perlengkapan, peralatan lainnya untuk 43 KWT	71 KWT	47.33
2.09.03.2.04.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya koordinasi capaian target pola konsumsi	21 Kecamatan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan	100%							
2.09.04.2.01	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Teridentifikasi daerah rawan pangan dan gizi	100%							
2.09.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan pangan yang dimuthirkan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100.00
2.09.04.2.02	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teridentifikasi daerah rawan pangan	100%							
2.09.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkan cadangan pangan pada daerah rawan pangan	21 Kecamatan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terpantaunya mutu dan keamanan pangan	100%							
2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji labor dan sertifikasi pangan	100%							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.09.05.2.01.02	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	200 Sample pangan segar	11 Sample pangan segar	63 Sample pangan segar dan 42 sampel pangan olahan	63 Sample pangan segar dan 42 sampel pangan olahan	100	63 Sample pangan segar	137 Sample pangan segar	68.50

2.09.05.2.01.04	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	200 Sample pangan segar	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!

Bangkinang, Juni 2023
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KAMPAR

Drs. MUHAMMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711015 199303 1 004

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi, cadangan dan harga pangan, bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dan bidang keamanan pangan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis pada sekretariat, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi, cadangan dan harga pangan, bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dan bidang keamanan pangan;
3. Pemantauan dan evaluasi pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi, cadangan dan harga pangan, bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dan bidang keamanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi, cadangan dan harga pangan, bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan dan bidang keamanan pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar Provonsi Raiau dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan kabupaten Kampar

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Ketahanan PanganKabupaten Kampar

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.01	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.01.01	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			-	78,790,000	90,610,000	108,732,000	68,067,908	278,798,000	139,399,000	181,218,700	
2.09.01.2.01.02	Jumlah dokumen RKA SKPD			-	6,500,000	7,475,000	8,596,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.01.03	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD			-	6,500,000	7,475,000	8,596,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.01.04	Jumlah dokumen DPA SKPD			-	6,500,000	7,475,000	8,596,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.01.05	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD			-	6,500,000	7,475,000	8,596,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.01.06	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerka dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			-	4,662,700	5,365,000	6,438,000	4,054,475	3,730,000	4,476,000	5,818,800	
2.09.01.2.01.07	Jumlah laporan yang disusun			-	5,500,000	6,325,000	7,274,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.02	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.02.01	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan			-	3,392,129,200	3,900,948,600	4,681,138,400	2,718,020,880	2,906,653,790	3,197,319,100	4,156,514,830	
2.09.01.2.02.05	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			-	3,885,600	4,468,500	5,362,200	3,378,736	9,885,420	11,862,500	15,421,250	
2.09.01.2.02.07	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			-	5,500,000	6,325,000	7,274,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.02.08	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD			-	5,500,000	6,325,000	7,274,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.03	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											

2.09.01.2.03.01	Tersedianya dokumen kebutuhan barang			-	6,500,000	7,575,000	7,274,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.03.11	Sinkronnya data barang milik daerah			-	6,250,000	7,187,500	8,267,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.05	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.05.01	Tersedianya finger print			-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	
2.09.01.2.05.02	Tersdianya Pakaian Dinas Harian			-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	
2.09.01.2.05.11	Meningkatnya sumber daya aparatur			-	-	95,000,000	109,250,000	-	-	-	-	

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.06	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.06.01	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan			-	8,682,500	9,984,900	11,981,900	7,292,600	3,575,000	4,647,500	6,041,750	
2.09.01.2.06.02	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			-	151,599,000	174,338,850	209,206,700	198,416,395	236,381,700	307,296,200	399,485,060	
2.09.01.2.06.04	Jumlah paket bahan logistik kantor yang			-	30,279,500	34,821,400	41,785,700	26,330,000	23,748,000	30,872,400	40,134,120	
2.09.01.2.06.05	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			-	22,585,700	25,973,600	31,168,300	19,639,740	16,074,250	20,896,500	27,165,450	
2.09.01.2.06.06	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			-	22,728,600	26,137,800	31,365,400	19,764,000	19,764,000	25,693,200	33,401,160	
2.09.01.2.06.09	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			-	186,132,100	214,051,900	256,862,500	161,832,000	216,509,000	281,461,700	365,900,210	
2.09.01.2.07	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.07.01	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			-	-	650,000,000	-	-	-	-	-	
2.09.01.2.07.02	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			-	-	100,000,000	-	-	-	117,791,219	153,128,585	
2.09.01.2.07.05	Tersedianya mebel kantor			-	-	250,000,000	-	-	-	-	-	
2.09.01.2.07.06	Tersediannya mesin ginset			-	-	350,000,000	-	-	-	-	-	
2.09.01.2.07.09	Tersedianya gedung laboratorium uji pangan segar dan pangan olahan			-	-	-	750,000,000	-	-	-	-	

2.09.01.2.07.10	Tersedianya Peralatan uji laboratorium pangan segar dan pangan olahan			-	-	-	2,225,000,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.08	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.08.02	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			-	22,770,000	26,185,500	31,422,600	19,800,000	19,800,000	25,740,000	33,462,000	
2.09.01.2.08.03	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			-	-	3,500,000	4,025,000	-	-	-	-	
2.09.01.2.08.04	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			-	420,082,800	483,095,200	555,559,400	345,633,840	341,257,464	375,383,200	487,998,160	
2.09.01.2.09	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten											
2.09.01.2.09.01	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			-	43,328,500	49,827,800	59,793,400	37,676,915	109,983,895	120,982,200	157,276,860	

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.01.2.09.02	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya			-	34,434,400	39,599,500	47,519,400	29,942,973	29,931,510	35,917,800	46,693,140	
2.09.01.2.09.06	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			-	19,771,900	27,737,700	27,285,200	16,032,750	30,450,000	39,585,000	51,460,500	
2.09.01.2.09.09	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi			-	250,000,000	-	-	-	-	330,000,000	429,000,000	
2.09.02	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga											
2.09.02.2.01	Tersedianya infrasrtuktur kemandirian pangan											
2.09.02.2.01.01	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia			-	-	550,000,000	632,500,000	730,049,915	-	-	-	
2.09.02.2.01.02	Jumlah infrastruktur lantai jemur yang tersedia			-	-	65,000,000	74,750,000	-	-	-	-	
2.09.02.2.01.03	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia			-	1,242,881,300	1,429,313,400	1,715,176,000	1,232,569,514	1,467,490,824	513,621,700	667,708,210	
2.09.03	Angka Pola Pangan Harapan											

2.09.03.2.01	Tercapinya Angka Pola Pangan Harapan											
2.09.03.2.01.01	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan			-	156,911,700	180,448,400	216,538,000	133,145,001	246,644,000	271,308,400	352,700,920	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan			-	39,839,700	45,815,600	54,978,700	33,711,242	215,797,000	237,376,700	308,589,710	
2.09.03.2.01.06	Tersedianya bahan pertanian dan tersalurkannya produksi pertanian			-	-	175,000,000	201,250,000	-	-	-	-	
2.09.03.2.01.07	Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga			-	-	525,000,000	603,750,000	-	-	-	-	
2.09.03.2.02	Tersusunnya Rencana Kebutuhan dan Cadangan Pangan											
2.09.03.2.02.02	Tersedianya sarana produksi lumbung pangan			-	137,636,600	158,282,000	189,938,400	42,819,000	28,524,000	71,310,000	92,703,000	
2.09.03.2.02.03	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah			-	352,721,100	405,629,300	486,755,200	302,226,150	51,231,000	76,846,500	99,900,450	
2.09.03.2.02.04	Terpeliharanya cadangan pangan daerah			-	-	25,000,000	28,750,000	-	-	-	-	
2.09.03.2.04	Tercapainnya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun											
2.09.03.2.04.01	Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi dan terlaksananya lomba cipta menu			-	240,428,700	276,493,000	331,791,600	205,698,127	230,030,360	276,036,400	358,847,320	
2.09.03.2.04.02	Pemanpaatan pekarangan sebagai sumber gizi			-	1,421,749,600	1,635,012,000	1,962,014,400	1,259,270,508	547,738,620	356,030,100	462,839,130	
2.09.03.2.04.03	Terlaksananya koordinasi capaian target pola konsumsi			-	-	175,000,000	201,250,000	-	-	-	-	
2.09.04	Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan											

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.09.04.2.01	Teridentifikasi daerah rawan pangan dan gizi											
2.09.04.2.01.01	Peta dan analisis ketahanan pangan yang dimuthirkan			-	84,071,300	96,682,000	116,018,400	68,457,675	71,887,950	143,775,900	186,908,670	
2.09.04.2.02	Teridentifikasi daerah rawan pangan							-				
2.09.04.2.02.02	Tersalurkan cadangan pangan pada daerah rawan pangan			-	-	185,000,000	212,750,000		-	-	-	
2.09.05	Terpantaunya mutu dan keamanan pangan											

2.09.05.2.01	Terlaksananya uji labor dan sertifikasi pangan											
2.09.05.2.01.02	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota			-	155,936,400	179,326,800	215,192,200	250,306,944	547,462,000	180,662,400	234,861,120	
2.09.05.2.01.04	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota			-	-	169,326,800	205,192,200	-	-	-	-	

2.3. Isu–isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupeten Kampar Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut masih ditemukan Isu-Isu strategis antara lain :

1. Sistem pertanian pangan
2. Dinamika penduduk
3. Keterbatasan infrastruktur
4. Fluktuasi harga
5. Keamanan pangan
6. Manajemen organisasi ketahanan pangan

Analisa SWOT Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan isu-isu penting dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut :

i. Faktor internal

a. kekuatan (strengths).

1). Pasokan dan distribusi pangan yang memadai.

1) Adanya OPD yang menangani bidang pangan

3). Dukungan kebijakan pemerintah daerah.

4). Sebagai daerah transit perdagangan.

b. Kelemahan (weakness).

1) Belum beragamnya pola konsumsi masyarakat.

2) Belum tersedianya data subsistem distribusi pangan

3) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM petani
4) Kurangnya alokasi anggaran untuk ketahanan pangan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan

1. kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
2. anggaran APBD yang kurang memadai
3. sering terjadinya bencana alam (banjir musiman)
4. masih terdapat daerah rentan rawan pangan

2.3.3 **Dampak pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional atau internasional.**

Dinas Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Ketahanan Pangan diantaranya penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi serta evaluasi ketahanan pangan daerah. Hal ini mencakup beberapa indikator dan pelayanan dasar tugas desentralisasi yang diserahkan oleh pusat di bidang pangan. Dan cakupan tugas bidang pangan tersebut sesuai dengan Permentan Nomor 65 Tahun 2010 tentang standard pelayanan minimal bidang ketahanan pangan pada pasal 6 sebagaimana penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target capaian 2022;

a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
   1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90%
   2. Penguatan cadangan pangan 60%
b. Distribusi dan Akses Pangan:

1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90%
2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90%

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 99,04 %
2. Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 80%

d. Penanganan Kerawanan Pangan.

2.3.4. Faktor eksternal

a. Peluang (opportunities)
1) perkembangan teknologi dalam bidang pangan
2) sarana produksi pangan
3) program mandiri pangan
4) adanya kebiijakan moneter
5) adanya peraturan perundang-udangan.

b. Ancaman (threats)
1) bencana alam di daerah aliran sungai.
2) adanya daerah rawan pangan
3) areal pangan yang cenderung menurun
4) adanya daerah sulit dan terisolir.

2.3.5. Formulasi issu-issu penting

1. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan dengan target capaian yang wajib dipantau adalah gabah/beras, jagung, kedele dan cabe merah.
2. rendahnya akses pangan masyarakat.
3. status gizi masyarakat yang masih rendah.

4. mutu dan keamanan pangan yang belum terjamin.
5. fluktuasi harga pangan yang tidak stabil.

Kekuatan (strengths).	***Peluang (opportunities)***
1).Pasokan dan distribusi pangan yang memadai. 1) Adanya OPD yang menangani bidang pangan 3).Dukungan kebijakan pemerintah daerah. 4).Sebagai daerah transit perdagangan.	1)perkembangan teknologi dalam bidang pangan 2) sarana produksi pangan 3) program mandiri pangan 4)adanya kebiijakan moneter 5)adanya peraturan perundang-udangan.
Kelemahan (weakness)	***Ancaman (threats)***
1. Belum beragamnya pola konsumsi masyarakat 2. Belum tersedianya data subsistem distribusi pangan 3. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM masyarakat yang menghasilkan pangan 4. Kurangnya alokasi anggaran untuk ketahanan pangan	1) bencana alam di daerah aliran sungai. 2) adanya daerah rentan rawan pangan 3) areal pangan yang cenderung menurun 4) adanya daerah sulit dan terisolir.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat yang disusun mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kecamatan (Musrembangcam) dan terakhir melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang dilaksanakan setiap tahun merupakan rencana program dan kegiatan yang disusun dari bawah (buttom up planning) demikian juga untuk tahun 2024 perencanaan tetap memegang prinsip dan melalui proses buttom up planning.

Tabel 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Tabel : 2.4
Review terhadap rancangan
awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kampar

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**	**5,069,323,519**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**	**5,069,323,519**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100%**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100%**		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	139,399,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	139,399,000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen RKA SKPD	20 Dokumen	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen RKA SKPD	20 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	20 Dokumen	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	20 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen DPA SKPD	20 Dokumen	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen DPA SKPD	20 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	20 Dokumen	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	20 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerka dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen	4,476,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerka dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen	4,476,000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah laporan yang disusun	10 Dokumen	-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Jumlah laporan yang disusun	10 Dokumen	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**0**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	1 Tahun	3,197,319,100	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	1 Tahun	3,197,319,100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20 Dokumen	11,862,500	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20 Dokumen	11,862,500	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kampar	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	10 Dokumen	-	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kampar	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	10 Dokumen	-	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kampar	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	10 Dokumen	-	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kampar	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	10 Dokumen	-	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kampar	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	10 Dokumen	-	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kampar	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	10 Dokumen	-	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kampar	Tersedianya finger print	1 Unit	-	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kampar	Tersedianya finger print	1 Unit	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar	Tersdianya Pakaian Dinas Harian	60 Stel	-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar	Tersdianya Pakaian Dinas Harian	60 Stel	-	

	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	Meningkatnya sumber daya aparatur	10 Orang	-	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kampar	Meningkatnya sumber daya aparatur	10 Orang	-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Tahun	4,647,500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang Disediakan	1 Tahun	4,647,500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Tahun	307,296,200	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	1 Tahun	307,296,200	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Tahun	30,872,400	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Tahun	30,872,400	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Tahun	20,896,500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kampar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Tahun	20,896,500	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Media	25,693,200	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kampar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Media	25,693,200	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	281,461,700	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	281,461,700	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	-	

	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	117,791,219	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit	117,791,219	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Tersedianya mebel kantor	70 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Tersedianya mebel kantor	70 Unit	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Tersediannya mesin ginset	1 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Tersediannya mesin ginset	1 Unit	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Tersdiang gedung laboratorium uji pangan segar dan pangan olahan	1 Unit	-	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Tersdiang gedung laboratorium uji pangan segar dan pangan Olahan	1 Unit	-	
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Tersedianya Peralatan uji laboratorium pangan segar dan pangan olahan	1 Unit	-	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Tersedianya Peralatan uji laboratorium pangan segar dan pangan olahan	1 Unit	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Tahun	25,740,000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kampar	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Tahun	25,740,000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Tahun	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Tahun	-	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	1 Tahun	375,383,200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	1 Tahun	375,383,200	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Kampar**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Kampar**	**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Tahun	120,982,200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kampar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Tahun	120,982,200	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	1 Tahun	35,917,800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	1 Tahun	35,917,800	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Tahun	39,585,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Tahun	39,585,000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	330,000,000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	330,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		**Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga**	**100 %**	**513,621,700**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**		**Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga**	**100 %**	**513,621,700**	
	Kegiatan Penyediaan Infrasrtuktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Tersedianya infrasrtuktur kemandirian pangan**	**100%**		**Kegiatan Penyediaan Infrasrtuktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Tersedianya infrasrtuktur kemandirian pangan**	**100%**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK Fisik)	Kab. Kampar	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia	21 Gapoktan	-	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK Fisik)	Kab. Kampar	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia	21 Gapoktan	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Kampar	Jumlah infrastruktur lantai jemur yang tersedia	4 Gapoktan	-	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kab. Kampar	Jumlah infrastruktur lantai jemur yang tersedia	4 Gapoktan	-	
	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	150 KWT	513,621,700	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kab. Kampar	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	150 KWT	513,621,700	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		**Angka Pola Pangan Harapan**	**95.21**	**1,288,908,100**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Angka Pola Pangan Harapan**	**9521%**	**1,288,908,100**	
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		**Tercapinya Angka Pola Pangan Harapan**	**100%**		**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Tercapinya Angka Pola Pangan Harapan**	**100%**		
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kampar	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	21 Kecamatan	271,308,400	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Kampar	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	21 Kecamatan	271,308,400	
	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kampar	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	21 Kecamatan	237,376,700	Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Kampar	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	21 Kecamatan	237,376,700	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Kampar	Tersedianya bahan pertanian dan tersalurkannya produksi pertanian	21 Kecamatan	-	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Kampar	Tersedianya bahan pertanian dan tersalurkannya produksi pertanian	21 Kecamatan	-	
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Kampar	Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga	21 Kecamatan	-	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Kampar	Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga	21 Kecamatan	-	
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Kab. Kampar**	**Tersusunnya Rencana Kebutuhan dan Cadangan Pangan**	**100%**		**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Kampar**	**Tersusunnya Rencana Kebutuhan dan Cadangan Pangan**	**100%**		
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Kampar	Tersedianya sarana produksi lumbung pangan	21 Lumbung Pangan	71,310,000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Kampar	Tersedianya sarana produksi lumbung pangan	Lumbung Pang	71,310,000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	50 Ton	76,846,500	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	50 Ton	76,846,500	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Terpeliharanya cadangan pangan daerah	50 Ton	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Terpeliharanya cadangan pangan daerah	50 Ton		
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Kab. Kampar**	**Tercapainnya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun**	**100%**		**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Kab. Kampar**	**Tercapainnya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun**	**100%**		
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Kampar	Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi dan terlaksananya lomba cipta menu	1 Dokumen dan 2 Iven	276,036,400	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Kampar	Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi dan terlaksananya lomba cipta menu	okumen dan 2 I	276,036,400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kampar	Penguatan dan pengembangan kelompok wanita tani dalam intensifikasi pekarangan	150 KWT	356,030,100	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Kampar	Penguatan dan pengembangan kelompok wanita tani dalam intensifikasi pekarangan	150 KWT	356,030,100	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Kampar	Terlaksananya koordinasi capaian target pola konsumsi	21 Kecamatan	-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Kampar	Terlaksananya koordinasi capaian target pola konsumsi	21 Kecamatan	-	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		**Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan**	**100%**	**143,775,900**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan**	**100%**	**143,775,900**	
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		**Teridentifikasi daerah rawan pangan dan gizi**	**100%**		**Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**		**Teridentifikasi daerah rawan pangan dan gizi**	**100%**		
	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kampar	Peta dan analisis ketahanan pangan yang dimuthirkan	21 Kecamatan	143,775,900	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Kampar	Peta dan analisis ketahanan pangan yang dimuthirkan	21 Kecamatan	143,775,900	
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Kampar**	**Teridentifikasi daerah rawan pangan**	**100%**		**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Kampar**	**Teridentifikasi daerah rawan pangan**	**100%**		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Tersalurkan cadangan pangan pada daerah rawan pangan	21 Kecamatan	-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Tersalurkan cadangan pangan pada daerah rawan pangan	21 Kecamatan		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**Terpantaunya mutu dan keamanan pangan**	**100%**	**180,662,400**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Terpantaunya mutu dan keamanan pangan**	**100%**	**180,662,400**	
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		**Terlaksananya uji labor dan sertifikasi pangan**	**100%**		**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya uji labor dan sertifikasi pangan**	**100%**		
	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	126 Sample pangan segar	180,662,400	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	126 Sample pangan segar	180,662,400	

	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	126 Sample pangan segar	-	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	126 Sample pangan segar	-	
J U M L A H					**7,196,291,619**	**J U M L A H**				**7,196,291,619**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tabel : 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten kampar

No	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten**	**100 %**	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kampar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah dokumen RKA SKPD	20 Dokumen	
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	20 Dokumen	

			capaian kinerka dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah dokumen DPA SKPD	20 Dokumen	
	5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	20 Dokumen	
	6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerka dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen	
	7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan yang disusun	10 Dokumen	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kampar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	1 Tahun	
	2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Kabupaten	Jumlah laporan	20 Dokumen	

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kampar	keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	
	4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	10 Dokumen	
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Kampar	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	10 Dokumen	
	2. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kampar	Tersedianya dokumen kebutuhan barang	10 Dokumen	
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan	100 %	

			Pemerintah Daerah Kabupaten		
	1. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Kampar	Tersedianya finger print	1 Unit	
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kampar	Tersdianya Pakaian Dinas Harian	60 Stel	
	3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kampar	Meningkatnya sumber daya aparatur	10 Orang	
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Tahun	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Tahun	
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Tahun	
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kampar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	1 Tahun	

			disediakan		
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Kampar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Media	
	6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	
	3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Kampar	Tersedianya mebel kantor	70 Unit	
	4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kampar	Tersediannya mesin ginset	1 Unit	

	5. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Tersdiang gedung laboratorium uji pangan segar dan pangan olahan	1 Unit	
	6. Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Tersedianya Peralatan uji laboratorium pangan segar dan pangan olahan	1 Unit	
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Tahun	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Tahun	
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kampar	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Tahun	
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan	100 %	

			Pemerintah Daerah Kabupaten		
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kampar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Tahun	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kampar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	1 Tahun	
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Tahun	
	4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**		**Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga**	**100 %**	
1.	Kegiatan Penyediaan Infrasrtuktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai		Tersedianya infrasrtuktur kemandirian pangan	100 %	

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan (DAK Fisik)	Kabupaten Kampar	Jumlah infrastruktur lumbung pangan yang tersedia	21 Gapoktan	
	2. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kabupaten Kampar	Jumlah infrastruktur lantai jemur yang tersedia	4 Gapoktan	
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kabupaten Kampar	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	150 KWT	
III	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Angka Pola Pangan Harapan**	**95,21**	
1.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tercapinya Angka Pola Pangan Harapan	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kabupaten Kampar	Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	21 Kecamatan	
	2. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kabupaten Kampar	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	21 Kecamatan	
	3. Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kabupaten Kampar	Tersedianya bahan pertanian dan tersalurkannya produksi pertanian	21 Kecamatan	

	4. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kabupaten Kampar	Terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga	21 Kecamatan	
2.	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Tersusunnya Rencana Kebutuhan dan Cadangan Pangan	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kabupaten Kampar	Tersedianya sarana produksi lumbung pangan	21 Lumbung pangan	
	2. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	50 Ton	
	3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Terpeliharanya cadangan pangan daerah	50 Ton	
3.	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Tercapainnya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kabupaten Kampar	Tersedianya dokumen analisis pola konsumsi dan terlaksananya lomba cipta menu	1 Dokumen dan 2 Iven	
	2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kabupaten Kampar	Penguatan dan pengembangan kelompok wanita tani dalam intensifikasi pekarangan	150 KWT	

	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kabupaten Kampar	Terlaksananya koordinasi capaian target pola konsumsi	21 Kecamatan	
IV	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**		**Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan**	**100 %**	
1.	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Teridentifikasi daerah rawan pangan dan gizi	100 %	
	1. Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kabupaten Kampar	Peta dan analisis ketahanan pangan yang dimuthirkan	21 Kecamatan	
2.	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Teridentifikasi daerah rawan pangan	100 %	
	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Tersalurkan cadangan pangan pada daerah rawan pangan	21 Kecamatan	
V	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**		**Terpantaunya mutu dan keamanan pangan**	**100 %**	
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya uji labor dan sertifikasi pangan	100 %	

	1. Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	126 Sample pangan segar	
	2. Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kampar	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah/kabupaten kota	126 Sample pangan segar	

Perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang ata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Perencanaan dan penganggaran jangka menengah dan berbasis kinerja disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam beberapa tahun mendatang. Sedangkan program dan kegiatan disusun serta kebutuhan alokasi pendanaannya disusun berdasarkan rencana strategis. Pada prinsipnya perencanaan itu terdiri dari Buttom up planning dan top down up planning. Hal ini untuk dapat dipadukan menjadi suatu program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan diaplikasikan dalam masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 mempunyai visi :

"Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, Tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan"

Misi Badan Pangan Nasional

Untuk mencapai visi, maka misi Badan Pangan Nasional yaitu :

1. Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memantapkan satabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat produsen atau konsumen;
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;

5. Meningkatkan kwualitas konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang; dan
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

3.1.2. Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Riau.

Visi dan Misi Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4.737), Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan, maka sesuai dengan cakupan urusan Bidang Ketahanan Pangan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kondisi dan permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Riau, untuk merealisasikan Visi dan Misi Gubernur Riau ditetapkan Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai berikut:

A. VISI

"Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan".

Kata Kunci :

- **Handal;** Mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan;
- **Pemantapan Ketahanan Pangan;** Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, serta terjangkau;
- **Sumberdaya Lokal;** Berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan masyarakat;
- **Kemandirian Pangan.** Kemampuan dalam diversifikasi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

B. MISI

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut :

- Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan Provinsi Riau melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

- Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Sejalan dengan pokok-pokok visi dan misi Badan Pangan Nasional Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau perlu adanya perubahan dari paradigma lama menuju paradigma baru dalam penyelenggaraan Program Kegiatan Ketahanan Pangan yang mampu memberikan jalan keluar (way out) permasalahan melalui konsistensi dan holistic. Untuk mencapai paradigma baru dapat dicapai dari Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar dengan menetapkan visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai yaitu: ***"Menjadi institusi yang handal, inovatif dan aspiratif dalam mewujudkan ketahanan pangan 2026".***

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembar Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

3.2 Tujuan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar dibentuk dengan tujuan :

a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
b. Melaksanakan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.
c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan.

3.3 Sasaran

Menyikapi tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar pada Perda Nomor 6 Tahun 2016 yaitu Unsur Pelaksana Teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, maka yang menjadi sasarannya adalah :

a. Masyarakat atau kelompok masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan melalui strategi pemberdayan masyarakat dengan meiplementasikan teknologi produksi dan pangan dengan memanfaatkan arial pekarangan rumah dengan tujuan meningkatkan

kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga akan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan menuju kesejahteraan.

b. Pemangku kepentingan di Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi kelompok atau generasi muda dan tokoh masyarakat menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Beberapa program yang mendukung ketersediaan dan kemandirian yang sejalan dengan program nasional adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.3 Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

1.3.4 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.4 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.5 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5.6 Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

2.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

2.1.3 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

3.1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

3.1.2 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

3.1.3 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

3.1.4 Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

3.2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

3.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

3.2.2 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.2.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3.3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

3.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

3.3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

4.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

4.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

4.2 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

4.2.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2 Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**7.196.291.619**
	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.399.000
	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0
	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0
	1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0
	1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0
	1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	44.760.00

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	1.1.7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.197.319.100
	1.2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.862.500
	1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0
	1.2.4 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0
	1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	1.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
	1.3.2 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
	1.3.3 Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
	1.3.4 Sub Kegiatan Peningkatan	0

	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	1.3.5 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0
	1.3.6 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0
	1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.647.500
	1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.296.200
	1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.872.400
	1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.896.500
	1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.693.200
	1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.461.700
	1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik	

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0
	1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.791.219
	1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0
	1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0
	1.5.5 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
	1.5.6 Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0
	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.740.000
	1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0
	1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	375.383.200

	Kantor	
	1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.982.200
	1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.917.800
	1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.585.000
	1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.000.000
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**513.621.700**
	2.1 Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	0

	2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	0
	2.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	513.621.700
3.	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1.288.908.100**
	3.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
	3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	271.308.400
	3.1.2 Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	237.376.700
	3.1.3 Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	0
	3.1.4 Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0
	3.2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

	3.2.1 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	71.310.000
	3.2.2 Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76.846.500
	3.2.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0
	3.3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	3.3.1 Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	276.036.400
	3.3.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	356.030.100
	3.3.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	0
4.	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**143.775.900**
	4.1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan	

	Pangan Kecamatan	
	4.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	143.775.900
	4.1 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	4,2,1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0
5.	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**180.662.400**
	5.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
	5.1.1 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	180.662.400
	5.1.2 Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0
T O T A L		**7.196.291.619**

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar tahun 2024 berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KAMPAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETAHANAN PANGAN						**7.196.291.619,00**							**9.355.179.105,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.196.291.619,00**							**9.355.179.105,00**	
	-	-						**7.196.291.619,00**							**9.355.179.105,00**	
1.	-	-	***Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten***	-			**100 Persen**	**5.069.323.519,00**						-	**6.590.120.575,00**	
	-	-	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten*	-			100 Persen	143.875.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	187.037.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	139.399.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		181.218.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	4.476.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		5.818.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten*	-			100 Persen	3.209.181.600,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	4.171.936.080,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20 Laporan	11.862.500,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		15.421.250,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.197.319.100,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		4.156.514.830,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten*	-			100 Persen	670.867.500,00			-	Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	872.127.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	4.647.500,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Bidang Ekonomi	-		6.041.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	307.296.200,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Bidang Ekonomi	-		399.485.060,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.872.400,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Bidang Ekonomi	-		40.134.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.896.500,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Bidang Ekonomi	-		27.165.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	25.693.200,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		33.401.160,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	281.461.700,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		365.900.210,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-	*Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten*	-			100 Persen	401.123.200,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	521.460.160,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.740.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		33.462.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	375.383.200,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		487.998.160,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten*	-			100 Persen	526.485.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Infrastruktur	-	-	684.430.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	120.982.200,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Infrastruktur	-		157.276.860,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	35.917.800,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		46.693.140,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	39.585.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		51.460.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	-	-	***Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga***	**20 Persen**			**100 Persen**	**513.621.700,00**						**20 Persen**	**667.708.210,00**	
	-	-	*Tersedianya Infrastruktur Kemandirian Pangan*	-			6 KWT	513.621.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	667.708.210,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				6 Unit	513.621.700,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		667.708.210,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**-**	**-**	***Angka Pola Pangan Harapan***	**100 Persen 100 Persen 100 Persen**			**100 Persen**	**1.288.908.100,00**						**20 Persen 20 Persen 20 Persen**	**1.675.580.530,00**	
	-	-	*Tersedianya Informasi Harga dan Stok Pangan*	-			21 Kecamatan	508.685.100,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	661.290.630,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				12 Laporan	271.308.400,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		352.700.920,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	237.376.700,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		308.589.710,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-	*Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten*	-			21 Kecamatan	148.156.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	192.603.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				12 Dokumen	71.310.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		92.703.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				300 Ton	76.846.500,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		99.900.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-	*Terlaksananya Capaian Target Pola Konsumsi Masyarakat*	-			21 Kecamatan	632.066.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	821.686.450,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				20 Dokumen	276.036.400,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		358.847.320,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				12 Laporan	356.030.100,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		462.839.130,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	-	-	***Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**143.775.900,00**						**20 Persen**	**186.908.670,00**	
	-	-	*Teridentifikasinya Daerah Rentan Rawan Pangan dan Gizi*	-			21 Kecamatan	143.775.900,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	186.908.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				20 Dokumen	143.775.900,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		186.908.670,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	-	-	***Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten***	**100 Persen**			**100 Persen**	**180.662.400,00**						**20 Persen**	**234.861.120,00**	
	-	-	*Terlaksananya Uji Labor dan Sertifikasi Pangan*	-			21 Kecamatan	180.662.400,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	234.861.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	180.662.400,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		234.861.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	-	-	***Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten***	-			**100 Persen**	**5.069.323.519,00**						-	**6.590.120.575,00**	
	-	-	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten*	-			100 Persen	526.485.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	684.430.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	330.000.000,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		429.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-	*Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten*	-			100 Persen	117.791.219,00			-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-	-	153.128.585,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	-	-														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	117.791.219,00	- Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Perekonomian Peningkatan Bidang Ekonomi	-		153.128.585,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H							**7.196.291.619,00**							**9.355.179.105,00**	

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar tahun 2024 ini disusun atas dasar evaluasi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pangan serta kenyataan yang ada dalam masyarakat dari kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan dalam melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar tahun 2024 sangat ditentukan oleh kemampuan dan kesanggupan serta tanggung jawab dari setiap unsur pelaksana dalam penyelenggaraan program dan kegiatan ketahanan pangan disamping dukungan dan kerjasama dengan instansi terkait.

Bangkinang, Juni 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KAMPAR



Drs. MUHAMMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711015 199303 1 004

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

DOKUMEN

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR
JL. PROF, M. YAMIN, SH NO. 59 BANGKINANG KOTA

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Kampar NomorTahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar untuk priode 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c. BAB III : Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024).

(3) Pelaksanaan lebih lanjut Renja PD Kabupaten Kampar Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Pasal 4

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
c. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;
d. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
e. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
f. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Rencana Kerja Dinas Sosial;

h. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
j. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
k. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
l. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan ;
o. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
q. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
t. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
u. Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
v. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
w. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK;
x. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
y. Rencana Kerja Inspektorat;
z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
aa. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
bb. Rencana Kerja Badan Pedapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
dd. Rencana Kerja Sekertariat Daerah;
ee. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
ff. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hilir;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Tapung Hulu;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Tapung;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Tambang;
ll. Rencana Kerja Kecamatan Kampar;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Siak Hulu;
oo. Rencana Kerja Kecamatan XIII Koto Kampar;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Rumbio Jaya;

qq. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Utara;
rr. Rencana Kerja Kecamatan Kampa;
ss. Rencana Kerja Kecamatan Salo;
tt. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang;
uu. Rencana Kerja Kecamatan Kuok;
vv. Rencana Kerja Kecamatan Bangkinang Kota;
ww. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Tengah;
xx. Rencana Kerja Kecamatan Kampar Kiri Hilir;
yy. Rencana Kerja Kecamatan Gunung Sahilan;
zz. Rencana Kerja Kecamatan Perhentian Raja;
aaa. Rencana Kerja Kecamatan Koto Kampar Hulu;

Pasal 5

Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 13 Juli 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

MHD. FIRDAUS

Diundangkan Di Bangkinang
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 18

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PERIKANAN
JLN. PROF. M. YAMIN, SH NO. 59 TELP. (0762) 20093 FAX. (076220648
BANGKINANG - 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 900/DISKAN-SET/2023/ 112

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR

Menimbang :

a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2024;

b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2023 dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2024 ;

c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah.
8 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keptusan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2024.

KESATU : Tim Penyusun (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2024. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ;
3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kampar;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Peemerintah Kabupaten Kampar ;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kampar;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2024 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : MARET 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAMPAR



ZULFAHMI, S.Pi, M.Si
NIP. 19690927 199803 1 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR

No	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Sekretaris	Wakil Ketua
3	Perencanaan Muda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perbenihan	Anggota
5	Kepala Bidang Budidaya	Anggota
6	Kepala Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelembagaan	Anggota
7	Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan	Anggota
8	Ka. UPT BBI	Anggota

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAMPAR

ZULFAHMI, S.Pi, M.Si
NIP. 19690927 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dapat diterbitkan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) merupakan rencana satu tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan serta analisis dari kegiatan tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2024 ini maka Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah mempunyai rencana rinci dan telah dijabarkan dengan skalaprioritas dan sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2023-2026

Untuk selanjutnya RENJA diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RENJA diharapkan menjadi komitmen bersama dan skenario pembelajaran rencana tahunan ke depan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ada guna dan manfaatnya dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Bangkinang Kota, 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAMPAR



ZULFAHMI, S,Pi, M.Si
NIP. 196909 199803 1 003

DAFTAR 1SI

KATA PENGANTAR i

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstra Perangkat Daerah..... 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah... 46

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 59

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 57

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 61

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 61

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 65

3.3 Program dan Kegiatan 65

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 66

V. PENUTUP 72

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJADinas Perikanan Kabupaten Kampar mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kampar mengingat beberapa hal sebagaiberikut :

1) RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam
   Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2) RENJA Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)
   pada tahun 2024.
3) RENJA Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasipelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD.

Mengingat arti strategis RENJA Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
2) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026;
3) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4) Program dan Kegiatan dalam RENJA dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2024 ini telah melalui beberapa tahapan :

1) Tahapan Persiapan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja, Orientasi mengenai Renja, Penyusunan Agenda Kerja serta penyiapan data dan informasi.

2) Tahap perumusan Rancangan Renja
3) Tahap penyajian Rancangan Renja

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar disusun dengan berpedoman kepada RPD Kabupaten Kampar dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor: 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor: 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar;
24. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Dinas Perikanan Kabupaten Kampar
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019- 2039.
26. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar tahun 2023- 2026;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

a Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar adalah :

1) Sebagai dasar acuan khususnya bagi aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan berbagai stakeholder yang terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun;

2) Sebagai petunjuk arah serta pedoman dalam menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar selama 1 (satu

) tahun anggaran

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar adalah :

1) Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah
2) Memberikan arah dan acuan bagi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati. Seluruh upaya dilakukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan koordinasi dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
3) Untuk menjadi bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dalam pelaksanaan program kegiatan lebih efektif dan efisien;
4) Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan dengan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
5) Sebagai media pengukur kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi;

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2024 meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang penulisan serta maksud dan tujuan renstra

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perangkat Daerah, fungsi Renja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan

1.2 Analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

1.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2024 maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi dan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
				Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9=4+6+8	10=9/3
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
a. Perencanaan, Pnganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Presentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	3 Dokumen	15%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA□SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA□SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA□SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA□SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								
Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	13%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Dokumen	0%
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	1 Paket	1 Paket	25%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 Orang	0%
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase Peningkatan administrasi umum perangkat daerah**								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	2 Paket	13%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	2 Paket	13%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	2 Paket	13%
Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	13%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	2 Paket	13%
Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.832 Dokumen	2.208 Dokumen	2.208 Dokumen	2.208 Dokumen	100%	2.208 Dokumen	1104 Dokumen	13%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	13%
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	2 Unit	2 Unit	25%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	312 Unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	78 Unit	0 Unit	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 Unit	0%
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	13%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	13%

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	6 unit	13%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%	12 Unit	6 unit	13%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	3 Unit	0 unit	0%
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah sungai, danau, dan waduk**								
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1.800 Unit	360 Unit	360 Unit	360 Unit	100%	451 Unit	20 unit	1%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.270 Unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%
b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil**								
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	400 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	0 orang	0 Orang	0%
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	100 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	100%	25 Kelompok	10 Orang	10%

c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Persentase Terkelolanya dan terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan secara baik**								
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	20 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0 Layanan	0%	0 Layanan	0 Layanan	)5
3. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	**Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pembudidaya Ikan Kecil**								
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi dan atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang mengunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif dan Intensif serta tidak Mengunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	40 Rekomndasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%

Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	40 Rekomndasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%	0	0 Rekomendasi	0%
b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Persentase Terlaksananya pemberdayaan pembudidaya ikan kecil**								
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	120 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	100%	50 Kelompok	4	
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	20 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	6 Kelompok	2 Kelompok	10%
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	4 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0%	0	0 Kelompok	0%
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	32 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	5 Kelompok	3	9%

c. Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	**Persentase Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil**								
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil	40 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Tanda Daftar Perikanan Budidaya	40 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%
d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi, Pemenuhan Sarana Prasarana, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan**								
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	8 Unit	3 unit	2%
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	1 unit	8%
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	13%

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	400 Orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	20 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0%	0 Ha	0 Ha	0%
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	200 Orang	0 orang	0 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%
4. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	**Persentase Terlaksananya pengawasan dan kelestarian sumberdaya perairan/perikanan**								
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	28 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	7 Dokumen	1 Dokumen	4%
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	50 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	%

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Persentase usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil**								
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0	0%
b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Miro dan Kecil	**Persentase Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang bersertifikasi Mutu**								
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	23 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%	10 Unit Usaha	4	17%
c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penyediaan dan Penyaluran bahan baku Industri Pengolahan Ikan**								
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.000 Ton	8.000 Ton	8.000 Ton	8.000 Ton	100%	8.000 Ton	3000 ton	38%
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Prikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitas	120 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100%	30 Pelaku Usaha	15	13%

Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI TAHUN		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	-		59.000	59.885	60.783	61.695					

Dari tabel diatas capaian kinerja Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Kampar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perikanan Budidaya

Potensi pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Kampar cukup luas dan mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Untuk budidaya kolam ikan tersedia areal seluas 6.111,3 Ha, dari luas tersebut telah diusahakan seluas 863,48 ha atau 14,13 %. Produksi budidaya perikanan Kabupaten Kampar pada tahun 2021 mencapai 56.985,79 Ton.

Untuk budidaya keramba dan jaring apung tersedia areal seluas 410 ha antara lain mencakup: waduk PLTA Koto Panjang selaus 275 Ha, sungai seluas 125 Ha, dan danau lainnya seluas 10 Ha. Dari jumlah tersebut baru dimanfaatkan untuk budidaya keramba seluas 48.14 Ha (11.74 %) atau sebanyak 7.521 unit.

Sejalan dengan perkembangan usaha perikanan budidaya, usaha perbenihan ikut berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan benih. Hal ini terlihat dari produksi pada tahun 2021 sebesar 251.862 juta menjadi 267.582 juta ekor pada tahun 2022.

Perikanan Tangkap

Dari target RPJM sebesar 2.600 ton tahun 2022 telah terealisasi sebesar 2.417,3 ton atau mencapai 92,97 %. Secara keseluruhan perikanan tangkap di Periran Umum Darat (PUD) memberikan peranan penting yakni sebagai sumber protein dan ketahanan pangan, sumber lapangan kerja, dan sumber pendapatan masyarakat. Selain itu dalam perspektif plasma nutfah dan genetik, PUD Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan yang tinggi, sehingga tercatat sebagai salah satu perairan dengan "*Mega Biodiversity*" di dunia.

Dengan Potensi yang dimiliki oleh oleh Kabupaten Kampar namun produksi perikanan di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurununan ini dikarenakan Faktor Cuaca yang tidak menentu seperti terjadinya Bencana Kabut Asap di seluruh Wilayah di Sumatera dan ditambah lagi dengan adanya bencana Nasional bahkan Dunia dengan Ancaman Dampak pandemi Covid-19 terhadap perikanan skala kecil; Banyak pengusaha ikan skala kecil mengalami kesulitan ketika dilakukan pembatasan sosial (social distancing) yang menghambat distribusi produk ikan ke konsumen dan diperparah dengan adanya penurunan permintaan dan harga ikan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kampar No. 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Perikanan. Dalam melaksanakan tugastersebut diatas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, bidang Perbenihan Perikanan, bidang budidaya perikanan, bidang penguatan daya saing hasil perikanan dan bidang sumberdaya perikanan dan kelembagaan
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, bidang Perbenihan Perikanan, bidang budidaya perikanan, bidang penguatan daya saing hasil perikanan dan bidang sumberdaya perikanan dankelembagaan
c. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, bidang Perbenihan Perikanan, bidang budidaya perikanan, bidang penguatan daya saing hasil perikanan dan bidang sumberdaya perikanan dan kelembagaan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasinya Dinas Perikanan adalah terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perbenihan Perikanan
d. Bidang Budidaya Perikanan
e. Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan
f. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelembagaan
g. Kelompok Jabatan Fumgsional

Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertangungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang perikanan

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, kewenangan di bidangperikanan;
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikananyang menjadi kewenangan kabupaten;
c. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis di bidang perikanan;
d. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanaan;
e. Melakukan pengelolaan, pembinaan usaha dan pelayanan perizinan di bidangperikanan;

f. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumberdaya perikanan;
g. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring kegiatan perikanan tangkap;
h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan dan organisasi Dinas;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pematauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan milik daerah serta umum dan kepegawaian.

1. Sekretaris meyelenggarakan fungsi
a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
b. Penghimpunan dan pengoordinasiaan, penyusunan data informasi, evaluasi, dan penyelenggaran kegiatan
c. Penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang
d. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, pengamanan serta pemafaatan barang yang dikuasai oleh dinas perikanan
e. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, penata usahaan keuangan, penyelenggaraan rumah tangga dan perjalanan dinas
f. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja
g. Pengelolaan kearsipan

h. Menilai hasil kerja bawahan
i. Menyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, pengelolaan asset, kepegawaiaan dan pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

   Kepala Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian meyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan administrasi surat meliputi penerimaan pengiriman dan pendistribusian surat
b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum
c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
d. Pelaksanaan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan pertokolan
e. Pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
f. Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor.
g. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertipan kantor.

h. Pelaksanaan koordinasi dan pelayananan administrasi kepegawaian antara lain karpeg, karis/ karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraianpegawai, daftar hadir pegawai, surat ijin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, penilaian kinerja pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; pension pegawai dan urusan kepegawaian lainnya;

i. Pelaksanaan pengolahan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

j. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan kepegawaian;

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Perbenihan Perikanan

1. Kepala Bidang Perbenihan Perikanan mempuyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan serta evaluasi bidang perbenihan

   Kepala Bidang Perbenihan meyelenggarakan fungsi

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan usaha perbenihan ikan

b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan mutu benih ikan daninduk ikan unggul.

c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan benih ikan bermutu dan induk ikan unggul.

d. Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan unit perbenihan rakyat (UPR)
e. Pelaksanaan penerapan standarisasi serta sertifikasi mutu benih dan induk ikan
f. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan.
g. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan pembenihan ikan,pembinaan dan pengawasan mutu benih ikan dan induk ikan;
h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
i. Menilai hasil kerja bawahan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.

Kepala Bidang Budidaya Perikanan

(1) Bidang Budidaya Perikanan melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi bidang budidaya perikanan
(2) Kepala Bidang Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan usaha budidaya ikan;
b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan pakan ikan;
c. Penyusunan program kegiatan bidang pengembangan budidaya ikan,pembinaan dan pengawasan pakan ikan dan pasca panen ikan;
d. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Unit Pelaksana TeknisDinas Laboratorium Penyakit Ikan dan Kualitas Air;
e. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan unit pelaksana teknis dinas pakan ikan

f. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan budidaya ikan, pembinaandan pengawasan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan
g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
h. Menilai hasil kerja bawahan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikanan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan

(1) Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan mempuyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pememantau dan evaluasi bidang pengutan daya saing hasil perikanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan menyelenggarakan tugas:

Uraian tugasnya adalah :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
b. perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta penguatan kelembagaan perikanan;
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana perikanan serta penguatan kelembagaan perikanan;
d. Penyelenggaraan pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana perikanan serta penguatan kelembagaan perikanan;
e. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan Unit Pelaksana teknis Dinas pengolahan ikan;
f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran, pengembangan sarana prasarana perikanan serta penguatan kelembagaan perikanan;

g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
h. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelembagaan

(1) Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan penyusuanan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pemantauan dan evaluasi bidang sumberdaya perikanan dan kelembagaan

(2) Kepala Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelembagaanmenyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan kegiatan bidang sumberdaya perikanan dan kelembagaan;
b. Perumusan kebijaksanaan teknis konversi perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan, serta pengawasan mutu perairan darat;
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perlindungan sumberdaya perikanan
d. Penyelenggaraan perlindungan sumberdaya perikanan serta standarisasi dan pengawasan mutu perairan darat;
e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sumberdaya perikanan dan lingkungan serta penguatan kelembagaan perikanan;
f. Menyusun program, perumusan, pengindentifikasi, dan pengelolaan para nelayan dan perairan umum daratan (PUD);
g. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengayaan stuck ikan melalui restucking, pemulihan dan domestifikasi jenis ikan lokal;

h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
i. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional

I. Sekretariat terdiri dari :

Fungsional Perencanaan Muda (Sub. Koordinator Sub Bagian Program dan Perencanaan)

Uraian Tugas dan Fungsi adalah :

a. Melakukan pengumpulan, pengelolahan, analisa dan evaluasi penyiapanserta penyajian data dinas;
b. Melakukan study dan survey/identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait;
c. Mempersiapkan dan mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) dan daftar pelaksanaan anggaran (DPA);
d. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan proyek serta merumuskan, mengelolah, mengevaluasi serta menyusun laporan;
e. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan;
f. Menyiapkan kebijakan teknis di masing-masing bidang dan institusi Kepala Bidang terkait;
g. Melaksanakan proses revisi RKA/PO bilamana diperlukan;
h. Menyelesaikan bahan laporan Tahunan Dinas, renja SKPD, rencana strategis,RPJM dan RPJP dengan institusi/Kepala Bidang terkait;
i. Mempersiapkan/ mengkoordinir laporan bulanan/ tahunan kegiatan proyek pembangunan;

j. Melaksanakan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja program kegiatan tahunan tersebut;
k. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumenpelaksanaan anggaran;
l. Menyusun dokumen program kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);
m. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub. Koordinator Keuangan dan Aset)

Uraian Tugasnya adalah :

a. Menyusun Rencana Kerja subbagian;
b. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menetukan prioritas;
c. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Biro keuangan Setda/ Bappeda Kabupaten Kampar;
d. Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari Rutin dan Bidang-bidang / PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD);
e. Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD yang telah diterbitkan;
f. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;
g. Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;

h. Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU gaji dan tunjangan PNS lainnya yang disampaikan bendaharawan pengeluaran;
i. Meneliti/membuat surat perintah membayar (SPM) yang akan diterbitkan Pengguna Anggaran;
j. Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mencatat SP2D serta membuat laporan bulanan SP2D yangtelah diterbitkan;
k. Meneliti, mengawasi dan mengurusi Pelaksanan Pembukuan Penerima dan Pengeluaran belanja SKPD;
l. Melakukan pemantauan pelaksaan anggaran rutin, meneliti konsep penyusunananggaran rutin dan membahas anggaran rutin;
m. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan;
n. Meneliti dan menandatangani pengesahaan surat pertanggung jawaban (SPJ);
o. Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan akuntansi SKPD, serta membuat jurnal;
p. Membuat konsep perhitungan permintaan gaji pegawai, honorarium dan bebankerja;
q. Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran gaji,membuat permintaan gaji pokok, rapel honorarium;
r. Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi pegawai untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
s. Memenuhi permintaan kenaikan gaji berkala;
t. Melakukan wajib pungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
u. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi anggaran SKPD;
v. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan);

w. Mengoreksi laporan bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan tentang keuangan;
x. Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah yang bersifat insidentil dibidang keungan untuk mendapatkan pedomanmenyelesaikan tugas;
y. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
z. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Bidang Perbenihan Perikanan

1. Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (Sub. Koordinator Standarisasi dan Sertifikasi Mutu Benih)

Uraian tugasnya adalah :

a. Menyusun rencana kerja seksi standarisasi dan sertifikasi mutu benih;
b. Melakukan pembinaan terhadap mutu benih yang dihasilkan oleh unit pembenihan rakyat dan Balai benih Ikan;
c. Melakukan sosialisasi dan inventarisasi terhadap unit pembenihan rakyak yang disertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
d. Menfasilitasi Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang baik (CPIB);
e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Cara Pembenihan Ikan YangBaik (CPIB);
f. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap Pembina mutu perbenihan;
g. Melakukan identifikasi dan pendataan penggunaan induk ikan unggul;
h. Melakukan penyiapan bahan standarisasi benih dan induk ikan;
i. Memfasilitasi unit pembenihan rakyat dan balai benih ikan dalam rangka memperoleh induk ikan unggul;
j. Melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan induk ikan unggul;
k. Mensosialisasikan penggunaan induk ikan unggul;

l. Melakukan pemantauan dan pengawasan mutu induk ikan;

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

n. Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsional Pengawas Perikanan (Sub. Koordinator pembenihan ikan)

Uraian tugasnya adalah :

a. Menyusun rencana kerja seksi pembenihan ikan;

b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana perbenihan ikan;

c. Melakukan pengembangan produksi dan distribusi ikan;

d. Melakukan pembinaan terhadap sarana dan prasarana perbenihan serta penerapan teknolgi pembenihan ikan;

e. Melaksanaan penerapan teknologi pembenihan ikan;

f. Melakukan identifikasi, dan pendataan teknologi pembenihan ikan dan saranaserta prasarana perbenihan ikan;

g. Menyiapkan data dukungan untuk penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembenihan;

h. Menyiapkan rekomendasi teknis bidang pembenihan untuk penerbitan Tanda Daftar Pencatatan Usaha Perikanan (TDPUP);

i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan;

j. Melakukan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi pembenihan ikan;

k. Melakukan pembinaan dan penerapan teknologi pengelolaan induk ikan unggul;

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. Bidang Penguat Daya Saing Hasil Perikanan

1. Fungsional Pengawas Perikanan (Sub. Koordinator Bina Usaha dan Perizinan)

(1) Uraian tugasnya adalah :

a. Membantu kepala bidang penguat daya saing hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas dalam urusan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

b. Perumusan kebijakan program dan kegiatan Bina Usaha dan Perizian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Melakukan pengembangan produksi dan distribusi produksi pengolahan hasil perikanan;

d. Menyiapkan rekomendasi teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk penerbitan Tanda Daftar Pencatatan Usaha Perikanan (TDPUP);

e. Melaksanakan Tanda Daftar Pencatatan Usaha Perikanan (TDPUP);

f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan standarisasi mutu hasil perikanan;

g. Memfasilitasi kelompok-kelompok perikanan dalam rangka memperoleh modalusaha;

h. Memberikan sarana dan bahan pertimbangan kepada kepala Bidang perikanan Budidaya yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan produksi budidaya perikanan dalam hal pengambilan keputusan/ kebijakan;

i. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Fungsional Pengawas Perikanan (Sub. Koordinator Bina Mutu, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan)

Uraian tugasnya adalah :

a. Melaksanakan pemantauan penyebaran informasi pengembangan bidang usaha pemasaran perikanan;
b. Melakukan identifikasi dan inventarisasi pada unit pengolahan ikan (UPI)
c. Memfasilitasi sertifikasi GMP bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
d. Mensosialisasikan standar pengawasan mutu mencakup SSOP (Standar Prosedur Sanitasi dalam Oprasional) dan cara mengolah ikan yang baik (GMP) ;
e. Melakukan penyiapan bahan standarisasi dan pengawasan mutu hasil perikanan;
f. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil perikanan;
g. Melaksanakan pengujian dan pengawasan proses dan mutu produk pengolahan hasil perikanan;
h. Memfasilitasi sertifikasi produk hasil perikanan
i. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan;
j. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan standarisasi mutu hasil perikanan;
k. Melakukan koordininasi dan pelaksanaan kegiatan Gemar ikan dan Forikan;
l. Melakukan persiapan bahan promosi hasil produksi perikanan dalam rangka pengembangkan dan perluasan jaringan pemasaran;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Budidaya Perikanan

1. Fungsional Analis Akuakultur (Sub. Koordinator Pakan Ikan)

Uraian tugasnya adalah:

a. Membantu kepala bidang budidaya perikanan, dalam melaksanakan tugas dalam urusan produksi bidang perikanan budidaya;
b. Perumusan kebijakan program dan kegiatan pakan ikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Melaksanakan pengembangan usaha pembuatan ikan;
d. Menyiapkan data dukung untuk penerbitan rekomendasi izin usaha pembuatan pakan ikan;
e. Menyiapkan rekomendasi teknis untuk penerbitan tanda pendataan usaha pembuat pakan ikan (TPUPPI);
f. Mengikuti/ melaksanakan ketentuan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB);
g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap pengembangan usaha pakan ikan mandiri;
h. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produksi, dan pengembangan karir bawahan;
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang perikanan budidaya, berkaitan dengan penggunaan dan produksi budidaya perikanan dalam hal pengambilan keputusan/ kebijakan;
j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan pakan ikan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Sub. Koordinator Produksi dan Kesehatan Ikan)

Uraian tugasnya adalah :

a. Melaksanakan tugas dalam urusan produksi budidaya bidang budidaya perikanan;
b. Perumusan kebijakan program dan kegiatan Seksi Produksi Budidaya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Melaksanakan pengembangan produksi dan distribusi produksi budidaya perikanan;
d. Menyiapkan data dukung untuk penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;
e. Melaksanakan Tanda Pendataan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
f. Melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
g. Melaksanakan pembinaan teknis produksi budidaya perikanan;
h. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan produksi budidaya perikanan dalam hal pengambilan keputusan/kebijakan;
i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Produksi Budidaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Penyebab Penyakit Ikan;
k. Melakukan Pengendalian Penyakit Ikan;
l. Melakukan Pengawasan, Penyiapan Bahan Rekomendasi SertifikasiPengendalian Penyakit Ikan;
m. Menyiapkan Bahan Koordinasi dalam rangka Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Ikan;
n. Melakukan Penyuluhan dan Pembinaan Terhadap PenangananPenyakit/Kesehatan Ikan;

o. Melakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Ikan;

p. Melaporkan kepada kepala bidang budidaya perikanan, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasa.

V. Bidang Sumber Daya Perikanan Dan Kelembagaan

1. Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (Sub. Koordinator Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan)

Uraian tugasnya adalah;

a. Melaksanakan perumusan dalam identifikasi dan klarifikasi nelayan dan lingkungan diperairan umum;

b. Melaksanakan perumusan pelaksanaan pertanahan Nelayan;

c. Melaksanakan pelayanan penguatan modal nelayan;

d. Melaksanakan bimbingan teknisi dan penataan bagi nelayan;

e. Melaksanakan dan penyusunan aturan, standar prosedur, kriteria pengelolaanusaha nelayan dan lingkungan diperairan umum;

f. Melaksanakan fasilitas diversifikasi usaha nelayan;

g. Melakukan pelayanan informasi dan pendataan nelayan dalam persuratan, dokumentasi dan adminitrasi;

h. Melaksanakan validasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan nelayan Dan lingkungan diperairan umum;

i. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana bagi nelayan sertamerevitalisasi kegiatan perikanan tangkap di perairan umum;

j. Melakukan identifikasi dan imventarisasi sumberdaya perikanan di perairanumum daratan;

k. Melaksanakan penataan dan pemamfaatan sumberdaya perikanan di perairanumum daratan;

l. Melaksankan pengawasan terhadap perlindungan sumberdaya perikanan diperairan umum daratan;

m. Melaksanakan monitoring dan observasi kwalitas perairan sebagaisumberdaya perairan;
n. Melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap kelestarian sumberdaya perikanan;
o. Melakukan rehabilitasi pengayaan stock ikan melalui restocking, pemulihandan domestifikasi jenis ikan local;
p. Menentukan kapasitas daya dukungan sumberdaya perikanan;
q. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perlindungan sumberdayaperikanan dan karantina ikan;
r. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiaatanperlindungan sumberdaya perikanan dan karantina ikan;
s. Melaksanakan domestifikasi jenis-jenis ikan lokal;
t. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas danfungsinya.

2. Fungsional Pengawas Perikanan (Sub Koordinator Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Perikanan)

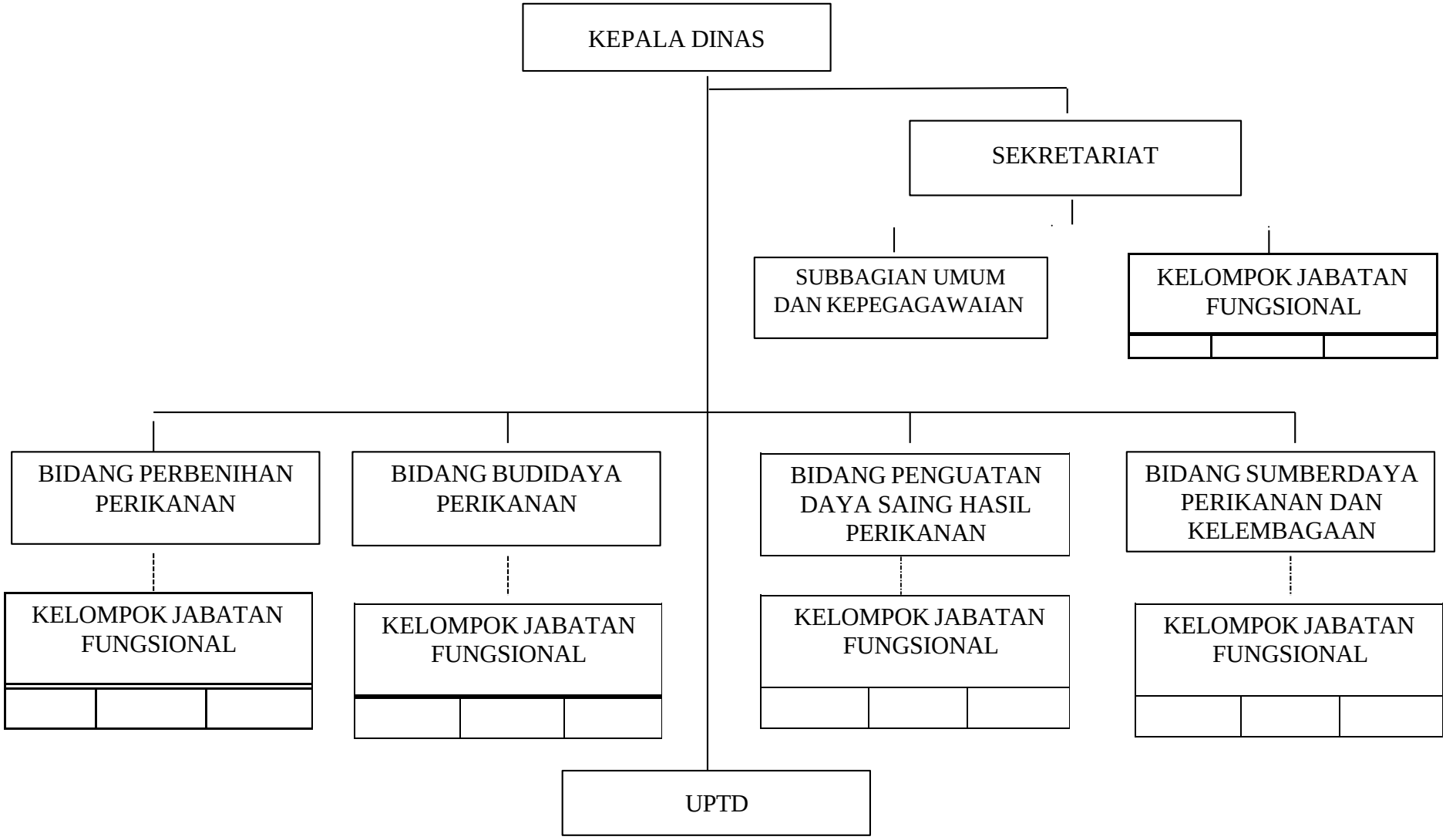
Uraian tugasnya adalah:

a. Menyusun rencana kerja seksi sumberdaya manusia dan kelembagaan perikanan;
b. Melaksanakan bimbingan teknis managerial pelaku usaha perikanan;
c. Melaksakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat perikanan;
d. Memfasilitasi kerja sama kelompok masyarakat perikanan dengan pihak ketiga (BUMN / BUMD dan pengusaha perikanan);
e. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga teknis perikanan dan pelaku usaha perikanan lainnya;
f. Menumbuh kembangkan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan;
g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan SDM dan kelembagaan perikanan;

h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kelembagaan perikanan;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan perikanan;
j. Melaksanakan penilaian dan pengukuhan kelas kelompok;
k. Menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan dan arahan bersama tenaga penyuluh perikanan;
l. Melakukan lomba kelompok utama dan pelaku usaha bidang perikanan ditingkat kabupaten;
m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 77 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

STRUKTUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR



Capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022

No.	Indikator	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan (ton)												
	- Penangkapan	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	3,772	2,025	2.147.02	2,792.35	2.423.88	2.417.48
	- Budidaya	56.900	59.400	61.900	64.400	66.900	69.400	58.148	63.752	57.095.55	51.895.63	56.985.79	65.167.80

2.3. Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Isu dan Permasalahan

Potensi pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Kampar cukup luas dan mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Untuk budidaya kolam ikan tersedia areal seluas 6.111,3 Ha, dari luas tersebut telah diusahakan seluas 863,48 ha atau 14,13 % dengan produksi pada tahun 2020 mencapai 37.604,500 Ton atau dengan tingkat produktifitas baru mencapai 43,55 ton/ha/tahun, sedangkan tingkat produktifitas optimum budidaya kolam dapat mencapai 50 – 75 ton/ha/tahun.

Untuk budidaya keramba dan jaring apung tersedia areal seluas 410 ha antara lain mencakup: waduk PLTA Koto Panjang selaus 275 Ha, sungai seluas 125 Ha, dan danau lainnya seluas 10 Ha. Dari jumlah tersebut baru dimanfaatkanuntuk budidaya keramba seluas 48.14 Ha (11.74 %) atau sebanyak 7.521 unit, dengan produksi pada tahun 2020 sebesar 15.767,652 ton.

Sejalan dengan perkembangan usaha perikanan budidaya, usaha perbenihan ikut berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan benih. Hal ini terlihat dari produksi pada tahun 2020 sebesar 239,435 juta menjadi 251,860 juta ekor pada tahun 2021.

Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan komplek karena keterkaitannya dengan banyak bidang dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat beberapa isu pengelolaan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama ini, khususnya pada kurun waktu 2017-2021 dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan Kabupaten Kampar, dengan uraian table sebagai berikut:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pemanfaatan Potensi Penangkapan Belum Optimal	- Tingkat daya saing rendah	- Penggunaan alat tangkap masih sederhana - Armada Penangkapan berskalakecil. - Masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non bank dalam hal akses permodalan kepada nelayan - Masih adanya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan terlarang seperti racun dan bom. - Sumberdaya manusia rendah
2	Pemanfataan Potensi Budidaya Perikanan Belum Optimal	- Keterbatasan sarana dan prasarana - Produksi Pakan mandiri belum berkualitas - Induk unggul dan benih bermutu terbatas - Harga pakan tinggi - Belum terpenuhi kebutuhan benihbagi pembudidaya ikan sehingga masih didatangkan dariluar Kabupaten Kampar seperti (Sumbar, Jambi, Jawa) dll	- Irigasi, jalan produksi dan jaringan listrik masih terbatas. - Ketersediaan calon induk unggul terbatas. - Ketersediaan benih bermutu masih terbatas - Kurang Maksimalnya Operasional Balai Benih Ikan dikarenakan keterbatasn anggaran - Pemanfaatan bahan baku pakan lokal belum optimal dankualitasnya rendah. - Kenaikan harga ikan tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi
3	Nilai Tambah Produk Perikanan	- Diversifikasi olahan terbatas - Pengolahan belum sesuai standar	- Penggunaan teknologi pengolahan masih sederhana - Sumberdaya Manusia masih terbatas

1. Pemanfaatan Potensi Penangkapan Belum Optimal

Perikanan di Riau sebagian besar terdiri dari nelayan yang memiliki sarana/prasarana, keterampilan, pengetahuan dan modal yang terbatas serta memiliki pola penangkapan yang one day trip. Dengan kondisi tersebut, menyebabkan daya saing mereka rendah. Hal ini disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang masih sederhana antara lain belat, jaring, lukah, pancing,

rawai dan jala. Kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah dibuktikan dengan rendahnya tingkat pendidikan yang rata-rata tamat Sekolah Dasar; dan akses permodalan yang terbatas menyebabkan nelayan kesulitan mengajukan kredit, karena tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan.

2. Pemanfaatan potensi budidaya perikanan belum optimal

Pada saat ini kawasan perikanan budidaya berkembang sangat pesat di Kabupaten Kampar namun demikian perkembangan kawasan ini belum didukung dengan prasarana penunjang seperti jaringan irigasi untuk budidayaair tawar dan air payau, jalan produksi dan jaringan listrik untuk peningkatan produksi perikanan budidaya. Untuk itu perlu adanya sinergi antar instansi terkait dalam memenuhi prasarana penunjang tersebut.

Tingginya harga pakan, merupakan masalah pada pengembangan perikanan budidaya. Harga pakan pabrik relatif tinggi, dan ada kecenderungan akan terus meningkat sejalan dengan ketergantungan akan impor bahan baku pakan dan sudah tentu harga akan disesuaikan dengan nilai tukar (kurs) dollar.Ketersediaan Bahan baku pakan lokal untuk pembuatan pakan buatan cukup banyak dan beragam jenisnya seperti bungkil sawit, dedak, kopra, ikan rucah dan lain sebagainya, namun belum dimanfaatkan secara optimal, disamping itu kualitas daripada bahan baku tersebut masih tergolong rendah, hal ini disebabkan pengelolaan bahan baku masih menggunakan teknologisederhana. Belum Optimalnya Operasional Balai Benih Ikan sebagai penyalur benih ikan yang berkualitas bagi pembudidaya perikanan dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga kebutuhan benih ikan yang berkualitas bagi pembudidaya belum terpenuhi dan masih didatangkan dari luar KabupatenKampar seperti (Sumbar, Jambi, Jawa) dll

Hal ini mengakibatkan biaya produksi usaha pembudidayaan ikan menjadi tinggi, sementara harga jual cenderung statis (tidak menunjukan peningkatan harga yang signifikan), dan pada gilirannya tingkat keuntungan

yang diterima pembudidaya rendah. Untuk itu, perlu pengembangan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal melalui pengadaan mesin pakan, pengadaan bahan baku alternatif, yang mudah didapat, tersedia secara kontinyu dalam jumlah yang cukup dengan harga terjangkau.

Pada sisi lain, jumlah dan mutu benih serta Induk ikan belum memadai. Ketersediaan benih dan induk baik dari segi jumlah maupun mutu masih sangat rendah, sementara kebutuhan akan benih dan induk guna memenuhi target produksi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Belum terpenuhi kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan sehingga masih didatangkan dari luar Kabupaten Kampar seperti (Sumbar,Jambi, Jawa) dll

Untuk itu, perlu upaya optimalisasi peran dan fungsi Balai Benih Ikan Balai Benih Ikan (BBI) Lokal, Kelompok Perbenihan Rakyat (KPR) dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas calon induk ikan unggul dan peningkatan produksi benih, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan teknologi perbenihan serta penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

3. Nilai Tambah Produk Perikanan

Ikan merupakan salah satu sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia, karena kandungan proteinnya tinggi, mengandung asam animo esensial dan omega 3 dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Masalahnyaadalah ikan memiliki kelemahan karena cepat mengalami pembusukan, maka perlu dilakukan penanganan, pengolahan dan pengawetan hasil perikanan yang bertujuan selain mencegah kerusakan ikan sehingga dapat memperpanjang daya simpan juga untuk menganekaragamkan produk olahan hasil perikanan.

Masih dilakukannya penanganan dan perlakuan produk hasil perikanan yang tidak mengikuti kaidah ketahanan dan keamanan pangan komoditas produk hasil perikanan sesuai dengan SSOP, GMP dan HACCP,

seperti pemakaian bahan berbahaya formalin dan boraxs pada aktivitas pengolahan pangan hasil perikanan dan pemakaian zat kimia berbahaya lainnya. Pada sisi lain, dalam pengolahan produk hasil perikanan masih menggunakan teknologi sederhana sebagai contoh masih menggunakan kayubakar dalam proses pengasapan/penyalaian ikan. Inovasi sumberdaya manusia dalam proses pengolahan ikan masih terbatas, produk-produk yang dihasilkan masih turunan kedua seperti ikan asin, ikan salai

Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Sektor Perairan (Ton), 2022

Kecamatan *District*	Kolam *Water Pond*	Keramba *Cage*		Jumlah *Total*
- 1	- 3	- 4		5
Kampar Kiri	144.20	4.60		148.80
Kampar Kiri Hulu	70.30			70.30
Kampar Kiri Hilir	369.40			369.40
Gunung Sahilan	872.10			872.10
Kampar Kiri Tengah	348.60	29.40		378.00
XIII Koto Kampar	4,331.80	11,953.10		16,284.90
Koto Kampar Hulu	32.70			32.70
Kuok	19,296.70	1,528.70		20,825.40
Salo	3,242.10	32.40		3,274.50
Tapung	1,884.60			1,884.60
Tapung Hulu	144.65			144.65
Tapung Hilir	216.88			216.88
Bangkinang Kota	1,965.90			1,965.90
Bangkinang	1,045.00	65.40		1,110.40
Kampar	4,337.20	6,933.10		11,270.30
Kampa	764.30	22.50		786.80
Rumbio Jaya	292.80	109.50		402.30
Kampar Utara	384.20	189.00		573.20
Tambang	36.40			36.40
Siak Hulu	1,026.00	927.30		1,953.30
Perhentian Raja	2,567.00			2,567.00
Kabupaten Kampar	**43,372.83**	**21,795.00**		65,167.83

Produksi Perikanan Menurut Kecamatan dan Sektor Perairan (juta rupiah) tahun 2022

Kecamatan *District* - 1.00	Kolam *Water Pond* - 3.00	Keramba *Cage* - 4.00	Pembenihan *Seed* - 5.00	Jumlah *Total* - 6.00
Kampar Kiri	2,739.80	184.00	720.00	3,643.80
Kampar Kiri Hulu	1,335.70	-	33.00	1,368.70
Kampar Kiri Hilir	7,018.60	-	432.00	7,450.60
Gunung Sahilan	16,569.90	-	90.00	16,659.90
Kampar Kiri Tengah	6,623.40	1,176.00	4,350.00	12,149.40
XIII Koto Kampar	82,304.20	478,124.00	1,920.00	562,348.20
Koto Kampar Hulu	621.30	-	-	621.30
Kuok	366,637.30	61,148.00	1,187.88	428,973.18
Salo	61,599.90	1,296.00	163.20	63,059.10
Tapung	35,807.40	-	-	35,807.40
Tapung Hulu	2,748.35	-	120.00	2,868.35
Tapung Hilir	4,120.72	-	-	4,120.72
Bangkinang Kota	37,352.10	-	1,093.50	38,445.60
Bangkinang	19,855.00	2,616.00	1,293.00	23,764.00
Kampar	82,406.80	277,324.00	4,818.60	364,549.40
Kampa	14,521.70	900.00	553.00	15,974.70
Rumbio Jaya	5,563.20	4,380.00	42.00	9,985.20
Kampar Utara	7,299.80	7,560.00	-	14,859.80
Tambang	691.60	-	-	691.60
Siak Hulu	19,494.00	37,092.00	320.40	56,906.40
Perhentian Raja	48,773.00	-	10,802.25	59,575.25
Kabupaten Kampar	**824,083.77**	**871,800.00**	**27,938.83**	1,723,822.60

Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan tahun 2022

District	goldfish	catfish	parrot	pomfret	Gourami
- 1.00	- 2.00	- 3.00	- 4.00	- 5.00	- 6.00
Kampar Kiri		15.52	92.62	8.00	
Kampar Kiri Hulu		7.85	24.00	2.00	4.00
Kampar Kiri Hilir		2.24	328.00		
Gunung Sahilan		386.19	37.00		
Kampar Kiri Tengah		4.17	47.43		6.00
XIII Koto Kampar	5,097.83	3,437.61	7,144.32		
Koto Kampar Hulu					
Kuok	26.00	13,512.79	2,728.24		
Salo	11.00	1,032.57	135.84	4.00	13.00
Tapung					
Tapung Hulu		12.05	32.00		7.00
Tapung Hilir		20.00	26.00		6.00
Bangkinang Kota		529.00	709.00	64.00	60.00
Bangkinang	40.00	25.00	338.48		
Kampar	8.00	3,211.00	2,925.00	85.00	32.00
Kampa		513.00	133.00	9.00	25.00
Rumbio Jaya		32.00	63.91		20.00
Kampar Utara		77.00	448.98		
Tambang		12.16	4.00		
Siak Hulu		199.00	899.41		
Perhentian Raja					
Kabupaten Kampar	**5,182.83**	**23,029.15**	**16,117.23**	**172.00**	**173.00**

Lanjutan Table Produksi Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan tahun 2022

Kecamatan *District*	Lele *lele*	Lomak *jelawat*	Baung *baung*	Lainnya *others*	Jumlah *Total*
- 1.00	- 7.00	- 8.00	- 9.00	- 10.00	
Kampar Kiri			32.00		148.14
Kampar Kiri Hulu	33.00				70.85
Kampar Kiri Hilir	39.00				369.24
Gunung Sahilan	449.00				872.19
Kampar Kiri Tengah	300.00		21.00		378.60
XIII Koto Kampar	606.00				16,285.76
Koto Kampar Hulu	33.00				33.00
Kuok	4,558.00				20,825.03
Salo	2,077.00				3,273.41
Tapung	1,885.00				1,885.00
Tapung Hulu	94.00				145.05
Tapung Hilir	166.00				218.00
Bangkinang Kota	605.00				1,967.00
Bangkinang	707.00				1,110.48
Kampar	152.00	4,770.00	86.00		11,269.00
Kampa	104.00		3.00		787.00
Rumbio Jaya	198.00			88.75	402.66
Kampar Utara	46.00				571.98
Tambang	20.00				36.16
Siak Hulu	55.00		24.00	774.87	1,952.28
Perhentian Raja	2,567.00				2,567.00
Kabupaten Kampar	**14,694.00**	**4,770.00**	**166.00**	**863.62**	65,167.83

Dalam pelaksaan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebagai Fasilitator Dan Penggerak Ekonomi Masyarakat tentunya masih dihadapkan pada tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

Tantangan.

a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan dan usaha budidaya perikanan.
b. Masih terbatasnya Sarana dan prasarana Budidaya
c. Biaya produksi yang tinggi pada pakan yaitu 70%, harga Pakan terus meningkat, sehingga perlu adanya program/kegiatan pengembangan pakan mandiri.
d. Kurangnya ketersediaan benih yang berkualitas dalam jumlah yang cukup.
e. Belum terpenuhi kebutuhan benih bagi pembudidaya ikan sehingga masih didatangkan dari luar Kabupaten Kampar seperti (Sumbar, Jambi, Jawa) dll
f. Masih kurang dalam akses permodalan bagi Nelayan sedangkan permasalahan yang terakhir ada pada bidang pemasaran, di mana nelayan masih kurang akses untuk mengetahui harga pasar hasil tangkap yang dapat menyebabkan fluktuasi harga.
g. krisis stock ikan tangkapan akibat padat tangkap atau tingkat pemanfaatannya berlebihan
h. Masih terbatasnya usaha diversifikasi produk dan pemasaran
i. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan perikanan.
j. Pembudidaya sulit dalam mendapatkan akses permodalan di lembaga keuangan/Bank.
k. Wilayah Perikanan Budidaya sangat luas sehingga petugas pengambil data statistik perikanan budidaya tidak maksimal/terjangkau dalampengambilan data.

l. Jaminan harga pasar tidak ada yang mengakibatkan semangat pembudidaya dalammelakukan usaha budidaya menurun. Salah satu solusi pasca panen adalah pengolahan hasil perikanan.

Peluang.

a. **Potensi** lahan untuk budidaya **perikanan** terutama **perikanan** air tawar seluas ±6.521,30Ha, yang terdiri dari budidaya kolam 6.111,30 Ha, danau/waduk (menggunakan Keramba Jaring Apung/KJA) 275Ha, dan budidaya sungai (menggunakan keramba) seluas 135 Ha.

b. Adanya Program Pegembangan Kampung-Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Adanya Program Konversi BBM ke BBG dari Kementerian ESDM

d. **Program Restocking** adalah salah satu upaya penambahan stok ikan tangkapan untuk ditebarkan di perairan umum, pada perairan yang dianggap telah mengalami krisis akibat padat tangkap atau tingkat pemanfaatannya berlebihan

e. Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing tinggi melalui pengembangan sentra-sentra pengolahan berbasis industri dan pemasaran

f. Meningkatkan pemanfaatan potensi melalui pengembangan kawasan sentra-sentra budidaya perikanan dan Kampung Patin.

g. Meningkatkan produksi benih ikan yang berkualitas melalui pengembangan Balai Benih ikan dan penumbuhan kelompok-kelompokpembenihan rakyat (UPR/KPR).

h. Meningkatkan sarana dan prasarana Perikanan melalui Pengembangan Kawasan, seperti Pengembangan Kawasan Minapolitan, Pengembangan Kawasan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, dan Pengembangan Kawasan Budidaya KJA Waduk PLTA Koto Panjang.

i. Bantuan teknologi dan pemodalaan bagi kelompok pembudidaya, pembenihan dan Pengolahan.
j. Pemberian subsidi pakan.

2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal Renja RKPD

Rancangan awal Renja PD disusun dengan menggunakan rancanganRenja PD dengan Kepala SKPD. Rancangan Renja PD menjadi bahan Musrenbang Kabupaten. Musrenbang Kabupaten merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah. Musrenbang Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan Renja antar PD dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan. MusrenbangKabupaten dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. ForumSKPD / Gabungan SKPD, serta Musrenbang Kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD.

Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki persamaan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Kampar, dalam hal program dan kegiatan serta pagu indikatif yang diusulkan. Kesamaan tersebut telah melalui proses analisis berdasarkan kebutuhan di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Sehingga apabila ada dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam hal penyediaan dana indikatif maka usulan program kegiatan Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Perikanan dapat terlaksanadengan baik.

2.5 Penelahaan Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para stekholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Perikanan Kab. Kampar selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat

beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) mulai tingkat terendan sampai tertinggi, Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan Button Up lainya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Perikan juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relefan terhadap pembangunan Perikanan Kabupaten Kampar.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.5 untuk Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 berikut ini.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten				
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
	- Pengadaan Perahu untuk Nelayan	Desa Batu Belah Kecamatan Kampar	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Klp	Setuju, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll)
	- Pengadaan Alat Tangkap Nelayan Mesin Tempel dan Sampan Nelayan	Desa Alam Panjang Kec. Rumbio Jaya	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Klp	Setuju, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll)
	- Pengadaan Mesin Sampan Nelayan	Desa Padang Mutung Kecamata Kampar	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Klp	Setuju, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll)
					Bantuan (hibah, dll)

2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				
A	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				
	- Pengadaan Benih Ikan Gurami dan Pakan Ikan	Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Klp	Setuju, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll)
	- Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Ikan	Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Klp	Setuju, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll)
	- Pengadaan Benih Ikan dan Pakan	Desa Teratak Buluh, Kab. Kampar, Siak Hulu, Teratak Buluh	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Klp	Setuju, Lengkapi Dokumen Pendukung dengan mengikuti Proses dan JUKNIS Bantuan (hibah, dll)

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Untuk memberikan gambaran secara nyata sebagai upaya penjabaran Visi Pembangunan Riau 2020, maka perlu visi antara selama 5 tahun, agar setiap tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai sesuai kondisi, kemampuan dan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran- ukuran kinerja pembangunan rumusan Visi pemerintah Provinsi Riau adalah :

"***Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)***"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Berdaya Saing

- Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan)
- Meningkatkan Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
- Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan kemandirian daerah

Usulan :
Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal.

Sejahtera

- Mengurangi ketimpangan sosial
- Menanggulangi kemiskinan
- Menurunkan tingkat ngguran

Usulan :
Kondisi kemakmuran masyarkat riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial,menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat

- Meningkatkan kehidupan beragama

- Melestarikan adat istiadat
- Mengembangan nilai sosial dan budaya

Usulan :
Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Unggul

- Prestasi di bidang seni, budaya dan agama
- Prestasi di bidang olahraga
- Terbaik dan terdepan dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
- Terobosan dan inovasi

daaerah Usulan :

Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi,pelayanaan publik danpenyelenggaraan pemerintahan

Sebagai provinsi yang menjadi pusat perekonomian pada tahun 2020, Provinsi Riau akan mempersiapkan infrastruktur, mewujudkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan dan ramah lingkungan, pembangunan kawasan perkotaan, pembangunan kawasan perdesaan, penanganan berbagai dampak dan issu pemanasan global, memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masakini dan generasi masa datang.

Di samping itu, pemerintah Provinsi Riau memperhatikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat melalui pembanguan infrastruktur perekonomian berbasis potensi sumber dayadaerah, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui partisipasi masyarakat dengan melibatkan pelaku usaha.

Selanjutnya, perhatian pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia, agar bermakna dan berkembang ke arah lebih baik dan mempunyai daya saing dengan daerah lain, mempermudah akses memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan pengembangan managemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi. Juga kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, serta pembangunan sarana dan prasarana masyarakat beragama, seni budaya dan moral.

Seterusnya, pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan keikutsertaan dan peran pihak swasta dalam pembangunan perekonomian percepatan investasi dan stabilitas pembangunan ekonomi melalui penciptaan rasa aman, kepastian hukum, percepatan pelayanan perizinan usaha,penyiapan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar.

Di sisi lain, aparat pemerintah Provinsi Riau harus berkemampuan, professional, bermoral serta keteladanan pemimpin, melalui penguatan kelembagaan dan kualitas aparat, untuk mencapaian kehidupan yang sejahtera bertata kehidupan dan penghidupan, baik materil maupun spritual bagi setiap masyarakat. Dari analisis rumusan Visi pemerintah Provinsi Riau 2019-2024 mencakup beberapa Program Prioritas, untuk dinas kelautan dan perikanan termasuk dalam program prioritas VI : Pertanian, Perkebunan,Perikanan, dan Peternakan meliputi:

1. Melakukan promosi dan pemasaraan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui media cetak, media elektoronik dan pameran Indonesia agri bisnis expo serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha
2. Peningkatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh
3. Pengembangan perikanan budidaya di daerah pesisir laut dan daratan Riau atau sungai/danau/tasik

4. Optimalisasi balai benih ikan
5. Pengembangan perikanan budidaya komoditas air tawar

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riauadalah misi ke 3 yaitu **Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing,** dengan tujuan mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 4 pada Misi ke 3, yaitu **Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran.**

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke tiga ini yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan masa ketiga dari RPJMD Tahun 2023-2026 yang disusun setelah Kepala Daerah terpilih yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Adapun sasaran (objective) Dinas Perikanan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan.

A. **Tujuan dan Sasaran Renja PD**

1. Tujuan Renja PD
    - Tingkat Produksi Perikanan
2. Sasaran Renja PD
    - Peningkatan Produksi Sektor Perikanan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tersusun dalam tabel Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Table

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KAB. KAMPAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERIKANAN							**20.891.701.214,00**	**23.401.835.251,00**	**24.166.958.691,00**	**3.275.257.477,00**							**21.751.701.214,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**20.891.701.214,00**	**23.401.835.251,00**	**24.166.958.691,00**	**3.275.257.477,00**							**21.751.701.214,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**20.891.701.214,00**	**23.401.835.251,00**	**24.166.958.691,00**	**3.275.257.477,00**							**21.751.701.214,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**10.041.701.214,00**	**10.626.604.051,00**	**11.037.372.991,00**	**410.000.000,00**							**10.451.701.214,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	325.000.000,00	389.189.800,00	400.881.400,00	75.881.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Dokumen Perencanaan		325.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	366.109.800,00	377.801.400,00	177.801.400,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	23.080.000,00	23.080.000,00	-6.920.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Peningkatan Administarasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.513.701.214,00	5.304.089.401,00	5.659.296.141,00	1.145.594.927,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Dokumen Dan Adminstrsi Kuangan		4.763.701.214,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.508.701.214,00	5.299.089.401,00	5.654.296.141,00	1.145.594.927,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			4.758.701.214,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	200.000.000,00	69.059.000,00	59.265.000,00	-140.735.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	ASN		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	100.000.000,00	69.059.000,00	59.265.000,00	-40.735.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Presentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.063.000.000,00	978.532.700,00	1.069.605.300,00	6.605.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Dokumen dan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.118.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	13.168.500,00	13.168.500,00	-1.831.500,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	250.000.000,00	300.105.200,00	345.265.800,00	95.265.800,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.000.000,00	12.014.000,00	12.014.000,00	-986.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			13.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	15.080.000,00	15.080.000,00	10.080.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	25.735.000,00	25.735.000,00	10.735.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2208 Dokumen	2208 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	597.430.000,00	643.342.000,00	-106.658.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.300.000.000,00	145.258.000,00	105.000.000,00	-1.195.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	65.258.000,00	25.000.000,00	-575.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				78 Unit	78 Unit	200.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100	100	1.875.000.000,00	1.900.057.138,00	1.900.057.138,00	25.057.138,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Dokumen dan Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.880.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	212.379.230,00	212.379.230,00	37.379.230,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000,00	1.687.677.908,00	1.687.677.908,00	-12.322.092,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	765.000.000,00	1.840.418.012,00	1.843.268.012,00	1.078.268.012,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		765.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	150.000.000,00	258.418.012,00	231.268.012,00	81.268.012,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	1.570.000.000,00	1.600.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)**				**2.600 ton**	**2.600 ton**	**3.100.000.000,00**	**4.042.635.800,00**	**4.332.328.800,00**	**300.000.000,00**							**3.400.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah Sungai, Danau dan Waduk,*				100 %	100 %	2.500.000.000,00	3.970.991.000,00	4.260.684.000,00	1.760.684.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	POKMASWAS		2.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.438.200,00	50.438.200,00	-49.561.800,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				450 Unit	450 Unit	1.600.000.000,00	3.920.552.800,00	4.210.245.800,00	2.610.245.800,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				320 Unit	320 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil*				100 %	100 %	400.000.000,00	71.644.800,00	71.644.800,00	-328.355.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Usaha Bersama		400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				25 Kelompok	25 Kelompok	200.000.000,00	71.644.800,00	71.644.800,00	-128.355.200,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**20.891.701.214,00**	**23.401.835.251,00**	**24.166.958.691,00**	**3.275.257.477,00**							**21.751.701.214,00**	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Presentase Terkelolanya dan Terselenggaranya Tempat Pelelangan Ikan Secara Baik*				100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Usaha Bersama		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				5 Layanan	5 Layanan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**20.891.701.214,00**	**23.401.835.251,00**	**24.166.958.691,00**	**3.275.257.477,00**							**21.751.701.214,00**	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)**				**57.285 Ton**	**57.285 Ton**	**3.750.000.000,00**	**7.786.360.800,00**	**7.851.022.400,00**	**0,00**							**3.750.000.000,00**	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pembudidaya Ikan Kecil*				100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil*				100 %	100 %	850.000.000,00	4.505.146.320,00	4.569.807.920,00	3.719.807.920,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)		850.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Kelompok	7 Kelompok	350.000.000,00	4.268.375.320,00	4.368.359.320,00	4.018.359.320,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	5 Kelompok	200.000.000,00	129.887.000,00	94.564.600,00	-105.435.400,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				1 Kelompok	1 Kelompok	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	8 Kelompok	250.000.000,00	106.884.000,00	106.884.000,00	-143.116.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil*				100 %	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Presentase Terlaksananya Penyediaan Data dan Informasi, Pemenuhan Sarana Prasarana, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan*				100 %	100 %	2.500.000.000,00	3.281.214.480,00	3.281.214.480,00	781.214.480,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)		2.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	49.999.780,00	49.999.780,00	-50.000.220,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit	50 Unit	500.000.000,00	2.711.167.200,00	2.711.167.200,00	2.211.167.200,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Unit	100 Unit	1.000.000.000,00	400.047.500,00	400.047.500,00	-599.952.500,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				5 Ha	5 Ha	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Terjaganya Kelestarian Sumberdaya Perairan/Perikanan**				**100 %**	**100 %**	**2.100.000.000,00**	**481.240.000,00**	**481.240.000,00**	**0,00**							**2.100.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Presentase Terlaksananya Pengawasan dan Kelestarian Sumberdaya Perairan/ Perikanan*				100 %	100 %	2.100.000.000,00	481.240.000,00	481.240.000,00	-1.618.760.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS)		2.100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	800.000.000,00	481.240.000,00	481.240.000,00	-318.760.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)**				**8.000 Ton**	**8.000 Ton**	**1.900.000.000,00**	**464.994.600,00**	**464.994.500,00**	**150.000.000,00**							**2.050.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Presentase Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Skala Mikro dan Kecil*				100 %	100 %	100.000.000,00	25.002.400,00	25.002.400,00	-74.997.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Pengolahan/ Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR)		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	25.002.400,00	25.002.400,00	-74.997.600,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Presentase Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Bersertifikasi Mutu*				100 %	100 %	300.000.000,00	31.798.800,00	31.798.800,00	-268.201.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Pengolahan/ Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR)		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	300.000.000,00	31.798.800,00	31.798.800,00	-268.201.200,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Presentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan*				100 %	100 %	1.500.000.000,00	408.193.400,00	408.193.300,00	-1.091.806.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi	Kelompok Pengolahan/ Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR)		1.650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8000 Ton	8000 Ton	600.000.000,00	144.956.900,00	144.956.900,00	-455.043.100,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			650.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	900.000.000,00	263.236.500,00	263.236.400,00	-636.763.600,00	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Bidang Ekonomi Peningkatan Bidang Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	J U M L A H								**20.891.701.214,00**	**23.401.835.251,00**	**24.166.958.691,00**	**3.275.257.477,00**							**21.751.701.214,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Perencanaan Sektor Perikanan serta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang padagilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatankinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan kabupaten Kampar, RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan Tahun berikutnya

Bangkinang Kota, 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KAMPAR



ZULFAHMI, S.Pi, M.Si
NIP. 196909 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

1950

RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) merupakan kewajiban setiap Instansi, tidak terkecuali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar. Ini sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat, amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangkinang, 12 Juni 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR



ARIZON, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19650802 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..…… I
DAFTAR ISI ……..…….. II
DAFTAR TABEL……..…….. III

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ……..……...1
1.2. Landasan Hukum ……..…3
1.3. Maksud dan Tujuan ……..……4
1.4. Sistimatika Penulisan ……..……..…5

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah …….. …..……..…..7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD … ……..……..……...18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ……..……22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……..……26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 36

BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD …..……..…38
3.3 Program dan Kegiatan …..……..……..40

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan ……..42

BAB. V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja…….11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD …….21
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…….27
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD …….45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Penjabaran yang lebih teknis dari Renstra OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar khususnya dan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yaitu OPD Satuan Polisi Pamong Praja), yang dalam penyusunannya harus sinkron dan berpedoman pada RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Tahun kedua dari RPD 2023-2026 Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2024 merupakan informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Satpol PP Kab. Kampar mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum sepanjang tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang perlu diberdayakan fungsinya dalam pelaksanaan pengamanan Pemilu dan Pilkada disamping unsur kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai salah satu dinas teknis di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar merupakan OPD yang menyelenggarakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang merupakan salah satu dari 6 (enam) urusan Wajib Pelayanan Dasar. Adapun Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, OPD ini mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan perencanaan, kebijakan teknis, bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis, bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas lingkupnya;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Pelaksana Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Sebagai suatu instansi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dengan berpijak pada tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mempunyai Visi sesuai rancangan Renstra 2023-2026 yaitu :

" Terwujudnya masyarakat yang taat peraturan, tertib tentram melalui penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan PerUndang – Undangan

Visi tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selama periode 2023-2026 untuk berusaha mewujudkan harapan-harapan yang akan dicapai sesuai dengan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tugas-tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan berpijak pada visi yang telah dicanangkan, secara lebih jelas terurai dalam misi-misi sebagaimana berikut :

1. Mensosialisasikan Peraturan Daerah, Keputusan
2. Daerah dan Perundang-undangan secara profesionalisme.
3. Membina masyarakat agar tertib tentram melalui Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan pembinaan, penertiban dan ketentraman terhadap pelanggar Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Perundangan yang berlaku secara profesional.
5. Mewujudkan kewibawaan Pemerintah Daerah melalui penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah serta Kebijakan lainnya secara profesionalisme oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
18. Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dan merumuskan rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKA OPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

1.2 Tujuan

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;
6. Program – program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab.Kampar 2024

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Kampar selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. A. Penetapan Indikator Kinerja

   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

   B. Capaian Analisis Kinerja

   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. Evaluasi Program Tahun 2022

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kampar. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

   Kegiatan :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administasi Umum Perangkat Daerah
   4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   5. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

   Anggaran : Rp. 14.191.503.849

   Realisasi : Rp. 13.964.443.193

   Realisasi (%) : 98,40% (sampai dengan 31 desember 2022)

2. Program : Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

   Kegiatan :
   1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran : Rp. 1.502.629.091

   Realisasi : Rp. 1.493.122.591

   Realisasi (%) : 99,37 % (sampai dengan 31 desember 2022)

Anggaran Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebesar Rp. 15.694.132.940 (sudah termasuk perubahan) dengan 2 (dua) program dan 6 (Enam) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi

sebesar Rp. 15.457.565.784 (hingga 31 Desember 2022) dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,49 %.

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2022 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebesar 100 %. Dengan capain kinerja sebesar 100 % tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/ sangat memuaskan dalam pencapaian kinerjanya pada tahun 2022.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 14.417.120.858 (sebelum perubahan) terurai dalam 2 (dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan serta 21 (dua puluh) sub kegiatan , diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 98 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta prakiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

Untuk melakukan analisis pencapaian kinerja dilakukan analisa berupa parameter dan variabel antara lain keberhasilan, kegagalan, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas, sehingga dari hambatan dan kendala ditemui adanya keberhasilan yang diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :

NO	PARAMETER	VARIABEL	INDIKATOR
1.	- Keberhasilan	- Pendapatan PAD meningkat melalui dinas instansi terkait. - Meningkatkan keamanan dan ketentraman. - Dapat memberantas penyakit masyarakat. - Teriventarisasinya perusahaan atau masyarakat yang belum memiliki izin. - Semakin kecilnya angka pelanggaran perusahaan/ masyarakat terhadap perda	- Meningkat perusahaan / masyarakat mengurus izin. - Tertibnya pedagang kaki lima dalam berjualan diruas jalan dan pasar didalam kota Bangkinang. - Menutup prostitusi dan perjudian dalam wilayah kabupaten Kampar. - Meningkatnya kepatuhan badan usaha dalam mengurus perizinan. - Dilaksanakan Diklatsar

		- Dapat menetralisir keadaan saat demonstrasi, sehingga angkanya semakin berkurang	- Demonstrasi pesertanya sudah tertib dan terkendali.
2.	- Kegagalan	- Demonstrasi masih ada dari masyarakat terhadap pimpinan. - Masih banyak perusahaan ilegal yang belum terdata. - Masih banyak perusahaan yang menunggak membayar pajak. - Penegakan Peraturan Daerah belum didukung sarana dan prasarana.	- Masih ada badan usaha yang tidak mau mengurus izin. - Perusahaan masih ada yang tidak memenuhi kewajibannya. - Sarana dan Prasarana administrasi dan mobilitas belum memadai. - Pelaksanaan tenaga PPNS belum optimal
3.	- Kendala	- Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan personil. - Partisipasi dan tingkat kepedulian masyarakat masih rendah. - Belum terlaksananya koordinasi antar dinas/instansi dengan baik. - Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat /perusahaan untuk menyelesaikan masalah. - Masih ada PNS yang tidak disiplin.	- Ditemuinya perusahaan yang ilegal. - Masih ada pelaksanaan Peraturan Daerah yang tidak berjalan. - Masih kurangnya pemahaman tugas oleh anggota Satpol PP - Masih rendahnya pelaksanaan koordinasi

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan urusan Penegakan Perda dan Lainnya, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakanya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2022 KABUPATEN KAMPAR

Urusan Pemerintahan : **1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**
Organisasi : **1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2017-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/sub kegiatan Tahun 2022			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	80%	20%	20%	100%	20%	100%	100%
1	05	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	20%	100%	100%

1	05	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	25 Dokumen	100%
1	**05**	**01**	**202**		**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang	152 Orang	38 Orang	38 Orang	100%	38 Orang	190Orang	100%
1	05	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%

1	**05**	**01**	**206**		**Administasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**
1	05	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	05	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	05	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	100%
1	05	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	05	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	400 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	500 Laporan	100%

1	**05**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**
1	05	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	40 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	50 Unit	100%
1	**05**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**
1	05	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1	05	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%

1	**05**	**01**	**209**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**
1	05	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	5 Unit	100%
1	05	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	44 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	55 Unit	100%
1	05	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	16 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	20 Unit	100%

1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**
1	**05**	**02**	**201**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**80%**	**20%**	**20%**	**100%**	**20%**	**100%**	**100%**
1	05	02	201	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	75 Kasus	60 Kasus	15 Kasus	15 Kasus	100%	15 Kasus	75 Kasus	100%
1	05	02	201	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	85 Kasus	68 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	100%	17 Kasus	85 Kasus	100%

1	05	02	201	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	105 Dokumen	84 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	100%	21 Dokumen	105 Dokumen	100%
1	05	02	201	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	434 Orang	348 Orang	87 Orang	87 Orang	100%	87 Orang	434 Orang	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang ketentuannya lebih lanjut mengenai SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal diperlukan agar masyarakat terjamin menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu, sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Untuk penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar maka Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima .dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Sedangkan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yaitu: Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selanjutnya pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

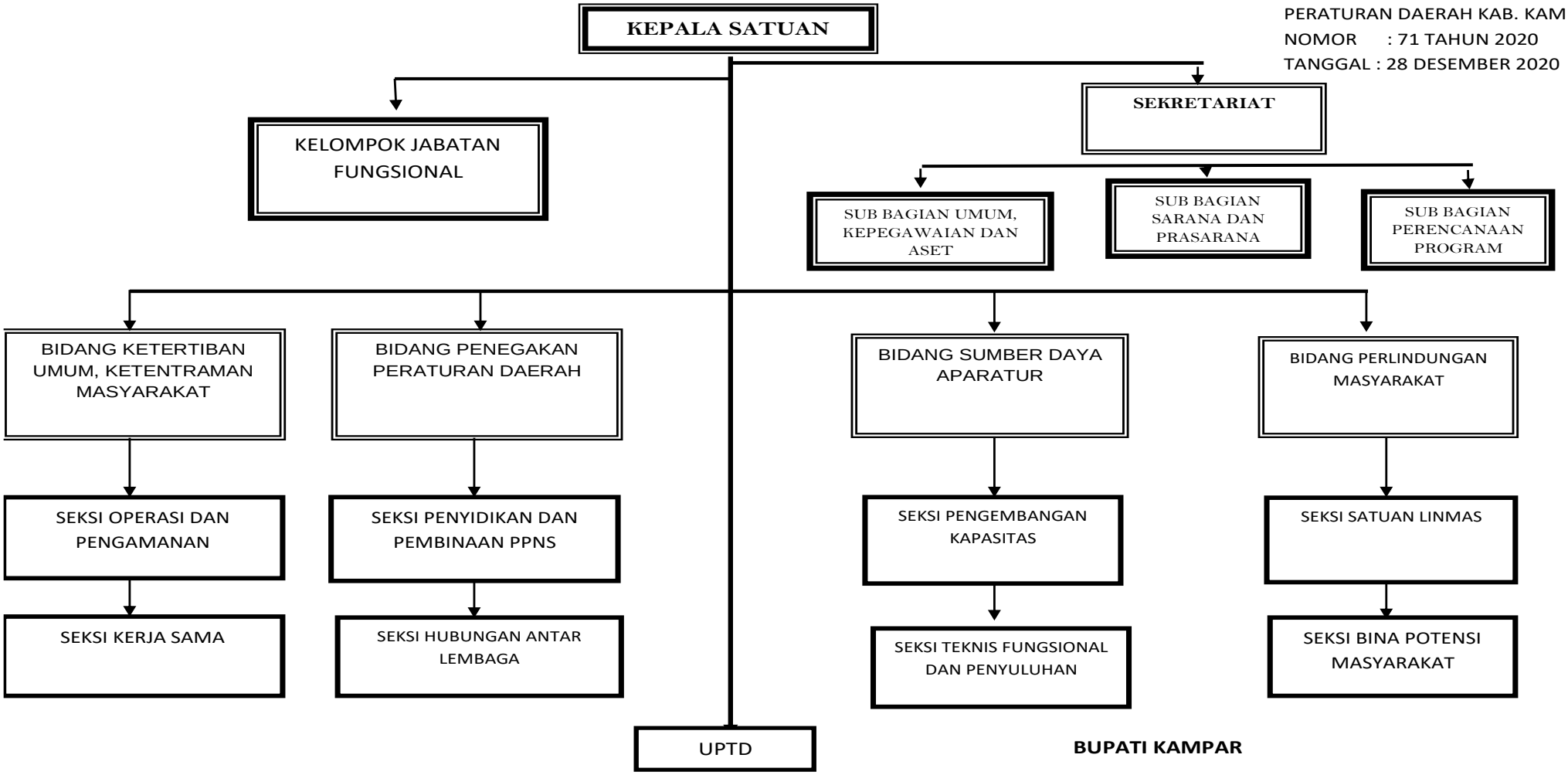
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Perbup No: 71 Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. Merumuskan Kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati;
b. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
d. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
f. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah;
g. Melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Organisasi;
h. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol. PP Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan daerah Nomor : 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Satpol. PP merupakan unsur perencana penyelenggaraan penertiban dan keamanan. Struktur organisasi Satpol. PP Kabupaten Kampar.(Daftar gambar terlampir)

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN DAERAH KAB. KAMPAR
NOMOR : 71 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 DESEMBER 2020



BUPATI KAMPAR

ttd

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatkan penanganan Kasus Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100%	100%	100%	100%	114 Kasus	619 Kasus	700 Kasus	750 Kasus	Kasus Tipiring dengan tindak lanjut disidangkan dan pembinaan
2	Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	9 Perda dan Perkada	9 Perda dan Perkada	9 Perda dan Perkada	9 Perda dan Perkada	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

Untuk Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar pada tahun 2022 terhadap masyarakat dalam pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum belum bisa maksimal dikarenakan tidak ada Anggaran tapi pelaksanaan Penyelenggaran Ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Perda dan Perlindungan Masyarakat tetap di laksanakan dengan anggaran yang ada dan ini menjadi evaluasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar agar dapat Dukungan Anggaran untuk meningkatkan Capaian SPM pada tahun mendatang.karna Satuan Polisi Pamong Praja termasuk OPD Pengampu Penunjang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol. PP

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang tercantum dalam pasal 255 dan 256 yaitu : untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja ini kemudian diatur dalam petunjuk teknis Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 71 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar maka kondisi yang diinginkan agar fungsi perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif yang menjadi fokus perhatian Satpol. PP Kabupaten Kampar.

Satpol. PP dalam menjalankan tugas pokok dan Fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Dalam penetapan pelaksanaan Peraturan Daerah yang mana pelaksanaanya adalah Dinas / Badan / Kantor Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah . Sedangkan Koordinasi Dinas Pelaksana dengan Satpol.PP Kab.Kampar sebagai petugas penegakan PERDA belum berjalan dengan baik.
2. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat / pengusaha / pedagang untuk mematuhi Peraturan Daerah terutama di bidang Perizinan dan ketaatan membayar pajak.
3. Sarana dan Prasarana sebagi pendukung aktifitas organisasi untuk Penertiban dan Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah masih belum memadai sesuai dengan wilayah Kabupaten Kampar yaitu 21 Kecamatan.

4 Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ada perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya.
5 Kompensasi sumber daya aparatur belum memadai dalam melaksanakan tugas.
6 Kurangnya dukungan anggaran untuk Program dan Kegiatan Satpol PP
7 Peraturan Daerah yang ada sekarang masih harus disosialisasikan kepada masyarakat/ pengusaha dan pedagang karena masih ada yang belum mengetahuinya.

Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol.PP juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu ; lingkungan dalam (Internal) dan lingkungan luar (Ekstenal). Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1). Lingkungan Internal.

Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut :

Kekuatan :

- Adanya dasar hukum dan kebijakan dipakai sebagai landasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Adanya sumber daya manusia aparatur
- Dukungan pimpinan.
- Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat
- Tugas Pokok dan fungsi cenderung dipakai oleh sebahagian aparatur

Kelemahan

- Kompetisi sumber daya aparatur belum memadai.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas organisasi.
- Kurang dukungan dana.
- Lemahnya koordinasi baik antar dinas / instansi maupun dengan aparatur wilayah

2). Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang dan Faktor Ancaman, sebagai berikut :

Peluang :

- Keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.
- Komitmen untuk menegakan supremasi hukum yang mulai tumbuh.
- Komitmen dari DPRD dan OPD terkait
- Tumbuhnya budaya yang tertib dan teratur dalam suasana yang tentram.

Ancaman :

- Pergesekan nilai sosial dan etika masyarakat.
- Masih terjadinya Miss Comunication antara Pemerintah Kampar dengan masyarakat .
- Demokrasi yang cenderung diikuti pula kekerasan dengan tidak mengindahkan etika tanggung jawab.
- Terdapatnya kebijakan yang kurang Responsif dan aspiratif

3. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan
   a. Adanya koordinasi, komunikasi dan partisipasi antara Masyarakat,Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
   b. Adanya peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika sosial yang semakin berkembang di dalam era masyarakat yang global.
   c. Adanya komitmen kerjasama yang sinergis dengan Instansi terkait khususnya instansi dibidang Keamanan dan Ketertiban dan tokoh masyarakat untuk menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
   d. Adanya peraturan, hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur bangsa dalam pelaksanaan operasi dilapangan.
   e. Adanya kesepakatan masyarakat dan pemerintah agar tetap mewaspadai upaya-upaya tertentu yang dapat mengancam keutuhan nasional.
   f. Adanya peluang membangun jiwa dan semangat aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang bercorak Praja Wibawa dengan menjaga.kehormatan

dan harga diri sebagai anggota Korps, untuk dapat membantu pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

4. Isu – Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar
   a. Kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024.
   b. Perlunya Koordinasi dan Tindak Lanjut dengan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Instansi yang terkait tentang status dan regulasi untuk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar karena anggota satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar yang berstatus PNS pada saat ini hanya 34 Orang sementara yang berstatus Tenaga Bantu atau Honorer sebanyak 338 Orang karena sesuai dengan Undang -undang nomor Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tepatnya Pasal 255 dan 256 maka pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
   c. Sarana dan Prasarana sebagai pendukung Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Perda dan Perkada serta Perlindungan Masyarakat masih belum memadai sesuai dengan wilayah Kabupaten Kampar yaitu 21 Kecamatan.
   d. Perlu adanya Pelatihan /Diklat Teknis Peningkatan Kapasitas SDM (Ppns, Intel, Provost, Personil Lapangan) Di Kemampuan Dasar Sebagai Personil Sat Pol Pp Kab. Kampar.
   e. Kompensasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar belum sesuai dengan beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kampar.
   f. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada sekarang masih harus disosialisasikan kepada masyarakat/ pengusaha dan pedagang karena masih banyak yang belum mengetahuinya.
   g. Meningkatkan Penertiban dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada yang ada di wilayah Kab. Kampar.
   h. Untuk Mendukung Program Pemerintah Kab. Kampar sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak, Sat Pol PP Kab. Kampar berkontribusi untuk

mendukung Program tersebut dengan mengoptimalkan Kegiatan Patroli rutin dengan sasaran Anak - anak yang bolos sekolah, anak jalanan, anak-anak yang jadi Pengemis dan lain sebagainya. kemudian diberikan edukasi dan Pembinaan.

i. Untuk mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sat Pol PP Kab. Kampar membutuhkan anggaran untuk merealisasikan hak warga/Masyarakat di Kab. Kampar yang terkena dampak kerugian materil maupun pengobatan akibat Penegakan Perda dan Perkada.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar tahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden dan Pilkada Serentak baik Gubernur maupun Bupati pada tahun 2024 di Prediksi beban kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar. Sebagai Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan Meningkat Tajam sehingga memerlukan kebutuhan penambahan Anggaran agar Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar dapat berjalan dengan maksimal.

RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2024 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dapat dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar sehingga menghasilkan Program Prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2024 program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Pada rencana kerja tahun 2024 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Kampar sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2024. Berikut ini adalah tabel review rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Tahun 2024.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kampar

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**3.966.578.076**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kab.Kampar ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan**	**100%**	**7.922.031.026**	
I	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**3.866.578.076**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Kampar ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**7.822.031.026**	
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	15 Kasus	1.357.125.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	15 Kasus	3.933.576.000	

2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	17 Kasus	706.072.550	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	17 Kasus	1.488.324.500	
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.000.000	
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	506.545.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	506.545.000	
5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	87 Orang	1.084.835.526	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	87 Orang	1.684.835.526	

6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100 Unit	100.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100 Unit	93.750.000	
7	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	1 Laporan	12.000.000	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	1 Laporan	15.000.000	
II	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100%**	**100.000.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Kab.Kampar ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100%**	**100.000.000**	
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	100.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	1 Laporan	100.000.000	

B	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**14.963.025.203**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**20.998.160.648**	
III	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**71.800.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**208.272.988**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	109.872.988	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	68.380.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	16.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	30.020.000	

IV	**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.682.976.849**	**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.691.864.849**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.673.826.849	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.673.826.849	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.038.000	
V	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**939.250.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar ,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**935.566.000**	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	869.250.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	866.250.000	

2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	69.316.000	
VI	**Administasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**904.396.481**	**Administasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1.781.267.450**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.537.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.740.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.199.500	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	499.996.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	79.993.950	

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14.483.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	89.483.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	496.376.481	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	913.855.000	
VII	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**150.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**1.769.424.000**	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.769.424.000	
VIII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**8.580.223.048**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**11.426.414.536**	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	32.967.880	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	32.967.880	

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.547.255.168	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	11.393.446.656	
IX	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**634.378.825**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.185.350.825**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	79.236.975	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	126.460.175	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	468.206.650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	468.706.650	

3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	16.627.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50.184.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Kampar,Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	70.308.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Kampar, Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	540.000.000	
TOTAL					**18.929.603.279**	**TOTAL**				**28.920.191.674**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sat Pol PP Kabupaten Kampar sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, memiliki kewenangan di bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dari Hasil Musrenbang Kecamatan se-Kabupaten Kampar tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja tidak mempunyai usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait maupun dari LSM, Asosiasi dan Perguruan Tinggi, yang terkait langsung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar, begitu juga usulan dalam bentuk program dan kegiatan dari pemangku kepentingan seperti DPRD.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Catatan ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja". Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan
   a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
   b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
   c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
   d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Peran dan tanggung jawab Satpol PP agar sigap dan waspada dalam membantu menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Pihak-pihak tersebut didorong

agar bahu-membahu dalam melahirkan praktik baik, adaptif, dan implementatif untuk membangun Indonesia yang lebih baik. sebagaimana yang diamanatkan Menteri Dalam Negeri pada Hut Pol PP, Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke 73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke 61 tahun 2023.

Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar diselenggarakan dengan suasana yang sangat meriah, dimana apresiasi oleh negara dan Pemerintah kepada Satpol PP yang bertugas menjamin bahwa PPKM berjalan dengan baik. di samping juga ada TNI/Polri, tenaga kesehatan, Satpol PP dan Linmas bekerja dengan baik. momentum Perayaan HUT Satpol PP dan Satlinmas ini juga untuk menyatukan prinsip dengan mengkonsolidasikan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah, baik dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi, membangun strategi pengendalian inflasi serta mensukseskan agenda Pemilu tahun 2024 agar tercipta kondisi yang aman, tertib, demokratis dalam bingkai NKRI.

Oleh karena itu, tema peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023 yaitu "MEWUJUDKAN WILAYAH TERTIB DAN RAMAH INVESTASI MELALUI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG", sudah sangat tepat dan menggambarkan realitas kesiapsiagaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat Satpol PP harus terus bergerak dan mengambil peran dalam menjawab tantangan zaman. Selain itu, ia juga berharap agar Satpol PP dan Satlinmas dapat meningkatkan profesionalisme dan menciptakan sinergitas guna terwujudnya wilayah tertib dan ramah investasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai jika di rumuskan terlebih dahulu kedalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan Kembali visi dan misi organisasi secara lebih detil, lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas, dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan kegiatan yang akan di laksanakan serta hasil akhir yang akan di capai.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 4 tahun kedepan sesuai dengan kondisi yang di harapkan yaitu:

Tujuan : Meningkatkan ketentramanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tujuan pertama yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan pokok di bidang peraturan daerah. Dalam hal ini, Satpol. PP diharapkan mampu menghasilkan rencana penertiban daerah yang aman dan berkualitas memiliki tujuan, sasaran, target dan tepat waktu, baik berupa jangka panjang (RPJPD), jangka menegah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan pokok di bidang pengendalian. Lingkungan masyarakat selain sebagai keamanan juga melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan daerah. Dalam pelaksanaan pengendalian diharapkan pelaksanaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan apa yang telah di rencakan sehingga kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan dapat di hindari lebih awal. Hasil pengendalian dan evaluasi juga dapat diharapkan sebagai bahan reprensi untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas untuk tahun berikutnya. Bidang ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta nyaman, dalam kondisi lingkungan yang tertib dan tentram.

Dalam rencana strategis ini disajikan tujuan dan sasaran yang bersifat strategis, yaitu tujuan dan sasaran yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sat pol pp kabupaten Kampar.

Mewujudkan atau menghasilkan visi misi kabupaten Kampar dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Sejalan dengan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai pada empat tahun kedepan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan di kabupaten Kampar.

b. Meningkatkan penegakan perda dan Perkada

c. Meningkatkan pelayanan perlindungan masyarakat.

d. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yang di rencanakan tahun 2024, didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor-faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, Isu-isu strategis dan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar serta pertimbangan dokumen perencanaan lainnya.

Program yang akan di laksanakan adalah 2 program dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kampar. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa perlu didukung dengan program kegiatan serta anggaran yang sesuai kebutuhan serta penambahan kegiatan agar dapat tepat sasaran.

Adapun Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1.	**Program**	**:**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	
	Kegiatan	:	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2.	Administasi Keuangan Perangkat Daerah
			3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			4.	Administasi Umum Perangkat Daerah
			5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
	Anggaran	:	Rp. 14.963.025.203	
2.	**Program**	**:**	**Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	
	Kegiatan	:	1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota

	Anggaran	:	Rp. 3.966.578.076
	Jumlah Anggaran	:	Rp. 18.929.603.279

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Sat Pol PP Kab. Kampar

Berdasarkan pagu indikatif yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, sebagai OPD yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan Dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dengan alokasi Anggaran sebesar Rp18.929.603.279, selama tahun 2024 akan menyelenggarakan 2 Program dari 9 kegiatan serta 28 Sub Kegiatan

Adapun Program dan kegiatan lokalitas adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Total Anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 37.000.000 untuk 1 tahun anggaran.
      b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD tahun 2023-2026 Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 17.800.000 untuk 1 tahun anggaran.
      c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 16.300.000 untuk 1 tahun anggaran.
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 3.673.826.849,-
      b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 9.150.000,-
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.869.250.000,-
      b. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.70.000.000,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.13.537.000,-
   b. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 60.000.000,-
   c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.300.000.000,-
   d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.20.000.000,-
   e. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.14.483.000,-
   f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.496.376.481,-
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.150.000.000,-
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.32.967.880,-
   b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.8.547.255.168,-
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.79.236.975,-
   b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.468.206.650,-
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.16.627.200,-
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.70.308.000,-

Untuk Kegiatan teknis yang berhubungan langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
   a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.357.125.000,-
   b. Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.706.072.550,-
   c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.100.000.000,-
   d. Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.506.545.000,-
   e. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas sdm Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azazi manusia Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.1.084.835.526,-
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.12.000.000,-
2. Kegiatan Penegakan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota
   a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Pertauran Bupati/Wali kota Total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.100.000.000,-

Untuk lebih jelasnya rincian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 4.1. dibawah ini:

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN KAMPAR

Urusan Pemerintahan : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				18.929.603.279				20.822.563.608
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100%	3.966.578.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	4.363.235.884
1	05	02	201		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100%	3.866.578.076	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	4.253.235.884

1	05	02	201	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	15 Kasus	**1.357.125.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Kasus	**1.492.837.500**
1	05	02	201	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	17 Kasus	**706.072.550**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Kasus	**776.679.805**
1	05	02	201	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	5 Dokumen	**100.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Dokumen	**110.000.000**

1	05	02	201	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Dokumen	**506.545.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	**557.199.500**
1	05	02	201	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	87 Orang	**1.084.835.526**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		87 Orang	**1.193.319.079**
1	05	02	201	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	100 Unit	**100.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Unit	**110.000.000**
1	05	02	201	09	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakkan Perda dan Perkada	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Laporan	**12.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	**13.200.000**

1	**05**	**01**	**202**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**100.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**110.000.000**
1	05	01	202	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dok	**110.000.000**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**14.963.025.203**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**16.459.327.724**
1	**05**	**01**	**201**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**71.800.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**78.980.000**

1	05	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	3 Dokumen	**37.700.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Dokumen	**41.470.000**
1	05	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Dokumen	**17.800.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	**19.580.000**
1	05	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	2 Laporan	**16.300.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	**17.930.000**

1	**05**	**01**	**202**		**Administasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**3.682.976.849**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**4.051.274.534**
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	12 Bulan	**3.673.826.849**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Bulan	**4.041.209.534**
1	05	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Laporan	**9.150.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	**10.065.000**
1	**05**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**939.250.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**1.033.175.000**
1	05	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Paket	**869.250.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	**956.175.000**

1	05	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	2 Orang	**70.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Orang	**77.000.000**
1	**05**	**01**	**206**		**Administasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**904.396.481**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**994.836.129**
1	05	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Paket	**13.537.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	**14.890.700**
1	05	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Paket	**60.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	**66.000.000**

1	05	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Paket	**300.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	**330.000.000**
1	05	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Paket	**20.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	**22.000.000**
1	05	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Dokumen	**14.483.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	**15.931.300**
1	05	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Laporan	**496.376.481**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	**546.014.129**
1	**05**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**150.000.000**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**165.000.000**

1	05	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	10 Unit	**150.000.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Unit	**165.000.000**
1	**05**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**8.580.223.048**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**9.438.245.353**
1	05	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	2 Laporan	**32.967.880**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Laporan	**36.264.668**
1	05	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	12 Laporan	**8.547.255.168**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	**9.401.980.685**
1	**05**	**01**	**209**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan**	**100%**	**634.378.825**	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**		**100%**	**697.816.708**

1	05	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Unit	**79.236.975**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	**87.160.673**
1	05	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	11 Unit	**468.206.650**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Unit	**515.027.315**
1	05	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	12 Unit	**16.627.200**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Unit	**18.289.920**
1	05	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab.Kampar,Semua Kecamatan,Semua Kelurahan	1 Unit	**70.308.000**	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	**77.338.800**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar merupakan dokumen perencanaan tahunan dan sebagai bagian dari draf Rencana Strategi (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar 2023 - 2026 yang memuat program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dalam tahun 2024, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan dinamis, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar dan sebagai pedoman seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi yang telah menjadi komitmen bersama.

Bangkinang, 12 Juni 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR



ARIZON, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19650802 199103 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR

ALAMAT : JALAN LINGKAR STA (8+000) TELP. 20036 FAX. (0762) 20538

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim
Assalamu'alakum Wr. Wb.

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar telah dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024.

Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai visi dan misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2024.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar selama tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangkinang, Juni 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAMPAR

RUSDI HANIP, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19710707 199603 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 14

3.1 Tabel pendanaan perubahan Renja tahun 2024 sesuai perubahan RKPD Tahun 2024 14

BAB IV PENUTUP 15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tebel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja PD Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan dokumen penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, pada tahun 2024 ini menyusun Buku Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna menjalankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disertai dengan upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja dalam kerangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang infrastruktur yang sudah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar merupakan penyempurnaan dari Rencana Kerja Akhir 2024 yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. DPA Tahun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024. DPA Tahun 2024 merupakan implementasi tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memberikan rumusan terhadap kebijakan dan program prioritas yang dilakukan berdasarkan masalah dan isu strategis pembangunan serta mengarah pada fokus kebijakan program dan kegiatan sesuai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar tahun 2024 yang berfungsi sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1048, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009.
15. PerMen PU No. 32 /PRT/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor: 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

25. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2022).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja perubahan (renja perubahan) SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan SKPD yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Kampar tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menindaklanjuti visi dan misi Kepala Daerah.
2. Merumuskan perubahan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar selama tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tabel Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai Perubahan RKPD

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Triwulan II

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu adalah mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi renja SKPD dan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1.

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar.
   a. Evaluasi Tahun 2023

      Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tahun 2023 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Capaian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

      - Capaian Keuangan, capaian keuangan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah sebesar 98,62 %.
      - Capaian fisik, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan sebesar 99,02 %.
      - Sedangkan capaian kinerja sebesar 99,02 %.

      Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2023 yakni sebesar 99,02 %

   b. Evaluasi Tahun 2024

      Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

      - Capaian keuangan, sampai dengan bulan Mei tahun 2024 capaian keuangan sebesar 5,7%.
      - Capaian fisik sebesar 23,23%
      - Sedangkan kinerja sebesar 23,93%

      Apabila dilihat dari kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dilihat dari capaian kinerja sebesar 23,93%.

Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Rasio Rumah Layak Huni.

Sampai dengan Triwulan II Rasio Rumah Layak Huni baru terealisasi 1,07% dimana untuk Rehab Rumah Layak Huni masih dalam proses pencairan Tahap I, sedangkan untuk Pembangunan Rumah Layak Huni yang dana bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi masih dalam Tahap proses pencairan Tahap I.

Program kegiatan pendukung tercapainya indikator ini adalah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yaitu sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

2. Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau.

Sampai dengan Triwulan II Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau 30,07% karena pada umumnya indikator pencapaian kegiatan baru terealisasi di akhir tahun perencanaan.

Program kegiatan pendukung tercapainya indikator ini adalah Program Pengembangan Perumahan dengan Sub Kegiata sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
b. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (dibawah 10 Ha).

Sampai dengan Triwulan II Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (dibawah 10 Ha) 11,84%. karena pada umumnya indikator pencapaian kegiatan baru masih dalam tahap perencanaan.

Program kegiatan pendukung tercapainya indikator ini adalah Program Kawasan Permukiman dengan Sub Kegiata sebagai berikut :

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
b. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

4. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU

Sampai dengan Triwulan II Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU 21,25 . % dimana sudah ada penambahan di TW 2, karena pada umumnya indikator pencapaian kegiatan baru terealisasi di akhir Triwulan III.

Program kegiatan pendukung tercapainya indikator ini adalah Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dengan Sub Kegiata sebagai berikut :

a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
d. Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang.

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (dibawah 10 Ha)**			0,59%	0,53%	0,47%	0,40%	0,59%		0,47%	0,40%	
2.	**Rasio Rumah Layak Huni**			0,65%	0,68%	0,70%	0,72%	0,65%		0,70%	0,72%	
3.	**Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau**			46,87%	49,70%	52,33%	55,00%	46,87%		52,33%	55,00%	

4.	**Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung PSU**			42,78%	48,13%	53,48%	58,82%	42,78%		53,48%	58,82%	

Kelemahan

Menurunnya jumlah kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi teknis, karena para tenaga teknis yang berpengalaman sudah mulai banyak yang memasuki usia pensiun dan lambatnya regenerasi;

Solusi

Agar dapat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia untuk penambahan jumlah kualitas sumber daya manusia dengan kualifikasi teknis yang sesuai dengan Dinas Perkim.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2024.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada tahun 2024 melaksanakan sebanyak 6 (enam) program 14 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan Anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 46.025.563.237 dan Anggaran pada APBD – P 2024 sebesar Rp. 57.535.064.592 sebagaimana pada Tabel 3.1.

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 ini sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang Perumahan dan Pemukiman. Renja Perubahan Tahun 2024 ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, dan berkembang secara dinamis, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia baik di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kampar, maupun oleh pihak penyedia jasa, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka menyiapkan infrastruktur khususnyadi Perumahan dan Permukiman.

Bangkinang , Juni 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAMPAR

RUSDI HANIP. ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19710707 199603 1 003

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Nama SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2023	Target Kinerja RENJA Tahun 2024 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1	04					**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	04					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	04	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	100 Persen	99 Persen	100 Persen	30 Persen	30 %	64.5	64.50
1	04	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	60 %	8	33.33
1	04	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	16.67
1	04	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2	33.33
1	04	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	16.67
1	04	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2	33.33
1	04	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	16.67
1	04	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2	33.33

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2023		Target Kinerja RENJA Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun n)	
														Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	200	Orang/Bulan	50	Orang/Bulan	50	Orang/Bulan	50	Orang/Bulan	100	%	100	50.00
1	04	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200	Orang/Bulan	45	Orang/Bulan	45	Orang/Bulan	45	Orang/Bulan	100	%	90	45.00
1	04	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	2	40.00
1	04	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	2	40.00
1	04	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15	Orang	3	Orang	6	Orang	0	Orang	0	%	3	20.00
1	04	01	2	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15	Orang			1	Dokumen	0		0	%	0	0.00
1	04	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	3	Orang	6	Orang	0	Orang	0	%	3	20.00
1	04	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	3	Orang	6	Orang	0	Orang	0	%	3	20.00
1	04	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	2	50.00
1	04	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantoR yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0	%	1	25.00
1	04	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	2	50.00
1	04	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	2	50.00
1	04	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	%	2	50.00
1	04	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Paket	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	2	50.00
1	04	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Paket	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	2	50.00

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2023	Target Kinerja RENJA Tahun 2024 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	01	2	07		Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1	20.00
1	04	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1	20.00
1	04	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	6	42.86
1	04	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	6	42.86
1	04	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	6	42.86
1	04	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	6	42.86
1	04	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	13 Unit	7 Unit	5 Unit	2 Unit	40 %	9	69.23
1	04	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	50 %	3	23.08
1	04	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit	40 %	7	53.85
1	04	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	13 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 %	2	15.38

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2023	Target Kinerja RENJA Tahun 2024 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	02				**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Penyediaan rumah yang layak	100 Persen	99 Persen	100 Persen	20 Persen	20 %	59.5	59.5
1	04	02	2	01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang Layak pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	20.00
1	04	02	2	01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	20.00
1	04	02	2	01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	20.00
1	04	02	2	01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	20.00
1	04	02	2	06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	100.00
1	04	02	2	06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	100.00
1	04	02	2	06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	200 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	20 Laporan	40 %	70	35.00

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2023	Target Kinerja RENJA Tahun 2024 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	03				**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diBawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	500 Unit	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0 %	0	0.00
1	04	03	2	01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	25.00
1	04	03	2	01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan/atau tereview serta terlegalisasi	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	25.00
1	04	03	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100 %	40	40.00
1	04	03	2	02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %	4	133.33
1	04	03	2	02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	33.33
1	04	03	2	03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	2	66.67
1	04	03	2	03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1	33.33
1	04	04				**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh diBawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota	2000 Unit	623 Unit	330 Unit	56 Unit	16.97 %	679	33.95
1	04	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan	2000 Unit	623 Unit	330 Unit	56 Unit	16.97 %	679	33.95

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2023		Target Kinerja RENJA Tahun 2024 (Tahun n)		Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023				Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun n)	
														Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	04	2	01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2000	Unit	623	Unit	330	Unit	20	Unit	6.0606	%	643	32.15
1	04	05				**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	200	Lokasi	50	Lokasi	50	Lokasi	20	Lokasi	40	%	70	35.00
1	04	05	2	01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	200	Lokasi	50	Lokasi	50	Lokasi	20	Lokasi	40	%	70	35.00
1	04	05	2	01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	8	Dok	1	Dok	1	Dok	0	Dok	0	%	1	12.50
1	04	05	2	01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	200	Lokasi	45	Lokasi	50	Lokasi	2	Lokasi	4	%	47	23.50
1	04	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	200	Lokasi	20	Laporan	50	Laporan	5	Laporan	10	%	25	12.50
1	04	05	2	01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	200	Dok	20	Dok	50	Dok	2	Dok	4	%	22	11.00

Kode						Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/d dengan Tahun 2023	Target Kinerja RENJA Tahun 2024 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun n)	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	04	06				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Peningkatan Pelayana Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	48 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	18	37.50
1	04	06	2	01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya Peningkatan Pelayana Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	48 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	18	37.50
1	04	06	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan	48 Laporan	16 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50 %	18	37.50

Bangkinang, Juni 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERI
KABUPATEN KAMPAR

RUSDI HANIP, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19710707 199603 1 003

TABEL 3.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2024
PROVINSI RIAU KABUPATEN KAMPAR

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Rencana Tahun 2024 (tahun berjalan)												Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg	PD Penanggung Jawab
							Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					a/b/c	1/2/3
1					2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16		17		18	19
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												**54,185,064,592**	**57,750,064,592**	**3,565,000,000**					**10,721,186,724**			
1	**04**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**5,929,250,100**	**6,194,250,100**	**265,000,000**	APBD	APBD			**6,330,354,824**			**Dinas Perkim**
1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	6 Dokumen	6 Dokumen	**81,671,250**	**81,671,250**	-	APBD	APBD	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**	6 Dokumen	**81,671,250**		**Dinas Perkim**
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.01	0002	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkinang Kota	Kec. Bangkinang Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	29,419,100	29,419,100	-	APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	29,419,100	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.01	0003	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkinang Kota	Kec. Bangkinang Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,098,500	20,098,500	-	APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,098,500	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.01	0004	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkinang Kota	Kec. Bangkinang Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	11,993,900	11,993,900	-	APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	11,993,900	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.01	0005	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Persen	Kec. Bangkinang Kota	Kec. Bangkinang Kota	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	8,123,000	8,123,000	-	APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,123,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.01	0006	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	12,036,750	12,036,750	-	APBD	APBD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	12,036,750	a	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	50 Orang/Bu	50 Orang/Bulan	**3,591,297,050**	**3,591,297,050**	-	APBD	APBD	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	50 Orang/Bulan	**3,992,401,774**		**Dinas Perkim**
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.02	0001	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 Orang/Bu	50 Orang/Bulan	3,536,270,150	3,536,270,150	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Orang/Bulan	3,937,374,874	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.02	0005	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	14,275,900	14,275,900	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	14,275,900	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.02	0007	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	40,751,000	40,751,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	40,751,000	a	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	15 Orang	15 Orang	**73,138,900**	**73,138,900**	-	APBD	APBD	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	15 Orang	**73,138,900**		**Dinas Perkim**
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.05	009	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Persen	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	6 Orang	37,450,000	37,450,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Orang	37,450,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.05	011	5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Persen	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Orang	6 Orang	35,688,900	35,688,900	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Orang	35,688,900	a	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	4 Paket	4 Paket	**664,561,200**	**877,461,200**	**212,900,000**	APBD	APBD	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	4 Paket	**664,561,200**		**Dinas Perkim**
					Sub Kegiatan																						
1	04	01	2.06	0001	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantoR yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantoR yang Disediakan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1 Paket	5,888,500	5,888,500	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	5,888,500	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0002	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1 Paket	205,171,800	218,071,800	12,900,000	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	205,171,800	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0004	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1 Paket	59,257,500	59,257,500	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	59,257,500	a	Dinas Perkim

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Rencana Tahun 2024 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg	PD Penanggung Jawab
							Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				a/b/c	1/2/3
1						2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16		17	18	19
1	04	01	2.06	0005	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	1 Paket	29,672,400	29,672,400	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	29,672,400	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0006	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 Dokumen	48 Dokumen	7,392,000	7,392,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Dokumen	7,392,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.06	0009	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	255 Laporan	255 Laporan	357,179,000	557,179,000	200,000,000	APBD	APBD	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	255 Laporan	357,179,000	a	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**965,998,000**	**980,998,000**	**15,000,000**	APBD	APBD	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**965,998,000**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	01	2.08	0002	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	46,728,000	46,728,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	46,728,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.08	0003	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	41,490,000	56,490,000	15,000,000	APBD	APBD	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	41,490,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.08	0004	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Persen	Non ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Non ASN Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	877,780,000	877,780,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	877,780,000	a	Dinas Perkim
1	**04**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**552,583,700**	**589,683,700**	**37,100,000**	APBD	APBD			**552,583,700**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	01	2.09	0001	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	166,520,000	166,520,000	-	APBD	APBD	Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Unit	166,520,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	0002	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	5 Unit	184,658,000	221,758,000	37,100,000	APBD	APBD	Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	5 Unit	184,658,000	a	Dinas Perkim
1	04	01	2.09	0009	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Persen	Dinas Perkim Kab. Kampar	Dinas Perkim Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	201,405,700	201,405,700	-	APBD	APBD	Terlaksananya pemeliharaan terhadap barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2 Unit	201,405,700	a	Dinas Perkim
1	**04**	**02**				**Program Pengembanga Perumahan**	**Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**850,831,900**	**850,831,900**	**-**	APBD	APBD			**850,831,900**		**Dinas Perkim**
1	**04**	**02**	**2.01**			**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	5 Dokumen		**170,015,800**	**170,015,800**	**-**	APBD	APBD	**Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	5 Dokumen	**170,015,800**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	02	2.01	0003	1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100 Persen	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100 Persen	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	170,015,800	170,015,800	-	APBD	APBD	Terlaksananya Pendataan Rumah pada Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	170,015,800	a	Dinas Perkim
1	**04**	**02**	**2.06**			**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izim Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	100 Persen	**Jumlah Dokumen Penerbitan Izim Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	50 Laporan	50 Laporan	**680,816,100**	**680,816,100**	**-**	APBD	APBD	**Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	50 Laporan	**680,816,100**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	02	2.06	0001	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100 Persen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	100 Persen	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Dinas Perkim dan Masyarakat Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	380,000,700	380,000,700	-	APBD	APBD	Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	380,000,700	a	Dinas Perkim
1	04	02	2.06	0003	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	50 Laporan	300,815,400	300,815,400	-	APBD	APBD	Adanya Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Laporan	300,815,400	a	Dinas Perkim

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Rencana Tahun 2024 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg	PD Penanggung Jawab
							Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				a/b/c	1/2/3
1						2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16		17	18	19
1	04	03				**Program Kawasan Permukiman**		20 Ha		20 Ha			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**650,000,000**	**750,000,000**	**100,000,000**	APBD	APBD			**650,000,000**		**Dinas Perkim**
1	04	03	2.01			**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan**	20 Ha	**Jumlah Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan**	20 Ha			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	53 Dokumen	53 Dokumen	**65,000,000**	**65,000,000**	-	APBD	APBD	**Tersedianya Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan**	53 Dokumen	**65,000,000**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	03	2.01	0001	1	Fasilitasi Pemunuhan Komitmen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	20 Ha	Dokumen kesepakatan dengan pengembang/pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik	20 Ha	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	65,000,000	-	APBD	APBD	Tersedianya Dokumen Perbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik yang di terbitkan	4 Dokumen	65,000,000	a	Dinas Perkim
1	04	03	2.02			**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata**	20 Ha	**Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata**	20 Ha			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	3 Dokumen		**275,000,000**	**375,000,000**	**100,000,000**	APBD	APBD		3 Dokumen	**275,000,000**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	03	2.02	0008	4	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	20 Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	20 Ha	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3 Dokumen	275,000,000	375,000,000	100,000,000	APBD	APBD	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	275,000,000	a	Dinas Perkim
1	04	03	2.03			**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata**	20 Ha	**Luas Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang tertata**	20 Ha			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	3 Dokumen	3 Dokumen	**310,000,000**	**310,000,000**	-	APBD	APBD	**Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	3 Dokumen	**310,000,000**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	03	2.03	0004	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaran Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	20 Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	20 Ha	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	50 Laporan	310,000,000	310,000,000	-	APBD	APBD	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	310,000,000	a	Dinas Perkim
1	04	04				**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen	**Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**20,345,070,500**	**21,445,070,500**	**1,100,000,000**	APBD	APBD dan BANKEU			**900,000,000**		**Dinas Perkim**
1	04	04	2.01			**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan**	330 Unit	**Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan**	330 Unit			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	330 Unit	330 Unit	**20,345,070,500**	**21,445,070,500**	**1,100,000,000**	APBD	APBD dan BANKEU	**Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun**	230 Unit	**900,000,000**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	04	2.01	0001	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	330 Unit	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	330 Unit	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	350 Unit	350 Unit	20,345,070,500	21,445,070,500	1,100,000,000	APBD	APBD dan BANKEU	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun	330 Unit	900,000,000	a	Dinas Perkim
1	04	05				**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	42.78 Persen	**Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU**	42.78 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**26,260,116,842**	**28,360,116,842**	**2,100,000,000**	APBD	APBD			**1,840,000,000**		**Dinas Perkim**
1	04	05	2.01			**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Lingkungan yang didukung PSU**	50 Lokasi	**Jumlah Lingkungan yang didukung PSU**	50 Lokasi			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	50 Lokasi	50 Lokasi	**26,260,116,842**	**28,360,116,842**	**2,100,000,000**	APBD	APBD	**Jumlah Lingkungan yang didukung PSU**	50 Lokasi	**1,840,000,000**		**Dinas Perkim**
						Sub Kegiatan																				
1	04	05	2.01	0001	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50 Lokasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	50 Lokasi	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	164,759,050	164,759,050	-	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	2 Dokumen	100,000,000	a	Dinas Perkim
1	04	05	2.01	002	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50 Lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	50 Lokasi	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Lokasi	50 Lokasi	25,659,944,892	27,659,944,892	2,000,000,000	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	20 Lokasi	1,340,000,000	a	Dinas Perkim
1	04	05	2.01	0003	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	50 Lokasi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	50 Lokasi	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	50 Laporan	85,208,400	85,208,400	-	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	30 Laporan	50,000,000	a	Dinas Perkim
1	04	05	2.01	0004	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	50 Lokasi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	50 Lokasi	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	50 Laporan	350,204,500	450,204,500	100,000,000	APBD	APBD	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU	10 Laporan	350,000,000	a	Dinas Perkim

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan				Rencana Tahun 2024 (tahun berjalan)											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			Jenis Keg	PD Penanggung Jawab
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		
										Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				a/b/c	1/2/3
1					2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-11	14	15	16		17	18	19
1	04	06			**Program Peningkatan Pelayana Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman**	100 Persen	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**			**149,795,250**	**149,795,250**	-	998	998			**150,000,000**		**Dinas Perkim**
1	04	06	2.01		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman**	100 Persen	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman**	100 Persen			**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	48 Laporan	48 Laporan	**149,795,250**	**149,795,250**	-	APBD	APBD	**Terlaksananya ertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman**	4 Laporan	**150,000,000**		**Dinas Perkim**
					Sub Kegiatan																				
1	04	06	2.01	0001	1 Koordinasi dan Sinkronisasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100 Persen	Kab. Kampar	Kab. Kampar	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kampar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	149,795,250	149,795,250	-	APBD	APBD	Terlaksananya ertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	20 Laporan	150,000,000	a	Dinas Perkim

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KAMPAR

RUSDI HANIP, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19710707 199603 1 003